



LKj

LAPORAN KINERJA **SEKRETARIAT DAERAH** **KABUPATEN TANAH LAUT**



TAHUN **2021**





TANAH LAUT
BERINTERAKSI



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

kompeten

akuntabel

berorientasi Pelayanan



harmonis

loyal

adaptif

kolaboratif

#BanggaMelayaniBangsa

Saya ASN
KAB.TANAH LAUT
BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

☎ 0852 4529 2385

📷 organisasi.tala

#bangga
melayani
bangsa

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia Nya sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Adapun kinerja yang diukur dalam laporan ini didasarkan atas Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sekretariat Daerah Tahun 2021.

Pada Tahun Anggaran 2021 capaian kinerja dan keuangan Sekretariat Daerah adalah **87,87 %** dengan kategori **Sangat Berhasil**, yang didukung dengan **39** (tiga puluh sembilan) Sasaran Strategis dan **49** (empat puluh sembilan) Indikator Sasaran serta didukung oleh **3** (tiga) Program, **18** (delapan belas) Kegiatan dan **55** (lima puluh lima) Sub Kegiatan.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 yang disusun ini tentunya masih jauh dari sempurna, perlu adanya masukan, saran, atau kritikan sehingga kedepan akan dapat disusun Laporan Kinerja yang lebih berkualitas, komprehensif dan bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi Aparatur lingkup Sekretariat Daerah dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Daerah di masa yang akan datang.

Pelaihari, 31 Januari 2022

Sekretaris Daerah,
Kabupaten Tanah Laut



Drs. H. DAHNIAL KIFLI, MAP
NIP. 19640425 1987033 1 012

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pendekatan yang digunakan adalah dengan menyajikan dokumen perencanaan jangka menengah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Penetapan Kinerja, serta Pengukuran Pencapaian Sasaran yang dilengkapi dengan identifikasi faktor - faktor yang mendukung keberhasilan dan atau kegagalan.

Di samping itu LKj ini juga melaporkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Penyusunan LKj ini berpedoman pada dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, yang mana dalam Renstra tersebut tercantum Visi “**Terwujudnya Tanah Laut yang "BERINTERAKSI" (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi)**”. Sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2018-2023, Sekretariat Daerah mengampu Misi ke- :

1. **Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;**
2. **Menciptakan Inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;**
3. **Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);**
5. **Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.**

Keempat Misi yang di ampu oleh Sekretariat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang mana masing- masing sasaran strategis yang ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaiannya. Untuk Tahun 2021 Sekretariat Daerah mempunyai anggaran belanja sebesar **Rp 78.265.490.458,00,-** dengan capaian realisasi sebesar **Rp 68.772.133.014,00,- (87,87%)**.

Berikut anggaran dan capaian realisasi di masing-masing bagian lingkup
 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 :

No	Bagian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2021 (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemerintahan	Rp. 2.566.229.358,00	Rp. 1.305.334.142,00	50.86%
2	Hukum	Rp. 1.525.510.792,00	Rp. 1.079.542.489,00	70.77%
3	Organisasi	Rp. 766.844.524,00	Rp. 521.926.428,00	68.06%
4	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Rp. 1.154.658.438,00	Rp. 766.018.746,00	66.34%
5	Pengadaan Barang/Jasa	Rp. 1.247.423.136,00	Rp. 806.240.833,00	64.59%
6	Kesejahteraan Rakyat	Rp. 30.491.169.166,00	Rp. 29.076.442.692,00	95.36%
7	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp. 2.025.753.496,00	Rp. 1.853.485.914,00	91.50%
8	Umum	Rp. 17.786.829.420,00	Rp. 15.012.624.806,00	84.40%
9	Perencanaan dan Keuangan	Rp. 20.701.072.128,00	Rp. 18.350.516.964,00	88.64%
	Jumlah	Rp. 78.265.490.458,00	Rp. 68.772.133.014,00	87.87%

**Sumber/Pengolah Data Bagian Perencanaan dan Keuangan*

Diharapkan LKj ini telah mempresentasikan kinerja nyata Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut sekaligus sebagai perwujudan Akuntabilitas dan Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dapat memberikan informasi pengambilan keputusan Pimpinan guna peningkatan kinerja organisasi.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi	2
C. Isu Strategis	12
D. Produk Layanan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi	29
E. Sistematika Penyajian	31
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Visi	33
B. Misi	36
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	37
D. Indikator Kinerja Utama	45
E. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021	46
F. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2021	51
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	56
1. Sasaran RPJMD	56
2. Eselon II.....	65
2.1 Eselon II (Sekretaris Daerah)	65
2.2 Eselon II (Asisten Sekretaris Daerah).....	107
3. Eselon III (Kepala Bagian) dan Eselon IV (Kasubbag)	116
3.1 Bagian Umum	116
3.2 Bagian Pemerintahan.....	152
3.3 Bagian Organisasi	196
3.4 Bagian Perencanaan dan Keuangan.....	237
3.5 Bagian Pengadaan Barang/Jasa	280



3.6 Bagian Hukum	306
3.7 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	334
3.8 Bagian Kesejahteraan Rakyat	360
3.9 Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA.....	402
4. Perbandingan Realisasi Capaian Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021.....	436
5. Laporan Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021	440
6. Tabel Rencana Aksi dan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Triwulan I s.d Triwulan IV Tahun 2021	456
 B. Akuntabilitas Keuangan	456
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2021	456
2. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021	457
3. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	465
4. Realisasi Persentase Keuangan, Realisasi Kinerja dan Efisiensi Sasaran Strategis Tahun 2021	473
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	479
B. Strategi Peningkatan Kinerja	484
C. Penghargaan dan Inovasi	487

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. IKU Sekretariat Daerah Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Pelaksana Tahun 2021
2. Pernyataan Hasil Reviu Tahun 2020
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ber tanda tangan
4. Pohon Kinerja Sekretariat Daerah

5. Matrik Keselarasan Tahun 2021
6. Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah Tahun 2021
7. Rencana Aksi Sekretariat Daerah Tahun 2021
8. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
9. SOP Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah
10. Monitoring dan evaluasi Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2018 – 2023
11. Tabel Rencana Aksi dan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Triwulan I s.d Triwulan IV Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam mencapai rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Disamping itu Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Akuntabilitas Sekretariat Daerah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik dan pertanggungjawaban instansi serta tekad seluruh PNS Sekretariat Daerah untuk mencapai Misi tujuan organisasi yang transparan guna mendukung tercapainya *Good Governance*.

Selaras dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values ASN BerAKHLAK* (**B**erorientasi Pelayanan, **A**kuntabel, **K**ompeten, **H**armonis, **L**oyal, **A**daptif, dan **K**olaboratif) dan *Employer Branding Bangsa Melayani Bangsa*, maka diharapkan ASN dan PTT di Lingkungan Sekretariat Daerah dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar BerAKHLAK menjadi Dasar penguatan budaya kerja

guna mendukung pencapaian kinerja dan tujuan organisasi sesuai dengan Misi yang di emban Sekretariat Daerah.

B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi

Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang Bupati dan didampingi seorang Wakil Bupati, **Bupati Tanah Laut dipimpin oleh H. Sukamta dengan Wakilnya Abdi Rahman yang dilantik pada tanggal 19 September 2018**. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah membentuk lembaga-lembaga pemerintahan berupa Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor Kecamatan, dan Kantor Kelurahan serta unit kerja lainnya sesuai kebutuhan Pemerintahan Kabupaten.

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut serta Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2020 tentang uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2020

Pasal 3, Ayat 1 susunan Organisasi terdiri atas :

- (1) Susunan Organisasi pada pasal 3 Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - 1) Bagian Pemerintahan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan

- c) Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
- 2) Bagian Hukum, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum Pengaturan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM); dan
 - c) Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Bina Mental dan Spritual;
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Budaya; dan
 - c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
- c. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 - 1) Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - b) Sub Bagian Perekonomian; dan
 - c) Sub Bagian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
 - 2) Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); dan
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- d. Asisten Bidang Administrasi Umum, terdiri dari:
 - 1) Bagian Umum, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Aset dan Kelengkapan; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga.
 - 2) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Protokol;
 - b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
 - 3) Bagian Organisasi, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - c) Sub Bagian Kinerja dan Refromasi Birokrasi.

- 4) Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Pelaporan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 1) Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
 - 2) Bagian Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten.
 - 3) Sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing masing Kepala Bagian.
 - 4) Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2), bertindak selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan-Undangan.

1. Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Sekretariat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan Administratif. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan administrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, perumusan produk hukum daerah serta di bidang kesejahteraan masyarakat;

- d. perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi di bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam, Pengadaan Barang/Jasa;
- e. perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan keuangan;
- f. perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengembangkan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan Daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat melalui:

- 1) Bagian Pemerintahan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasikan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah.
- 2) Bagian Hukum** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang hukum dan hak asasi manusia dan pembentukan produk hukum penetapan, dokumentasi dan informasi hukum.
- 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan budaya serta kesejahteraan masyarakat.

(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian

penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian administrasi pembangunan dan sumber daya alam dan pengadaan barang/jasa melalui:

- 1) **Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam** mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
- 2) **Bagian Pengadaan Barang/Jasa** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.

(3) Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan Daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, organisasi, dan perencanaan dan keuangan melalui:

- 1) **Bagian Umum** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi dibidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian, Aset Perlengkapan Serta Umum dan Rumah Tangga;
- 2) **Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
- 3) **Bagian Organisasi** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, dan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- 4) **Bagian Perencanaan dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

(4) Asisten Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.
- e. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah

Sumber daya aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan pendidikan dan golongan ruang sebagai berikut :

a. Aspek Strategis Organisasi

1) Sumber Daya SKPD

Susunan Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada akhir Tahun 2021 berdasarkan jabatan struktural dan non struktural berjumlah 246 orang yang terdiri 103 PNS dan 143 orang Non PNS, yang meliputi :

1. Sekretaris Daerah	:	1	Orang
2. Asisten	:	3	Orang
3. Staf Ahli Bupati	:	3	Orang
4. Kepala Bagian Pemerintahan	:	1	Orang
5. Kepala Bagian Hukum	:	1	Orang
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	:	1	Orang
7. Kepala Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	:	1	Orang



8. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	:	1	Orang
9. Kepala Bagian Umum	:	1	Orang
10. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	:	1	Orang
11. Kepala Bagian Organisasi	:	1	Orang
12. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	:	1	Orang
13. Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	:	1	Orang
14. Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah	:	1	Orang
15. Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan	:	1	Orang
16. Kepala Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum Pengaturan	:	1	Orang
17. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia	:	1	Orang
18. Kepala Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum	:	1	Orang
19. Kepala Sub Bagian Bina Mental dan Spiritual	:	0	Orang
20. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat	:	1	Orang
21. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Budaya	:	1	Orang
22. Kepala Sub Bagian Perekonomian	:	1	Orang
23. Kepala Sub Bagian Bina BUMD dan BLUD	:	1	Orang
24. Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	:	1	Orang
25. Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa	:	1	Orang
26. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	:	1	Orang
27. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	:	1	Orang
28. Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga	:	1	Orang
29. Kepala Sub Bagian Aset dan Perlengkapan	:	1	Orang
30. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	:	1	Orang
31. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan	:	1	Orang
32. Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan	:	0	Orang
33. Kepala Sub Bagian Protokol	:	1	Orang
31. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	:	1	Orang



32. Kepala Sub Bagian Publik dan Tata Laksana	:	1	Orang
33. Kepala Sub Bagian dan Reformasi Birokrasi	:	1	Orang
34. Kepala Sub Bagian Perencanaan	:	1	Orang
35. Kepala Sub Bagian Keuangan	:	1	Orang
36. Kepala Sub Bagian Pelaporan	:	1	Orang
37. JFU/ JFT/Pelaksana		62	Orang
38. Non PNS		143	Orang

Sedangkan susunan kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel Jumlah PNS berdasarkan Golongan dan Kualifikasi Pendidikan
per 31 Desember 2021

NO	BAGIAN	GOLONGAN																
		IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b	I/a	JML
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Sekretaris Daerah	1																1
2	Asisten		3															3
3	Staf Ahli		2	1														3
4	Pemerintahan				1	2	1	1	1		2							8
5	Hukum			1		1	2		1									5
6	Kesejahteraan Rakyat				1		2	1	1	2								7
7	Pengadaan Barang/Jasa				3	6	3	3	2	2	2							21
8	Perekonomian Administrasi Pembangunan Sumber Daya Alam				1	2		2		1								6
9	Umum				1	2		2	3	7	2	1	3	1	1			23
10	Protokol dan Komunikasi Pimpinan				1		1	2	3	2	2							11
11	Organisasi			1	1	2			2									6
12	Perencanaan dan Keuangan			1		2	1		1	2	2							9
JUMLAH		1	5	4	9	17	10	11	14	16	10	1	3	1	1	-	-	103

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Umum Tahun 2021*

b. Aspek SDM Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan pendidikan dan golongan ruang sebagai berikut :

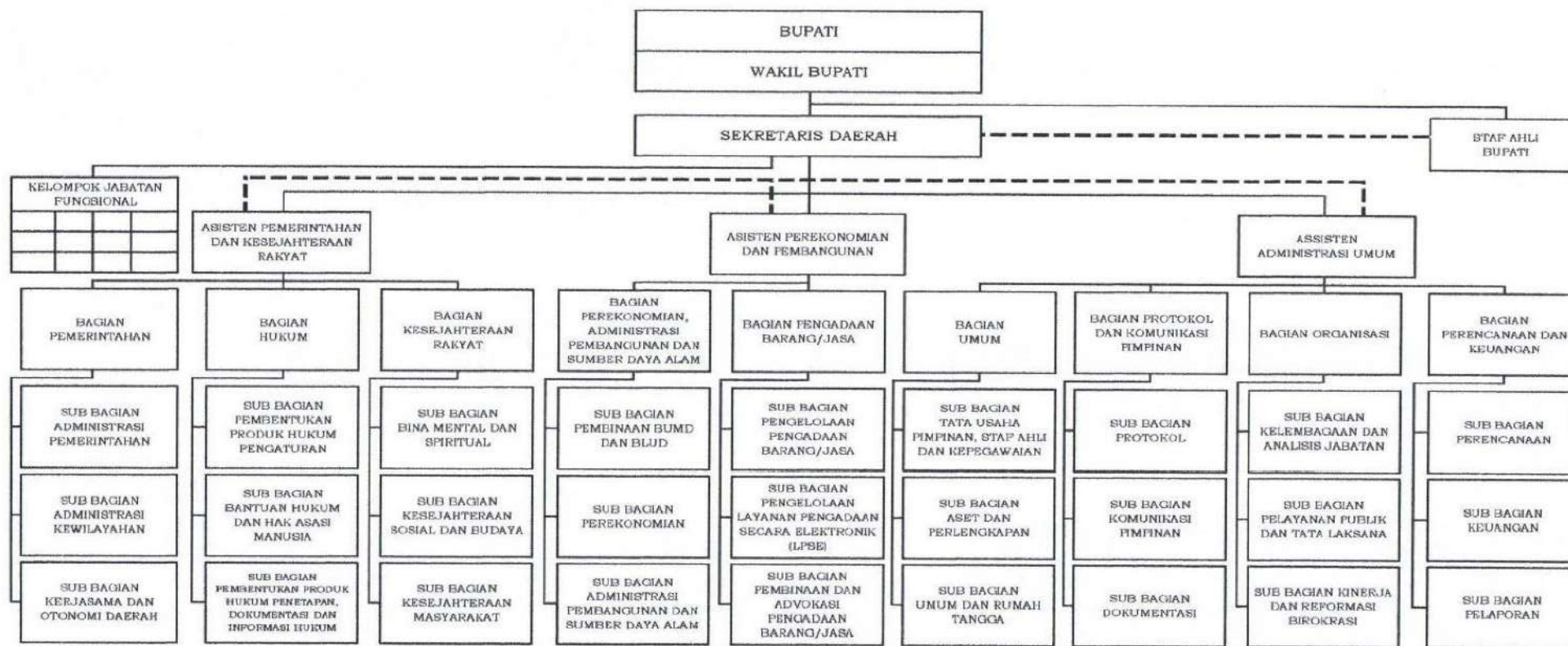
NO	BAGIAN	PENDIDIKAN									
		S3	S2	S1	DIV	D3	D2	SMU	SMP	SD	JUMLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Sekretaris Daerah		1								1
2	Asisten Sekda	1	2								3
3	Staf Ahli		1	2							3
4	Pemerintahan		2	4				2			8
5	Hukum		1	4							5
6	Organisasi		1	5							6
7	Pengadaan Barang Jasa		2	13		5		1			21
8	Perekonomian Adm Pembangunan SDA			4		1		1			6
9	Kesejahteraan Rakyat		1	3		1		2			7
10	Umum			5		1		14		3	23
11	Perencanaan dan Keuangan			5		1		3			9
12	Protokol dan Komunikasi Pimpinan		1	3		1	1	5			11
JUMLAH		1	12	48	-	10	1	28	-	3	103

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Umum Tahun 2021*



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 53 TAHUN 2020
TANGGAL : 8 MEI 2020



KETERANGAN
: Garis Komando
: Garis Koordinasi

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

Alfira

ALFIRIAL SH. MH
NIP.19750203 199903 2 005

BUPATI TANAH LAUT,
ttd
H. SUKAMTA

C. Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang *Good Governance* diperlukan penelaahan dan implementasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang merupakan unsur Staf.

Isu-isu strategis pada Sekretariat Daerah antara lain sebagai berikut :

i. **Belum Tercapainya Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai aspek indikator ANTARA dalam Indeks Reformasi Birokrasi**

Dalam proses pelaksanaan pembangunan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa memiliki peranan penting dalam pemerintahan sehingga tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) 2020-2024 dapat terwujud yaitu terciptanya pemerintah yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

Bagian Pengadaan Barang/Jasa memiliki peran dalam penyempurnaan kebijakan, pembinaan dan implementasi, hingga monitoring dan evaluasi atas program yang diampu.

Untuk mengukur kemajuan pelaksanaan RB di lingkungan instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen penilaian RB secara mandiri (self-assessment) yang diukur setiap tahun. Tersedianya nilai PMPRB ini merupakan upaya untuk

mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD).

Dalam rangka mempermudah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi PMPRB maka pengisian mandiri pemenuhan dokumen PMPRB dilakukan secara online dan dapat dimonitor menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) RB.

Untuk Penilaian Mandiri Pengelolaan RB (PMPRB) Antara pada proses pengadaan harus mencapai **Indeks tata kelola pengadaan minimal Baik**.

Indeks tata kelola pengadaan minimal Baik terdiri dari **indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional**, baik dari segi **Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan**, yaitu sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari:
 - a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
 - b. E-Tendering/E-Seleksi;
 - c. E-Purchasing;
 - d. Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing; dan
 - e. E-Kontrak.
2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ.
3. Tingkat Kematangan UKPBJ.

Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut bernilai CUKUP. Untuk itu maka di tahun 2021 ini yang menjadi Isu Strategis Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab. Tanah Laut adalah belum tercapainya Indeks tata kelola pengadaan minimal Baik.

Jika Indeks tata kelola pengadaan mampu mencapai nilai baik, maka hal tersebut menunjukkan bahwa :

- ✓ Kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa sudah terpenuhi;
- ✓ Tingkat kematangan UKPBJ yang mencakup Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko, Pengorganisasian, Tugas & Fungsi Kelembagaan, Perencanaan SDM,

Pengembangan SDM dan Sistem Informasi telah mencapai level 3 (proaktif); dan

- ✓ Telah **termanfaatkannya sistem pengadaan pada proses pengadaan** secara baik dan benar, yang meliputi :
 - Telah terumumkannya seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada aplikasi SiRUP LKPP;
 - Telah terlaksananya e-tendering/e-seleksi untuk seluruh paket pengadaan dengan metode tender/seleksi yang masuk ke UKPBJ dan terumumkan di SiRUP LKPP;
 - Semua pengadaan secara e-purchasing telah selesai dilaksanakan;
 - Telah dilaksanakannya pencatatan atas kegiatan non e-tendering dan non e-purchasing di seluruh SKPD; dan
 - Telah dilaksanakannya e-kontrak oleh SKPD.

Adapun langkah yang telah dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa guna mencapai Indeks tata kelola pengadaan minimal Baik di Tahun 2021 yaitu :

NO	PENILAIAN INDIKATOR	INDIKATOR KEBERHASILAN	LANGKAH UNTUK MENCAPAI MINIMAL BAIK
1.	Pemanfaatan Sistem Pengadaan		
a.	SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)	persentase nilai anggaran PBJ yang diumumkan dalam SiRUP (nilai RUP).	Pemerintah Daerah Kab. Tanah Laut telah mengumumkan seluruh Rencana Umum Pengadaan yang dilaksanakan melalui aplikasi SiRUP LKPP
b.	<i>E-Tendering</i> /E-Seleksi	Pemerintah Daerah sudah menerapkan 100% (seratus persen) proses <i>E-Tendering</i> /E-Seleksi dalam Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP	Semua paket yang masuk ke Bagian PBJ dengan metode pengadaan tender/seleksi dan akan dilaksanakan proses pemilihan penyedia oleh Pokja Pemilihan SELALU menerapkan proses <i>E-Tendering</i> /E-Seleksi dalam Pengadaan Barang/Jasa.
c.	<i>E-Purchasing</i>	Pemerintah Daerah sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai 100% (seratus persen) pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring	Melaksanakan pendataan ke SKPD yang memiliki paket pengadaan melalui e-purchasing dan meminta kepada SKPD tersebut untuk menyelesaikan paket hingga status selesai 100% (seratus persen) pada aplikasi Katalog Elektronik.

NO	PENILAIAN INDIKATOR	INDIKATOR KEBERHASILAN	LANGKAH UNTUK MENCAPAI MINIMAL BAIK
2.	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Persentase keterisian Formasi JF PPBJ terhadap formasi yang sudah dihitung.	UKPBJ Kab. Tanah Laut telah memiliki 10 JF PPBJ dari 26 JF PPBJ rekomendasi formasi yang ditetapkan LKPP
3.	Tingkat Kematangan UKPBJ	UKPBJ mencapai minimal level 3 (Proaktif) pada seluruh variabel (9 variabel)	UKPBJ Kab. Tanah Laut telah mencapai Level 3 Proaktif untuk Tingkat Kematangan UKPBJ

ii. **Belum terpenuhinya Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) sesuai dengan rekomendasi dari LKPP**

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen paling penting agar sebuah organisasi lembaga dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya elemen tersebut atau kualitasnya yang kurang baik, organisasi lembaga akan sulit untuk berjalan dan beroperasi dengan semestinya meski sumber daya yang lain telah terpenuhi.

Berdasarkan Jumlah eksisting, ketersediaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) di Pemerintah Kab. Tanah Laut saat ini adalah :

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	JF PPBJ Pertama	3 orang
2.	JF PPBJ Muda	5 orang
3.	JF PPBJ Madya	2 orang
	Total	10 orang

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021*

Berdasarkan surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) RI tanggal 25 Mei 2021 Nomor : 10197/D.3.1/05/2021 Perihal : Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kab. Tanah Laut, disampaikan bahwa Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional (JF) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kab. Tanah Laut yg disampaikan LKPP RI terkait usulan perhitungan kebutuhan JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kab. Tanah Laut, yaitu :

NO	Nama Jabatan	Rekomendasi Instansi Pembina
1	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	14
2	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	9
3	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	3
	TOTAL	26

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021*

Dari paparan kedua tabel di atas maka diketahui bahwa masih terdapat kekurangan formasi JF PPBJ sebanyak 16 orang.

Untuk itu maka, Bagian Pengadaan Barang/Jasa berusaha mengusulkan kepada Bupati Tanah Laut untuk dapat memenuhi formasi JF PPBJ tersebut sesuai dengan jumlah yang ditentukan dengan cara pembukaan formasi pada penerimaan CPNS untuk Kabupaten Tanah Laut atau memfasilitasi perpindahan jabatan lain ke jabatan fungsional pengadaan barang/jasa.

iii. Fasilitas Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Perekonomian Dalam Rangka Pengaturan Distribusi Gas LPG 3 Kg Bersubsidi dan Penggunaan Sistem Pembayaran Non Tunai untuk Pembelian Gas LPG 3 Kg Bersubsididi Kabupaten Tanah Laut

Bahwa kelangkaan persediaan LPG 3 Kg Subsidi kepada masyarakat memicu terjadinya kenaikan harga yang sangat tidak wajar, sehingga perlu untuk diambil tindakan dan langkah kebijakan yang bersifat segera agar tidak menimbulkan keresahan warga masyarakat.

Tindakan dan Langkah yang diambil bertujuan untuk mengembalikan Tata kelola Penyaluran/Distribusi LPG 3 kg Subsidi agar tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku

Dasar Hukum

- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu di Daerah
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas
- Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/197-KUM/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.

FAKTA DAN DATA

- 1) Bahwa DISTRIBUSI LPG 3 KG adalah Distribusi Tertutup Sebagaimana Diamanahkan Oleh :
 - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian *Liquiefied Petroleum Gas*;
 - Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquiefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah.
- 2) SE dari Dirjen Minyak Dan Gas Bumi Nomor : 10.e/06/djm.s/2016 tentang Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tanggal 4 Oktober 2016, menegaskan peran serta kabupaten/kota tetap berpedoman pada UU nomor 22 tahun 2001, yaitu melaksanakan urusan minyak dan gas bumi (*di UU nomor 23/2014 menyebutkan bukan kewenangan Pemda lagi*), sehingga :
 - a) Penetapan HET LPG tertentu (LPG 3 KG) pada titik serah di sub penyalur;
 - b) Pengawasan pendistribusian dan harga LPG 3 KG;
 - c) Usulan kuota LPG 3 KG; dan
 - d) Pelaksanaan uji coba distribusi tertutup LPG 3 KG.adalah menjadi urusan Kabupaten/kota sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bekerjasama dengan PT.Pertamina telah melakukan Operasi Pasar LPG 3 kg Subsidi secara intens selama tahun 2020, tetapi langkah tersebut tidak membawa dampak yang berarti terhadap permasalahan penyaluran LPG 3 kg subsidi.
- 3) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bekerjasama dengan PT.Pertamina telah melakukan Operasi Pasar LPG 3 kg Subsidi secara intens selama tahun 2020, tetapi langkah tersebut tidak membawa dampak yang berarti terhadap permasalahan penyaluran LPG 3 kg subsidi.
- 4) Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengamatan dari TIMWASTIB-GAS Kab, Tanah Laut diperoleh fakta:
 - Tingginya pasokan LPG 3 kg subsidi yang disalurkan dan kuota sebanyak hampir 3 juta tabung /tahun tidak otomatis membuat harga LPG 3 kg dapat

diperoleh dengan harga HET, karena ternyata pengguna/Konsumen LPG 3 kg didominasi oleh warga yang mampu dan bukan Sasaran/Penerima yang berhak;

- LPG 3 kg Subsidi beredar dengan bebas dan diperjualbelikan diwarung/kios/toko;
- Terdapat rumah makan/restoran /warung kuliner dengan omzet besar menggunakan Tabung LPG 3 kg Subsidi;
- Pangkalan menjual kepada Konsumen RT dengan harga di atas HET, dan juga menjual kepada warung/kios/toko dan pedagang eceran keliling;
- Lokasi Pangkalan di daerah Perkotaan (Pelaihari), berlokasi sama dengan Pangkalan lain mengakibatkan terjadinya tumpang tindih Sasaran, sehingga “*over stock*”, mengakibatkan Pangkalan menjual sebagian besar LPG kepada “Pengecer” (warung/kios/toko) dan rumah makan/restoran /warung kuliner;
- Dari Laporan Camat/Kepala Desa terdapat beberapa desa yang tidak memiliki Pangkalan tetapi juga ada dalam satu desa beroperasi beberapa pangkalan, sehingga terjadi tumpang tindih sasaran dan penyaluran /distribusi yang tidak merata;
- Pangkalan tidak memfungsikan logbook (Rumah tangga Sasaran/Penerima yang terdaftar) sebagaimana mestinya, logbook yang ada adalah daftar tanda terima dari Rumah Tangga yang mengambil LPG di Pangkalan tsb;
- Agen/Pangkalan tidak pernah melaporkan mengenai Penyaluran /Distribusi LPG 3 Kg Subsidi kepada Pemda;
- Penentuan lokasi pangkalan oleh PT. Pertamina selaku badan usaha yang melakukan distribusi gas bersubsidi hanya berdasarkan pengajuan agen yang bermitra dengan PT Pertamina, tidak berdasarkan data penerima.

LANGKAH YANG TELAH DIAMBIL

Dalam rangka mengatasi permasalahan penyaluran/distribusi LPG 3 kg subsidi, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah mengambil langkah langkah sebagai berikut:

- a) Membentuk TIM KOORDINASI, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN DISTRIBUSI LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) 3 KILOGRAM BERSUBSIDI DI KABUPATEN TANAH LAUT berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/841 - KUM/2021 Tentang

Pembentukan Tim Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Distribusi LPG 3 Kilogram Bersubsidi di Kabupaten Tanah Laut. Tim bertugas untuk melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Distribusi LPG 3 Kilogram Bersubsidi;

- b) Mengundang seluruh Stakeholder terkait, antara lain : Sales Manager Area Kalselteng PT.Pertamina, Agen /Perwakilan Pangkalan LPG 3 Kg Subsidi, SKPD Pemda, Dandim 1009 Pelaihari, Kapolres Tanah Laut, Kejaksaan Negeri Tanah Laut, untuk membicarakan seluruh fakta dan Permasalahan dalam Tata Kelola Penyaluran LPG 3 Kg Subsidi, Pertemuan tersebut menyepakati KOMITMEN PARA AGEN yang ditandatangani oleh Seluruh Agen LPG 3 Kg Subsidi yang beroperasi di Kabupaten Tanah Laut dengan disaksikan oleh Timwastib-Gas, PT.Pertamina, Dandim 1009 Pelaihari,dan Kapolres Tanah Laut;
- c) Menerbitkan Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 500/2 -TIMWASTIB-GAS/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 Tentang Kepatuhan Untuk mentaati Ketentuan Mengenai Penyaluran dan Distribusi tertutup *Liquified Petroleum Gas* Tertentu (*LPG 3 Kilogram*) di Kabupaten Tanah Laut;
- d) Mengeluarkan Intruksi Bupati Tanah Laut Nomor 1 tahun 2021 Tanggal 11 Februari 2021 tentang Ketentuan Mengenai Penyaluran dan Distribusi tertutup *Liquified Petroleum Gas* Tertentu (*LPG 3 Kilogram Subsidi*) di Kabupaten Tanah Laut;
- e) Mengeluarkan Intruksi Bupati Tanah Laut Nomor 2 tahun 2021 Tanggal 11 Februari 2021 tentang Larangan Bagi Rumah Tangga Pegawai Negeri Sipil untuk menggunakan *Liquified Petroleum Gas* Tertentu (*LPG 3 Kilogram Subsidi*);
- f) Membentuk Posko Konversi Tabuing LPG 3 kg Subsidi ke Tabung 5,5 kg Non Subsidi, dan dari laporan terakhir (tanggal 28 Februari 2021) telah tersalur =/- 1500 tabung LPG 5,5 kg Non Subsidi, dan terus berjalan;
- g) Membentuk Posko Konversi Tabuing LPG 3 kg Subsidi ke Tabung 5,5 kg Non Subsidi, dan dari laporan terakhir (tanggal 28 Februari 2021) telah tersalur =/- 1500 tabung LPG 5,5 kg Non Subsidi, dan terus berjalan;
- h) Bupati Tanah Laut telah memberikan Persetujuan Untuk Kerjasama Pemanfaatan dengan Badan Usaha Perniagaan/Agen BBG Non Subsidi (PT. MUSATHA BORNEO ENERGI) sebagai Tindak Lanjut Kebijakan Konversi

Tabung dari LPG 3 Kg Subsidi dan untuk menjamin keredaiaan/supply LPG Non Subsidi di Kabupaten Tanah Laut.

- i) Menerapkan Sistem Distribusi tertutup LPG 3 Kg Subsidi (*LPG tertentu*) dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2021 Tentang PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI *LIQUIFIED PETROLEUM GAS* (LPG) TABUNG 3 KG (TIGA KILOGRAM) BERSUBSIDI;
- j) Menginstruksikan kepada semua Kepala Desa dan Lurah untuk melaksanakan Musyawarah Desa/Kelurahan untuk menentukan daftar masyarakat yang berhak menggunakan Gas LPG 3 Kg Bersubsidi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Perbup Nomor 24 Tahun 2021.
- k) Mengatur Ketentuan mengenai Perijinan bagi Agen /Pangkalan LPG 3 Kg Subsidi;
- l) Memproses dan menindak Agen/Pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tatakelola Penyaluran LPG 3 kg Subsidi;
- m) Melakukan validasi dan verifikasi data Sasaran/penerima dan menerapkan system kartu kendali.
- n) Mengkontruksi ulang data sebaran Pangkalan dalam rangka mapping data dan pedoman dalam perijinan pangkalan
- o) Mapping Bersama Agen melakukan penataan ulang terhadap zonasi Pangkalan agar sesuai dengan jumlah sasaran/penerima yang berhak.
- p) Menyita Tabung LPG 3 kg hasil Razia/ penertiban yang diperdagangkan oleh Pelaku usaha yang tidak berhak
- q) Melakukan penandatanganan MoU dan PKS dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel) dalam rangka penggunaan kartu debit Bank Kalsel sebagai kartu kendali pembelian Gas LPG 3 Kg bersubsidi.

2. Fasilitas Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Perekonomian Dalam Rangka Mendukung Program KEJAR (satu rekening satu pelajar) di Kabupaten Tanah Laut

A. Latar Belakang

Kelompok pelajar memiliki potensi yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data statistik tahun 2019 menunjukkan jumlah pelajar yaitu sebesar 55,7 juta atau 20,86% dari total jumlah penduduk Indonesia.

Selain besarnya jumlah pelajar tersebut, hasil riset dalam Indonesia Millennial Report 2019 menunjukkan karakter millennials seperti *self-development*, *creativity*, dan *multitasking ability* menjadi salah satu dasar yang dapat memperkuat perekonomian Indonesia di masa depan. Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan besarnya kelompok pelajar sebagai penggerak perekonomian Indonesia baik dari segi jumlah populasi dan karakter. Dari data Dinas Pendidikan kami memperoleh informasi bahwa di Kabupaten Tanah Laut terdapat:

- a) 242 Sekolah Dasar dengan perkiraan peserta didik sebanyak 34.881 siswa.
- b) 56 Sekolah Menengah Pertama dengan perkiraan peserta didik sebanyak 8.989 siswa.

Total 43.860 ribu siswa SD dan SMP yang berada dalam pengaturan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut, sebuah potensi yang cukup besar untuk meningkatkan basis nasabah tabungan.

B. Tujuan

Adanya upaya perluasan akses keuangan sejak tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) bahwa pada tahun 2019 target inklusi keuangan adalah sebesar 75%. Dalam Perpres tersebut, pelajar menjadi salah satu sasaran dari keuangan inklusif. Arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas SNKI tanggal 28 Januari 2020 yaitu menargetkan tingkat inklusi keuangan Indonesia yang saat ini sebesar 76,19% dapat meningkat menjadi di atas 90% pada tahun 2023. Selain itu, Presiden juga mengharapkan mahasiswa dan pelajar dapat ditarik untuk menggunakan produk dari perbankan nasional sehingga dapat meningkatkan inklusi keuangan. Untuk mendukung upaya dimaksud, Presiden meminta Mendikbud untuk memastikan agar semua pelajar dan mahasiswa dapat memiliki tabungan. Saat ini telah diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung yang ditetapkan setiap tanggal 20 Agustus. Bertepatan dengan Hari Indonesia Menabung tersebut, akan dilaksanakan kegiatan SimPel Day dalam rangka meningkatkan *awareness* masyarakat khususnya orang tua, sekolah dan pelajar terhadap kegiatan menabung sejak dini. Hal ini juga sejalan dengan tugas dan fungsi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Tanah Laut yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/

-KUM/2020 tanggal PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH (TPAKD) KABUPATEN TANAH LAUT.

C. Program KEJAR

Program Satu Rekening, Satu Pelajar (KEJAR) merupakan salah satu bentuk Aksi Indonesia Menabung sebagai implementasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung. Dalam implementasinya, program KEJAR dapat menggunakan produk Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB) atau produk tabungan anak yang telah dimiliki oleh bank. Program KEJAR ini diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian target inklusi keuangan yang ditetapkan oleh Bapak Presiden pada Rapat Terbatas SNKI tanggal 28 Januari 2020, yaitu mencapai lebih dari 90% pada tahun 2023. Adapun jumlah pelajar yang telah memiliki rekening pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 50%, tahun 2021 sebesar 75% dan pada tahun 2022 diharapkan seluruh pelajar di Indonesia telah memiliki rekening.

D. Strategi Peningkatan Peserta Program KEJAR

Dalam mencapai target dimaksud, tentunya diperlukan strategi dalam implementasi program KEJAR diantaranya:

- 1) Strategi dari sisi regulasi/kebijakan seperti adanya Surat Edaran dari Pemerintah Daerah kepada stakeholders terkait. Implementasi SE KEJAR di Kabupaten Tanah Laut di laksanakan dalam bentuk Gerakan yang dinamakan GENTA SAMBUNG RASA (Generasi Tangguh Dari Banua Menabung untuk Rakyat Sejahtera) yang di Gagas oleh Bupati Tanah Laut H.M. Sukamta dan hal itu diperkuat dan tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Tanah Laut nomor 500/2416/Perekobang-VIII/2020 tentang Program Simpanan Pelajar Genta Sambung Rasa Kabupaten Tanah Laut.
- 2) Dari sisi infrastruktur, kegiatan kunjungan bank ke sekolah (bank goes to school) harus ditingkatkan dan perlu didorong adanya keberadaan agen bank di sekolah.
- 3) Pelaksanaan campaign untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap pentingnya budaya menabung sejak dini (Sosialisasi Program KEJAR atau Simpel pada kegiatan Manunggal Tuntung Pandang). Hal itu dilakukan Pemkab Tanah Laut sebagai sebuah komitmen untuk mendorong dan mendukung

budaya menabung dalam rangka membangkitkan literasi dan inklusi keuangan melalui kepemilikan rekening oleh seluruh peserta didik pada desa yang dilaksanakan kegiatan Manunggal Tuntung Pandang.

- 4) Maaping sekolah dan pihak perbankan yang akan melakukan pelayanan pada masing – masing sekolah telah dilakukan oleh Sekretariat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yaitu Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan tujuan tidak terjadi tumpang tindih pelayanan kepada masing – masing sekolah.

iv. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah

Tuntutan penyelenggaraan reformasi birokrasi belum tuntas untuk terus dilaksanakan sebagai langkah telah melaksanakan sebagian agenda reformasi birokrasi, dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023.

Reformasi Birokrasi yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), sistem pengelolaan keuangan, manajemen kepegawaian, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah belum optimal dilaksanakan, hal ini dikarenakan terbatasnya kompetensi SDM untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi tersebut.

Sampai saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah belum dilaksanakan secara optimal, ada beberapa komponen Area Perubahan Reformasi Birokrasi yang belum dilaksanakan, hal tersebut dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :

- 1) Manajemen Perubahan; sosialisasi dan internalisasi RB belum dilaksanakan secara terus menerus
- 2) Regulasi Kebijakan; Identifikasi dan analisis pemutakhiran pemetaan seluruh peraturan perundang undangan yang tidak harmonis/sinkron belum dilaksanakan secara berkelanjutan

- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi; Tindak lanjut evaluasi penyesuaian beban kerja SKPD belum maksimal
- 4) Penataan Tata Laksana; Belum disusunnya Peta Proses Bisnis Setda, SOP belum sesuai dengan Peta Proses Bisnis
- 5) Penataan Sistem Manajemen SDM; Belum adanya rewi terhadap standar kompetensi jabatan PNS Setda dan kinerja individu belum dilakukan monev secara berkala
- 6) Penguatan Akuntabilitas; Belum terlibatnya pimpinan secara menyeluruh dalam penyusunan dokumen perencanaan
- 7) Penguatan Pengawasan;
 - Penerapan SPIP belum optimal
 - Monev pembangunan Zona Integritas belum dilakukan secara berkala
 - Belum optimalnya penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat
- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 - Belum maksimalnya pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi
 - Belum maksimalnya penerapan budaya pelayanan prima

Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, perlu adanya rencana tindak lanjut untuk menjamin perbaikan program Reformasi Birokrasi Lingkup Sekretariat Daerah guna mendukung pelaksanaan Reformasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, rencana tindak lanjut dimaksud adalah sebagai berikut :

NO.	AREA PERUBAHAN RB	RENCANA TINDAK LANJUT
1.	Manajemen Perubahan	a. Telah membuat Keputusan terkait Tim RB sesuai Area pada LKE b. Melakukan pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi c. Melakukan perubahan pola pikir dan budaya kinerja kearah yang lebih baik
2.	Regulasi Kebijakan	a. Melakukan Identifikasi dan analisis kembali untuk pemutakhiran pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron secara berkelanjutan; b. Revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah selesai dilakukan indentifikasi, analisa dan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron yang terbaru dengan melibatkan Tokoh Masyarakat.
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	a. Penataan kelembagaan berbasis kinerja; b. Evaluasi kelembagaan kesesuaian beban kerja organisasi
4.	Penataan Tatalaksana	a. Melakukan rewi terhadap SOP;

		b. Penyusunan Draft Keputusan Peta Proses Bisnis; c. Penyusunan SOP sesuai Peta Proses Bisnis; d. Melakukan Evaluasi Peta Proses dan Penerapan SOP; e. Melakukan pemuktahiran data dan informasi publik.
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	a. Reviu terkait Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai upaya perbaikan secara berkelanjutan; b. Melakukan Riviu kebutuhan pegawai sebagai upaya perbaikan secara berkelanjutan; c. Pemberian reward dan punishment terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi; d. Reviu terhadap standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil; e. Pemanfaatan system informasi kepegawaian; f. Melakukan monev kinerja individu secara berkala.
6.	Penguatan Akuntabilitas	a. Memaksimalkan Keterlibatan Pimpinan dalam penyusunan Dokumen perencanaan ; b. Melakukan penyelarasan dokumen perencanaan SKPD dengan Kabupaten c. Melakukan revisi Indikator Kinerja Utama Pejabat Eselon II d. Evaluasi Internal Terhadap Capaian Kinerja SKPD e. Pemenuhan dokumen data dukung capaian target kinerja SKPD f. Memaksimalkan Komitmen Pimpinan dan seluruh ASN dalam Implementasi SAKIP
7.	Penguatan Pengawasan	a. Membangun komitmen anti Gratifikasi disetiap pelayanan; b. Melakukan identifikasi Risiko SKPD; c. Melakukan peningkatan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui Aplikasi WBS; d. Meningkatkan Penanganan Pelaporan Benturan Kepentingan; e. Melakukan peningkatan pembangunan Zona Integritas untuk meraih WBK
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	a. Evaluasi atas Pengembangan system informasi layanan masyarakat; b. Meningkatkan informassi pelayanan mudah diakses melalui berbagai media; c. Meningkatkan nilai atas persepsi Kualitas Pelayanan Publik. d. Pengembangan Aplikasi Layanan untuk mempermudah pelayanan

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Umum Tahun 2021*

Dalam rangka upaya peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat, maka diperlukan komitmen bersama antara Pimpinan dan jajarannya untuk menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN.

Disamping itu, selain komitmen bersama, pimpinan sebagai *role model* dapat menjadi panutan bagi PNS di Lingkup Sekretariat Daerah dengan membangun Nilai Budaya bagi seluruh Aparatur Sekretariat Daerah dalam bentuk slogan Budaya yaitu:

- **INTEGRITAS** dengan konsisten dalam setiap tindakan
- **PROFESIONAL** dalam melaksanakan tugas
- **AKUNTABEL** dengan sikap yang mampu mempertanggungjawaban keberhasilan / kegagalan melaksanakan tugas

v. Pelaksanaan Budaya Kerja Lingkup Sekretariat Daerah Tahun 2021

Budaya kerja diartikan sebagai cara pandang seseorang dalam memberi makna terhadap “kerja”. Dengan demikian budaya kerja diartikan sebagai sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Pada prakteknya, budaya kerja diturunkan dari budaya organisasi. Budaya Kerja merupakan suatu komitmen organisasi, dalam upaya membangun sumber daya manusia, proses kerja, dan hasil kerja yang lebih baik.

Adapun penerapan nilai-nilai Budaya Kerja Lingkup Sekretariat Daerah belum dapat maksimal dilaksanakan terkait pada **Nilai-nilai Dasar Budaya Kerja Kepemimpinan dan Manajemen**, sedangkan **Nilai-nilai Dasar Budaya Kerja Perilaku Bekerja** dan **Nilai-nilai Dasar Budaya Kerja Pola Pikir dan Cara Kerja** terjadi peningkatan perilaku bekerja dari Tahun sebelumnya. Pada Tahun 2021 penilaian pelaksanaan Budaya Kerja Lingkup Sekretariat Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah memperoleh peningkatan Nilai-nilai Budaya sebagai berikut :

NO	NAMA SKPD	2020		2021	
		TOTAL	KATEGORI	TOTAL	KATEGORI
1.	SEKERTARIAT DAERAH				
	KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN	12,05	BB	18.07	TB
	POLA PIKIR DAN CARA KERJA	13,02	KB	6.00	B
	PERILAKU BEKERJA	23,88	BB	17.74	B

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Umum 2021*

- 1) Pada nilai-nilai dasar Budaya Kerja dalam pola pikir dan cara kerja Sekretariat Daerah pada Tahun 2020 memperoleh **Nilai 13.02** dengan kategori **KURANG BAGUS** sedangkan Tahun 2021 mengalami peningkatan dengan memperoleh **Nilai 6.00** dengan kategori **BAGUS** , hal ini dikarenakan telah terpolanya Budaya Kerja :
 - dari yang hanya menjalankan wewenang menjadi menjalankan peran
 - dari yang bersifat terkotak-kotak menjadi sinergis

- dari yang hanya berpikir jangka pendek/sesaat menjadi berpikir jangka panjang/strategis
- dari yang bersifat memerintah menjadi bersifat melayani
- dari yang bersifat melaksanakan rutinitas menjadi bersifat melakukan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan

Untuk ini budaya kerja Sekretariat Daerah terkait pola pikir dan cara kerja diperlukan sosialisasi lebih intens, pelatihan dan penerapannya secara konsisten agar kedepannya terjadi perubahan pola pikir dan cara kerja.

2) Untuk nilai-nilai Dasar Budaya Kerja dalam Kepemimpinan dan Manajemen Sekretariat Daerah pada Tahun 2020 memperoleh **Nilai 12.05** dengan kategori **BELUM BAGUS** sedangkan Tahun 2021 mengalami penurunan dengan memperoleh **Nilai 18.07** dengan kategori **TIDAK BAGUS**, hal ini dikarenakan belum terpolanya Budaya Kerja :

- Pengembangan SDM dalam bentuk pola pikir, sikap dan cara kerja belum dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan.
- Penerapan Nilai-nilai Budaya kerja dalam sistem kebijakan publik belum dilaksanakan secara berkelanjutan.
- Belum maksimalnya tindak lanjut atas hasil evaluasi terhadap kebijakan dan program kerja dan pelayanan publik.
- Belum sepenuhnya dipahami secara jelas visi misi organisasi oleh aparatur Sekretariat Daerah
- Penerapan standar kualitas pelayanan masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan masyarakat.
- Belum dilaksanakannya secara konsisten dialog dua arah antara pimpinan dan seluruh aparatur terkait evaluasi kinerja strategi kebijakan dan program kerja dalam pencapaian visi misi.

Budaya kerja Sekretariat Daerah terkait Kepemimpinan dan Manajemen diperlukan peningkatan nilai-nilai budaya kerja (sosialisasi) agar kedepannya terjadi perubahan :

- Pengembangan SDM dalam membentuk pola pikir, sikap dan cara kerja yang produktif dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan
- Penerapan Nilai-nilai Budaya kerja dalam sistem kebijakan publik dilaksanakan secara berkelanjutan

- adanya tindak lanjut atas hasil evaluasi terhadap kebijakan dan program kerja dan pelayanan publik.
- Visi misi organisasi telah dipahami secara jelas oleh aparat Sekeratriat Daerah
- Penerapan standar kualitas pelayanan masyarakat sesuai dengan tuntutan masyarakat.
- Pimpinan melaksanakan dialog dua arah secara konsisten dengan seluruh aparat terkait evaluasi kinerja strategi kebijakan dan program kerja dalam pencapaian visi misi.

3) Nilai-nilai Dasar Budaya Kerja dalam Perilaku Bekerja Sekretariat Daerah pada Tahun 2020 memperoleh **Nilai 23.88** dengan kategori **BELUM BAGUS** sedangkan Tahun 2021 mengalami peningkatan dengan memperoleh **Nilai 17.74** dengan kategori **BAGUS** hal ini dikarenakan telah terpolanya Budaya Kerja :

- Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah berdasarkan pada Nilai-nilai dasar budaya kerja antara lain terkait :
 1. Komitmen dan Konsistensi
 2. Wewenang dan tanggung jawab
 3. Keikhlasan dan kejujuran
 4. Integritas dan Profesionalisme
 5. Kreatifitas dan Kepekaan terhadap lingkungan tugas
 6. Kepemimpinan dan Keteladanan
 7. Rasionalitas dan Kecerdasan Emosi
 8. Disiplin dan Keteraturan Bekerja
 9. Keberanian dan Kearifan dalam mengambil keputusan dan menangani konflik
 10. Dedikasi dan loyalitas
 11. Semangat dan Motivasi
 12. Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 13. Keadilan dan Keterbukaan

D. Produk Layanan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut bahwa kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati, maka kegiatan yang dilaksanakan adalah membantu Bupati antara lain dalam melaksanakan pelayanan administratif melalui pelayanan yang dilaksanakan oleh Bagian-bagian lingkup Sekretariat Daerah.

Adapun jenis pelayanan sebagaimana maksud tersebut di atas adalah sebagai berikut :

NO	BAGIAN	JENIS LAYANAN
1.	Pelayanan Bagian Pengadaan Barang/Jasa	1) Memfasilitas pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa; 2) Membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; 3) Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; 4) Memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa; 5) Memfasilitasi layanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas; 6) Melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personil UKPBJ; 7) Melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilingkungan pemerintah Kabupaten/Kota; 8) Melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh system informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SiRUP, SPSE, E-Katalog, E-Monev, SIKaP; dan 9) Layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.
2.	Pelayanan Bagian Kesejahteraan Rakyat	1) Pemberian bantuan hibah bagi tempat ibadah dan lembaga/organisasi keagamaan; 2) Sosialisasi kelengkapan administrasi dan tata cara penyaluran dana; hibah daerah kepada pengurus tempat ibadah dan lembaga/organisasi keagamaan; 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hibah daerah untuk tempat ibadah dan lembaga/ organisasi keagamaan; 4) Fasilitasi kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dengan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan; 5) Pemberian insentif bagi guru-guru TPA, Madrasah Diniyah (MADIN), Pondok Pesantren dan Penyuluh Agama; 6) Fasilitasi pembayaran BPJS Ketenaga kerjaan bagi Penyuluh Agama; 7) Fasilitasi penyelenggaraan Ibadah Haji;



NO	BAGIAN	JENIS LAYANAN
		8) Fasilitas pemberian bantuan Beasiswa bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (Bidang Agama); 9) Fasilitas kegiatan keagamaan (MTQ, Betamat Al Qur'an, Wisuda Santri, Hari Santri Nasional, MQK, PORSADIN, FASI dan Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama) bagi organisasi/lembaga keagamaan (LPTQ, BKPRMI, FKPP, FKDT dan FKUB); 10) Pembinaan bagi lembaga/organisasi keagamaan (LPTQ, BKPRMI, FKPP, FKDT dan FKUB); 11) Fasilitas Tausiyah Keagamaan lingkup Sekretariat Daerah; 12) Fasilitas pelaksanaan seleksi dan Penetapan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanah Laut; dan 13) Fasilitas Penetapan Kepengurusan LPTQ, PHBI, Masjid Agung Syuhada dan PESPAWARI Kabupaten Tanah Laut.
3.	Pelayanan Bagian Pemerintahan	1) Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan; 2) Fasilitas Kerjasama Daerah; 3) Sosialisasi Penyusunan IKK LPPD; 4) Fasilitas Kegiatan <i>Coffe Morning</i> ; 5) Fasilitas Kegiatan Forkopimda dan Instansi Vertikal; 6) Fasilitas Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Kabupaten; 7) Fasilitas Penyusunan LKPJ/LPPD; 8) Fasilitas Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada; dan 9) Fasilitas Administrasi Pimpinan dan PAW Anggota DPRD.
4.	Pelayanan Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA	1) Memfasilitasi kegiatan koordinasi BUMD dengan Pemerintah Daerah; 2) Memfasilitasi kegiatan koordinasi BLUD dengan Pemerintah Daerah; 3) Fasilitas kegiatan pembinaan BUMD dan BLUD; 4) Fasilitas kegiatan penyusunan Kajian/Analisa Investasi Pemerintah Daerah; 5) Mengkoordinasikan kegiatan promosi produk unggulan daerah; 6) Mengkoordinasikan kegiatan penyaluran Kredit Modal Kerja Tanpa Bunga Program Gapura Karomah; 7) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait UMKM; 8) Fasilitas dan koordinasi kegiatan pengembangan perekonomian lintas sektoral; 9) Memfasilitasi kegiatan koordinasi dan pelaporan Administrasi Pembangunan; 10) Memfasilitasi kegiatan koordinasi di Bidang Sumber Daya Alam (Pertanian, Peternakan, Perikanan dan lain-lain); 11) Fasilitas kegiatan pengendalian distribusi gas bersubsidi; dan 12) Memfasilitasi kegiatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
5.	Pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1) Memfasilitasi Protokol Kegiatan Pimpinan; 2) Memfasilitasi Protokol Tamu Daerah; 3) Memfasilitasi Pembuatan Video Pimpinan; 4) Dokumentasi Kegiatan Pimpinan; 5) Memfasilitasi Pemberitaan Kegiatan Pimpinan; dan 6) Memfasilitasi Pembuatan Naskah Pidato.
6.	Pelayanan Bagian Hukum	1) Memfasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah; 2) Memfasilitasi Bantuan Hukum dan HAM;

NO	BAGIAN	JENIS LAYANAN
		3) Konsultasi dan Pengkajian Hukum; dan 4) Koreksi draft MoU, NPHD, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Keperdataan lainnya.
7.	Pelayanan Bagian Umum	1) Memfasilitasi Penyewaan Gedung; 2) Memfasilitasi Penyewaan Bus; 3) Pelayanan Tamu Daerah; 4) Memberikan Pelayanan Surat Menyurat; 5) Memberikan Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut; dan 6) Memberikan Pelayanan dan Penyimpanan Arsip di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8.	Pelayanan Bagian Organisasi	1) Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja; 2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 3) Pendampingan Penyusunan Anjab, ABK dan Evjab; 4) Pendampingan Penyusunan SOTK dan Tupoksi/Uraian Tugas Jabatan SKPD; 5) Pembuatan ID Card Pegawai; 6) Fasilitasi Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 7) Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan 8) Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP).
9.	Pelayanan Bagian Perencanaan dan Keuangan	1) Fasilitasi Pembayaran Pendapatan/Gaji dan Tunjangan Operasional Pimpinan; 2) Fasilitasi Pembayaran Pendapatan/Gaji dan TPP ASN Sekretariat Daerah; 3) Fasilitasi Penyusunan Renja Sekretariat Daerah; 4) Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Keuangan; 5) Fasilitasi Penyusunan Manajemen Risiko; dan 6) Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021*

Diharapkan dengan layanan yang telah dilaksanakan oleh Bagian-bagian dapat memberikan pelayanan secara maksimal dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut baik bagi masyarakat, instansi vertikal maupun untuk layanan Perangkat Daerah.

E. Sistematika Penyajian

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, menggambarkan struktur organisasi tugas pokok dan

fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, aspek strategis organisasi, produk dan layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan program/kegiatan dan sub kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian sasaran strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan (ringkasan realisasi anggaran menurut program Tahun 2020 dan Tahun 2021 serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program.

BAB IV PENUTUP

Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya dan penghargaan serta inovasi yang telah diraih.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Sekretariat Daerah bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Sekretariat Daerah.

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 sekaligus menjadi Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023 adalah:

Terwujudnya Tanah Laut yang “**BERINTERAKSI**”

- **Berkarya**
- **Inovasi**
- **Tertata**
- **Religius**
- **Aktual**
- **Sinergi**

Visi tersebut menunjukkan adanya keinginan yang kuat dari segenap unsur aparatur pemerintah di Lingkungan Sekretariat Daerah sebagai motor penggerak penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut.

Dengan demikian Sekretariat Daerah diharapkan mampu menampilkan dirinya sebagai motor penggerak, sebagai koordinator perumusan kebijakan pemerintah daerah, sehingga dapat bergerak cepat, penuh energi dan menghasilkan kebijakan yang akurat dan memberi daya dorong yang kuat bagi pembangunan daerah serta mampu memberi dorongan yang kuat bagi semua perangkat daerah agar senantiasa bertenaga, mampu menyesuaikan dengan perkembangan keadaan yang selalu bergerak maju menuju kemajuan masa depan.

Komitmen untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut. Sekretariat Daerah menetapkan Misi sebagai gambaran aktivitas yang sudah seharusnya dilaksanakan. Dengan Misi maka akan terlihat secara jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana cara memenuhinya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Oleh karena itu, sebuah Visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian Misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Tanah Laut dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

BERKARYA : Makna kata “berkarya” lebih tinggi daripada kata “bekerja”; yaitu merujuk pada hasil kerja. Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Secara makro, indikasi dari adanya karya dalam peningkatan taraf kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita, yang diiringi dengan laju inflasi di Daerah yang semakin terkendali; tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional yang semakin menurun; rasio kesenjangan kemiskinan serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang semakin menurun; pembangunan manusia yang semakin baik; dan meningkatnya daya saing daerah;

INOVASI : Inovasi adalah solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan

seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan / ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka inovasi tersebut, maka percepatan pembangunan inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui penjangkaran dan penumbuhan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus kembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraan.

- TERTATA** : Secara umum, makna “tertata” adalah *tertib administrasi dan tertib substansi*. Artinya, aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.
- RELIGIUS** : Pada aspek religius ini, peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.
- AKTUAL** : Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- SINERGI** : Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi,

dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di tingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

B. Misi

1. **Berkarya** meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya
2. Menciptakan **inovasi** di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif
3. Membangun **tata** kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas **religiusitas** dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun **sinergitas** yang baik antartingkat pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut mengemban Misi ke:

1. **Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;**
2. **Menciptakan Inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;**
3. **Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);**

5. **Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.**

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang ingin dicapai atau dihasilkan atau dihasilkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun. Penetapan tujuan strategis ini dapat menjadi sarana bagi Sekretariat daerah untuk secara cepat dan tepat mengetahui apa yang harus segera diwujudkan oleh segenap jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis Sekretaris Daerah kepada Bupati Tanah Laut atas capaian kinerja untuk indikator-indikator sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga diharapkan dapat dijadikan sarana bagi Bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan pengukuran sejauh mana kegiatan yang dilakukan telah memberikan akses terhadap pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang telah ditetapkan.

Adapun rumusan Tujuan Strategis yang ingin dicapai sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018 s/d 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Asset Perlengkapan serta Umum dan Rumah Tangga;
2. Meningkatkan kualitas Pelayanan Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Asset Perlengkapan serta Umum dan Rumah Tangga;
3. Meningkatkan inovasi dalam Pelayanan Publik;
4. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik;
5. Meningkatnya Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik;
6. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama Pemerintah Daerah serta administrasi kewilayahan;
7. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi di Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
9. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengelolaan pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
10. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Pembentukan Produk Hukum Pengaturan,

- Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Pruduk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum;
11. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Protokol, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi;
 12. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Bina Mental Spritual, Kesejahteraan social dan Budaya serta kesejahteraan masyarakat;
 13. Meningkatkan sinergitas pengelolaan perekonomian dan investasi;
 14. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan wilayah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Administrasi Pembangunan serta Sumber Daya Alam.

Sasaran strategis yang telah dirumuskan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) Sasaran adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA					KET
						2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Asset Perlengkapan serta Umum dan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	BAIK (85)	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80	81	81.5	82	Sekretariat Daerah dan Bagian Umum
	Meningkatkan kualitas Pelayanan Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Asset Perlengkapan serta Umum dan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	100%	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/SKPD/ Masyarakat dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Umum



MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA					KET
						2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Menciptakan Inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif	Meningkatkan Inovasi dalam Pelayanan Publik	Persentase peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik	100%	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah dan Bagian Organisasi
Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	BAIK (75)	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	ST 3,060	ST 3,075	ST 3,100	ST 3,125	ST 3,150	Sekretariat Daerah dan Bagian Pemerintahan
				Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	75	80	85	90	100	Sekretariat Daerah dan Bagian Organisasi
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	85	90	95	100	100	Sekretariat Daerah dan Bagian Organisasi
	Meningkatnya Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	BB (85)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	80	82	82	83	85	Sekretariat Daerah dan Bagian Perencanaan dan Keuangan
					Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7	Sekretariat Daerah dan Bagian Perencanaan dan Keuangan
				Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	80	85	90	91	92	Sekretariat Daerah dan Bagian Umum
					Nilai ZI Sekretariat Daerah	80	82	83	84	85	
	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama Pemerintah Daerah serta Administrasi Aewilayahan	Persentase kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama Pemerintah Daerah serta administrasi kewilayahan	100%	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan
					Persentase kegiatan Peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan



MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA					KET
						2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan
				Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan
				Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke Tiga	Persentase dokumen kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi	100%	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	65%	70%	80%	90%	100%	Bagian Organisasi
				Meningkatnya nilai Area Perubahan RB SKPD	Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60	10%	20%	30%	40%	50%	Bagian Organisasi
				Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Persentase Unit Pelayanan dengan nilai SKM Minimal 80	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi
					Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi
				Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan, pemanataan dan evaluasi di Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Persentase kualitas penyelenggaraan, pemanataan dan evaluasi di Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	100%	Meningkatnya layanan administrasi bidang perencanaan dan keuangan	Persentase layanan administrasi bidang perencanaan dan keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
				Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan lingkup Sekretariat Daerah	Persentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja dan keuangan yang sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan



MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA					KET
						2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	80	82	82	83	85	Bagian Perencanaan dan Keuangan
					Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7	Bagian Perencanaan dan Keuangan
				Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada Bagian-Bagian lingkup Setda sarana prasarana/aset milik Sekretariat Daerah terkelola dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Umum
				Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Umum
				Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai komponen area perubahan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah	80	85	90	91	92	Bagian Umum
					Nilai komponen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah	80	82	83	84	85	Bagian Umum
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengelolaan pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Persentase kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengelolaan pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	100%	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase Paket pengadaan yang terlayani dalam pengadaan/jasa sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
				Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	-	65%	75%	85%	100%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa



MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA					KET
						2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Meningkatnya kompetensi SDM dalam proses PBJ yang berkualitas	Persentase SDM yang kompeten dalam Pengadaan Barang/jasa	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
				Meningkatnya efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	Persentase efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	-	-	100%	100%	100%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Pembentukan Produk Hukum Pengaturan, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Pruduk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum	Persentase kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Pembentukan Produk Hukum Pengaturan, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Pruduk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum	100%	Meningkatnya Informasi Produk Hukum	Persentase Informasi Produk Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Hukum
				Meningkatnya Harmonisasi Produk Hukum	Persentase Produk hukum yang harmonis	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Hukum
				Tingkat Penanganan kasus/perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Hukum
				Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)	Nilai 75	Nilai 75	Nilai 75	Nilai 75	Nilai 76	Bagian Hukum
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Protokol, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi	Persentase kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Protokol, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi	100%	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolkan dan dokumentasi	Persentase penyebaran informasi/pemberitaan pembangunan pemerintah daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
					Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
					Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/Tamu daerah yang terlayani keprotokolannya	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
					Persentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
					Persentase pengaduan masyarakat yang di tindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan



MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA					KET
						2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan sosial dan Budaya serta kesejahteraan masyarakat	Persentase kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan sosial dan Budaya serta kesejahteraan masyarakat	100%	Meningkatnya pembinaan Lembaga sosial dan keagamaan	Persentase peningkatan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
				Meningkatnya layanan bantuan sosial keagamaan	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
				Meningkatnya peran serta Organisasi/Lembaga Keagamaan/SKPD dalam Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan sinergitas pengelolaan perekonomian dan investasi	Persentase pengelolaan perekonomian dan pembangunan	100%	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	100%	100%	100%	100%	100%	Sekda dan Kabag Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan wilayah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Administrasi Pembangunan serta Sumber Daya Alam	Persentase kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan wilayah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Administrasi Pembangunan serta Sumber Daya Alam	100%	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahna terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
				Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja positif	60%	75%	75%	100%	100%	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
				Meningkatnya Pelaku UMKM yang terfasilitasi permodalan	Persentase UMKM yang terfasilitasi	60%	75%	75%	100%	100%	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
				Meningkatnya kualitas manajemen data administrasi pembangunan yang proporsional	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan progres pembangunan fisik	-	-	80%	80%	85%	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang digunakan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Selain itu, indikator kinerja utama digunakan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel Indikator Kinerja Utama Sekretaris Daerah Tahun 2021

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Rumus	Penanggung jawab/ Sumber Data
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah dan Kabag Umum
2.	Inovasi Publik yang diciptakan SKPD	Jumlah Inovasi SKPD yang didaftarkan	Jumlah Inovasi SKPD yang didaftarkan dalam kompetisi Inovasi	Sekretaris Daerah dan Kabag Organisasi
3.1	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	Skor yang diperoleh dari hasil penilaian LPPD oleh Kemendagri	Sekretaris Daerah dan Kabag Pemerintahan
3.2	Meningkatkannya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Presentase SKPD dengan nilai RB minimal B	$\frac{\text{Jumlah SKPD dengan Nilai RB Minimal B}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	Sekretaris Daerah dan Kabag Organisasi
3.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Presentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	$\frac{\sum \text{SKPD dengan Nilai SAKIP Minimal BB}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	Sekretaris Daerah dan Kabag Organisasi
3.4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai yang diperoleh dari penilaian SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut	Sekretaris Daerah dan Kabag Perencanaan dan Keuangan
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	Nilai yang diperoleh dari penilaian SPIP oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut	Sekretaris Daerah dan Kabag Perencanaan dan Keuangan
3.5	Meningkatnya tata kelola Kepemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	Nilai yang diperoleh dari penilaian RB oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Sekretaris Daerah dan Kabag Umum
		Nilai ZI Sekretariat Daerah	Nilai yang diperoleh dari penilaian ZI oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Sekretaris Daerah dan Kabag Umum

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Rumus	Penanggung jawab/ Sumber Data
1	2	3	4	5
4.	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	$\frac{\sum \text{kebijakan perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{kebijakan perekonomian dan pembangunan yang dihasilkan}} \times 100\%$	Sekretaris Daerah dan Kabag Perekonomian, Administrasi Pembangunan Sumber Daya Alam

Sumber: Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

untuk Eselon II, Eselon III dan Eselon IV Tahun 2021 (data terlampir)

E. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah. Untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudkan komitmen penerimaan amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 yang telah disepakati baik oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV dan Pelaksana Lingkup Sekretariat Daerah.

Untuk Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II dalam hal ini Sekretaris Daerah dapat dilihat dibawah ini :



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 21003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2021
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. DAHNIAL KIFLI, M.AP

Jabatan : Sekretaris Daerah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. SUKAMTA

Jabatan : Bupati Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bupati Tanah Laut

H. SUKAMTA

Pelaihari, 01 Nopember 2021
Sekretaris Daerah

Drs. H. DAHNIAL KIFLI, M.AP
NIP. 19640425 198703 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 21003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2021
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
	1	2	3
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81
2.	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	1
3.	Meningkatnya Skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	ST 3,100
4.	Meningkatnya Pelaksanaan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	85
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	95
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	82
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3,6
7.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	90
		Nilai ZI Sekretariat Daerah	83
8.	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	100%



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 21003

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 240.493.962,-
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 19.650.211.990,-
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 855.227.638,-
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 5.439.022.670,-
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.745.160.661,-
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.864.693.334,-
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 4.488.180.117,-
		8. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 1.010.366.176,-
		9. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp 1.194.545.000,-
		10. Penataan Organisasi	Rp 766.844.524,-
		11. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi	Rp 2.025.753.496,-



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 21003

		Pimpinan	
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Administrasi Tata Pemerintahan	Rp 2.436.321.322,-
		2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp 30.491.169.166,-
		3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp 1.525.510.792,-
		4. Fasilitasi Kerjasama Daerah	Rp 129.908.036,-
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp 900.193.652,-
		2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp 254.464.786,-
		3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 1.247.423.136,-

Bupati Tanah Laut

H. SUKAMTA

Pelaihari, 01 Nopember 2021
 Sekretaris Daerah

Drs. H. DAHNIAL KIFLI, M.AP
 NIP. 19640425 198703 1 012

Sedangkan untuk Perjanjian Kinerja Eselon II Asisten, Eselon III Kepala Bagian, Eselon IV Kasubbag, dan Pelaksana lingkup Sekretariat Daerah (Data Terlampir).

F. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis maka untuk mencapai sasaran tersebut memerlukan dukungan anggaran yang dirincikan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	240.493.962	240.493.962	35.90%	Perencanaan dan Keuangan dan Umum
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.376.882	61.376.882	86.50%	Perencanaan dan Keuangan
		- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	6.019.360	6.019.360	6.65%	Perencanaan dan Keuangan
		- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	3.845.790	3.845.790	26.52%	Perencanaan dan Keuangan
		- Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	9.132.950	9.132.950	23.92%	Perencanaan dan Keuangan
		- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.833.280	7.833.280	29.74%	Perencanaan dan Keuangan
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.285.700	27.285.700	45.12%	Perencanaan dan Keuangan
		- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.000.000	125.000.000	12%	Perencanaan dan Keuangan
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	129.495.734	129.495.734	71.89%	Perencanaan dan Keuangan
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.736.326	30.736.326	75.35%	Perencanaan dan Keuangan



No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	98.759.408	98.759.408	70.80%	Perencanaan dan Keuangan
		Kegiatan Belanja Gaji PNS	8.546.741.272	8.546.741.272	82.58%	Perencanaan dan Keuangan
		Kegiatan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	10.973.974.984	10.973.974.984	94.33%	Perencanaan dan Keuangan
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	855.227.638	855.227.638	45.25%	Umum
		- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	202.829.000	202.829.000	88.95%	Umum
		- Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	25.000.000	25.000.000	0.00%	Umum
		- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	627.398.638	627.398.638	32.93%	Umum
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.511.147.400	5.439.022.670	84.47%	Umum
		- Penyediaan Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	113.637.480	113.637.480	81.20%	Umum
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156.529.050	156.529.050	85.05%	Umum
		- Penyedia Bahan Logistik Kantor	263.869.100	263.744.700	91.52%	Umum
		- Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	160.051.320	160.050.990	69.87%	Umum
		- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.970.000	2.970.000	53.54%	Umum
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.814.090.450	4.742.090.450	85.79%	Umum
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	825.625.201	1.745.160.661	85.97%	Umum
		- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	825.625.201	1.745.160.661	85.97%	Umum



No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.118.493.334	3.864.693.334	84.17%	Umum
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.919.999.740	1.600.199.740	91.46%	Umum
		- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.037.434.464	1.103.434.464	72.81%	Umum
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.161.059.130	1.161.059.130	84.92%	Umum
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.792.226.917	4.488.180.117	73.79%	Umum
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	155.960.000	155.960.000	98.08%	Umum
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.312.013.961	2.312.013.961	90.25%	Umum
		- Pemelihara Mabel	21.250.000	21.250.000	0.00%	Umum
		- Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	864.746.592	1.560.699.792	47.72%	Umum
		- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	438.256.364	438.256.364	74.73%	Umum
		Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	886.822.176	1.010.366.176	93.87%	Perencanaan dan Keuangan dan Umum
		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	686.822.176	810.366.176	93.87%	Perencanaan dan Keuangan
		- Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200.000.000	200.000.000	0.00%	Umum
		Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.194.545.000	1.194.545.000	99.16%	Umum
		- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	684.835.000	684.835.000	98.70%	Umum



No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	509.710.000	509.710.000	99.77%	Umum
		Kegiatan Penataan Organisasi	799.995.164	766.844.524	66.35%	Organisasi
		- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	309.367.916	276.217.276	58.85%	Organisasi
		- Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	209.100.976	209.100.976	72.63%	Organisasi
		- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	281.526.272	281.526.272	69.14%	Organisasi
		Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.875.753.716	2.025.753.496	91.50%	Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		- Fasilitas Keprotokolan	450.951.254	450.951.254	88.49%	Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		- Fasilitas Komunikasi Pimpinan	963.305.306	963.305.306	91.40%	Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		- Pendokumentasian Tugas Pimpinan	461.497.156	611.496.936	93.87%	Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2	PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	2.167.695.422	2.436.321.322	49.72%	Pemerintahan
		- Penataan Administrasi Pemerintahan	1.865.960.946	2.038.691.846	44.85%	Pemerintahan
		- Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	160.105.606	260.090.606	80.95%	Pemerintahan
		- Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	141.628.870	137.538.870	62.73%	Pemerintahan
		Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	125.908.036	129.908.036	72.42%	Pemerintahan
		- Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	125.908.036	129.908.036	72.42%	Pemerintahan
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	25.084.349.246	30.491.169.166	95.36%	Kesejahteraan Rakyat
		- Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spritual	299.999.572	2999.999.166	45.34%	Kesejahteraan Rakyat
		- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	12.999.999.982	19.035.999.762	98.81%	Kesejahteraan Rakyat
		- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait	3.699.999.692	3.070.819.832	72.23%	Kesejahteraan Rakyat



No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		Kesejahteraan Masyarakat				
		Kegiatan Belanja Hibah uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.084.350.000	8.084.350.000	97.446%	Kesejahteraan Rakyat
		Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum	1.317.403.562	1.525.510.792	70.77%	Hukum
		- Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	595.572.972	711.572.352	72.60%	Hukum
		- Fasilitas Bantuan Hukum	371.469.772	412.043.902	63.64%	Hukum
		- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	350.360.818	401.894.538	74.82%	Hukum
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	945.234.652	900.193.652	60.33%	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	390.017.336	466.142.336	54.21%	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		- Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	89.774.270	52.642.270	33.32%	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		- Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	465.443.046	381.409.046	71.54%	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	254.464.786	254.464.786	87.60%	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		- Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	254.464.786	254.464.786	87.60%	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.703.803.136	1.247.423.136	64.89%	Pengadaan Barang/Jasa
		- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.023.379.472	566.999.472	50.39%	Pengadaan Barang/Jasa
		- Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	294.327.192	294.327.192	91.82%	Pengadaan Barang/Jasa
		- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	386.096.472	386.096.472	64.69%	Pengadaan Barang/Jasa

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban selama Tahun 2021 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas sasaran - sasaran kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2021. Selain itu, realisasi keuangan yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2021.

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD

1.1 . Sasaran RPJMD akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan instansi Pemerintah. Dimana Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2021 mengampu Misi Ke-1, Misi Ke-2, Misi Ke-3 dan Misi Ke-5 RPJMD sebagai berikut :

Tabel Sasaran RPJMD Sekretariat Daerah Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	Penanggung jawab/ Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	85%	70%	82,35	Sekretaris Daerah dan Kabag Organisasi
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan Nilai SAKIP Minimal BB	95%	65%	68,42	Sekretaris Daerah dan Kabag Organisasi
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	87.12	107.5%	Sekretaris Daerah dan Kabag Umum
4	Inovasi Publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	1	6	600	Sekretaris Daerah dan Kabag Organisasi
5	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	100%	100%	100%	Sekretaris Daerah dan Kabag Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA

*Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021

1. SASARAN Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah

Indikator : Persentase SKPD dengan Nilai RB Minimal B

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	Penanggung jawab/ Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
MISI Ke-3 : Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)						
1.	Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	85%	70%	82,35%	Sekretaris Daerah dan Kabag Organisasi

Reformasi Birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur Negara.

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dengan tiga sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2. Birokrasi yang Kapabel;
3. Pelayanan Publik yang Prima; dan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024. Reformasi Birokrasi (RB) telah dilaksanakan terhadap 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi yaitu manajemen perubahan, peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penguatan tatalaksana, penguatan sistem manajemen SDM ASN, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan quick wins.

Atas penerapan Reformasi Birokrasi tersebut maka Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada seluruh SKPD sebanyak 40 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan 1 (satu) UPTD RSUD. H. Boedjasin Pelaihari yang dimulai sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021. Hasil evaluasi untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2021

Kategori	Jumlah SKPD	Persentase	Interpretasi
AA	5	12,5	Istimewa
A	8	20	Sangat Baik
BB	10	25	Baik
B	4	10	Cukup Baik
CC	3	7,5	Cukup
C	7	17,5	Buruk
D	3	7,5	Sangat Buruk

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Organisasi Tahun 2021*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 27 SKPD dengan nilai RB minimal B (Cukup Baik) atau sebesar 67,5% dari seluruh SKPD (40 SKPD). Di dalam RPJMD 2018-2023 Kabupaten Tanah Laut telah ditargetkan untuk Indeks Reformasi Birokrasi adalah 70 (Cukup Baik). Ini merupakan Tahun ke-4 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dilakukan evaluasi oleh KemenpanRB terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Untuk Hasil evaluasi Tahun 2021 sampai saat ini belum disampaikan oleh KemenpanRB kepada seluruh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se Indonesia. Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 adalah 56,21 dengan kategori Cukup.

Terjadi peningkatan realisasi dibandingkan dengan Tahun 2020 yaitu pada Tahun 2020 terdapat 22 SKPD dengan nilai RB minimal B (Cukup Baik) atau sebesar 55% dari seluruh SKPD (40 SKPD). Berikut disajikan rekapitulasi hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2020.

Tabel Rekapitulasi Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2020

Kategori	Jumlah SKPD	Persentase	Interpretasi
AA	4	10	Istimewa
A	4	10	Sangat Baik
BB	6	15	Baik
B	8	20	Cukup Baik
CC	3	7,5	Cukup
C	6	15	Buruk
D	9	22,5	Sangat Buruk

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Organisasi Tahun 2021*

2. SASARAN Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten

Indikator : Persentase SKPD dengan Nilai SAKIP Minimal BB

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	Penanggung jawab/ Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
MISI Ke-3 : Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)						
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan Nilai SAKIP Minimal BB	95%	65%	68,42%	Sekretaris Daerah dan Kabag Organisasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah berupaya maksimal dari tahun ke tahun dalam menerapkan SAKIP. Ini dapat dilihat dari terus meningkatnya SKPD dengan hasil evaluasi SAKIP minimal BB. Evaluasi SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

Rekapitulasi hasil evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2021
oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Kategori	Jumlah SKPD	Persentase	Interprestasi
A	9	22,5	Memuaskan
BB	17	42,5	Sangat Baik
B	10	25	Baik
CC	3	7,5	Cukup
C	1	2,5	Kurang

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Organisasi Tahun 2021*

Rekapitulasi hasil evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2021

oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Kategori	Jumlah SKPD	Persentase	Interprestasi
A	7	17,5	Memuaskan
BB	30	75	Sangat Baik
B	3	7,5	Baik

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Organisasi Tahun 2021*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Tahun 2021 terdapat 26 SKPD atau sebesar 65% dengan nilai SAKIP minimal BB, 14 SKPD dengan nilai SAKIP di bawah baik atau sebesar 35%. Terjadi penurunan dibandingkan Tahun 2020 dimana pada Tahun 2020 terdapat 37 SKPD atau sebesar 92,5% dengan nilai SAKIP minimal BB, 3 SKPD dengan nilai SAKIP Baik dan tidak ada lagi SKPD yang memiliki nilai SAKIP dibawah Baik. Ringkasan evaluasi SAKIP Tahun 2020 sebagai berikut

Rekapitulasi hasil evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2021

oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Kategori	Jumlah SKPD	Persentase	Interprestasi
A	7	17,5	Memuaskan
BB	30	75	Sangat Baik
B	3	7,5	Baik

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Organiisasi Tahun 2021*

Di dalam RPJMD 2018-2023 Kabupaten Tanah Laut telah ditargetkan untuk NILAI SAKIP Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 adalah BB (77), ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar bagi seluruh SKPD terutama bagi Tim SAKIP Kabupaten untuk merealisasikannya. Dengan melihat hasil evaluasi SAKIP di atas semoga saja nilai SAKIP Kabupaten dapat terealisasi sesuai target. Sampai saat ini hasil evaluasi SAKIP dari KemenpanRB belum disampaikan oleh KemenpanRB kepada seluruh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se Indonesia.

Indikator ini juga merupakan indikator Sekretaris Daerah, dimana Sekretariat Daerah merupakan fasilitator pelaksanaan SAKIP Kabupaten dan Sekretariat Tim SAKIP Kabupaten.

3. SASARAN Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	Penanggung jawab/ Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
MISI Ke-1 : Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya						
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	87.12	107.5%	Sekretaris Daerah dan Kabag Umum

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Dengan tersedianya data penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat diharapkan hasilnya dapat bermanfaat sebagai :

1. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam upaya pemenuhan kinerja pelayanan.
2. Diketuainya tingkat kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.
3. Adanya data perbandingan antara harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil

- pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
4. Diketuainya tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.
 5. Diketuainya kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik.
 6. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan unit Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada tahun sebelumnya.
 7. Diketuainya Survey Kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada unit kerja yang telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun sebelumnya.

Gambaran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Secara umum, pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 adalah sebesar 87.12, dimana masuk dalam kategori **“BAIK”** berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Bagian-bagian Lingkup Sekretariat Daerah dengan responden menurut tugas dan fungsi Bagian tersebut, hasil Survey tersebut di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	BAGIAN	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	NILAI
1.	ORGANISASI	89	88	86	87	89	88	97	87	89	88.13
2.	PENGADAAN BARANG/JASA	77	76	78	75	77	74	77	80	77	95.88
3.	PEMERINTAHAN	86	88	83	87	86	86	84	86	84	89.03
4.	PEREKOMIAN, ADM. PEMBANGUNAN & SDA	89	87	79	89	87	82	89	80	91	85.80
5.	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	86	90	89	120	87	78	92	83	76	88.91

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Umum Tahun 2021*

6.	PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	59	56	58	56	58	56	57	59	59	95.83
7.	UMUM	87	90	85	96	89	86	93	85	100	90.02
8.	HUKUM	111	103	108	105	107	103	104	99	104	87.32
9.	KESEJAHTERAAN RAKYAT	87	88	84	90	85	86	87	80	88	86.03
	JUMLAH	86	90	89	120	87	78	92	83	76	87.12

4. SASARAN Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD

Indikator : Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	Penanggung jawab/ Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
MISI Ke-2 : Menciptakan Inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif						
1	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	1	6	600%	Sekretaris Daerah dan Kabag Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada

Tujuan dari Inovasi Pelayanan Publik, yaitu:

- 1) Mendorong pembangunan inovasi pelayanan publik;
- 2) Mendorong pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik;
- 3) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- 4) Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Target kinerja inovasi yang didaftarkan untuk Tahun 2021 adalah 1 inovasi, dengan realisasi 6 inovasi sehingga capaian untuk Tahun 2021 adalah 600%. Realisasi ini telah melebihi target akhir RPJMD 2018-2023 yaitu 2 inovasi.

Berikut adalah perbandingan jumlah inovasi yang ada di Kabupaten Tanah Laut dari Tahun 2019-2021.

Tabel Perbandingan Jumlah Inovasi dari Tahun 2019-2021

	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Inovasi SKPD	12	13	40

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Organisasi Tahun 2021*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dari Tahun 2019 s.d 2021, yaitu dengan total jumlah inovasi 65 inovasi. Hal ini tidak terlepas dari komitmen Bupati Tanah Laut yang meminta kepada SKPD dan jajarannya agar terus dapat menciptakan inovasi-inovasi pada SKPD yang nantinya mempermudah dalam pelayanan publik.

Inovasi merupakan salah satu indikator sasaran dalam RPJMD dan penghargaan yang diterima adalah indikator tujuannya. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah mendapatkan penghargaan pada Innovative Government Award (IGA) Tahun 2021 dan memperoleh kategori Inovatif dengan skor indeks 52,42.



Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Inovasi SKPD Tahun 2021

5. SASARAN Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan

Indikator : Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	Penanggung jawab/ Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
MISI Ke-5 : Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat						
1	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	100%	100%	100%	Sekretaris Daerah dan Kabag Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA

Berbagai tantangan muncul pada masa pandemi covid-19. bertambahnya pengangguran, kesulitan pemasaran oleh pelaku UKM, tingginya angka kredit bermasalah (NPL) dan lainnya akibat dari pembatasan perlu untuk disikapi dengan teliti, cepat, dan serius. Dalam hal terkait perekonomian. Oleh karena itu terdapat beberapa kebijakan yang dirancang untuk menjaga perekonomian tetap berjalan. Kebijakan yang dirancang oleh Pemerintah Daerah antara lain tetap dilaksanakannya pemberian relaksasi kredit kepada debitur Gapura Karomah, evaluasi dan monitoring debitur program Gapura karomah yang masih bermasalah dalam hal pengembalian, tindak lanjut rencana penambahan investasi Pemerintah Daerah Kepada BUMD, evaluasi manajemen BUMD secara berkala, sosialisasi program permodalan berbiaya rendah (KUR dan UMi) dan menjaga stabilitas harga pangan dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan inflasi di tingkat Pusat.

2.1 Eselon II (Sekretaris Daerah)

Dari target Indikator Kinerja Utama Eselon II (Sekretaris Daerah) yang telah selaras dengan **Sasaran RPJMD**, maka uraian dan analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dapat di lihat pada tabel berikut :

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	87.12	107.5%
2	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	1	6	600%

3.1	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	3,100	Masih dalam tahap evaluasi	Masih dalam tahap evaluasi
3.2	Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	85	70%	82,35
3.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	95	65%	68,42
3.4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	82	86,81	105,86%
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3,5	Tahap Baseline SPIP	Tahap Baseline SPIP
3.5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	90	91.71	101,9%
		Nilai ZI Sekretariat Daerah	83	84.64	101,9%
4	Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	100%	100%	100%

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021*

SASARAN 1 Meningkatkan Kualitas Layanan Sekretariat Daerah

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	87.12	107.5%

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik memberikan amanat kepada seluruh penyelenggara pelayanan yang terstandarisasi dengan memenuhi komponen standar pelayanan. Sebuah instansi dalam pelayanan publik sangat tergantung dengan sejauh mana sumber daya manusia yang terdapat dalam instansi tersebut dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan organisasi dalam memberikan pelayanan prima kepada publik. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai penyelenggara pelayanan publik terus berupaya mengikuti perkembangan dan berupaya selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang

diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut ;

NILAI SKM SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2020		NILAI SKM SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021	
SEMESTER I	SEMESTER II	SEMESTER I	SEMESTER II
81.99	82,33	86.73	87.12

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut secara umum dikategorikan baik hal tersebut dapat dilihat dari hasil SKM pada Semester I Tahun 2020 dengan nilai 81,99 dengan kategori baik, sedangkan pada Semester II Tahun 2020 nilai Survei Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut 82,33 dengan kategori Baik, hal tersebut ada peningkatan sebesar 1,0% , meskipun peningkatan tersebut tidak signifikan.

Pada Tahun 2021 kembali Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada Semester I dengan nilai 86,73 dengan kategori baik, kemudian pada Semester II Tahun 2021 nilai survei kepuasan masyarakat meningkat dengan nilai 87,12 dengan kategori baik.

Perbandingan SKM pada Tahun 2020 Semester I dengan nilai 82,33 dengan SKM Tahun 2021 Semester II 87,12 terjadi peningkatan sebesar 4,79 poin.

Kedepannya Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut selalu berupaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap apa yang menjadi kelemahan-kelemahan atas survei kepuasan masyarakat.

Dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut secara umum dapat berjalan dengan lancar, Adapun Kendala, solusi dan Rencana Aksi dapat dilihat pada table dibawah ini ;

Tabel : Kendala, Solusi dan Rencana Aksi Survei Kepuasan Masyarakat

No	Kendala	Solusi	Rencana Aksi
1	Kurang pahamnya masyarakat terhadap maksud dan tujuan dilakukannya Survei Kepuasan masyarakat	Perlunya pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait maksud setiap pertanyaan dalam Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Petugas membantu dan mengarahkan tentang tata cara pengisian kuisioner
2	Lambatnya pengembalian lembar jawaban kuisioner dari masing-masing bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut	Melakukan monitoring atas lembar jawaban kuisioner SKM	Melakukan koordinasi secara intens kepada masing-masing bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
3	Kuisioner masih manual sehingga penyebarannya terbatas	Kuisioner dilakukan secara <i>online</i>	Membuat kuisioner <i>online</i>

SASARAN 2 Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD

Indikator : Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
1	2	3	4	5	6
2	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	1	6	600

Pada Tahun 2021, ada 6 (enam) inovasi yang ada di SKPD yang diikutsertakan pada Innovative Government Award (IGA) Tahun 2021, dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021, Kabupaten Tanah Laut memperoleh kategori Inovatif dengan skor indeks 52,42.

6 inovasi yang didaftarkan itu adalah sebagai berikut :

No	SKPD	Inovasi	Tahun Pembuatan	Keterangan
1	Sekretariat Daerah	Sosialita (Sistem Order Semua Instansi Lingkup Tanah Laut)	2020	Sosialita adalah sistem order semua instansi lingkup Tanah laut untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan 50 juta. Metode pengadaan di aplikasi sosialita ini adalah metode pengadaan langsung yang menggunakan dana APBD. Metode pengadaan di aplikasi sosialita ini adalah metode pengadaan langsung yang menggunakan dana APBD.
2	Sekretariat Daerah	Gapura Karomah (Program Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat Melalui Kredit Tanpa Bunga dan	2020	Gapura Karomah adalah program yang dibuat dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tanah Laut, khususnya peningkatan dan pengembangan usaha mikro sektor pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan,

		Rente Bagi Ekonomi Lemah)		industri kecil dan usaha lainnya di Kabupaten Tanah Laut yang bersumber dari APBD.
3	Dinas PUPRP	BOC (Bina Marga On Call)	2021	BOC adalah kemudahan pelayanan yang diberikan oleh Dinas PUPRP utk penanganan jalan-jalan rusak yang sifatnya darurat/emergency, yang tidak terencana dan tidak terlalu luas penanganannya seperti jalanan berlubang, jalan amblas, jembatan, gorong2 pecah yang volumenya tidak luas.
4	Dinas Pariwisata	Fantastic Radio	2020	Radio berbasis aplikasi di android yang memberikan informasi kepariwisataan, hiburan di radio ini bisa didengarkan dimana saja dan kapan saja (24 jam).
5	Dinas Kesehatan	PSC 119	2019	PSC 119 adalah layanan panggilan sebagai ujung tombak pelayanan kegawatdaruratan pra rumah sakit di Kabupaten Tanah Laut. Diharapkan dapat bersinergi dengan seluruh jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dan membangun jaringan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pelayanan kegawatdaruratan medis pra rumah sakit bagi masyarakat yang membutuhkan.
6	Dinas PMD	Program Manunggal Tuntung Pandang	2019	Manunggal Tuntung Pandang adalah salah satu dari 7 (tujuh) Program Unggulan Bupati yaitu bermalam Bersama yang dilaksanakan di seluruh desa di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 130 (seratus tiga puluh) Desa selama 5 (lima) tahun jabatan Bupati. Dengan melibatkan seluruh unsur Perangkat Daerah, masyarakat Desa, unsur Perangkat Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta Pejabat Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berkomitmen akan terus meningkatkan inovasi-inovasi di segala sendi kehidupan terutama inovasi dalam hal pelayanan publik. Hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Timbulnya kesadaran dari ASN untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat.
- 2) Menciptakan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.
- 3) Mempersingkat panjangnya birokrasi terutama dalam hal pelayanan publik

Rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan yaitu:

- 1) Pada Tahun 2021 Bupati Tanah Laut melalui rapat koordinasi dengan semua SKPD, meminta agar setiap SKPD membuat inovasi yang berkaitan dengan pelayanan publik yang ada di SKPD tersebut yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut atau Keputusan Bupati Tanah Laut.

Dengan adanya inovasi SKPD, hal ini menjadi salah satu indikator dalam penilaian kinerja perangkat daerah pada Tahun 2022, dimana ke depannya bagi SKPD yang telah memiliki inovasi maka akan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah itu sendiri dan akan mendapatkan *reward* oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten Tanah Laut.

- 2) Melakukan pembinaan inovasi dalam kompetisi sehingga akan mendorong SKPD untuk memunculkan inovasinya lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar pelayanan yang diberikan lebih baik dan berkualitas.

SASARAN 3.1 Meningkatnya Skor LPPD Kabupaten

Indikator : Skor LPPD Kabupaten

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2021		Realisasi 2021	Capaian 2021
1	2	3	4		5	6
3.1	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	ST 3,100		Dalam Proses Awal Evaluasi	Masih dalam tahap awal evaluasi

Kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berupa pelaksanaan rapat koordinasi yang dilaksanakan untuk pembentukan Tim Penyusun LKPJ dan LPPD, sosialisasi penyusunan, hingga evaluasi yang dilaksanakan ke masing-masing SKPD. Rapat koordinasi terlaksana dengan baik dengan didukung oleh perhatian dan peran aktif dari seluruh stake holder dan SKPD terkait terutama untuk tingkat kehadiran yang tinggi di setiap rapat koordinasi walaupun terdapat beberapa kekurangan di kelengkapan dokumen serta validasi data yang dikumpulkan.

Program yang mendukung kegiatan ini adalah Program Pemeritahan Dan Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp 137.538.870,- dan realisasi sebesar Rp 86.280.000,- (62,73%).

Adapun untuk penilaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 masih dalam tahap awal penilaian.

Capaian Skor LPPD Kabupaten Tanah Laut dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Skor LPPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 s/d 2021

NO	2019	2020	2021
	Nilai Belum Terbit dari Kemendagri	Nilai Belum Terbit dari Kemendagri	Dalam Proses Awal Evaluasi

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Bobot nilai IKK LPPD masih banyak yang capaiannya rendah karena realisasi capaian kinerja di masing-masing IKK dari SKPD yang rendah, kegiatannya tidak ada pelaksanaannya atau belum terakomodir.
- Kurangnya komitmen SKPD dalam menyajikan data yang *valid*.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Peningkatan kualitas pengumpulan data IKK LPPD dan evaluasi internal seluruh SKPD.
- Memprioritaskan perencanaan usulan kegiatan-kegiatan SKPD yang termasuk pada IKK LPPD untuk dianggarkan di SKPD terkait.
- Menerapkan *reward* dan *punishment* terhadap SKPD terkait penyusunan dan skor LPPD.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Menghadirkan narasumber dari Kemendagri untuk sosialisasi LPPD kedepannya
- Memprioritaskan perencanaan usulan kegiatan-kegiatan SKPD yang termasuk pada IKK LPPD untuk dianggarkan di SKPD terkait.
- Menerapkan *reward* dan *punishment* terhadap SKPD terkait penyusunan dan skor LPPD.
- Untuk format LPPD SKPD disesuaikan dengan format Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Laporan Kinerja SKPD disusun menjadi satu dengan LPPD SKPD.





Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan LPPD SKPD Tahun 2021

SASARAN 3.2 Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah

Indikator : Persentase SKPD dengan Nilai RB Minimal B

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
1	2	3	4	5	6
3.2	Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	85%	70%	82,35%

Persentase SKPD dengan nilai RB minimal Cukup Baik terealisasi sebesar 70% (28 SKPD dari 40 SKPD) dari target 85% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 82,35%. Persentase ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2020 yaitu sebesar 55% (22 SKPD dari 40 SKPD). Untuk realisasi Tahun 2020, jika dibandingkan dengan Target akhir Renstra adalah sebesar 70% dengan target 100%. Jadi diharapkan di Tahun 2023 seluruh SKPD telah memiliki nilai RB minimal B (cukup baik) karena RPJMD menargetkan Indeks Reformasi Birokrasi Baik (75) untuk Tahun 2023.

Bahwa untuk mendukung tercapainya indikator Persentase SKPD dengan nilai RB minimal Cukup Baik telah dilaksanakan kegiatan :

1. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagai peta jalan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah laut.
2. Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemeirntah Kabupaten Tanah Laut

3. Penetapan Kepala Perangkat Daerah sebagai Role Model (teladan) dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terutama dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja.

4. Penguatan Agen Perubahan
Menunjuk 51 Orang Agen Perubahan yang tersebar pada 40 Perangkat Daerah dengan proses sesuai dengan pemilihan sesuai dengan PermenpanRB Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.



Tahapan Assesment dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan Psikologi Universitas Lambung Mangkurat. Video lengkap pelaksanaan Assesment dapat diunduh pada link berikut. <https://bit.ly/videoagenperubahan>

5. Pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada seluruh Agen Perubahan dengan tujuan meningkatkan kualitas kemampuan dan integritas individu Agen Perubahan sehingga mampu melaksanakan perannya dengan baik dalam percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah. Setelah dilakukan bimbingan teknis seluruh Agen Perubahan menyusun Rencana Aksi Perubahan yang akan di implementasikan di seluruh SKPD masing-masing Agen Perubahan.



6. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja

Menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Mengadakan sosialisasi Peraturan Bupati, internalisasi melalui pemasangan papan budaya malu di seluruh Perangkat Daerah, melaksanakan sosialisasi core values dan employer branding Bangsa Melayani Bangsa ke seluruh Perangkat Daerah agar dapat

di internalisasikan kepada seluruh ASN dan PTT di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

7. Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja

Pelaksanaan evaluasi pengembangan Budaya Kerja dilakukan setiap tahun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Pada Instansi Pemerintah.

8. Sosialisasi dan internalisasi 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi kepada seluruh SKPD

9. Pelaksanaan PMPRB kepada 40 SKPD

Berikut disajikan nilai hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terhadap 40 SKPD di Lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah.

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO	SKPD	NILAI PEMENUHAN (14,6)	NILAI REFORM (21,7)	NILAI TOTAL (36,30)	RANKING	PERSEN TASE %	KATEGORI
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.83	21.36	35.19	1	96.94	AA
2	Inspektorat Kabupaten	13.46	21.25	34.71	2	95.62	AA
3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	14.25	20.15	34.4	3	94.77	AA
4	Sekretariat Daerah	13.75	19.54	33.29	4	91.71	AA
5	Badan Kesatuan bangsa dan Politik	13.33	19.76	33.09	5	91.16	AA
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.6	18.91	30.51	6	84.05	A
7	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12.83	17.45	30.28	7	83.42	A
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.83	17.45	30.28	7	83.42	A



9	Kecamatan Bumi Makmur	12.83	17.45	30.28	7	83.42	A
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.26	17.93	30.19	10	83.17	A
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11.85	17.85	29.7	11	81.82	A
12	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	12.29	17.19	29.48	12	81.21	A
13	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	11.49	17.98	29.47	13	81.18	A
14	Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	11.37	16.87	28.24	14	77.80	BB
15	Dinas Pariwisata	9.74	18.42	28.16	15	77.58	BB
16	Kecamatan Takisung	12.31	15.49	27.8	16	76.58	BB
17	Dinas Kesehatan	9.97	17.47	27.44	17	75.59	BB
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	10.76	16.54	27.3	18	75.21	BB
19	Dinas Sosial	10.77	16.44	27.21	19	74.96	BB
20	Dinas Perhubungan	9.82	17.36	27.18	20	74.88	BB
21	Badan Pendapatan Daerah	9.9	16.76	26.66	21	73.44	BB
22	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	13.47	13.11	26.58	22	73.22	BB
23	Dinas Pendidikan	10.44	15.22	25.66	23	70.69	BB
24	RSUD H. BOEJASIN	10.12	15.09	25.21	24	69.45	B
25	Sekretariat DPRD	8.27	14.98	23.25	25	64.05	B
26	Kecamatan Panyipatan	11.12	12.1	23.22	26	63.97	B
27	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.46	11.69	22.15	27	61.02	B
28	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	9.36	12.56	21.92	28	60.39	B
29	Kecamatan Batu Ampar	9	12.16	21.16	29	58.29	CC

30	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	7.8	11.87	19.67	30	54.19	CC
31	Kecamatan Jorong	7.9	11.36	19.26	31	53.06	CC
32	Kecamatan Pelaihari	9.36	7.85	17.21	32	47.41	C
33	Kecamatan Bajuin	7.81	9.3	17.11	33	47.13	C
34	Kecamatan Kurau	8.08	8.69	16.77	34	46.20	C
35	Dinas Pemembudayaan Masyarakat dan Desa	6.02	10.2	16.22	35	44.68	C
36	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7.39	7.37	14.76	36	40.66	C
37	Kecamatan Tambang Ulang	5	9.26	14.26	37	39.28	C
38	Kecamatan Kintap	5.17	6.49	11.66	38	32.12	C
39	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	3.77	4.04	7.81	39	21.52	D
40	Kecamatan Bati Bati	1.72	5.7	7.42	40	20.44	D
41	Dinas Pertanian Hortikultura dan Perkebunan	4.47	2.69	7.16	41	19.72	D

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Organisasi Tahun 2021*

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk nilai Reformasi Birokrasi ada 28 SKPD dengan nilai di atas 60 **Kategori B dengan predikat Cukup Baik.**

Pada Tahun 2021 telah dilakukan PMPRB oleh Inspektorat dengan bantuan aplikasi PMPRB yang disediakan oleh Kemenpan dan RB sehingga memudahkan penilaian pelaksanaan RB seluruh SKPD

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Belum tertanamnya ke seluruh ASN budaya kerja organisasi yang berbudaya kinerja

- Kurangnya memahami dan kurangnya komitmen dari seluruh ASN terhadap penerapan Reformasi Birokrasi.
- Kurangnya peran Agen Perubahan sehingga belum bisa menjadi Role Model atau panutan dalam penerapan reformasi birokrasi di lingkungan pekerjaan sehari-hari.
- Kurangnya peran Tim pelaksana Reformasi Birokrasi dalam rangka internalisasi 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi.

Solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:

- Melibatkan seluruh aparatur Negara terutama Pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk lebih berkomitmen dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi terutama pada perubahan pola pikir (*Mind Set*) dan budaya dalam bekerja agar lebih berbudaya kinerja dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat karena inti dari perubahan adalah manusia itu sendiri dalam hal ini adalah aparatur Negara.
- Optimalisasi internalisasi seluruh program Reformasi Birokrasi sampai dengan level organisasi terendah
- Mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki untuk membangun Kabupaten Tanah Laut.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Pelaksanaan Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 21 tahun 2021 tentang pedoman pengembangan budaya kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Pelaksanaan Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 91 tahun 2021 tentang Pedoman penilaian kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Optimalisasi internalisasi seluruh program Reformasi Birokrasi sampai dengan level organisasi terendah
- Dilaksanakan kembali bimbingan teknis kepada seluruh Role Model dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tahun 2021, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan melalui Kegiatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan Anggaran sebesar Rp 56.090.560 dan terealisasi sebesar Rp 16.530.100 atau 29,47% dan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 2 Orang yaitu Kepala Bagian Organisasi dan Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Tabel Kegiatan Penunjang Kinerja Sub Kinerja dan Reformasi Birokrasi

KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	281.526.272	203.645.292	72,5
	56.090.560,00	16.530.100,00	29,47

SASARAN 3.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten

Indikator : Persentase SKPD dengan Nilai SAKIP Minimal BB

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
1	2	3	4	5	6
3.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	95	65	68,42

Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB terealisasi sebesar 65% (26 SKPD dari 40 SKPD) dari target 95% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 68,42%. Mengalami penurunan sebesar 27,5% jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yaitu 92,5% (37 SKPD dari 40 SKPD). Untuk realisasi tahun 2021, jika dibandingkan dengan Target akhir Renstra adalah sebesar 65% dengan target 100%. Jadi diharapkan di Tahun 2023 seluruh SKPD telah memiliki nilai SAKIP minimal BB karena RPJMD menargetkan nilai A (81) untuk nilai SAKIP Tahun 2023.

Beberapa hal yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam peningkatan SAKIP di tahun 2021 antara lain :

1. Revisi Renstra dan Pohon Kinerja seluruh SKPD menyelaraskan dengan RPJMD mulai dari eselon II, III dan IV agar Indikator Kinerja seluruh SKPD bersifat spesifik (*spesific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*achivable*), berorientansi hasil (*Result Oriented*), yang dapat dicapai dalam periode atau satuan waktu tertentu (*time-bond*) atau *SMART*.

2. Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD yang ditetapkan telah memuat penjabaran kinerja (*cascade down*) hingga level pelaksana.
3. Efektifitas program dan kegiatan melalui refocusing program kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah berorientasi pada *outcome* bukan sebatas *output*. Terdapat efektifitas program sebesar 30,95% dan kegiatan sebesar 21,78%. Perbandingan jumlah program dan kegiatan antara APBD Tahun 2021 dan RKPD Tahun 2022 sebagai berikut :

APBD TAHUN 2021	RKPD TAHUN 2022
Program 223	Program 154
Kegiatan 551	Kegiatan 431
Sub Kegiatan 1.385	Sub Kegiatan 1.222

Sumber: Bappeda Kabupaten Tanah Laut

4. Inspektorat Kabupaten melakukan reviu dan evaluasi SAKIP terhadap 40 SKPD dengan hasil sebagaimana tabel berikut :

JUMLAH SKPD	KATAGORI	PERSENTASE	INTERPRESTASI
9	A	22,5	Memuaskan
17	BB	42,5	Sangat Baik
10	B	25	Baik
3	CC	7,5	Cukup
1	C	2,5	Kurang

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di tahun 2021 terdapat 9 SKPD atau sebesar 22,5% dengan nilai SAKIP kategori A (memuaskan), 17 SKPD dengan nilai SAKIP BB (Sangat Baik), 10 SKPD dengan nilai SAKIP B (Baik), 3 SKPD dengan nilai SAKIP CC (Cukup) dan 1 SKPD dengan nilai SAKIP C (kurang). Berikut table data hasil evaluasi SAKIP seluruh SKPD Tahun 2021 masing-masing komponen.

Tabel 3.3.4
Rekapitulasi Nilasi SAKIP SKPD per komponen Tahun 2021 hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten

NO	ENTITAS AKUNTABILITAS (SKPD)	IRBAN PENGAMPU	NILAI KOMPONEN					Total Nilai	KATEGORI
			Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (25%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Internal (10%)	Pencapaian Kinerja (20%)		
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2	28,18	21,88	13,3	8,18	17,38	88,91	A
2	Inspektorat Kabupaten	3	26,62	21,57	13,37	8,14	17,85	87,55	A
3	Sekretariat Daerah	4	28,80	21,88	13,21	6,92	16,00	86,81	A
4	Badan Pendapatan Daerah	4	25,80	21,25	12,14	6,92	17,00	83,11	A
5	Dinas Kesehatan	2	29,75	23,13	10,52	5,89	12,28	81,57	A
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	4	28,35	21,88	10,49	5,99	14,00	80,70	A
7	Dinas Pariwisata	2	25,6	20,94	12,58	8,42	13,09	80,62	A
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	26,23	17,19	13,21	6,78	17,00	80,41	A
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	26,3	19,38	12,23	7,13	15,32	80,16	A
10	Sekretariat DPRD	2	26,93	19,38	10,61	6,55	14,44	77,89	BB
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	25,23	20,00	10,61	7,14	14,88	77,85	BB
12	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4	28,05	21,38	8,43	5,99	13,00	76,84	BB
13	Kecamatan Bajuin	1	28,95	22,19	10,88	3,04	11,75	76,80	BB
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	25,48	18,13	10,61	6,92	15,39	76,53	BB
15	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1	26,60	16,25	12,31	6,55	14,45	76,16	BB
16	Kecamatan Takisung	4	27,43	18,753	9,35	5,99	14,00	75,51	BB
17	Kecamatan Kurau	1	26,23	14,38	12,21	5,15	17,63	75,49	BB
18	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3	25,23	18,13	10,61	6,55	14,64	75,16	BB
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	25,18	19,69	10,42	5,90	13,88	75,06	BB
20	Kecamatan Jorong	1	23,89	21,25	10,52	4,77	14,38	74,78	BB
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	23,82	13,75	11,68	6,98	17,13	73,35	BB
22	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1	24,16	19,06	10,61	6,92	11,31	72,07	BB

23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	25,73	15,63	10,03	6,55	14,00	71,93	BB
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3	26,48	15	10,69	6,55	15	71,72	BB
25	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	27,55	20,31	10,79	5,85	7,08	71,58	BB
26	Dinas Perhubungan	1	28,65	20,94	9,45	2,61	8,64	70,29	BB
27	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3	26,32	18,44	9,61	4,64	10,32	69,33	B
28	Kecamatan Bumi Makmur	3	24,90	20,31	9,80	5,69	8,46	69,16	B
29	Kecamatan Bati-Bati	4	23,63	15,31	9,77	6,92	12,00	67,63	B
30	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1	24,15	18,19	10,61	4,89	14,40	67,23	B
31	Kecamatan Batu Ampar	3	24,54	15	9,62	5,26	11,96	66,38	B
32	Dinas Sosial	4	23,80	16,25	8,68	6,34	11,00	66,07	B
33	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	3	24,19	14,38	9,26	5,52	10,04	63,39	B
34	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	19,32	18,44	10,22	0,67	14,63	63,31	B
35	Kecamatan Pelaihari	3	20,87	13,75	9,97	5,11	12,88	62,56	B
36	Kecamatan Tambang Ulang	4	19,00	14,69	9,77	5,78	11,00	60,23	B
37	Kecamatan Kintap	2	19,82	15,31	8,29	0,89	12,13	56,44	CC
38	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	4	19,58	15,63	10,15	3,33	6,50	55,19	CC
39	Kecamatan Panyipatan	2	21,45	14,38	7,08	0,67	6,94	50,51	CC
40	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	15,1	15,94	4,97	0,67	5,25	41,93	C

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Beberapa hal yang menjadi hambatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam peningkatan SAKIP antara lain:

1. Kurangnya komitmen Pimpinan dan seluruh Aparatur SKPD dalam membangun sistem akuntabilitas kinerja.
2. Sasaran kinerja SKPD belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar dalam pemilihan program dan kegiatan sehingga masih terdapat program dan kegiatan yang kurang efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

3. Kualitas pengukuran kinerja SKPD belum sepenuhnya berorientasi kepada pencapaian kinerja program, masih ada pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
4. Masih kurangnya kualitas laporan kinerja SKPD, dimana masih banyak laporan kinerja yang mengungkapkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum sepenuhnya menyajikan analisis pencapaian kinerja program serta belum mampu menyajikan analisis efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja.
5. Evaluasi atas program belum sepenuhnya mampu menampilkan efektivitas program yang diemban oleh setiap SKPD disebabkan belum berorientasi kepada kinerja program, dan hanya pelaksanaan program atau kegiatan serta penyerapan anggaran.
6. Masih kurangnya capaian kinerja Kabupaten dan SKPD dikarenakan masih kurangnya kualitas pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja secara triwulan dan evaluasi internal seluruh SKPD.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka peningkatan nilai SAKIP adalah :

1. Internalisasi BerAKhlak kepada seluruh Aparatur Sipil Negara agar bekerja lebih berorientasi kepada Capaian Kinerja yang menunjang Visi Misi Kabupaten.
2. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran kinerja (*Cascade Down*), mulai dari level Kepala SKPD sampai dengan indikator kinerja level eselon III, eselon IV dan individu pegawai.
3. Melakukan reviu terhadap program dan kegiatan serta komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran. Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian strategis pembangunan dan pemilihan program/kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran;
4. Meningkatkan pemahaman dan keterlibatan Pimpinan SKPD terhadap penerapan manajemen kinerja organisasi sehingga mampu meningkatkan pencapaian kinerjanya;
5. Memastikan kegiatan yang menunjang Indikator Kinerja Utama Kabupaten mendapatkan anggaran yang sesuai dengan porsinya, sehingga dapat mencapai target indikatornya.

6. Meningkatkan kualitas pengukuran terhadap outcome dan output secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja (tujuan dan sasaran) organisasi;
7. Meningkatkan kualitas indikator kinerja sasaran strategis pada SKPD sehingga lebih berorientasi hasil dan relevan dengan sasaran yang dicapai;
8. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, informasi kinerja hingga pelaporan agar mampu meningkatkan penerapan manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Pimpinan, sehingga mampu meningkatkan efektivitas program kerja organisasi dalam pencapaian kinerjanya;
9. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja SKPD yang menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran;
10. Mendorong APIP untuk meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap SKPD, sehingga menciptakan pemahaman yang merata antar SKPD, serta mendorong secara khusus kepada SKPD pengampu bidang perencanaan dan para penanggung jawab program untuk terus meningkatkan kualitas evaluasi program untuk mewujudkan efektivitas pencapaian sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran;

Rencana Aksi yang akan dilakukan yaitu:

1. Implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk memberikan reward dan punishment kepada SKPD sesuai dengan nilai beberapa indikator salah satunya adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperoleh.
2. Mengintegrasikan seluruh sistem pengukuran kinerja individu dan organisasi.
3. Dilaksanakan workshop dalam rangka peningkatan kompetensi evaluator SAKIP

Tahun 2021, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kegiatan penataan organisasi sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi Birokrasi dengan Anggaran sebesar Rp 281.526.272 dan terealisasi sebesar Rp 203.645.292 atau 72,5% dan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 3 Orang yaitu Kepala Bagian Organisasi, Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi dan Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja.



Dokumentasi Kegiatan Asistensi SAKIP sekaligus reviu SAKIP SKPD

SASARAN 3.4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah

Indikator 1 : Nilai SAKIP Sekretariat Daerah

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
1	2	3	4	5	6
3.4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	82	86,81	105,86%

Indikator Sasaran ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023. Dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah ini selaras dalam mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tanah Laut.

Disamping itu dalam melaksanakan IKU di atas Sekretariat Daerah telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja 2022. Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, mempunyai tugas :

- Menyusun rencana dan menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengadakan rapat koordinasi antar anggota Tim dalam merumuskan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten

Tanah Laut Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

- c. Menelaah dan memahami bahan yang telah disiapkan juga menganalisa data dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- d. Mengoreksi dalam penyelesaian pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- e. Mendiskusikan dengan Bagian-Bagian sehubungan pencarian data tambahan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut; dan
- f. Mengadakan perbaikan atau perubahan sehubungan penetapan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Bahwa Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut tersebut melibatkan Pimpinan dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Sekretaris Daerah sebagai Pengarah
- 2) Asisten Bidang Administrasi Umum sebagai Wakil Ketua

Dalam proses penyusunan Laporan Kinerja pimpinan selalu terlibat dan memberikan arahan terkait bahan atau data Laporan Kinerja (LKj) serta dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Laporan Kinerja selalu melibatkan pimpinan.

Berdasarkan surat dari Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor: 700/1202//LHE-Insp/2021, Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) Tahun 2020, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 memperoleh nilai sebesar **86,81** dengan kategori **A (Memuaskan)**, sedangkan hasil evaluasi nilai SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2019 yang dievaluasi pada Tahun 2020 memperoleh nilai sebesar **84,35** dengan kategori **A (Memuaskan)**. Hasil penilaian SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2021 mengalami

peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 2,8%, dan peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Hasil Penilaian SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2020 dan Tahun 2021

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
			Y/T	NILAI		Y/T	NILAI
A	PERENCANAAN KINERJA (30%)	30.00	100%	30.00	30.00	96.00%	28.80
I	Perencanaan Strategis (10%)	10.00	100%	10.00	10.00	100.00%	10.00
a	Pemenuhan Renstra (2%)	2.00	100%	2.00	2.00	100.00%	2.00
b	Kualitas Renstra (5%)	5.00	100%	5.00	5.00	100.00%	5.00
c	Implementasi Renstra (3%)	3.00	100%	3.00	3.00	100.00%	3.00
II	Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)	20.00	100%	20.00	20.00	94.00%	18.80
a	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%)	4.00	100%	4.00	4.00	100.00%	4.00
b	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%)	10.00	100%	10.00	10.00	100.00%	10.00
c	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)	6.00	100%	6.00	6.00	80.00%	4.80
B	PENGUKURAN KINERJA (25%)	25.00	93.75%	23.44	25.00	87.50%	21.88
I	Pemenuhan Pengukuran (12.5%)	5.00	100%	5.00	5.00	100.00%	5.00
II	Kualitas Pengukuran (12.5%)	12.50	100%	12.50	12.50	97.50%	12.19
III	Implementasi Pengukuran (7.5%)	7.50	79.17%	5.94	7.50	62.50%	4.69
C	PELAPORAN KINERJA (15%)	15.00	73.71	11.06	15.00	88.07%	13.21
I	Pemenuhan Pelaporan (3%)	3.00	100%	3.00	3.00	100.00%	3.00
II	Penyajian Informasi Kinerja (7.5%)	7.50	71.43%	5.36	7.50	88.14%	6.61
III	Pemanfaatan Informasi Kinerja (4.5%)	4.50	60.00	2.70	4.50	80.00%	3.60
D	EVALUASI INTERNAL (10%)	10.00	67%	6.70	10.00	69.22%	6.92
I	Pemenuhan Evaluasi (2%)	2.00	100%	2.00	2.00	89.00%	1.78
II	Kualitas Evaluasi (5%)	5.00	64%	3.20	5.00	65.33%	3.27
III	Pemanfaatan Evaluasi (3%)	3.00	50%	1.50	3.00	62.50%	1.88
E	PENCAPAIAN SASARAN/ KINERJA ORGANISASI (20%)	20.00	65.77%	13.15	20.00	76.19%	16.00
-	Kinerja yang Dilaporkan (<i>Output</i>) (7.5%)	7.50	66.67%	5.00	7.50	88.89%	8.00
-	Kinerja yang Dilaporkan (<i>Outcome</i>) (12.5%)	12.50	163.10%	8.15	12.50	66.67%	8.00
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100.00	84.35%	84.35	100.00	86.81%	86.81

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021*

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pimpinan rapat menyampaikan hasil evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Tahun 2020 dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, dari hasil evaluasi tersebut ada beberapa catatan rekomendasi pada Komponen Evaluasi Internal yang harus ditindaklanjuti oleh Bagian pengampu IKU nya untuk peningkatan kualitas evaluasi internal.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Kurang optimalnya komitmen dan keterlibatan pimpinan dan sebagian pejabat struktural dalam kegiatan penyusunan Akuntabilitas Kinerja
- Kurangnya kualitas evaluasi kinerja internal
- Kurangnya kompetensi aparatur penyusun laporan terhadap kemampuan menganalisa

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melibatkan pimpinan dalam monitoring dan evaluasi penyusunan laporan kinerja
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi per Triwulan terhadap laporan kinerja Bagian – Bagian lingkup Sekretariat Daerah
- Peningkatan kompetensi aparatur dalam hal menganalisa masalah terkait penyusunan laporan kinerja

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Capaian kinerja lebih ditingkatkan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang bermanfaat
- Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap dokumen Perjanjian Kinerja yang dapat dijadikan dasar untuk memberikan *reward* dan *punishment*
- Peningkatan kompetensi aparatur penyusun laporan kinerja melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis serta FGD



Dokumentasi Kegiatan Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah

Indikator 2 : Nilai SPIP Sekretariat Daerah

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
1	2	3	4	5	6
3.4	Meningkatnya Akuntabilitas Sekretariat Daerah	Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3.5	Tahap Baseline SPIP	Tahap Baseline SPIP

Sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sekretariat Daerah telah menerapkan Peraturan Pemerintah tersebut dengan melaksanakan 5 (lima) Unsur SPIP yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan organisasi agar menimbulkan perilaku positif untuk mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

2. Penilaian Risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi dengan melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan ini membantu memastikan arahan pimpinan sudah dilaksanakan atau belum, dan kegiatan ini harus efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi yang relevan dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan, informasi disajikan dalam bentuk komunikasi yang efektif dan saran dengan tepat waktu sehingga pimpinan dapat melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan dapat segera ditindaklanjuti.

Pengendalian intern Lingkup Sekretariat Daerah sudah terlaksana dengan tertib dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan terbukti dengan hasil penilaian Maturitas SPIP Sekretariat Daerah dari Itwil Kabupaten Tanah Laut dengan nilai 3,777, kemudian setelah dilakukan penilaian *Quality Assurance* dari Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Tanah Laut memperoleh nilai 3,16 dengan tingkat Maturitas level 3 sedangkan untuk Tahun 2021 masih dalam tahapan Kertas Kerja Penilaian *Baseline* Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Dalam melaksanakan Indikator ini Sekretariat Daerah telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 20/Kep-Sekda/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, dengan tugas sebagai berikut :

- 1) Mengatur agenda kegiatan Satgas, menyempurnakan dan menjabarkannya kedalam kegiatan detail;
- 2) Menghadiri rapat dan pertemuan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- 3) Melakukan Konsultasi dengan Inspektorat;
- 4) Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam agenda kegiatan sesuai jadwal;
- 5) Membantu Ketua Satgas dalam koodinasi penyusunan rencana kerja;
- 6) Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
- 7) Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 8) Meningkatkan pemahaman tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- 9) Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Bagian/Sub Bagian masing-masing ;
- 10) Menyusun instrument penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Bagian/Sub Bagian masing-masing; dan
- 11) Melakukan survey dan evaluasi penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Bahwa Penyusunan Laporan SPIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut tersebut melibatkan Pimpinan dengan susunan sebagai berikut :

- 3) Sekretaris Daerah sebagai Penanggungjawab
- 4) Asisten Bidang Administrasi Umum sebagai Ketua

Dalam proses penyusunan Laporan SPIP Sekretariat Daerah pimpinan selalu terlibat dan memberikan arahan terkait bahan atau data Laporan Sekretariat Daerah serta dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Laporan SPIP Sekretariat Daerah selalu melibatkan pimpinan.

Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut melakukan Rencana Tindak Pengendalian terhadap analisa risiko pada Bagian-Bagian Lingkup Sekretariat Daerah dengan pendampingan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan surat dari Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor : 050/98 - Insp/2021, Tanggal 23 November 2021, Perihal *Baseline* Maturitas Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), bahwa Sekretariat Daerah menjadi salah satu SKPD sampel dengan mengampu minimal 2 (dua) sasaran strategis RPJMD. Dan telah ditindaklanjuti dengan mengisi Kertas Kerja Penilaian *Baseline* Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pimpinan rapat menyampaikan hasil evaluasi Manajemen Risiko Sekretariat Daerah Tahun 2021 dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, dari hasil evaluasi tersebut ada beberapa catatan rekomendasi pada *Pernyataan Risiko, Dampak pada Pencapaian Tujuan dan pada Pengendalian Risiko* yang harus ditindaklanjuti oleh Bagian-Bagian sebagai pengampu Risiko dari pelaksanaan kegiatannya.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Kompetensi Sumber Daya Manusia belum memadai
- Kurangnya kepatuhan terhadap aturan
- Belum maksimalnya kegiatan evaluasi dan dokumentasi terhadap pelaksanaan unsur-unsur SPIP
- Adanya kegiatan yang belum didukung oleh SOP

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Meningkatkan pemahaman tentang unsur-unsur SPIP
- Adanya sanksi terhadap pelanggaran kepatuhan
- Melakukan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan
- Adanya SOP untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Menerbitkan surat edaran tentang sanksi terhadap pelanggaran kepatuhan
- Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi
- SOP Kegiatan selaras dengan Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah



Dokumentasi Kegiatan Evaluasi SPIP Sekretariat Daerah

SASARAN 3.4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Daerah

Indikator 1 : Nilai RB Sekretariat Daerah

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
1	2	3	4	5	6
3.4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	90	91.71	101,9%

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan Pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang menegaskan akan pentingnya penerapan *clean governance* yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dengan program utama yang dilakukan pemerintah daerah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi.

Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegrasi tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Adapun prinsip-prinsip *good governance* adalah :

1. Partisipasi masyarakat, yaitu semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak.
2. Tegaknya supremasi hukum, yaitu kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3. Transparansi, yaitu dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti.
4. Peduli pada stakeholder yaitu lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi pada konsensus yaitu tata pemerintah yang baik dapat menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25/KEP-SEKDA/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka Tim Pelaksana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu ;

1. Tim Sekretariat, mempunyai tugas ;
 - a. Merumuskan Rencana Kerja/Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 - b. Memberikan arahan/sosialisasi mengenai program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 - c. Melakukan Pengawasan terhadap Proses Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 - d. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 - e. Mengkoordinasikan Tugas Kelompok Kerja Area Perubahan I sampai dengan VIII;
 - f. Membuat Laporan atas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
2. Tim Kelompok Kerja, mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan bukti-bukti (*evidence*) dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* untuk mendukung Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 - b. Mengisi Lembar Kerja (LKE) Reformasi Birokrasi untuk masing-masing area perubahan;

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor : 700/148/Insp/EV-RB/Irbn-IV/2021 tanggal 5 Juli 2021, hal Laporan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 dimana Sekretariat Daerah kabupaten Tanah Laut mendapat nilai 91,71 dengan rincian sebagai berikut ;

Tabel Penilaian Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2020 dan Tahun 2021

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	HASIL PENILAIAN TAHUN 2020		HASIL PENILAIAN TAHUN 2021	
		Nilai	%	Nilai	%
A	Komponen Pengungkit/Proses				
1	Manajemen Perubahan (2%)	2	100	2	100
2	Deregulasi Kebijakan (1%)	1	100	1	100
3	Penataan dan Penguatan Organisasi (2%)	2	100	2	100
4	Penataa Tatalaksana (1%)	0.72	72	0.97	97
5	Penataan Manajemen SDM (1.4%)	1.35	96	1.35	96.43
6	Penguatan Akuntabilitas (2.5%)	2.24	98	2.45	98
7	Penguatan Pengawasan (2.2%)	2.03	92	2.03	92.27
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2.5%)	1.78	71	1.95	78
	Reform (21.70)				
1	Manajemen Perubahan (3%)			8.17	72.33
2	Deregulasi Kebijakan (2%)			22	100
3	Penataan Organisasi (1.5%)			1.5	100
4	Penataa Tatalaksana (3.75%)			3.42	91.2
5	Penataan Manajemen SDM (2%)			1	50
6	Penguatan Akuntabilitas (3.75%)			3.75	100
7	Penguatan Pengawasan (1.95%)			1.95	1.591
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3.75%)			3.75	100
TOTAL		23.84	13.33	33.29	91.71

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Umum Tahun 2021*

Berdasarkan hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupate Tanah Laut Tahun 2020 menunjukkan hasil dengan nilai (91,24 %), sedangkan hasil evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2021 dapat diperoleh nilai 91,71 %, dengan peningkatan 0,47 persen dari tahun sebelumnya,.

Adapun peningkatan pemenuhan dokumen tersebut pada area Penataan Tata Taksana, Penataan Manajemen, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Penerapan tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan;
- Masih adanya dokumen-dokumen pada Area Perubahan Reformasi Birokrasi yang belum terpenuhi
- Masih rendahnya penerapan budaya kerja untuk kepemimpinan dan manajemen, Pola Pikir dan Cara Kerja serta Perilaku Bekerja

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Penerapan tata kelola pemerintahan secara efektif
- Dokumen-dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi dipenuhi sesuai dengan Area Perubahannya.
- Penerapan Budaya Kerja untuk kepemimpinan dan manajemen, Pola Pikir dan Cara Kerja serta Perilaku Bekerja sesuai dengan Kategori Bagus

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut telah di sosialisasikan dan kedepannya terus dilakukan secara berkesinambungan
- Pimpinan berperan sebagai *role model* bagi Jajarannya
- Peran Assesor dan Agen Perubahan yang aktif dan inovatif dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- Memerintahkan Tim Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi untuk Koordinasi dan konsultasi secara intens dengan Tim Pembina Reformasi Birokrasi Kabupaten.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Reformasi Birokrasi dan pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara yang mampu memberikan pelayanan prima kepada

masyarakat maka berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, maka ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut menerapkan Nilai Budaya Kerja dengan menerapkan 10 (sepuluh) Budaya Malu yaitu ;

1. Malu datang terlambat dan pulang lebih awal;
2. Malu tidak mengikuti apel / upacara;
3. Malu sering izin tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas;
4. Malu sering meninggalkan kantor di jam kerja tanpa keterangan;
5. Malu tidak bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan dan tidak mencapai target;
6. Malu menerima apalagi meminta gratifikasi dan korupsi, kolusi, dan nepotisme
7. Malu berseragam tidak sesuai aturan;
8. Malu tidak bertatakrama dan sopan santun;
9. Malu tidak ikut memelihara lingkungan kantor; dan
10. Malu hanya menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban.

Dengan menerapkan nilai-nilai budaya kerja serta 10 (sepuluh) budaya malu, maka ASN Sekretariat Daerah diharapkan menjadi ASN yang “BAIMAN,BAUNTUNG,BATUAH”.

1. Istilah Baiman, Bauntung, dan Batuah merupakan gambaran tentang konsepsi manusia yang diharapkan oleh masyarakat Banjar, yang bermakna:
 - a. Baiman, maknannya adalah orang yang beriman dan bertaqwa dalam perilaku, yakni percaya dan yakin kepada Rasul, memegang dengan kuat iman sebagai pegangan hidup, dan percaya bahwa segala perbuatan mendapatkan balasan dari Tuhan. ASN harus memiliki iman yang kuat karena iman menjadi fondasi bagi kehidupan orang Banjar;
 - b. Bauntung, maknanya adalah bernasib baik dan bermanfaat untuk orang lain. ASN harus bekerja dengan niat mencari berkah, berlandaskan kehalalan dengan proses memudahkan, cepat, dan lancar. Mengharapkan hasil yang bagus, baik, bermanfaat dan bernilai positif untuk kebaikan diri sendiri, orang lain dan masyarakat menuju sukses di dunia dan di akhirat; dan
 - c. Batuah, maknannya adalah menjadi manusia yang mempunyai harkat dan martabat bahkan dalam taraf tertentu bisa menjadi karamah.

ASN harus memiliki martabat yang mulia baik di dunia maupun di akhirat. Menjalani pekerjaan dengan mempunyai kelebihan berupa bakat, keistimewaan atau keahlian khusus yang tidak dimiliki orang lain yang berbasis iman, digunakan untuk menolong dan menjadi berkah bagi orang lain, sehingga disukai bahkan dicintai orang, karena menjadi contoh yang baik, patut ditiru kelakuaanya, terhormat hidupnya di masyarakat, memiliki harkat dan martabat, seperti menghias diri dengan akhlak mulia.

Motto Budaya Kerja Pemerintah Daerah adalah “ KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKLAS’.

Motto budaya kerja adalah sebagai berikut:

- a. Kerja Keras adalah merupakan suatu pekerjaan yang dikerjakan secara sungguh tanpa mengenal Lelah, atau berhenti sebelum mencapai target yang diinginkan dengan mengutamakan kepuasan hati pada setiap aktivitas yang dilakukan;
- b. Kerja Cerdas adalah berkerja sebaik mungkin dengan hasil yang lebih besar untuk usaha yang sama atau hasil yang sama dengan usaha yang sedikit dengan menggunakan apa yang dimaksud dengan daya ungkit. Pengungkit disini merupakan alat yang memungkinkan kita bisa menghasilkan kerja dengan usaha yang sekecil mungkin dengan prinsip efektif dan efesien;
- c. Kerja Tuntas adalah bahwa di dalam bekerja kita mampu mengorganisasikan bagian usaha secara terpadu dari awal sampai akhir untuk dapat menghasilkan usaha sampai selesai dengan hasil maksimal;
- d. Kerja Berkualitas adalah bekerja dengan hasil yang hasil semaksimal mungkin, bermutu baik sesuai tingkat, baik, berupa taraf atau derajat sesuatu; dan
- e. Kerja Iklas adalah dalam bekerja selalu dengan niat perbuatan/bekerja amal saleh secara tulus ikhlas tanpa pamrih manusia, melaikan hanya mengharapakan ridho Allah SWT semata.



Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi Oleh KEMENPAN RB Tahun 2021

Indikator 2 : Nilai ZI Sekretariat Daerah

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor : 700/186/LHE-ZI/Irbn-4/2021 tanggal 30 Juli 2021 hal Laporan Hasil Penilaian Zona Integritas Tahun 2021 bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan nilai 84,64 seperti pada table dibawah ini ;

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
1	2	3	4	5	6
3.4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai ZI Sekretariat Daerah	83	87.45	105,3%

Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarlan hasil Penilaian yang dilakukan oleh TPI pada Aplikasi PMPZI yang tertuang dalam Surat Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Nomor : 700/186/LHE-ZI/Irbn-4/2021 tanggal 30 Juli 2021 diperoleh nilai 87,45 dengan rincian sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel Hasil Penilaian Zona Integritas pada Sekretariat Daerah Tahun 2021

NO	URAIAN	Hasil Penilaian 2020	%	Hasil Penilaian 2021	%
A	KOMPONEN PENGUNGKIT (60%)	53.29	88.81	53.49	89.15
1	Manjemen Perubahan (8%)	8	100	5	62.5
2	Penataan Tata Laksana (7%)	5.36	76.57	5.78	82.57
3	Penataan Sistem Manajemen SDM (10%)	8.80	88	9.30	93
	Penguatan Akuntabilitas (10%)	10	100	10.0	100
	Penguatan Pengawasan (15%)	12.13	80.86	13.81	92
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (10%)	9	90	9.60	96
B	UNSUR INDIKATOR HASIL (40%)	31.35	78.375	33.96	84.9
1	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (20%)	14.20	71	14.66	73.3
1.1	Nilai Survey Persepsi Korupsi (<i>Survey External</i>) (15%)	13.20	88	14.66	97.73
1.2	Persentase Temuan hasil pemeriksaan (Internal dan Eksternal) yang di tindaklanjuti (5%)	1	20	0.0	0.0
2	Kualitas Pelayanan Publik (20%)	17.15	85.75	19.30	96.5
2.1	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (<i>Survey Eksternal</i>) (20%)			19.30	96.5
TOTAL PENILAIAN		84.64		87.45	

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Umum Tahun 2021*

Pelaksanaan Zona Integritas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Penilaian Mandiri pada Tahun 2020 dengan nilai 84,64 sedangkan pada Tahun 2021 87,45 atau meningkat sebesar 2,81% dimana peningkatan tersebut pada area ;

1. Penataan tatalaksana
2. Penataan Sitem Manajemen
3. Penguatan Pengawasan
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
5. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survey External)

Hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas dan Unit Penggerak Integritas (UPI pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut akan dijadikan bahan evaluasi atas Pelaksanaan Zona Integritas, kemudian hasil tersebut juga untuk ;

- a. Memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian zona integritas di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- b. Memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil penilaian mandiri zona integritas di lingkungan internal periode sebelumnya
- c. Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian zona integritas di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

Dalam melaksanakan Indikator Zona Integritas tersebut di atas ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

- a. Kompetensi Sumber Daya Manusia kurang memadai
- b. Lingkungan kerja belum sepenuhnya menunjang pelaksanaan Zona Integritas
- c. Kurangnya Sosialisasi kepada seluruh PNS dan PTT Sekretariat Daerah bahwa Sekretariat Daerah termasuk menjadi SKPD yang dicanangkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi
- d. Belum pahamnya aparatur Sekretariat Daerah tentang program Zona Integritas itu sendiri.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam memahami komponen area perubahan Zona Integritas
- Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk menunjang pelaksanaan Zona Integritas
- Meningkatkan Sosialisasi Pelaksanaan Zona Integritas kepada seluruh ASN Sekretariat Daerah secara berkelanjutan.
- Melakukan evaluasi dan monitoring progres pemenuhan dokumen LKE Zona Integritas

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Monev dari Tim Pembangunan Zona Integritas dan Tim Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dan pimpinan harus berperan aktif dalam melaksanakan monev
- Manajemen media sebagai sarana informasi dan komunikasi bagi masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik ([website setda.tanahlautkab.go.id](http://website.setda.tanahlautkab.go.id), [Facebook @Prokopim Kab. Tanah Laut](https://www.facebook.com/ProkopimKabTanahLaut) dan [Instagram @prokopimtala](https://www.instagram.com/prokopimtala), ukpbj.tanahlautkab.go.id, lpse.tanahlautkab.go.id).
- Memerintahkan Tim Penyusunan Laporan Zona Integritas untuk melakukan konsultasi dan koordinasi ke Tim Zona Integritas Kabupaten
- Meningkatkan koordinasi dengan Tim Pelaksana Pengembangan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah.



*Dokumentasi Kegiatan Evaluasi Zona Integritas Sekretariat Daerah Oleh
KEMENPAN RB Tahun 2021*

SASARAN 4 Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan

Indikator : Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Utama Eselon II yang melekat pada Bagian Perekonomian Adm Pembangunan dan Sumber Daya Alam adalah Presentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang diterapkan. Pada Tahun 2021, semua kegiatan – kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan telah dilaksanakan 100%. Kebijakan yang telah ditindaklanjuti tersebut ada 5 yaitu:

- 1) Pencairan tahap ketiga dana investasi daerah pada program Gapura Karomah sebesar 15 Milyar Rupiah untuk disalurkan kepada para pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 2) Pengembalian dana investasi daerah tahap pertama yang akan jatuh tempo dan penyelesaian debitur Program Gapura Karomah yang bermasalah (macet);
- 3) Tindak lanjut Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan investasi Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
- 4) Penertiban jalur distribusi Gas LPG 3 Kg Bersubsidi; dan
- 5) Menjaga stabilitas harga bahan pokok dan penting bagi masyarakat dalam rangka pengendalian inflasi.

Untuk melaksanakan penerapan kebijakan tersebut, adapun tahapan-tahapan kegiatan yang telah dilakukan di Bagian Perekonomian Adm Pembangunan dan Sumber Daya Alam yaitu :

- 1) Pencairan tahap ketiga dana investasi daerah pada program Gapura Karomah sebesar 15 Milyar Rupiah untuk disalurkan kepada para pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka langkah --langkah kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :
 - a) Melaksanakan rapat – rapat koordinasi dan menyusun tahapan administrasi yang diperlukan dalam rangka pencairan dana ke PT. BPR Tala selaku pelaksana Program Gapura Karomah.

- b) Menyusun Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/629-KUM/2021 tentang Pelaksanaan Realisasi Investasi Daerah berupa Penempatan Penyaluran Dana Investasi kepada Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.
 - c) Menyusun kajian mitigasi risiko terhadap 40% dana investasi daerah yang dikelola oleh BPR dalam rangka pembiayaan program Gapura Karomah.
- 2) Pengembalian dana investasi daerah tahap pertama yang akan jatuh tempo dan penyelesaian debitur Program Gapura Karomah yang bermasalah (macet), maka langkah --langkah kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:
- a) Melakukan rapat koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Bank Penyalur dalam hal ini PT. BPR Tala terkait besaran jumlah dan jatuh tempo pengembalian dana investasi daerah tahap pertama;
 - b) Menindaklanjuti permasalahan terkait debitur Program Gapura Karomah yang macet dengan melakukan rapat koordinasi secara bekal dengan Tim Teknis yang ada di masing – masing SKPD teknis;
 - c) Melaksanakan FGD dan evaluasi terkait pengembalian dana investasi daerah yang masih tertunda karena adanya debitur yang belum menyelesaikan pengembalian (macet).
 - d) Membuat pertimbangan dan telaahan tentang proses pengembalian dana investasi yang masih kurang dan tindak lanjut terhadap kekurangan pengembalian dana investasi.
- 3) Tindak lanjut Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan investasi Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, maka langkah - langkah kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :
- a) Melakukan rapat – rapat koordinasi dengan pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan untuk dapat memberikan masukan yang positif dan gambaran bisnis kepada pihak legislatif.
 - b) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak OJK Regional 9 yang menjadi regulator perbankan di Indonesia;
 - c) Mendampingi pihak legislatif melakukan kunjungan dalam rangka konsultasi dan kaji banding dalam rangka Penambahan investasi Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
- 4) Penertiban jalur distribusi Gas LPG 3 Kg Bersubsidi, maka langkah - langkah kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a) Membentuk tim pengawasan distribusi Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kabupaten Tanah Laut melalui keputusan Bupati Tanah Laut;
 - b) Melakukan rapat koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan PT. Pertamina dan para Agen Penyalur Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kabupaten Tanah Laut.
 - c) Membuat draft rancangan Peraturan Bupati tentang pengendalian distribusi Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kabupaten Tanah Laut;
 - d) Bersama – sama dengan anggota Tim pengawasan distribusi Gas LPG 3 Kg Bersubsidi melakukan monitoring dan penindakan terhadap penyelewengan distribusi Gas bersubsidi;
 - e) Mengeluarkan Surat Edaran Bupati tentang larangan bagi para PNS Kabupaten Tanah Laut untuk menggunakan Gas LPG 3 Kg Bersubsidi;
 - f) Melakukan penyusunan data calon pengguna Gas LPG 3 Kg Bersubsidi yang berdasarkan data usulan dari Desa dan Kelurahan;
 - g) Melakukan kerjasama dengan pihak Bank Kalsel dalam rangka penerapan Kartu kendali yang dapat digunakan untuk membeli Gas Bersubsidi dengan transaksi secara digital.
- 5) Menjaga stabilitas harga bahan pokok dan penting bagi masyarakat dalam rangka pengendalian inflasi, langkah - langkah kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:
- a) Melakukan rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah setiap akhir semester dan pada saat tertentu yang diperlukan untuk stabilisasi harga bahan pokok;
 - b) Melakukan monitoring ketersediaan bahan pokok di pasar oleh Pimpinan Daerah dan Forkopimda untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan monitoring harga pasar;
 - c) Melakukan koordinasi dengan dinas teknis lingkup pertanian, peternakan dan ketahanan pangan terkait ketersediaan dan produksi pangan daerah

Secara keseluruhan, semua kebijakan dibidang Perekonomian yang dikeluarkan telah ditindaklanjuti dengan tujuan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Belum optimalnya monitoring dalam rangka pembinaan terhadap pelaku usaha mikro penerima program Gapura Karomah oleh SKPD teknis khususnya debitur yang mengalami kesulitan perekonomian karena pandemi sehingga pengembalian pinjaman banyak yang macet.
- Optimalisasi penyaluran kredit program Gapura Karomah dalam rangka pemulihan perekonomian tidak maksimal karena masih adanya Peraturan Bupati nomor 44 Tahun 2020 yang mengubah porsi penyaluran menjadi 40 : 60.
- Belum adanya kesamaan perspektif antara pihak eksekutif dan legislatif terhadap rancangan peraturan daerah tentang penambahan investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Meningkatkan koordinasi antar SKPD teknis yang membidangi pembinaan usaha mikro agar melakukan penyaringan lebih intens terhadap pelaku usaha yang mengajukan pinjaman program gapura karomah.
- Memerintahkan kepada SKPD Teknis yang terlibat dalam pembinaan usaha mikro dan bermasalah dalam pengembalian dana tersebut diwajibkan membantu pihak BPR dalam melakukan penagihan
- Melaksanakan FGD yang melibatkan *stakeholder* terkait untuk membahas isu – isu strategis pengembangan BUMD

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Melakukan kajian tentang dampak program Gapura Karomah terhadap kemajuan pelaku usaha mikro
- Membentuk forum komunikasi para pimpinan BUMD
- Rapat koordinasi berkala tentang perkembangan pemanfaatan program pembiayaan bagi pelaku usaha mikro
- Monitoring dan evaluasi secara berkala



Dokumentasi Kegiatan Rakor GAPURA KAROMAH Tahun 2021



Dokumentasi Kegiatan Rakor TPID Tahun 2021

2.2 Eselon II (Asisten Sekretaris Daerah)

1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat.

Dalam rangka mewujudkan capaian target kinerja jangka menengah dari hasil capaian kinerja Kepala Bagian yang berada dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, maka ditetapkanlah Perjanjian Kinerja sebagaimana tersebut di bawah ini :

Perjanjian Kinerja Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan Target dan Realisasi Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	CAPAIAN 2021
1	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Kinerja di Bidang Pemerintahan	100%	158.5%
		Persentase Capaian Kinerja di Bidang Hukum	100%	100%
		Persentase Capaian Kinerja di Bidang Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	100%	98.5%

SASARAN 1 Meningkatkan Capaian Kinerja di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat

Indikator 1 : Persentase Capaian Kinerja di Bidang Pemerintahan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	CAPAIAN 2021
1	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Kinerja di Bidang Pemerintahan	100%	158.5%

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan perumusan kebijakan bidang pemerintahan, melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan urusan umum pemerintahan dan urusan Pemerintahan Daerah serta mengoordinasikan kebijakan di Bidang Pemerintahan dengan instansi vertikal. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kebijakan di

Bidang Pemerintahan. Untuk Tahun 2021 target indikator sasaran ini adalah 100% dan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerjanya 158.5%.

Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemerintahan yang di fasilitasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Administrasi Pemerintahan	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian Bidang Administrasi Pemerintahan
2	Kerjasama dan Otonomi Daerah	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian Bidang Kerjasama dan Otonomi Daerah
3	Administrasi Kewilayahan	Rumusan dan Pengendalian Bidang Kewilayahan

Indikator 2 : Persentase Capaian Kinerja di Bidang Hukum

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	CAPAIAN 2021
1	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Kinerja di Bidang Hukum	100%	100%

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan mengevaluasi perumusan produk hukum dan Daerah serta mengkoordinasikan kebijakan di Bidang Hukum dengan instansi vertikal. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kebijakan di Bidang Hukum. Untuk Tahun 2021 target indikator sasaran ini adalah 100% dan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerjanya 100%.

Pelaksanaan kebijakan di Bidang Administrasi Hukum yang di fasilitasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Pembentukan Produk Hukum Pengaturan	1. Rumusan pra rancangan dan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati 2. Rumusan kebijakan dan pengendalian pembentukan prodeuk hukum pengaturan
2	Bantuan Hukum dan HAM	1. Rumusan kebijakan dan pengendalian bantuan hukum dan pemantauan HAM 2. Rumusan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan bantuan hokum dan HAM
3	Pembentukan Produk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum	1. Rumusan kebijakan dan pengendalian produk hukum penetapan, dokumentasi dan informasi hukum 2. Rumusan Keputusan Bupati, Keputusan Sekretaris Daerah, NPHD, Perjanjian Kerjasama dan MoU

		3. Rumusan layanan informasi hukum dengan melaksanakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum melalui website (JDIH)
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indikator 3 : Persentase Capaian Kinerja di Bidang Pelayanan Kesejahteraan Rakyat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	CAPAIAN 2021
2	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Ekonomi, Pelayanan Barang/Jasa dan Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Kinerja Bidang Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	100%	98.5%

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan pembinaan sosial kemasyarakatan dan kebudayaa, pembinaan bidang pendidikan dan agama, kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat serta melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat. Untuk Tahun 2021 target indikator sasaran ini adalah 100% dan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerjanya 98.5%.

Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang di fasilitasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Bina Mental dan Spiritual	1. Rumusan kebijakan dan pengendalian bidang bina mental dan spiritual
2	Kesejahteraan Masyarakat	1. Rumusan Kebijakan dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Masyarakat
3	Kesejahteraan Sosial dan Budaya	1. Rumusan Kebijakan dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan sosial dan Budaya

2) Asisten Perekonomi dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan bertugas membantu Sekretaris Daerah untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, mengoordinasikan, merumuskan sasaran, mengevaluasi dan melaporkan

penyelenggaraan pemerintahan melalui Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam rangka mewujudkan capaian target kinerja jangka menengah dari hasil capaian kinerja Kepala Bagian yang berada dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, maka ditetapkanlah Perjanjian Kinerja sebagaimana tersebut di bawah ini :

Perjanjian Kinerja Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan
Target dan Realisasi Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	CAPAIAN 2021
2	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Capaian Kinerja di Bidang Perekonomian dan Pembangunan dan Sumber Daya Alam	100%	100%
		Persentase Capaian Kinerja di Bidang Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	100%	87.9%

SASARAN 2 Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Perekonomian Pembangunan dan SDA dan Pengadaan Barang/Jasa

Indikator 1 : Persentase Capaian Kinerja di Bidang Perekonomian Pembangunan dan SDA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	CAPAIAN 2021
2	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Capaian Kinerja di Bidang Perekonomian dan Pembangunan dan Sumber Daya Alam	100%	100%

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan monev perekonomian pembangunan, merumuskan kebijakan pengembangan potensi perekonomian, dan bina badan usaha milik perusahaan Daerah serta melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kebijakan di Bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam. Untuk Tahun 2021 target indikator sasaran ini adalah 100% dan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerjanya 100%.

Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam yang di fasilitasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Perekonomian	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Perekonomian
2	Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD
3	Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Indikator 2 : Persentase Capaian Kinerja di Bidang Pelayanan Barang/Jasa

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	CAPAIAN 2021
2	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Perekonomian Pembangunan dan SDA dan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Capaian Kinerja di Bidang Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	100%	87.9%

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan rumusan kebijakan pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa serta melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa. Untuk Tahun 2021 target indikator sasaran ini adalah 100% dan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerjanya 87.9%.

Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pelayanan Barang/Jasa yang di fasilitasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Pengadaan Barang/Jasa
2	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
3	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa

3) Asisten Administrasi Umum

Asisten Bidang Administrasi Umum bertugas membantu Sekretaris Daerah untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, mengoordinasikan,

merumuskan sasaran, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pemerintahan melalui Bagian Umum, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Bagian Organisasi dan Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Dalam rangka mewujudkan capaian target kinerja jangka menengah dari hasil capaian kinerja Kepala Bagian yang berada dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum, maka ditetapkanlah Perjanjian Kinerja sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Perjanjian Kinerja Asisten Bidang Administrasi Umum sesuai Target dan Realisasi Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	CAPAIAN 2021
3	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Organisasi dan Perencanaan dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja di Bidang Umum	100%	97.5%
		Persentase Capaian Kinerja di Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	80%
		Persentase Capaian Kinerja di Bidang Organisasi	100%	121.4%
		Persentase Capaian Kinerja di Bidang Perencanaan dan Keuangan	100%	100%

SASARAN 2 Meningkatkan Capaian Kinerja di Bidang Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Organisasi dan Perencanaan dan Keuangan

Indikator 1 : Persentase Capaian Kinerja di Bidang Umum

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	CAPAIAN 2021
3	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Organisasi dan Perencanaan dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja di Bidang Umum	100%	97.5%

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan pembinaan penyusunan perencanaan urusan umum, dan perlengkapan, urusan rumah tangga dan penataan asset melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal di Bidang Pelayanan Umum. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kebijakan di Bidang pelayanan Umum. Untuk Tahun 2021 target

indikator sasaran ini adalah 100% dan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerjanya 97.5%.

Pelaksanaan kebijakan di Bidang Umum yang di fasilitasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Umum dan Rumah Tangga	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Umum dan Rumah Tangga
2	Aset dan Perlengkapan	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Penataan Aset dan Perlengkapan Kantor
3	Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Tata Usaha dan Kepegawaian

Indikator 2 : Persentase Capaian Kinerja di Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	CAPAIAN 2021
3	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Organisasi dan Perencanaan dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja di Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	80%

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan pembinaan terkait penyelenggaraan di Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal terkait kegiatan Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kebijakan di Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Untuk Tahun 2021 target indikator sasaran ini adalah 100% dan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerjanya 80%.

Pelaksanaan kebijakan di Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang di fasilitasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Dokumentasi Pimpinan	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Dokumentasi Pimpinan
2	Komunikasi Pimpinan	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Komunikasi Pimpinan
3	Protokol	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Protokol Pimpinan

Indikator 3 : Persentase Capaian Kinerja di Bidang Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	CAPAIAN 2021
3	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Organisasi dan Perencanaan dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja di Bidang Organisasi	100%	121.4%

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi penataan organisasi perangkat daerah, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan aparatur dan akuntabilitas kinerja. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kebijakan di Bidang Organisasi. Untuk Tahun 2021 target indikator sasaran ini adalah 100% dan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerjanya 121.4%.

Pelaksanaan kebijakan di Bidang Organisasi yang di fasilitasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1. Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2. Rumusan data beban kerja menjadi formasi jabatan 3. Rumusan bahan standar kompetensi jabatan 4. Rumusan bahan evaluasi jabatan untuk menentukan kelas dan nilai jabatan
2	Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1. Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2. Rumusan data standarisasi pedoman kerja 3. Pemantauan dan evaluasi penerapan pengaturan kerja 4. Rumusan bahan pengukuran indeks kepuasan masyarakat 5. Rumusan bahan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik
3	Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1. Rumusan Kebijakan dan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 2. Rumusan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemberdayaan aparatur dan akuntabilitas kinerja 3. Rumusan data pemberdayaan aparatur meliputi pengawasan melekat dan penerapan budaya kerja 4. Rumusan Bahan analisis indikator kinerja dalam rencana strategis dan RPJMD 5. Rumusan laporan pelaksanaan kegiatan pengukuran kinerja 6. Rumusan bahan pelaksanaan dan Laporan Penerapan Reformasi Birokrasi

Indikator 4 : Persentase Capaian Kinerja di Bidang Perencanaan dan Keuangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	CAPAIAN 2021
----	-------------------	-------------------	-------------	--------------

4	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Organisasi dan Perencanaan dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja di Bidang Perencanaan dan Keuangan	100%	100%
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------	------

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan pembinaan, penyusunan perencanaan di Bidang Perencanaan dan Keuangan menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh di Bidang Perencanaan dan Keuangan. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kebijakan di Bidang Perencanaan dan Keuangan. Untuk Tahun 2021 target indikator sasaran ini adalah 100% dan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerjanya 100%.

Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perencanaan dan Keuangan yang di fasilitasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Rekonsiliasi Keuangan Triwulan 2. Rumusan dan Penatausahaan secara keseluruhan anggaran pendapatan dan belanja Daerah 3. Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan kas 4. Rumusan Penyampaian SPT Tahunan orang pribadi ASN Sekretariat Daerah 5. Rumusan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan Renja Sekretariat Daerah 2. Rumusan RKA Sekretariat Daerah 3. Rumusan Maturitas SPIP Terintegrasi Sekretariat Daerah 4. Rumusan Manajemen Risiko Sekretariat Daerah 5. Rumusan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah
3	Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah 2. Rumusan LPPD Sekretariat Daerah 3. Rumusan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

3. Eselon III (Kepala Bagian) dan Eselon IV (Kasubbag)

Berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 untuk Sekretariat Daerah mengemban Misi Bupati sebagaimana termuat di dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut, sehubungan hal tersebut

Maka analisa capaian sasaran strategi diuraikan berdasarkan Misi Bupati Tanah Laut dengan uraian sebagai berikut :

Analisa Capaian Sasaran Strategis

Kepala Bagian Umum

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/ SKPD/ Masyarakat dengan baik	100%	80%	80%	Bagian Umum Mengampu Misi ke-3 "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda sarana prasarana/ aset milik Setda terkelola dengan baik	100%	100%	100%	
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan,Pemantauan dan Evalusi dibidang Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evalusi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian	100%	100%	100%	
4	Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai Komponen area perubahan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah	90	91,71	101.9%	
		Nilai Komponen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah	83	87,45	105.4%	
ESELON IV						
1	Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana/aset Sekretariat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana/aset milik Setda yang terpelihara dan terkelola dengan baik	614 Jenis	592 Jenis	96.4%	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga
2	Melaksanakan Pelayanan Urusan Pimpinan/Bagian/SKPD/ dan Masyarakat	Jumlah layanan Pimpinan/Bagian/SKPD dan Masyarakat terlayani dengan baik	70.822 Ok	70.000 Ok	98.8%	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga
3	Melaksanakan Pelayanan bidang transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah layanan transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah terlayani dengan baik	100	90	90%	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Melaksanakan pengadaan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset yang didistribusikan di Lingkup Sekretariat Daerah	91 Jenis	91 Jenis	100%	Kasubbag Asset dan Perlengkapan
5	Melaksanakan Pengelolaan, Pencatatan Aset dan Penghapusan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset Sekretariat Daerah yang terkelola dan tercatat dengan baik	2.468 Jenis	2.468 Jenis	100%	Kasubbag Asset dan Perlengkapan
6	Melaksanakan Rumusan Analisa Kebutuhan Barang di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen analisa kebutuhan barang berupa rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) sesuai standar dan kebutuhan di lingkup Sekretariat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	Kasubbag Asset dan Perlengkapan
7	Memberikan Pelayanan Surat Menyurat lingkup Setda sesuai SOP	Jumlah SKPD/Bagian Lingkup Setda yang terlayani administrasi surat menyurat	54 SKPD	50 SKPD	92.6%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
8	Memberikan pelayanan Administrasi Kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah yang terselesaikan	250 Kali	250 Kali	100%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
9	Memberikan pelayanan Administrasi Pimpinan lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah pelayanan Administrasi Pimpinan Daerah (KDH/WKDH/SEKDA)	250 Kali	261 Kali	104,4 %	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
10	Pengelolaan dan penyimpanan arsip Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah arsip yang terkelola sesuai SOP	3.500 Surat	3.518 Surat	100, 51 %	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
11	Melaksanakan Reformasi Birokrasi dilingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen area perubahan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	126 Dokumen	115 Dokumen	91,26 %	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
12	Melaksanakan Zona Integritas di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen area perubahan Zona Integritas Sekretariat Daerah	96 Dokumen	90 Dokumen	93,75 %	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Bagian Umum terhadap capaian tahun sebelumnya

Tabel Capaian Indikator Sasaran Strategis Bagian Umum
terhadap capaian Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2021		
			2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/ SKPD/ Masyarakat dengan baik	%	81,84%	82,33%	100%	80%	80%
2	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda sarana prasarana/ aset milik Setda dikelola dengan baik	%	86,83%	86,83%	100%	100%	100%
3	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian	%	-	-	100%	100	100
4	Nilai Komponen area perubahan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah	Nilai	52,02	91,24	90	91,71	101,9
5	Nilai Komponen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah	Nilai	-	84,65	83	87,45	105,4

❖ Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Kinerja

Capaian kinerja bagian umum dari lima indikator adalah 89,7% dengan rincian sebagai berikut :

1. Persentase layanan Pimpinan/Bagian/ SKPD/ Masyarakat dengan baik dengan capaian komponen layanan pimpinan dan Bagian-Bagian dengan realisasi sebesar 80,00% dari target 100%.
2. Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Sekretariat Daerah terkait sarana prasarana/ aset milik Sekretariat Daerah dikelola dengan baik dengan capaian komponen layanan pencatatan aset dan pendistribusian dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%.
3. Persentase pelayanan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian sebesar 100% dari target 100%
4. Nilai komponen area perubahan reformasi birokrasi sekretariat daerah tanah laut Tahun 2021 dari hasil PMPMRB diperoleh 97.71 dari target yang ditetapkan 90 dengan prosentasi pencapaian 101,9 persen

- Nilai komponen area perubahan zona integritas Sekretariat daerah Tahun 2021 dari hasil PMPMZI diperoleh nilai 87.45 dari target yang ditetapkan 83 dengan prosentasi pencapaian 105,36 persen.

❖ **Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

- Persentase layanan Pimpinan/Bagian/SKPD/Masyarakat dengan baik dengan capaian pada Tahun 2021 80% sedangkan Tahun 2020 82.33%, mengalami penurunan sebesar 2.33%.
- Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Sekretariat Daerah terkait sarana prasarana/aset milik Sekretariat Daerah terkelola dengan baik pada Tahun 2021 100% mengalami peningkatan dari Tahun 2020 86.86% yaitu sebesar 13.17%.
- Persentase pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian belum ada di Tahun 2020 pada Bagian Umum sehingga data perbandingan belum ada.
- Persentase komponen area perubahan reformasi birokrasi sekretariat daerah tanah laut Tahun 2021 dari hasil PMPMRB diperoleh 97.71 hal ini ada peningkatan dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari tahun sebelumnya (Tahun 2020) dengan nilai 91,24
- Persentase komponen area perubahan zona integritas Sekretariat daerah Tahun 2021 dari hasil PMPMZI diperoleh nilai 87.45 sedangkan pada Tahun 2020 diperoleh nilai 84.65.

❖ **Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

SASARAN 1 Meningkatnya Kualitas Layanan Umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan Baik

Indikator : Persentase Layanan Pimpinan/Bagian/SKPD/Masyarakat dengan Baik

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/ SKPD/ Masyarakat dengan baik	100%	80%	80%	Bagian Umum Mengampu Misi ke-3 "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"

Indikator ini dilaksanakan melalui sub kegiatan penyelenggaraan rapat rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.742.090.450,- pada Tahun 2021 dengan serapan anggaran sebesar Rp 4.068.463.151,- atau 85,79%, sub kegiatan pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan pagu anggaran Rp 1.560.699.792 pada Tahun 2021 dengan serapan anggaran sebesar Rp 744.788.124 atau 47,72%, sub kegiatan pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp 438.256.364 pada Tahun 2021 dengan serapan anggaran sebesar Rp 327.519.700 atau 74,73%, sub kegiatan peyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 155.960.000 dengan serapan anggaran sebesar Rp 152.971.207 atau 98,08% dan sub kegiatan peyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional dengan pagu program sebesar Rp 2.312.013.961 dengan serapan anggaran sebesar Rp 2.086.570.721 atau 90,25%.

Dalam melaksanakan indikator tersebut diatas, menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Kurang tertibnya usulan RKBK dari Bagian-Bagian sehingga mengakibatkan kurang terakomodir kebutuhan di setiap Bagian.
- Kurangnya kesadaran dalam memelihara asset daerah.

Solusi yang dilakukan dalam mencapai indikator ini adalah :

- Memberikan batasan atau tengang waktu dalam membuat RKBK dari bagian-bagian yang diusulkan ke Bagian Umum.
- Perlu adanya sanksi terhadap kelalaian penggunaan asset daerah.

Rencana aksi perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Membuat surat edaran mengenai batasan usulan RKBK.
- Membuat surat edaran tentang penggunaan asset daerah.





Foto Kegiatan Acara Ramah Tamah Peyambutan Tamu, Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut dan 17 Agustus

SASARAN 2 Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib

Indikator : Persentase Layanan Pada Bagian-Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Terkait Sarana Prasarana/ Aset Milik Sekretariat Daerah Terkelola Dengan Baik

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda sarana prasarana/ aset milik Setda terkelola dengan baik	100%	100%	100%	Bagian Umum Mengampu Misi ke-3 "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"

Peningkatan indikator ini ditunjang dengan sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.745.160.661 dengan serapan anggaran sebesar Rp 1.500.384.221 atau 85,97%. Sub kegiatan peyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp 160.050.990 dengan serapan anggaran sebesar Rp 111.827.300 atau 69.87%.

Indikator tersebut diatas, terdapat beberapa kendala antara lain :

- Banyaknya jumlah asset yang tidak ditemukan dan dalam keadaan rusak berat (RB)
- Pencatatan asset yang belum tertib

Solusi yang dilakukan dalam mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan penelusuran terhadap asset yang tidak ditemukan
- Menertibkan pencatatan asset

Rencana aksi perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Membuat berita acara penelusuran asset yang tidak ditemukan dan diusulkan untuk dihapus atau hibah.
- Membuat berita acara serah terima barang.

SASARAN 3 Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian

Indikator : Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian	100%	100%	100%	Bagian Umum Mengampu Misi ke-3 "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"

Pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian ditunjang dengan Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 202.829.000 dengan serapan anggaran 180.415.000 atau 88,95 persen. Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan Anggaran sebesar Rp. 4.741.090.450 dengan realisasi 4.068.463.151 dengan persentasi 85,79 persen. Sedangkan Sub Kegiatan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas dengan pagu anggaran 25.000.000 tetapi tidak terealisasi, Sub Kegiatan *Medical Chek Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan 200.000.000 tetapi juga tidak terealisasi.

Indikator tersebut diatas, terdapat beberapa kendala antara lain :

Pelaksanaan kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena pada Tahun 2021 masih adanya *Covid-19* sedangkan untuk sub kegiatan pegawai yang meninggal tidak terealisasi karena tidak ada ASN yang meninggal dunia sedangkan Kegiatan *Medical Chek Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga tidak direalisasi karena kondisi Pimpinan dalam keadaan sehat.

Pada indikator kegiatan di atas belum terdapat solusi dikarenakan kendala yang ada dalam pelaksanaannya adalah kendala non teknis sehingga semua sudah berjalan

sebagaimana aturan dalam pelaksanaannya untuk pengadaan pakaian dinas yang terlaksana sesuai dengan kebutuhan pimpinan sedangkan dua kegiatan lainnya seperti pemulangan jenazah pegawai yang meninggal dan *Medical Chek Up* pimpinan tidak dapat terlaksana.



Pengadaan baju PDH dan PDU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

SASARAN 4 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pemerintahan yang baik Lingkup Sekretariat Daerah

Indikator 1 : Peningkatan komponen area perubahan Reformasi Birokrasi Lingkup Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
4	Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai Komponen area perubahan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah	90	91,71	101.9%	Bagian Umum Mengampu Misi ke-3 "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"

Pelaksanaan peningkatan komponen area perubahan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dari target yang ditetapkan 85 berdasarkan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh TPI Sekretariat Daerah mendapatkan Nilai 91,71 dengan prosentasi pencapaian 101,9% dari target yang telah ditetapkan, kedepannya Sekretariat Daerah terus berupaya meningkatkan pemenuhan dokumen-dokumen LKE Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam upaya peningkatan penerapan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut maka rencana tindak lanjut dari LHE RB 2021 adalah sebagai berikut ;

No	Area Perubahan	Tindak Lanjut
1	Manajemen Perubahan	a. Membuat Keputusan terkait Tim RB sesuai area pada LKE b. Melakukan pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi c. Melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja kearah yang lebih baik
2	Regulasi Kebijakan	a. Melakukan identifikasi dan analisis Kembali untuk pemutkhiran pemetaan terhadap peraturan Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron secara berkelanjutan b. Revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron yang terbaru dengan melibatkan tokoh masyarakat
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	a. Penataan Kelembagaan berbasis kinerja b. Evaluasi Kelembagaan kesesuaian beban kerja organisasi
4	Penataan Tatalaksana	a. Melakukan reviu terhadap SOP b. Penyusunan draf keputusan peta proses bisnis c. Penyusunan SOP sesuai peta proses bisnis d. Melakukan pemutakhiran data dan informasi publik
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	a. Reviu terkait analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai upaya perbaikan secara berkelanjutan b. Melakukan reviu kebutuhan pegawai sebagai upaya perbaikan secara berkelanjutan c. Pemberian reward dan punishment terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi d. Reviu terhadap standar kompetensi jabatan pegawai negeri sipil e. Memanfaatkan system informasi kepegawaian f. Melakukan monitoring kinerja individu secara berkala
6	Penguatan Akuntabilitas	a. Memaksimalkan keterlibatan pimpinan dalam penyusunan dokumen perencanaan b. Melakukan penyalarsan dokumen perencanaan SKPD dengan kabupaten c. Melakukan revisi Indikator Kinerja Utama Pejabat Eselon II d. Evaluasi Internal terhadap capaian kinerja SKPD e. Pemenuhan dokumen data dukung capaian target kinerja SKPD f. Memaksimalkan komitmen Pimpinan dan seluruh ASN dalam Implementasi SAKIP
7		a. Membangun komitmen anti gratifikasi di setiap pelayanan b. Melakukan identifikasi resiko SKPD c. Melakukan peningkatan penanganan dan tindak lanjut pengaduan

		masyarakat melalui Aplikasi WBS d. Meningkatkan penanganan pelaporan benturan kepentingan e. Melakukan peningkatan pembangunan zona integritas untuk meraih WBK
8	Peningkatan kualitas pelayanan bisnis	a. Evaluasi atas pengembangan system informasi layanan masyarakat b. Meningkatkan informasi pelayanan mudah diakses melalui berbagai media c. Meningkatkan nilai atas persepsi kualitas pelayanan public d. Pengembangan Aplikasi layanan untuk mempermudah pelayanan

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Penerapan tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan;
- Masih adanya dokumen-dokumen pada Area Perubahan Reformasi Birokrasi yang belum terpenuhi
- Masih rendahnya penerapan budaya kerja untuk kepemimpinan dan manajemen, Pola Pikir dan Cara Kerja serta Perilaku Bekerja

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Penerapan tata kelola pemerintahan secara efektif
- Dokumen-dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi dipenuhi sesuai dengan Area Perubahannya.
- Penerapan Budaya Kerja untuk kepemimpinan dan manajemen, Pola Pikir dan Cara Kerja serta Perilaku Bekerja sesuai dengan Kategori Bagus

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Mendorong segera adanya role model di mana pimpinan yang menjadi contoh untuk bawahannya.
- Dokumen-dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi segera di buat di dicatat agar terkoordinasi dengan baik dan cepat.



Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi RB

Indikator 2 : Peningkatan komponen area perubahan Zona Integritas Lingkup Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
4	Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai Komponen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah	83	87,45	105.4%	Bagian Umum Mengampu Misi ke-3 "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Penilaian Mandiri pada Tahun 2021 dengan nilai 87,45 dari target yang ditetapkan 83 dengan prosentasi 105,4 persen.

Sekretariat Daerah juga diusulkan menjadi WBK akan tetapi nilai yang diperoleh dari hasil penilaian Kemenpan dan RB masih belum memenuhi target, sehingga saat ini belum mendapatkan WBK. Dalam Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas tersebut di atas ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

- Kompetensi Sumber Daya Manusia kurang memadai
- Lingkungan kerja belum sepenuhnya menunjang pelaksanaan Zona Integritas
- Kurangnya Sosialisasi kepada seluruh PNS dan PTT Sekretariat Daerah bahwa Sekretariat Daerah termasuk menjadi SKPD yang dicanangkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi

- d. Belum pahamnya aparat Sekretariat Daerah tentang program Zona Integritas itu sendiri.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam memahami komponen area perubahan Zona Integritas
- Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk menunjang pelaksanaan Zona Integritas
- Meningkatkan Sosialisasi Pelaksanaan Zona Integritas kepada seluruh ASN Sekretariat Daerah secara berkelanjutan.

Melakukan evaluasi dan monitoring progres pemenuhan dokumen LKE Zona Integritas.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Banyak melakukan sosialisasi untuk memahami komponen area perubahan Zona Integritas
- Pembuatan Sarana dan Prasarana untuk menunjang pelaksanaan Zona Integritas
- Meningkatkan Sosialisasi Pelaksanaan Zona Integritas kepada seluruh ASN Sekretariat Daerah secara berkelanjutan.



Foto foto sarana dan prasarana pendukung dan penandatanganan komitmen bersama

❖ **Analisa Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia**

1. Untuk mencapai sasaran layanan Pimpinan/Bagian/SKPD/Masyarakat dengan baik ditunjang oleh 3 orang Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu Kepala Bagian Umum, Kasubbag Umum dan Rumah Tangga dan pelaksana Bagian Umum.

2. Untuk mencapai sasaran persentase layanan pada Bagian-Bagian Lingkup Sekretariat Daerah terkait sarana prasarana/aset milik Sekretariat Daerah terkelola dengan baik ditunjang oleh 3 orang Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu Kepala Bagian Umum, Kasubbag Asset dan Perlengkapan dan pelaksana Bagian Umum.
3. Untuk mencapai sasaran persentase layanan kebijakan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli, dan kepegawaian ditunjang oleh 3 orang yaitu kepala bagian umum, kasubag TU pimpinan dan staf ahli dan pelaksana bagian umum.
4. Untuk mencapai peningkatan komponen area perubahan reformasi birokrasi lingkup sekretariat daerah ditunjang oleh 3 orang yaitu kepala bagian umum, kasubag TU pimpinan dan staf ahli dan pelaksana bagian umum.
5. Untuk mencapai peningkatan komponen area perubahan zona integritas lingkup sekretariat daerah ditunjang oleh 3 orang yaitu kepala bagian umum, kasubag TU pimpinan dan staf ahli dan pelaksana bagian umum.

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	KET
1	Persentase layanan Pimpinan/ Bagian/ SKPD/ Masyarakat dengan baik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KABUPATEN/ KOTA	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.742.090.450	4.068.463.151	85.79		
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.742.090.450	4.068.463.151	85.79	3 orang	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.998.956.156	1.772.685.424	83.66		
			- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	1.560.699.792	1.445.165.724	95.59	3 orang	
			- Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	438.256.364	327.519.700	74.73	3 orang	
2	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda sarana prasarana/ aset milik Setda terkelola dengan baik		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	377.382.180	333.649.780	86.36		
			- Sub Kegiatan Peyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor	113.637.480	92.271.620	81.20	3 orang	
			- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	263.744.700	241.378.160	91.52	3 orang	
			Kegiatan Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.264.490.594	1.789.351.768	78.86		
			- Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.103.434.464	803.389.830	72.81	3 orang	
		- Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.161.056.130	985.961.938	84.92	3 orang		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.488.180.117	4.012.227.352	89.39			
		- Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	155.960.000	152.971.207	98.08	3 orang		



NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	KET
			- Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	2.312.013.961	2.086.570.721	90.25	3 orang	
			- Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	21.250.000	0.00	0.00	3 orang	
			- Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	1.560.699.792	1.445.165.724	92.59	3 orang	
			- Pemeliharaan /Rehabilitasi Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	438.256.364	327.519.700	74.73	3 orang	
3	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpina, Staff Ahli dan Kepegawaian		Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200.000.000	0.00	0.00		
			Sub Kegiatan <i>Medical Check-Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200.000.000	0.00	0.00	3 orang	
			Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat daerah	855.227.638	386.993.064	45.25		
			- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	202.829.000	180.415.000	88.95	3 orang	
			- Sub Kegiat Pemulangan Pegawai yang Meninggal Dunia Dalam Melaksanakan Tugas	25.000.000	0.00	0.00	3 orang	
			- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	627.398.638	206.578.064	32.93	3 orang	
			Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat daerah	4.901.589.500	4.203.185.561	74.79		
			- Sub Kegiatan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan	156.529.050	133.132.410	85.05	3 orang	
			- Sub Kegiatan Peyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.742.090.450	4.068.463.151	85.79	3 orang	
			- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.970.000	1.590.000	53.54	3 orang	
4	Nilai Komponen area perubahan Reformasi Birokrasi lingkup		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.050.990	111.827.300	69.87		



NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	KET
	Sekretariat Daerah							
5	Nilai Komponen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah		Sub Kegiatan Peyediaan barang cetakan dan Penggandaan	160.050.990	111.827.300	69.87	3 orang	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.745.160.661	1.527.384.221	85.97		
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	1.745.160.661	1.527.384.221	85.97	3 orang	
			Kegiatan Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.600.199.740	1.436.499.260	91.46		
			Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.600.199.740	1.436.499.260	91.46	3 orang	
			Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.194.545.000	1.184.506.500	99.16		
			- Sub Kegiatan Peyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	684.835.000	675.964.000	98.70	3 orang	
			- Sub Kegiatan Peyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	509.710.000	508.542.500	99.77	3 orang	

❖ **Analisa Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga :**

Untuk capaian Indikator sasaran pada Kasubbag Umum dan Rumah Tangga dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan pagu Rp 1.194.545.000 terealisasi Rp 1.184.506.500 dengan realisasi keuangan sebesar 99.16% dengan dukungan SDM sebanyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari:

- Sub Kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah dengan pagu Rp 684.835.000 terealisasi Rp 675.964.000 dengan realisasi keuangan sebesar 98.70%;
- Sub Kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah dengan pagu Rp 509.710.000 terealisasi Rp 508.542.500 dengan realisasi keuangan sebesar 99.77%;

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia
Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	KET
1	Jumlah sarana dan prasarana/aset milik Setda yang terpelihara dan terkelola dengan baik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KABUPATEN/ KOTA	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.050.990	111.827.300	69.87		
2	Jumlah layanan Pimpinan/Bagian/SKPD dan Masyarakat terlayani dengan baik		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	160.050.990	111.827.300	69.87	3 orang	
3	Jumlah layanan transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah terlayani dengan baik		Kegiatan Fasilitasi Kerumah Tangga Setda	1.194.545.000	1.184.506.500	99.16		
			- Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	684.835.000	675.964.000	98.70	3 orang	

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	KET
			- Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	509.710.000	508.542.500	99.77	3 orang	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.745.160.661	1.527.384.221	85.97		
			- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.745.160.661	1.527.384.221	85.97	3 orang	
			- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.600.199.740	1.436.499.260	91.46		
			- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.600.199.740	1.436.499.260	91.46	3 orang	
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.000.000	15.000.000	12.00		
			- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.000.000	15.000.000	12.00	3 orang	

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga dapat dilihat pada analisa sebagai berikut :

Tabel Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana/aset Sekretariat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana/aset milik Setda yang terpelihara dan terkelola dengan baik	614 Jenis	592 Jenis	96.4%	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga
2	Melaksanakan Pelayanan Urusan Pimpinan/Bagian/SKPD/ dan Masyarakat	Jumlah layanan Pimpinan/Bagian/SKPD dan Masyarakat terlayani dengan baik	70.822 Ok	70.000 Ok	98.8%	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga
3	Melaksanakan Pelayanan bidang transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah layanan transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah terlayani dengan baik	100	90	90%	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga

SASARAN 1 Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana/Aset Sekretariat Daerah

Indikator : Jumlah Sarana Dan Prasarana/Aset Milik Sekretariat Daerah yang Terpelihara dan Terkelola dengan Baik

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana/aset Sekretariat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana/aset milik Setda yang terpelihara dan terkelola dengan baik	614 Jenis	592 Jenis	96.4%	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga

Indikator ini dilaksanakan melalui sub kegiatan pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.560.699.792 dengan serapan anggaran sebesar Rp 744.788.124 atau 47.72%. sub kegiatan pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp 438.256.364 dengan serapan anggaran sebesar Rp 327.519.700 atau 74.73%.

SASARAN 2 Melaksanakan Pelayanan Urusan Pimpinan/Bagian/SKPD/ dan Masyarakat

Indikator : Jumlah Layanan Pimpinan/Bagian/ SKPD dan Masyarakat Terlayani dengan Baik

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Melaksanakan Pelayanan Urusan Pimpinan/Bagian/SKPD/ dan Masyarakat	Jumlah layanan Pimpinan/Bagian/SKPD dan Masyarakat terlayani dengan baik	70.822 Ok	70.000 Ok	98.8%	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga

Indikator ini dilaksanakan melalui sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.742.090.450 dengan serapan anggaran sebesar Rp 4.068.463.151 atau 85.79%, sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 684.835.000 dengan serapan anggaran sebesar Rp 675.964.000 atau 98,70%, dan sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 509.710.000 dengan serapan anggaran sebesar Rp 508.542.500 atau 99.77%.

SASARAN 3 Melaksanakan Pelayanan Bidang Transportasi, Konsumsi dan Gedung Pertemuan Di Lingkup Sekretariat Daerah

Indikator : Jumlah Layanan Transportasi, Konsumsi dan Gedung Pertemuan Di Lingkup Sekretariat Daerah Terlayani dengan Baik

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Melaksanakan Pelayanan bidang transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah layanan transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah terlayani dengan baik	100	90	90%	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga

Peningkatan indikator ini dilakukan dengan menyediakan jasa sewa gedung dan layanan penyewaan bus untuk masyarakat umum dan pimpinan. Dalam hal ini dapat kami jelaskan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut memiliki beberapa

gedung atau aula yang dapat dimanfaatkan atau disewa oleh Masyarakat/SKPD ataupun dari Lembaga Organisasi lainnya berupa :

- 1) Gedung Balairung Tuntung Pandang
- 2) Gedung Sarantang Saruntung
- 3) Aula Rapat Ruang Barakat Lantai dua Sekretariat Daerah
- 4) Aula Rapat Lantai tiga Sekretariat Daerah

Yang mana gedung dan aula tersebut sering digunakan untuk acara cara resmi seperti pelantikan para pejabat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Selain gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut juga memiliki 4 buah armada bus yang dapat di sewa oleh Masyarakat ataupun SKPD dengan tarif yang terjangkau karena tarif di atur dengan Peraturan Daerah yang mana dana akan masuk ke Kas Daerah.

❖ Analisa Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Asset dan Perlengkapan

Melaksanakan pengelolaan, pencatatan aset dan penghapusan aset di Lingkup Sekretariat Daerah dan jumlah aset yang terkelola dan tercatat dengan baik, maka untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan Anggaran sebesar Rp 4.488.180.117 dan terealisasi sebesar Rp 3.311.849.752 atau 73.79%.

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia
Kepala Sub Bagian Asset dan Perlengkapan

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	KET
1	Jumlah aset yang didistribusikan di Lingkup Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KABUPATEN/ KOTA	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	377.382.180	333.649.780	86.36		
2	Jumlah aset Sekretariat Daerah yang terkelola dan tercatat dengan baik		- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	113.637.480	92.271.620	81.20	3 orang	
3	Jumlah dokumen analisa kebutuhan barang berupa rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) sesuai standar dan kebutuhan di lingkup Sekretariat Daerah		- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	263.744.700	241.378.160	91.52	3 orang	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.264.493.594	1.789.351.768	78.86		
			- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.103.434.464	803.389.830	72.81	3 orang	
			- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.161.059.130	985.961.938	84.92	3 orang	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.488.180.117	4.012.227.352	89.39		
			- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	155.960.000	152.971.207	98.08	3 orang	
			- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	2.312.013.961	2.086.570.721	90.25	3 orang	



NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	KET
			Dinas Operasional Atau Lapangan					
			- Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	21.250.000	0.00	0.00	3 orang	
			- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.560.699.792	1.445.165.724	92.59	3 orang	
			- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	438.256.364	327.519.700	74.73	3 orang	

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Asset dan Perlengkapan dapat dilihat pada analisa sebagai berikut :

Tabel Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Asset dan Perlengkapan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Melaksanakan pengadaan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset yang didistribusikan di Lingkup Sekretariat Daerah	91 Jenis	91 Jenis	100%	Kasubbag Asset dan Perlengkapan
2	Melaksanakan Pengelolaan, Pencatatan Aset dan Penghapusan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset Sekretariat Daerah yang terkelola dan tercatat dengan baik	2.468 Jenis	2.468 Jenis	100%	Kasubbag Asset dan Perlengkapan
3	Melaksanakan Rumusan Analisa Kebutuhan Barang di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen analisa kebutuhan barang berupa rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) sesuai standar dan kebutuhan di lingkup Sekretariat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	Kasubbag Asset dan Perlengkapan

SASARAN 1 Melaksanakan Pengadaan Aset di Lingkup Sekretariat Daerah

Indikator : Jumlah Aset Yang di Distribusikan di Lingkup Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Melaksanakan pengadaan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset yang didistribusikan di Lingkup Sekretariat Daerah	91 Jenis	91 Jenis	100%	Kasubbag Asset dan Perlengkapan

Indikator ini dilaksanakan melalui sub kegiatan Pengadaan Saranan dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.745.160.661 dengan serapan anggaran sebesar Rp 1.500.384.221 atau 85,97%. Pada sub kegiatan ini dilaksanakan pengadaan barang dan perlengkapan kantor seperti pengadaan komputer, printer dan alat alat penunjang kegiatan kantor lainnya

dimana bukan hanya pengadaaannya saja yang di catat dalam SIMDA BMD tetapi juga pendistribusiannya juga tercatat di laman berita acara serah terima barang, serta pencatatan keadaan barang baik yang rusak berat, ringan atau pun keadaan baik.

Berikut disajikan daftar barang yang dimusnahkan dan dihapus pencatatannya dari aset Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

Daftar BMD yang Dilakukan Pemusnahan

(Lampiran Tabel KIB)

Peralatan dan Mesin

No	Kode Barang	Jenis Barang>Nama Barang	Register	Merk/Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Rangka	Nomor Mesin	Polisi	BPKB	Asal Usul	Harga Perolehan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	02.06.01.03.18	Mesin Cetak ID Card	1	-	-	Camp	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	43,000,000	
2	02.06.01.04.14	Lemari kayu	5	lokal/lemari pakaian	-	Kayu Jati	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	9,432,500	
3	02.06.01.04.14	Lemari kayu	7	lokal/lemari pakaian	3 pintu	Kayu Jati	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	9,432,500	
4	02.06.01.04.14	Lemari kayu	8	lokal/lemari pakaian	2 pintu	Kayu	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	8,192,800	
5	02.06.02.01.01	Lemari Kayu	12	Indojati / -	230X55 X230 cm	Kayu	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	22,293,750	
6	02.06.02.01.55	Lemari Rias	3	Melodi /1 pintu	-	camp	2015	-	-	-	-	-	Pembelian	1,650,000	
7	02.06.02.03.04	Mesin Cuci	12	Nilfisk / Nilfisk	standar	Camp	2016	-	-	-	-	-	Pembelian	5,610,000	
8	02.06.02.04.04	AC Split	1	LG	standar		2004	-	-	-	-	-	Pembelian	6,781,250	
9	02.06.02.04.04	AC Split	16	Panasonic	standar	Camp	2006	-	-	-	-	-	Pembelian	5,445,000	
10	02.06.02.04.04	AC Split	27	Panasonic	standar	Camp	2007	-	-	-	-	-	Pembelian	5,000,000	
11	02.06.02.04.04	AC Split	30	Panasonic	standar	Camp	2007	-	-	-	-	-	Pembelian	2,400,000	
12	02.06.02.04.04	AC Split	40	Panasonic	standar	Camp	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	4,500,000	
13	02.06.02.04.04	AC Split	41	Panasonic	standar	Camp	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	9,000,000	
14	02.06.02.04.04	AC Split	42	Panasonic	standar	Camp	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	9,000,000	
15	02.06.02.04.04	AC Split	6	- / -	standar	Camp	2005	-	-	-	-	-	Pembelian	18,600,000	
16	02.06.02.04.04	AC Split	7	- / -	standar	Camp	2005	-	-	-	-	-	Pembelian	18,600,000	

No	Kode Barang	Jenis Barang>Nama Barang	Register	Merk/Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Rangka	Nomor Mesin	Polisi	BPKB	Asal Usul	Harga Perolehan (Rp)	Ket
17	02.06.03.02.01	P.CUnit/ Komputer PC	18	Acer / PC	standar	Camp	2007	-	-	-	-	-	Pembelian	8,900,000	
18	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	19	Acer / PC	standar	Camp	2007	-	-	-	-	-	Pembelian	8,900,000	
19	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	46	Acer / AspirePC M3920	standar	Camp	2011	-	-	-	-	-	Pembelian	6,788,375	
20	02.06.03.02.02	Laptop	1	Toshiba	standar	Camp	2004	-	-	-	-	-	Pembelian	19,900,000	
21	02.06.03.02.03	Note Book	39	Toshiba/ -	standar	Camp	2009	-	-	-	-	-	Pembelian	19,600,000	
22	02.06.03.02.03	Note Book	48	Toshiba	standar	Camp	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	11,950,000	
23	02.06.03.05.02	Monitor	9	Samsung/ LCD/LED	standar	Camp	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	7,426,100	
24	02.06.03.05.11	UPS	118	ICA/CV 1400	standar	Camp	2016	-	-	-	-	-	Pembelian	1,485,000	
25	02.06.03.06.11	Wireless Access Point	13	Linksys/ EA 2700	standar	Camp	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	1,430,000	
26	02.06.03.06.11	Wireless Access Point	14	Linksys/ EA 2700	standar	Camp	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	1,430,000	
27	02.06.04.01.06	Meja kerja Pejabat Eselon IV	5	Jati	standar	kayu	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	5,950,000	
28	02.09.04.05.17	System/Power Supplay Lain- lain	2	Panel Power Supply/ Combinations	standar	Camp	2016	-	-	-	-	-	Pembelian	4,500,000	
Jumlah														277,197,275	

SASARAN 2 Melaksanakan Pengelolaan, Pencatatan Aset dan Penghapusan Aset di Lingkup Sekretariat daerah

Indikator : Jumlah Aset Sekretariat Daerah Yang Terkelola dan Tercatat Dengan Baik

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Melaksanakan Pengelolaan, Pencatatan Aset dan Penghapusan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset Sekretariat Daerah yang terkelola dan tercatat dengan baik	2.468 Jenis	2.468 Jenis	100%	Kasubbag Asset dan Perlengkapan

Untuk melaksanakan indikator ini dilakukan sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp 160.050.990 dengan serapan sebesar Rp 111.827.300 atau 69.87%. Kegiatan dilaksanakan berupa pencetakan kartu kendali barang, laporan RKBMD tahunan dan penjilidannya, serta pencetakan kartu inventaris barang.

SASARAN 3 Melaksanakan Rumusan Analisa Kebutuhan Barang di Lingkup Sekretariat Daerah

Indikator : Jumlah dokumen analisa kebutuhan barang berupa rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) sesuai standar dan kebutuhan di lingkup Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
3	Melaksanakan Rumusan Analisa Kebutuhan Barang di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen analisa kebutuhan barang berupa rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) sesuai standar dan kebutuhan di lingkup Sekretariat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	Kasubbag Asset dan Perlengkapan

Untuk melaksanakan indikator ini dilakukan sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp 156.529.050 dengan serapan anggaran sebesar Rp 133.132.410 atau 85.05%. indikator ini dilaksanakan dengan kegiatan pengadaan Alat tulis kantor dan lain lainnya yang mana tiap bagian akan mengajukan RKBMD barang sesuai dengan kebutuhannya.

❖ Analisa Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian

Melaksanakan pengelolaan, pencatatan dan pengelolaan arsip, pelayanan administrasi dan kepegawaian pimpinan, melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di lingkup Sekretariat Daerah, maka untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui sub kegiatan pengadaan pakaian dinas dan atribut kelengkapannya dengan pagu anggaran sebesar Rp 202.829.000 dan terealisasi sebesar Rp 180.415.000 atau 88.95%.

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia
Kepala Sub Bagian Asset dan Perlengkapan

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	KET
1	Jumlah SKPD/ Bagian lingkup Setda yang terlayani administrasi surat menyurat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KABUPATEN/ KOTA	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	855.227.638	386.993.064	45.25		
2	Jumlah administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah yang terselesaikan		- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	202.829.000	180.415.000	88.95	3 orang	
3	Jumlah pelayanan administrasi Pimpinan Daerah (KDH/WKDH/SEKDA)		- Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai Yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas	25.000.000	0.00	0.00	3 orang	
4	Jumlah arsip yang dikelola sesuai SOP		- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	627.398.638	206.578.064	32.93	3 orang	
5	Jumlah Dokumen area perubahan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.901.589.500	4.203.185.561	74.79		
6	Jumlah Dokumen Area Perubahan Zona Integritas Lingkup Sekretariat Daerah		- Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.970.000	1.590.000	53.54	3 orang	
			- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.742.090.450	4.068.463.151	85.79	3 orang	
		- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156.529.050	133.132.410	85.05			



NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	KET
			Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200.000.000	0.00	0.00		
			- Sub Kegiatan Medical Check-Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200.000.000	0.00	0.00	3 orang	

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian dapat dilihat pada analisa sebagai berikut :

Tabel Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memberikan Pelayanan Surat Menyurat lingkup Setda sesuai SOP	Jumlah SKPD/Bagian Lingkup Setda yang terlayani administrasi surat menyurat	54	54	100 %	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
2	Memberikan pelayanan Administrasi Kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah yang terselesaikan	250 Kali	260	104 %	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
3	Memberikan pelayanan Administrasi Pimpinan lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah pelayanan Administrasi Pimpinan Daerah (KDH/WKDH/SEKDA)	250 Kali	261 Kali	104,4 %	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
4	Pengelolaan dan penyimpanan arsip Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah arsip yang dikelola sesuai SOP	3.500 Surat	3.518 Surat	100, 51 %	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
5	Melaksanakan Reformasi Birokrasi dilingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen area perubahan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	126 Dokumen	115 Dokumen	91,26 %	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
6	Melaksanakan Zona Integritas di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen area perubahan Zona Integritas Sekretariat Daerah	96 Dokumen	90 Dokumen	93,75 %	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

Untuk memberikan pelayanan surat menyurat lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah laut telah di dukungan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran 156.529.050 dengan realisasi sebesar 133.132.410 dengan persentasi 85.05%. Sedangkan pelaksanaan pengelolaan arsip belum maksimal dengan persentase 81%.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pelayanan administrasi penyimpanan arsip adalah sebagai berikut ;

- Belum adanya tenaga arsiparis
- Belum adanya anggaran untuk mendukung pengelolaan arsip

Sedangkan untuk mengatasi atas kendala tersebut adalah ;

- a. Menunjuk ASN yang membantu dalam pelaksanaan pengelolaan Arsip
- b. Menganggarkan alokasi biaya untuk pengelolaan arsip dilingkup Sekretariat Daerah

SASARAN 1 Memberikan Pelayanan Surat Menyurat lingkup Sekretariat Daerah sesuai SOP

Indikator : Jumlah SKPD/Bagian Lingkup Sekretariat Daerah yang terlayani administrasi surat menyurat

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Memberikan Pelayanan Surat Menyurat lingkup Setda sesuai SOP	Jumlah SKPD/Bagian Lingkup Setda yang terlayani administrasi surat menyurat	54	54	100 %	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

Untuk melaksanakan indikator ini dilakukan sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp 156.529.050 dengan serapan anggaran sebesar Rp 133.132.410 atau 85.05%. pelaksanaan indikator ini dilakukan dengan kegiatan pelayanan administrasi surat menyurat dengan mengadakan alat tulis kantor dan barang penggandaan surat menyurat

SASARAN 2 Memberikan pelayanan Administrasi Kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah

Indikator : Jumlah Administrasi Kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah yang terselesaikan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Memberikan pelayanan Administrasi Kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah yang terselesaikan	250 Kali	260 Kali	104 %	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

Untuk melaksanakan indikator ini dilakukan sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp 156.529.050 dengan serapan anggaran sebesar Rp 133.132.410 atau 85.05%. pelaksanaan indikator ini dilakukan dengan kegiatan pelayanan administrasi surat menyurat dengan mengadakan alat tulis kantor dan barang penggandaan surat menyurat.

SASARAN 3 Memberikan pelayanan Administrasi Pimpinan lingkup Sekretariat Daerah

Indikator : Persentase pelayanan Administrasi Pimpinan Daerah (KDH/WKDH/SEKDA)

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
3	Memberikan pelayanan Administrasi Pimpinan lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah pelayanan Administrasi Pimpinan Daerah (KDH/WKDH/SEKDA)	250 Kali	261 Kali	104,4 %	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

Untuk melaksanakan indikator ini dilakukan sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp 156.529.050 dengan serapan anggaran sebesar Rp 133.132.410 atau 85.05%. pelaksanaan indikator ini dilakukan dengan kegiatan pelayanan administrasi surat menyurat dengan mengadakan alat tulis kantor dan barang penggandaan surat menyurat

SASARAN 4 Pengelolaan dan penyimpanan arsip Lingkup Sekretariat Daerah

Indikator : Persentase arsip yang terkelola sesuai SOP

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
4	Pengelolaan dan penyimpanan arsip Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah arsip yang terkelola sesuai SOP	3.500 Surat	3.518 Surat	100, 51 %	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

Untuk melaksanakan indikator ini dilakukan sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp 156.529.050 dengan serapan anggaran sebesar Rp 133.132.410 atau 85.05%, tetapi untuk pengelolaan Arsip sendiri tidak ada anggaran khusus. pelaksanaan indikator ini dilakukan dengan kegiatan pelayanan administrasi surat menyurat dengan mengadakan alat tulis kantor dan barang penggandaan surat menyurat.

SASARAN 5 Melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkup Sekretariat Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen area perubahan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
5	Melaksanakan Reformasi Birokrasi dilingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen area perubahan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	126 Dokumen	115 Dokumen	91,26 %	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

Untuk melaksanakan indikator ini dilakukan sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp 156.529.050 dengan serapan anggaran sebesar Rp 133.132.410 atau 85.05%. Pelaksanaan indikator ini dilakukan dengan kegiatan pengisian LKE Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah dengan 8 (delapan) Area Perubahan.

SASARAN 6 Melaksanakan Zona Integritas di Lingkup Sekretariat Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen area perubahan Zona Integritas Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
6	Melaksanakan Zona Integritas di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen area perubahan Zona Integritas Sekretariat Daerah	96 Dokumen	90 Dokumen	93,75 %	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

Untuk melaksanakan indikator ini dilakukan sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp 156.529.050 dengan serapan anggaran sebesar Rp 133.132.410 atau 85.05%. Pelaksanaan indikator ini dilakukan dengan kegiatan pengisian LKE Zona Integritas Sekretariat Daerah dengan 6 (enam) Area Perubahan.

Analisa Capaian Sasaran Strategis

Kepala Bagian Pemerintahan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	100%	76,5%	76,5%	Bagian Pemerintahan Mengampu Misi ke- 3 : "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"
		Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/ Kabupaten yang diselenggarakan	100%	100%	100%	
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	100%	100%	100%	
3	Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	100%	100%	100%	
4	Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga	Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	100%	416%	416%	
ESELON IV						
1	Memfasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan umum	Jumlah laporan hasil penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan umum yang berhasil difasilitasi	50 Kali	39 Kali	78%	Kasubbag Administrasi Pemerintahan
2	Memfasilitasi kegiatan perayaan Hari Besar Nasional dan Kabupaten	Jumlah kegiatan perayaan Hari Besar Nasional dan Kabupaten yang berhasil difasilitasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	Kasubbag Administrasi Pemerintahan
3	Memfasilitasi kegiatan Forkopimda	Jumlah laporan hasil fasilitasi kegiatan Forkopimda	12 Kali	9 Kali	75%	Kasubbag Administrasi Pemerintahan
4	Penyusunan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Jumlah Dokumen penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Kasubbag Kerjasama dan Otonomi Daerah

5	Memfasilitasi kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri	Jumlah dokumen kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil difasilitasi	6 Dokumen	25 Dokumen	416%	Kasubbag Kerjasama dan Otonomi Daerah
6	Melakukan pembinaan administrasi Bidang Kewilayahan Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Kecamatan yang dibina	11 Kali	11 Kali	100%	Kasubbag Administrasi Kewilayahan
7	Memfasilitasi penyelesaian penegasan batas antar Daerah dan Kecamatan	Jumlah laporan penyelesaian penegasan batas antar Daerah dan Kecamatan yang difasilitasi	2 Laporan	2 Laporan	100%	Kasubbag Administrasi Kewilayahan

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Bagian Pemerintahan terhadap capaian tahun sebelumnya.

Tabel Capaian Indikator Sasaran Strategis
Bagian Pemerintahan Terhadap Capaian Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2021		
			2019	2020	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	%	100%	82%	100%	76,5%	76,5%
2	Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan	%	80%	70%	100%	100%	100%
3	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	%	97,84%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	%	100%	175%	100%	416%	416%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							158,5%

1. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Kinerja

Rata-rata capaian kinerja Bagian Pemerintahan dari ke lima indikator adalah 158,5%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti sebesar 76,5% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 76,5%. Realisasi tersebut telah mencapai 100% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 100%. dst
2. Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan sebesar 100% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.
3. Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti sebesar 100% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.
4. Persentase Pemenuhan IKK SKPD/ SKPD sebesar 100% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.
5. Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti sebesar 416% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 416%.

2. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

1. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti Tahun 2021 adalah 78% mengalami penurunan sebesar 4% dari Tahun 2020 yaitu sebesar 82%.kegiatan ini mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemic covid -19.
2. Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan Tahun 2021 adalah 100% mengalami kenaikan sebesar 30% dari Tahun 2020 yaitu sebesar 70%. Kegiatan ini dapat melampaui target dikarenakan Pandemi Covid -19 mulai berkurang sehingga kegiatan tetap bisa terlaksanakan.
3. Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti Tahun 2021 adalah 100% sama dengan Tahun 2020 yang juga sebesar 100%.
4. Persentase Pemenuhan IKK SKPD/ SKPD Tahun 2021 adalah 100% sama dengan Tahun 2020 yang juga sebesar 100%.

5. Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti Tahun 2021 adalah 416% mengalami kenaikan sebesar 241% dari Tahun 2020 yaitu sebesar 175%. Kegiatan ini dapat melampaui target dikarenakan di Tahun 2021 terdapat peningkatan yang signifikan terkait penyusunan Dokumen Kerjasama di SKPD karena realisasi kegiatan di Anggaran Perubahan maupun kebijakan-kebijakan yang ditetapkan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

3. Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Sasaran 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Indikator : Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	100%	76,5%	76,5%	Bagian Pemerintahan Mengampu Misi ke- 3 : "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"

Untuk mendukung tercapainya indikator Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti telah dilaksanakan melalui Program Pemeritahan Dan Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp 2.038.691.846,00 dan terealisasi sebesar Rp 914.437.528,00 atau 44,85%.

Bahwa untuk mendukung tercapainya indikator Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti telah dilaksanakan kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi (*Coffee Morning*) yang terealisasi sebesar 78 %, dan Rapat Forkopimda yang terealisasi sebesar 75%. Rapat Forkopimda yang terealisasi yaitu sebanyak 9 kali (75%) dari target sebanyak 12 kali (100%)

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Terbenturnya jadwal kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (*Coffee Morning*) dan Rapat Forkopimda dengan jadwal undangan lain yang sudah dijadwalkan.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Mengkoordinasikan jadwal kegiatan yang sudah di agendakan agar tidak saling berbenturan, sehingga dapat dilaksanakan dengan tidak mengganggu agenda lainnya

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah

- Mensinkronkan jadwal kegiatan rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (*Coffee Morning*) dan Rapat Forkopimda agar tidak terbentur dengan jadwal agenda lainnya



Rapat Pejabat Pemerintah Daerah (Coffee Morning) dan Rapat Forkopimda

Indikator 2 : Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan Mengampu Misi ke- 3 : "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"

Untuk mendukung tercapainya indikator Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan melalui Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp 2.038.691.846,00 dan terealisasi sebesar Rp 914.437.528,00 atau 44,85%.

Bahwa untuk mendukung tercapainya indikator Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan telah dilaksanakan kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut dan membentuk Panitia Pelaksanaan hari besar tersebut. Persentase capaian pada Tahun 2021 sebesar 100% atau mengalami kenaikan dari tahun 2020 dengan persentase capaian sebesar 70%. Hal ini dikarenakan koordinasi SKPD terkait agenda kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dalam rangka Hari Besar Nasional/Kabupaten yang baik sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terealisasi sebesar 100%.

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah :

- Terbenturnya jadwal agenda kegiatan Pejabat Provinsi Kalimantan Selatan yang di undang khususnya pada Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut
Solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:
- Meningkatkan Koordinasi dengan seluruh SKPD

- Secepatnya/lebih awal mengkoordinasikan terkait jadwal agenda kegiatan Pejabat Provinsi Kalimantan Selatan yang di undang pada Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Lebih cepat mengkoordinasikan dalam menyinkronkan jadwal agenda kegiatan Pejabat Provinsi Kalimantan Selatan yang akan di undang pada Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut.



Pelaksanaan Rapat Koordinasi Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut dan Pelaksanaan Acara Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut

SASARAN 2 Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Indikator 1 : Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan Mengampu Misi ke- 3 : "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"

Bahwa untuk mendukung tercapainya indikator Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti telah dilaksanakan kegiatan:

- Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Kabupaten Tanah Laut.

- Pengecekan dilapangan dengan berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Provinsi dan Tim PBD Kabupaten/Kota yang berbatasan.
- Melaksanakan rapat koordinasi Tim PBD Kabupaten dan mengikuti rapat koordinasi fasilitasi Tim PBD Provinsi Kalimantan Selatan.
- Melakukan inventarisasi data-data dukung terkait wilayah yang terdapat konflik, khususnya di Desa Bentok Darat yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar di Desa Kiram.

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

- Adanya penyampaian opsi-opsi maupun usulan titik segmen batas yang berbeda-beda oleh pihak Kabupaten Banjar pada setiap pelaksanaan rapat koordinasi yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Adanya pandemi Covid-19.

Solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:

- Mempertemukan Kepala Daerah antara Kabupaten yang berbatasan dengan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar segera mendapat putusan titik segmen batas yang di sepakati.
- Menerapkan protokol Kesehatan yang ketat pada setiap pelaksanaan rapat koordinasi baik di daerah maupun yang di fasilitasi Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Melaksanakan koordinasi dengan Tim PBD Provinsi Kalimantan Selatan untuk segera melakukan fasilitasi survey lapangan untuk persiapan pemancangan batas Penegasan Batas Daerah di titik-titik yang disepakati.
- Meningkatkan koordinasi dengan Tim PBD Kalimantan Selatan untuk penyelesaian dokumen-dokumen yang diperlukan untuk Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penegasan Batas Daerah.



Rapat koordinasi Tim PBD Kabupaten dan Penandatanganan Kesepakatan Batas Wilayah

SASARAN 3 Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD

Indikator : Persentase Pemenuhan IKK SKPD

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
3	Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan Mengampu Misi ke- 3 : "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"

Untuk mendukung tercapainya indikator Persentase Pemenuhan IKK SKPD/ SKPD telah dilaksanakan melalui Program Pemeritahan Dan Kesejahteraan Rakyat telah dilaksanakan kegiatan:

- Tim Penyusun LPPD Kabupaten Tanah Laut melaksanakan sosialisasi penyusunan Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Laut sekaligus penyampaian format pengisian Data Dukung IKK LPPD Kabupaten Tanah Laut
- Melakukan pengumpulan Data Dukung IKK LPPD Kabupaten Tanah Laut yang terdiri dari IKK Outcome yang berjumlah 105 IKK dan IKK Output yang berjumlah 491 IKK.
- Melakukan verifikasi dan validasi Data Dukung IKK LPPD.
- Mengikuti Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) oleh Tim EKPPD Provinsi dan Tim EKPPD Pusat.

Berikut disajikan Pelaporan IKK Output dan IKK Outcome 2021 Kabupaten Tanah Laut.

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Pemda		Apip				
						Capaian	Keterangan	File Bukti	Diperbarui	Status	Keterangan	Diperbarui
1.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib	Pendidikan	1	1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
1.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	10	1	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar. Jumlah anak usia 7- 12 tahun pada provinsi yang bersangkutan	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
1.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	10	1	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama. Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
1.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	8	1	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan kesetaraan. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
1.b.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1	1	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan. Jumlah Penduduk di kabupaten/kota	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
1.b.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1	1	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi. Jumlah RS di kabupaten/kota	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
1.b.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	2	1	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-

1.b.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	2	1	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan. Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
1.b.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	2	1	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
1.b.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	2	1	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Jumlah balita di kabupaten/kota	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
1.b.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	2	1	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
1.b.8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	2	1	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
1.b.9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	2	1	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
1.b.10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	2	1	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
1.b.11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	2	1	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Jumlah penderita DM di kabupaten/kota	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
1.b.12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	2	1	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
1.b.13	Urusan Pemerintahan	Kesehatan	2	1	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-

	Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar				Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota							
1.b.14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	2	1	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar. Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
1.c.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha). Luas Kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
1.c.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7	1	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m). Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m).	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
1.c.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3	1	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting. luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
1.c.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	1	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota.. Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
1.c.5	Urusan Pemerintahan	Pekerjaan Umum dan	8	1	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-



	Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Penataan Ruang			cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD. Jumlah rumah di Kabupaten A							
1.c.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8	1	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya. Jumlah IMB yang berlaku	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
1.c.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	1	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap. Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
1.c.8.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8	1	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis. Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
1.c.8.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8	1	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi. Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
1.d.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat	9	1	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n. Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun.	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
1.d.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat	6	1	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni. Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
1.d.3	Urusan Pemerintahan	Perumahan Rakyat	3	1	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-

	Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar				ditangani (ha). Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha							
1.d.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat	6	1	Jumlah unit rumah tidak layak huni. Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
1.d.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat	9	1	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi. Jumlah unit rumah kab/kota	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
1.e.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentrangan, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat	6	1	Jumlah pengaduan yang ditangani. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
1.e.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentrangan, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat	0	1	Jumlah Perda/Perkade yang memuat sanksi yang ditegakkan. Jumlah keseluruhan Perda dan Perkade yang memuat sanksi	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
1.e.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentrangan, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat	2	1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
1.e.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentrangan, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat	6	1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
1.e.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentrangan, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat	4	1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
1.e.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentrangan, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat	6	1	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat.	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-

					Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota							
1.e.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat	0	1	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
1.f.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	9	1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak lanjut pengemis		-	Tidak Ada	-	-	-	-
1.f.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	6	1	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran. Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	3	1	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	11	3	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi. Jumlah tenaga kerja keseluruhan	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2	1	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan). Jumlah tenaga kerja	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-

2.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	10	1	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak. Jumlah Perusahaan Perusahaan	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.a.5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	10	1	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan. Jumlah pencaker yang terdaftar	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.g.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	1	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD. Jumlah seluruh belanja langsung APBD	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.g.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	1	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi. Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.g.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	1	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan. Jumlah penduduk perempuan	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.h.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	8	1	Jumlah cadangan pangan. Jumlah kebutuhan pangan	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.i.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	5	1	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi. seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.i.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	5	1	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum. Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.i.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	5	1	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan Diterbitkan peruntukannya di atas izin lokasi. Luas izin lokasi yang diterbitkan.	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-

2.i.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	5	1	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; Jumlah penerima tanah obyek landreform	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.i.5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	5	1	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah. Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan.	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.i.6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	5	1	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani. Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.j.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	1	1	-	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.j.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	1	1	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani. Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota.	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.j.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	5	1	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota. Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.k.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Sipil	4	1	Jumlah Penduduk wajib KTP-el yang telah Pencatatan melakukan perekaman. Jumlah penduduk wajib KTP-el	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.k.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Sipil	4	1	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA. Jumlah anak usia 0-17 tahun	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.k.1.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Sipil	4	1	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir. Jumlah anak usia 0-18 tahun	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-

	Berkaitan Pelayanan Dasar											
2.k.1.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Sipil	4	1	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama. Jumlah OPD	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.l.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	4	1	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun. Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun)	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.l.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	4	1	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun. Jumlah desa berkembang (per-awal tahun)	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.m.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	5	1	-	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.m.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	4	1	Jumlah peserta KB Aktif Modern. Jumlah Pasangan Usia Subur	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.m.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2	1	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani. Jumlah Pasangan Usia Subur	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.n.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	4	1	-	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.n.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	4	1	-	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.o.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak	Komunikasi dan Informatika	3	1	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-

	Berkaitan Pelayanan Dasar				disediakan oleh Dinas Kominfo. Jumlah OPD							
2.o.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	6	1	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi. Jumlah Layanan Publik	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.o.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	0	1	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Jumlah penduduk	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.p.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	7	1	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset. Jumlah seluruh koperasi	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.p.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	7	1	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha. Jumlah usaha mikro keseluruhan	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.q	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	11	1	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n- 1) di kabupaten/kota. Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.r.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2	1	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi. Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.r.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2	1	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota. Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.r.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2	1	-	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-

2.s.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	7	1	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Jumlah OPD	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.s.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	7	1	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah. jumlah OPD	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.t	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	4	1	Jumlah nilai per area keamanan informasi. Jumlah area penilaian	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.u	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	7	1	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan. Jumlah cagar budaya yang terdata	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.v.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	5	1	-	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.v.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	3	1	-	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.w.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	4	1	-	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
2.w.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	6	1	-	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
3.a	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	5	1	-	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
3.b.1	Urusan Pilihan	Pariwisata	10	1	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1). Jumlah wisatawan tahun n-1	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-

3.b.2	Urusan Pilihan	Pariwisata	10	1	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1). Jumlah wisatawan tahun n-1	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
3.b.3	Urusan Pilihan	Pariwisata	10	1	Jumlah kamar yang terjual. Jumlah kamar yang tersedia	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
3.b.4	Urusan Pilihan	Pariwisata	10	1	-	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
3.b.5	Urusan Pilihan	Pariwisata	10	1	-	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
3.c.1	Urusan Pilihan	Pertanian	5	1	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun. luas panen	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
3.c.2	Urusan Pilihan	Pertanian	1	1	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1). Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
3.d	Urusan Pilihan	Kehutanan	4	0	-	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
3.e	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	1	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin. Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
3.f.1	Urusan Pilihan	Perdagangan	8	1	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan. Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
3.f.2	Urusan Pilihan	Perdagangan	1	1	Realisasi. RDKK	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
3.f.3	Urusan Pilihan	Perdagangan	1	1	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan. jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
3.g.1	Urusan Pilihan	Perindustrian	1	1	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n– Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1). Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
3.g.2	Urusan Pilihan	Perindustrian	1	1	-	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-

3.g.3	Urusan Pilihan	Perindustrian	2	1	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan. Jumlah izin yang dikeluarkan	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
3.g.4	Urusan Pilihan	Perindustrian	0	1	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan. Jumlah izin yang dikeluarkan	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
3.g.5	Urusan Pilihan	Perindustrian	0	1	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan. Jumlah izin yang dikeluarkan	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
3.g.6	Urusan Pilihan	Perindustrian	1	1	-	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
3.h	Urusan Pilihan	Transmigrasi	3	0	-	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
4.a.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	0	1	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan. Jumlah APBD	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
4.a.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	0	1	Jumlah PAD. Jumlah APBD non migas	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
4.a.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	0	1	-	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
4.a.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	0	1	-	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
4.a.5	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	0	1	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures. jumlah belanja APBD	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
4.a.6	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	0	1	-	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
4.b.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	0	1	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n. jumlah kontrak keseluruhan tahun n.	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
4.b.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	0	1	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode dengan kompetitif. Jumlah	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-

					pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif							
4.b.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	0	1	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan. total belanja langsung	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
4.c.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	0	1	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas. Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
4.c.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	0	1	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan). seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
4.c.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	0	1	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi. seluruh jumlah pegawai non Fungsional(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
4.d.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	0	1	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi. total belanja APBD dikurangi satu	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
4.d.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	0	1	Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi. dibagi total PAD dalam APBD dikurangi satu	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
4.d.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	0	1	-	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
4.d.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	0	1	Nilai realisasi SiLPA. total belanja anggaran tahun dalam sebelumnya	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
4.e.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik	0	1	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda. Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	0	-	Tidak Ada	-	-	-	-
4.e.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik	0	1	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda. total jumlah dokumen yang telah dirinci	0	1	Tidak Ada	-	-	-	-

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa Data Dukung IKK LPPD Kabupaten Tanah Laut Sehingga dari total IKK Outcome berjumlah 105 IKK dan IKK Output berjumlah 491 IKK maka sudah terpenuhi Data Dukung IKK LPPD. Sehingga persentase pemenuhan IKK adalah sebesar 100%. Sedangkan untuk skor LPPD hasil EKPPD Tahun 2021, nilai/skor masing-masing Kabupaten dari Tim EKPPD Pusat belum terbit.

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah :

- Bobot nilai per IKK terdapat banyak kekurangan karena realisasi capaian IKK dari SKPD yang kecil atau bahkan kegiatannya tidak / belum dilaksanakan
- Kurangnya komitmen SKPD dalam menyajikan data yang *valid*
- Belum dilakukan revidi oleh APIP terhadap dokumen LPPD SKPD

Solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:

- Peningkatan kompetensi aparatur yaitu kemampuan analisis analisis para Tim Penyusun LPPD
- Peningkatan kualitas pengumpulan data IKK LPPD dan evaluasi internal seluruh SKPD
- Pemanfaatan e-LPPD untuk memudahkan pengisian Data Dukung IKK LPPD
- Adanya *reward* dan *punishment* terhadap SKPD terkait penyusunan dan skor LPPD
- Membuat surat kepada APIP untuk melakukan revidi terhadap dokumen LPPD SKPD

Rencana Aksi :

- Mengadakan sosialisasi penyusunan LPPD dengan narasumber dari Tim Evaluasi Pusat
- Mengajukan kepada pimpinan usulan *reward* dan *punishment* terhadap SKPD terkait penyusunan dan skor LPPD
- Adanya penilaian terhadap LPPD SKPD layaknya seperti SPIP, Reformasi Birokrasi, Zona Integritas dan SAKIP



Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyampaian IKK LPPD secara Desk SKPD

SASARAN 4 Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga
Indikator : Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
4	Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga	Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	100%	416%	416%	Bagian Pemerintahan Mengampu Misi ke- 3 : "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"

Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti pada Tahun 2021 adalah 416%, meningkat dari Tahun 2020 yang sebesar 175%. Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti di tahun 2021 sebanyak 25 Dokumen (416%) dari target sebanyak 6 Dokumen (100%). Kegiatan ini dapat melampaui target dikarenakan di Tahun 2021 terdapat peningkatan yang signifikan terkait penyusunan Dokumen Kerjasama di SKPD karena realisasi kegiatan di Anggaran Perubahan maupun kebijakan-kebijakan yang ditetapkan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Kurangnya koordinasi SKPD terkait mengenai rencana awal penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah
- Penyusunan Dokumen Kerjasama yang tidak sesuai dengan SOP

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- a. Memberikan penjelasan kepada SKPD yang akan melakukan penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah mengenai tata cara penyusunan Dokumen Kerjasama
- b. Memberikan penjelasan mengenai SOP terkait penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah

- Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait rencana kegiatan-kegiatan penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah yang akan direalisasikan di tahun anggaran berjalan maupun anggaran tahun berikutnya.
- Membuat SOP terkait penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah agar SKPD dapat lebih awal menyampaikan *draft* dokumen tersebut sehingga Bagian Tata Pemerintahan dapat memfasilitasi kegiatan secara maksimal.



Rapat Pembasan PKS dan Penandatanganan MoU

❖ Analisa Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

- 1) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti di tunjang dengan Program Pemeritahan Dan Kesejahteraan Rakyat dengan pagu Rp 2.038.691.846,00 dan terealisasi sebesar Rp 914.437.528,00 atau 44,85%. dan dilaksanakan oleh 4 (empat) orang SDM.
- 2) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan indikator Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan di tunjang dengan Program Pemeritahan Dan Kesejahteraan Rakyat dengan pagu Rp 2.038.691.846,00 dan terealisasi sebesar Rp 914.437.528,00 atau 44,85%. dan dilaksanakan oleh 4 (empat) orang SDM.
- 3) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan indikator Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti di tunjang dengan Program Pemeritahan Dan Kesejahteraan Rakyat dengan pagu Rp 260.090.606,00 terealisasi Rp 210.533.982,00 dengan realisasi keuangan sebesar 80,95% dan dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang SDM.
- 4) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD dengan indikator Persentase Pemenuhan IKK SKPD/ SKPD di tunjang dengan Program Pemeritahan Dan Kesejahteraan Rakyat dengan pagu Rp 137.538.870,00 terealisasi Rp 86.280.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar 62,73% dan dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang SDM.
- 5) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga dengan indikator Persentase Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti di tunjang dengan Program Pemeritahan Dan Kesejahteraan Rakyat dengan pagu Rp 129.908.036,00 terealisasi Rp 94.028.632,00 dengan realisasi keuangan sebesar 72,42% dan dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang SDM

Dalam mencapai sasaran, Bagian Pemerintahan memiliki 1 (satu) Program dengan 5 (lima) Kegiatan dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	KET
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	2.038.691.846	914.437.528	44,85	4	
2	Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan		Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	2.038.691.846	914.437.528	44,85	4	
3	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	260.090.606	210.533.982	80,95	3	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	260.090.606	210.533.982	80,95	3	
4	Persentase Pemenuhan IKK SKPD		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	137.538.870	86.280.000	62,73	3	
			Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	137.538.870	86.280.000	62,73	3	
5	Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti		Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	129.908.036	94.028.632	72,42	3	
			Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	129.908.036	94.028.632	72,42	3	

❖ Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah

Untuk capaian indikator sasaran pada Kasubbag Kerjasama dan Otonomi Daerah dilaksanakan melalui Program Pemeritahan Dan Kesejahteraan Rakyat dengan pagu Rp 267.446.906,00 terealisasi Rp 180.308.632.00 dengan realisasi keuangan sebesar 67,41%; dengan kapasitas SDM sebanyak 3 (tiga) orang.

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia
Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	KET
1	Jumlah Dokumen penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	137.538.870	86.280.000	62.73	3	
2	Jumlah dokumen kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil difasilitasi		Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	137.538.870	86.280.000	62.73	3	
			Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	129.908.036	94.082.632	72.42	3	
			Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	129.908.036	94.082.632	72.42	3	

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah dapat dilihat pada analisa sebagai berikut :

Tabel Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Penyusunan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Jumlah Dokumen penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Kasubbag Kerjasama dan Otonomi Daerah
2	Memfasilitasi kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri	Jumlah dokumen kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil difasilitasi	6 Dokumen	25 Dokumen	416%	Kasubbag Kerjasama dan Otonomi Daerah

SASARAN 1 Penyusunan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Indikator : Jumlah Dokumen penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Penyusunan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Jumlah Dokumen penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Kasubbag Kerjasama dan Otonomi Daerah

- Pada indikator sasaran Jumlah penyusunan Dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk capaian Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Tim Penyusun LKPJ dan LPPD

Kabupaten Tanah Laut melaksanakan sosialisasi penyusunan Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Laut sekaligus penyampaian format pengisian Data Dukung IKK LPPD Kabupaten Tanah Laut. Melakukan pengumpulan Data Dukung IKK LPPD Kabupaten Tanah Laut yang terdiri dari IKK Outcome yang berjumlah 105 IKK dan IKK Output yang berjumlah 491 IKK. Melakukan verifikasi dan validasi Data Dukung IKK LPPD. Mengikuti Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) oleh Tim EKPPD Provinsi dan Tim EKPPD Pusat.

SASARAN 2 Memfasilitasi kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri

Indikator : Jumlah dokumen kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil difasilitasi

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Memfasilitasi kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri	Jumlah dokumen kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil difasilitasi	6 Dokumen	25 Dokumen	416%	Kasubbag Kerjasama dan Otonomi Daerah

- 1) Pada indikator sasaran Jumlah kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri untuk capaian Tahun 2021 adalah sebesar 416%. Untuk mendukung tercapainya indikator jumlah dokumen kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri Dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil di tindaklanjuti telah dilaksanakan kegiatan rapat-rapat dengan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah.

Tabel Capaian Sasaran Strategis
 Sub Bagian Otonomi Daerah Terhadap Capaian Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2021		
			2019	2020	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Jumlah Dokumen penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Dokumen	2	2	2	2	100
2	Jumlah dokumen kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil difasilitasi	Dokumen	3	7	6	25	416
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							258%

a. Perbandingan Realisasi Dengan Target Kinerja

Rata-rata capaian kinerja Sub Bagian Otonomi Daerah dari ke dua indikator adalah 258%, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Jumlah penyusunan Dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) terealisasi sebanyak 2 dokumen dari target 2 dokumen, sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.
- 2) Jumlah kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri untuk capaian Tahun 2021 terealisasi sebanyak 25 Dokumen dari target 6 Dokumen sehingga capaian kinerjanya adalah 416%.

b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

- 1) Jumlah penyusunan Dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang terealisasi Tahun 2021 adalah 2 dokumen sedangkan realisasi Tahun 2020 juga sebanyak 2 dokumen sehingga perbandingan realisasi capaian kinerja dari tahun sebelumnya adalah tetap.
- 2) Jumlah kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri untuk capaian Tahun 2021 terealisasi sebanyak 25 Dokumen sedangkan realisasi Tahun 2021 sebanyak 12 dokumen sehingga realisasi capaian kinerja dari tahun sebelumnya meningkat.



Pelaksanaan Sosialisasi penyusuna LPPD



Pelaksanaan Penandatanganan PKS

❖ Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan

Untuk capaian indikator sasaran pada Kasubbag Administrasi Pemerintahan dilaksanakan melalui Program Pemeritahan Dan Kesejahteraan Rakyat dengan pagu Rp 2.038.691.846,00 terealisasi Rp 914.437.528,00 dengan realisasi keuangan sebesar 44,85%.

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia
Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	KET
1	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	2.038.691.846	914.437.528	44.85	4	
			Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	2.038.691.846	914.437.528	44.85	4	

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dapat dilihat pada analisa sebagai berikut :

Tabel Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Memfasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintah umum	Jumlah laporan hasil penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan umum yang berhasil difasilitasi	50 Kali	39 Kali	78%	Kasubbag Administrasi Pemerintahan
2	Memfasilitasi kegiatan perayaan Hari Besar Nasional dan Kabupaten	Jumlah kegiatan perayaan Hari Besar Nasional dan Kabupaten yang berhasil difasilitasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	Kasubbag Administrasi Pemerintahan
3	Memfasilitasi kegiatan Forkopimda	Jumlah laporan hasil fasilitasi kegiatan Forkopimda	12 Kali	9 Kali	75%	Kasubbag Administrasi Pemerintahan

SASARAN 1 Memfasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintah umum

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan pemerintahan umum yang berhasil difasilitasi

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Memfasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintah umum	Jumlah laporan hasil penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan umum yang berhasil difasilitasi	50 Kali	39 Kali	78%	Kasubbag Administrasi Pemerintahan

Pada Tahun 2021 Jumlah rapat penyelenggaraan pemerintahan umum yang berhasil difasilitasi terealisasi sebesar 78% yaitu sebanyak 39 Kali dari target sebesar 50 Kali. Untuk mendukung tercapainya indikator Persentase Permasalahan Penyelenggaraan

Pemerintahan Umum yang berhasil di fasilitasi telah dilaksanakan kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi (*Coffee Morning*).

a. Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata-rata capaian kinerja sub bagian administrasi pemerintahan dari indikator adalah 78%, sebagai berikut :

- Persentase Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di fasilitasi terealisasi sebanyak 39 kali dari target 50 kali, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 78%.

b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

- Persentase Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di fasilitasi pada Tahun 2021 sebanyak 39 kali, mengalami penurunan sebanyak 2 kali dari Tahun 2020, sehingga persentase realisasi Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 4,87%.



Kegiatan rapat Koordinasi Pimpinan SKPD

SASARAN 2 Memfasilitasi kegiatan perayaan Hari Besar Nasional dan Kabupaten

Indikator : Jumlah kegiatan perayaan Hari Besar Nasional dan Kabupaten yang berhasil difasilitasi

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Memfasilitasi kegiatan perayaan Hari Besar Nasional dan Kabupaten	Jumlah kegiatan perayaan Hari Besar Nasional dan Kabupaten yang berhasil difasilitasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	Kasubbag Administrasi Pemerintahan

Pada Tahun 2021 Realisasi Jumlah kegiatan Perayaan Hari Besar Nasional dan Kabupaten yang berhasil difasilitasi sesuai dengan target yaitu 2 Kegiatan.

a. Perbandingan Realisasi Dengan Target

- Persentase Jumlah kegiatan perayaan Hari Besar Nasional dan Kabupaten yang berhasil difasilitasi yang berhasil difasilitasi terealisasi sebesar 2 Kegiatan dari target 2 Kegiatan, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.

b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

- Persentase Jumlah kegiatan perayaan Hari Besar Nasional dan Kabupaten yang berhasil difasilitasi Tahun 2021 sebanyak 2 Kegiatan sama seperti dari Tahun 2020 sehingga capaian kinerjanya dari tahun sebelumnya tetap sama adalah sebesar 100%.



Kegiatan perayaan Hari Jadi Kab. Tanah Laut



Kegiatan perayaan HUT RI

SASARAN 3 Memfasilitasi kegiatan Forkopimda

Indikator : Jumlah laporan hasil fasilitasi kegiatan Forkopimda

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
3	Memfasilitasi kegiatan Forkopimda	Jumlah laporan hasil fasilitasi kegiatan Forkopimda	12 Kali	9 Kali	75%	Kasubbag Administrasi Pemerintahan

Pada Tahun 2021 Realisasi Jumlah kegiatan Forkopimda yang berhasil di fasilitasi yaitu 9 kali dari target 12 kali.

a. Perbandingan Realisasi Dengan Target

- Persentase Jumlah kegiatan Forkopimda yang berhasil difasilitasi terealisasi sebesar 9 kali dari target 12 kali, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 75%.

b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

- Persentase Jumlah kegiatan Forkopimda yang berhasil difasilitasi Tahun 2021 sebanyak 9 kali sama seperti dari Tahun 2020 sehingga capaian kinerja dari tahun sebelumnya tetap sama sebesar 9 kali.



Kegiatan Rapat koordinasi Forkopimda

❖ Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan

Untuk capaian indikator sasaran pada Kasubbag Administrasi Kewilayahan Pada Tahun 2021 dilaksanakan melalui Program Pemeritahan Dan Kesejahteraan Rakyat dengan pagu dengan pagu Rp 260.090.606,00 terealisasi Rp 210.533.982,00 dengan realisasi sebesar 80,95% pada Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan.

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	KET
3	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	260.090.606	210.533.982	80.95	3	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	260.090.606	210.533.982	80.95	3	

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan dapat dilihat pada analisa sebagai berikut :

Tabel Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
6	Melakukan pembinaan administrasi Bidang Kewilayahan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Kecamatan yang dibina	11 Kali	11 Kali	100%	Kasubbag Administrasi Kewilayahan
7	Memfasilitasi penyelesaian penegasan batas antar Daerah dan Kecamatan	Jumlah laporan penyelesaian penegasan batas antar Daerah dan Kecamatan yang difasilitasi	2 Laporan	2 Laporan	100%	Kasubbag Administrasi Kewilayahan

SASARAN 6 Melakukan pembinaan administrasi Bidang Kewilayahan Kecamatan/Kelurahan

Indikator : Jumlah Kecamatan yang dibina

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
6	Melakukan pembinaan administrasi Bidang Kewilayahan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Kecamatan yang dibina	11 Kali	11 Kali	100%	Kasubbag Administrasi Kewilayahan

Pada Tahun 2021 Jumlah Kecamatan yang dibina terealisasi sebesar 100% yaitu sebanyak 11 Kali dari target sebesar 11 Kali.

a. Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata-rata capaian kinerja sub bagian administrasi kewilayahan dari indikator adalah 100%, sebagai berikut :

- Persentase Penyelenggaraan Pembinaan Kecamatan yang berhasil di fasilitasi terealisasi sebanyak 11 kali dari target 11 kali, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 11%.

b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Persentase Permasalahan Penyelenggaraan Pembinaan Kecamatan yang berhasil di fasilitasi pada Tahun 2021 sebanyak 11 kali, sama seperti dari Tahun 2020, sehingga persentase realisasi Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya sebesar 100%.

c. Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Untuk mendukung tercapainya indikator Persentase Penyelenggaraan Pembinaan Kecamatan yang berhasil di fasilitasi, dimana telah dilaksanakan melalui Program Pemeritahan Dan Kesejahteraan Rakyat melalui Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp 260.090.606,00 dan terealisasi sebesar Rp 210.533.982,00 atau 80,95%.

Bahwa untuk mendukung tercapainya indikator Persentase Penyelenggaraan Pembinaan Kecamatan yang berhasil di fasilitasi telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan Kecamatan/Kelurahan yang terealisasi sebesar 80,95%.

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini antara lain :

- Jarak antara Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan yang cukup Jauh.
- Permasalahan yang tidak menentu karena bersifat urgensi serta pandemi Covid-19 yang mengharuskan untuk menjaga jarak dan menjauhi kerumunan.

Sedangkan solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan tersebut adalah :

- Meningkatkan Mobilitas dan mengatur jadwal perjalanan ke Kecamatan dengan baik dalam Pelaksanaan Pembinaan Kecamatan
- Melaksanakan Rakor Camat di Satu titik tempat agar tidak selalu berkunjung ke satu Kecamatan saja.

Rencana Aksi :

Melaksanakan Pembinaan Kecamatan dengan konsep berbeda



Kegiatan rapat koordinasi Camat

SASARAN 7 Memfasilitasi penyelesaian penegasan batas antar Daerah dan Kecamatan

Indikator : Jumlah laporan penyelesaian penegasan batas antar Daerah dan Kecamatan yang difasilitasi

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
7	Memfasilitasi penyelesaian penegasan batas antar Daerah dan Kecamatan	Jumlah laporan penyelesaian penegasan batas antar Daerah dan Kecamatan yang difasilitasi	2 Laporan	2 Laporan	100%	Kasubbag Administrasi Kewilayahan

Pada Tahun 2021 Jumlah laporan penyelesaian penegasan batas antar Daerah dan Kecamatan yang difasilitasi terealisasi sebesar 100% yaitu sebanyak 2 Kasus dari target sebesar 2 Kasus.

a. Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata-rata capaian kinerja sub bagian administrasi Kewilayahan dari indikator adalah 100%, sebagai berikut :

Persentase Jumlah laporan penyelesaian penegasan batas antar Daerah dan Kecamatan yang difasilitasi terealisasi sebanyak 2 kasus dari target 2 kasus, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.

b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Persentase Jumlah laporan penyelesaian penegasan batas antar Daerah dan Kecamatan yang difasilitasi pada Tahun 2021 sebanyak 2 kasus, sama seperti dari Tahun 2020, sehingga persentase realisasi Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya sebesar 100%.

c. Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Bahwa untuk mendukung tercapainya indikator Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti telah dilaksanakan kegiatan:

Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Kabupaten Tanah Laut.

Pengecekan dilapangan dengan berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Provinsi dan Tim PBD Kabupaten/Kota yang berbatasan.

Melaksanakan rapat koordinasi Tim PBD Kabupaten dan mengikuti rapat koordinasi fasilitasi Tim PBD Provinsi Kalimantan Selatan.

Melakukan inventarisasi data-data dukung terkait wilayah yang terdapat konflik, khususnya di Desa Bentok Darat yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar di Desa Kiram.

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

Adanya penyampaian opsi-opsi maupun usulan titik segmen batas yang berbeda-beda oleh pihak Kabupaten Banjar pada setiap pelaksanaan rapat koordinasi yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Adanya pandemi Covid-19.

Solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:

Mempertemukan Kepala Daerah antara Kabupaten yang berbatasan dengan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar segera mendapat putusan titik segmen batas yang di sepakati.

Menerapkan protokol Kesehatan yang ketat pada setiap pelaksanaan rapat koordinasi baik di daerah maupun yang di fasilitasi Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

Melaksanakan koordinasi dengan Tim PBD Provinsi Kalimantan Selatan untuk segera melakukan fasilitasi survey lapangan untuk persiapan pemancangan batas Penegasan Batas Daerah di titik-titik yang disepakati.

Meningkatkan koordinasi dengan Tim PBD Kalimantan Selatan untuk penyelesaian dokumen-dokumen yang diperlukan untuk Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penegasan Batas Daerah.



Kegiatan Penetapan batas daerah

Analisa Capaian Sasaran Strategis

Kepala Bagian Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	80%	65%	81,25%	Bagian Organisasi Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"
2	Meningkatnya Nilai Area Perubahan RB SKPD	Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60	30%	70%	233,33%	
3	Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80	100%	92,5	92,5%	
		Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	100%	
4	Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	100%	100%	100%	
ESELON IV						
1	Pelaksanaan penataan kelembagaan yang efektif	Jumlah SKPD yang telah memiliki uraian tugas rinci dan jelas	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan
		Jumlah SKPD yang memiliki SOTK yang jelas	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan
2	Pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan	Jumlah perangkat daerah yang memiliki informasi jabatan	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan
		Jumlah perangkat daerah yang memiliki evaluasi jabatan	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Jumlah perangkat daerah yang dianalisis beban kerja	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan
		Jumlah perangkat daerah yang memiliki standar kompetensi jabatan	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan
3	Penguatan Pelayanan Publik	Jumlah unit pelayanan publik yang melaksanakan standar pelayanan publik	3 SKPD	3 SKPD	100%	Kasubbag Pelayanan Publik Dan Tata Laksana
		Jumlah SKPD yang berpartisipasi pada Inovasi pelayanan publik	5 SKPD	5 SKPD	100%	Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana
4	Penguatan Tata Laksana	Jumlah SKPD yang sudah memiliki SOP	20 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		Jumlah regulasi standarisasi pedoman kerja	5 Perbup	4 SK	80%	Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana
5	Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai Permenpan 53 Tahun 2014	Jumlah laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang disusun sesuai Permenpan 53 Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi
6	Pelaksanaan Pembinaan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah SKPD yang di diasistensi terkait laporan kinerja	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi
7	Penguatan Sistem Reformasi Birokrasi	Jumlah SKPD yang dibina terkait pelaksanaan reformasi birokrasi	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Bagian Organisasi terhadap capaian tahun sebelumnya

Tabel Capaian Indikator Sasaran Strategis
 Bagian Organisasi terhadap capaian tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2021		
			2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	%	62,5	92,5	80%	65%	81,25%
2	Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60	%	12,5%	55	30%	70%	233,33%
3	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80	%	100%	100	100%	92,5	92,5%
4	Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	%	100	100	100%	100%	100%
5	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	%	100	100	100%	100%	100%

* : data sementara BPS Kabupaten Tanah Laut

❖ Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Kinerja

Rata-rata capaian kinerja Bagian Organisasi dari ke tujuh indikator adalah 139,93, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10 terealisasi sebesar 65% dari target 80%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 81,25%.
- 2) Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60 terealisasi sebesar 70% dari target 30%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 233,33%.
- 3) Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80 terealisasi sebesar 92,5% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 92,5%.
- 4) Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) terealisasi sebesar 100% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.

- 5) Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif terealisasi sebesar 100% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.
- 6) Persentase Analisa dan evaluasi jabatan sesuai proporsinya terealisasi sebesar 100% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.

❖ **Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

- 1) Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10 Tahun 2021 sebesar 65% mengalami penurunan sebesar 27,5% dari tahun 2020 yaitu sebesar 92,5%.
- 2) Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60 Tahun 2020 adalah terealisasi sebesar 70% (28 SKPD dari 40 SKPD) dari target 30%, mengalami peningkatan sebesar 15% dibandingkan tahun 2020 yaitu 55%.
- 3) Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80 Tahun 2021 adalah 92,5%, persentasenya menurun dari Tahun 2020 sebesar 100%.
- 4) Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tahun 2021 adalah 100% sama dengan Tahun 2020 yang juga sebesar 100%.
- 5) Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif tahun 2021 adalah 100% sama dengan Tahun 2020 yang juga sebesar 100%.

❖ **Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

SASARAN 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Minimal 10

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	80%	65%	81,25%	Bagian Organisasi Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Untuk mendukung tercapainya indikator Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10 telah dilaksanakan kegiatan :

- 1) Tim SAKIP Melaksanakan asistensi terhadap SAKIP SKPD yang memiliki nilai SAKIP SKPD di bawah 70. Desk Penyelarasan dokumen SAKIP seluruh SKPD dengan melakukan penyelarasan pohon kinerja terhadap Renstra, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama karena laporan kinerja disusun berdasarkan seluruh dokumen-dokumen tersebut. Kegiatan pada bulan Agustus bertempat di Aula Inspektorat Kabupaten Tanah Laut
- 2) Tim SAKIP melaksanakan asistensi terhadap laporan kinerja 40 SKPD yang dilaksanakan pada bulan Februari Tahun 2021 di Ruang Rapat Barakat Lantai II Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Melakukan perbaikan-perbaikan terhadap perencanaan kinerja dan indikator kinerja setiap jabatan mulai dari Esselon II, III dan IV agar indikator kinerja seluruh SKPD sehingga bersifat spesifik (*spesific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*achivable*), berorientansi hasil (*Result Oriented*), yang dapat dicapai dalam periode atau satuan waktu tertentu (*time-bond*) atau SMART.

Berikut disajikan nilai hasil Evaluasi SAKIP seluruh SKDP pada komponen Pelaporan Kinerja di Lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2021.

Hasil Evaluasi SAKIP seluruh SKDP di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO	ENTITAS AKUNTABILITAS	NILAI KOMPONEN
		PEN CAPAIAN KINERJA
		20%
(1)	(2)	(3)
1	Inspektorat	13,37
2	BPKAD	13,3
3	Sekretariat Daerah	13.21
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.21
5	Dinas Pariwisata	12.58
6	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	12.31
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.23

NO	ENTITAS AKUNTABILITAS	NILAI KOMPONEN
		PEN CAPAIAN KINERJA
		20%
8	Kecamatan Kurau	12.21
9	Badan Pendapatan Daerah	12.14
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.68
11	Kecamatan Bajuin	10.88
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.79
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	10.69
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.61
15	Sekretariat DPRD	10.61
16	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	10.61
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10.61
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.61
19	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	10.61
20	Dinas Kesehatan	10.52
21	Kecamatan Jorong	10.52
22	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	10.49
23	Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.42
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.22
25	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	10.15
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.03
27	Kecamatan Pelaihari	9.97
28	Kecamatan Bumi Makmur	9.8
29	Kecamatan Bati-Bati	9.77
30	Kecamatan Tambang Ulang	9.77
31	Kecamatan Batu Ampar	9.62
32	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	9.61
33	Dinas Perhubungan	9.45

NO	ENTITAS AKUNTABILITAS	NILAI KOMPONEN
		PEN CAPAIAN KINERJA
		20%
34	Kecamatan Takisung	9.35
35	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	9.26
36	Dinas Sosial	8.68
37	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8.43
38	Kecamatan Kintap	8.29
39	Kecamatan Panyipatan	7.08
40	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.97

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk komponen pelaporan kinerja, ada 26 SKPD dengan nilai di atas 10 dan 14 SKPD dengan nilai di bawah 10 atau sebesar 65%. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

- Kurangnya komitmen dan keterlibatan pimpinan dan seluruh pejabat struktural dalam kegiatan Akuntabilitas Kinerja.
- Kurang selarasnya dokumen AKIP Karena laporan kinerja disusun berdasarkan dokumen perencanaan.
- Kurangnya kualitas evaluasi kinerja internal;
- Belum dimanfaatkannya informasi kinerja pada laporan kinerja dalam pelaksanaan manajemen kinerja pada periode berikutnya.

Solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:

- Peningkatan kompetensi aparatur yaitu kemampuan analisis analisis para penanggungjawab program serta tim penyusun Laporan kinerja
- Tetap dilaksanakan asistensi terhadap laporan kinerja seluruh SKPD.
- Peningkatan kualitas pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja secara triwulan dan evaluasi internal seluruh SKPD.
- Pemanfaatan informasi kinerja pada laporan kinerja dalam pelaksanaan manajemen kinerja pada periode berikutnya.
- Adanya reward dan punishment terhadap kinerja organisasi.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- memberikan reward dan punishment kepada SKPD sesuai dengan nilai beberapa indikator salah satunya adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperoleh sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2021.
- Mengintegrasikan seluruh sistem pengukuran kinerja individu dan organisasi.
- Dilaksanakan workshop dalam rangka peningkatan aparatur pengawas dan auditor.

Tahun 2021, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kegiatan penataan organisasi sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi Birokrasi dengan Anggaran sebesar Rp 281.526.272 dan terealisasi sebesar Rp 203.645.292 atau 72,5% dan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 3 Orang yaitu Kepala Bagian Organisasi, Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi dan Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja.



Dokumentasi Kegiatan Evaluasi SAKIP SKPD

SASARAN 2 Meningkatnya Nilai Area Perubahan RB SKPD

Indikator 1 : Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya Nilai Area Perubahan RB SKPD	Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60	30%	70	233.33	Bagian Organisasi Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

--	--	--	--	--	--	--

Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60 terealisasi sebesar 70% (28 SKPD dari 40 SKPD) dari target 30% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 233,33%.

Realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 15%, jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 55%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka capainnya adalah sebesar 70% dengan target 100%. Jadi diharapkan di Tahun 2023 seluruh SKPD telah memiliki nilai RB minimal B (cukup baik) karena RPJMD menargetkan Indeks Reformasi Birokrasi Baik (75) untuk Tahun 2023.

Berikut disajikan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Kabupaten terhadap 8 (delapan) area perubahan Tahun 2020 :

NO	SKPD	NILAI PEMENUHAN (14,6)	NILAI REFORM (21,7)	NILAI TOTAL (36,30)	PERSENTASE %	KATEGORI
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.83	21.36	35.19	96.94	AA
2	Inspektorat Kabupaten	13.46	21.25	34.71	95.62	AA
3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	14.25	20.15	34.4	94.77	AA
4	Sekretariat Daerah	13.75	19.54	33.29	91.71	AA
5	Badan Kesatuan bangsa dan Politik	13.33	19.76	33.09	91.16	AA
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.6	18.91	30.51	84.05	A
7	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12.83	17.45	30.28	83.42	A
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.83	17.45	30.28	83.42	A
9	Kecamatan Bumi Makmur	12.83	17.45	30.28	83.42	D
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.26	17.93	30.19	83.17	A
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11.85	17.85	29.7	81.82	A
12	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	12.29	17.19	29.48	81.21	A
13	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	11.49	17.98	29.47	81.18	A
14	Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	11.37	16.87	28.24	77.80	BB
15	Dinas Pariwisata	9.74	18.42	28.16	77.58	BB
16	Kecamatan Takisung	12.31	15.49	27.8	76.58	BB
17	Dinas Kesehatan	9.97	17.47	27.44	75.59	CC
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	10.76	16.54	27.3	75.21	BB
19	Dinas Sosial	10.77	16.44	27.21	74.96	BB
20	Dinas Perhubungan	9.82	17.36	27.18	74.88	BB
21	Badan Pendapatan Daerah	9.9	16.76	26.66	73.44	BB

22	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	13.47	13.11	26.58	73.22	BB
23	Dinas Pendidikan	10.44	15.22	25.66	70.69	BB
24	Sekretariat DPRD	8.27	14.98	23.25	64.05	B
25	Kecamatan Panyipatan	11.12	12.1	23.22	63.97	B
26	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.46	11.69	22.15	61.02	B
27	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	9.36	12.56	21.92	60.39	B
28	Kecamatan Batu Ampar	9	12.16	21.16	58.29	CC
29	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	7.8	11.87	19.67	54.19	CC
30	Kecamatan Jorong	7.9	11.36	19.26	53.06	CC
31	Kecamatan Pelaihari	9.36	7.85	17.21	47.41	C
32	Kecamatan Bajuin	7.81	9.3	17.11	47.13	C
33	Kecamatan Kurau	8.08	8.69	16.77	46.20	C
34	Dinas Pemebrdayaan Masyarakat dan Desa	6.02	10.2	16.22	44.68	C
35	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran	7.39	7.37	14.76	40.66	C
36	Kecamatan Tambang Ulang	5	9.26	14.26	39.28	C
37	Kecamatan Kintap	5.17	6.49	11.66	32.12	C
38	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	3.77	4.04	7.81	21.52	D
49	Kecamatan Bati Bati	1.72	5.7	7.42	20.44	D
40	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	4.47	2.69	7.16	19.72	D

Bagian Organisasi merupakan sekretariat pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Untuk mencapai indikator nilai komponen area perubahan SKPD dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melaksanakan sosialisasi 8 (delapan) area perubahan RB
- Melaksanakan bimtek agen perubahan seluruh SKPD
- Menginternalisasikan rencana aksi Reformasi Birokrasi dan kalimat-kalimat positif dalam budaya kerja.
- Pelaksanaan Quick Win RB
- Pelaksanaan program prioritas RB sesuai Roadmap RB 2020-2024.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Belum optimalnya internalisasi roadmap RB sampai dengan level organisasi terendah
- Belum optimalnya peran agen perubahan dan role model dalam menjalankan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi.
- Belum optimalnya Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.

Rencana Aksi:

- Optimalisasi internalisasi roadmap RB sampai dengan level organisasi terendah
- optimalisasi agen perubahan dan role model dalam menjalankan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi.
- Melaksanakan rapat Tim secara berkala agar reformasi birokrasi bisa menjalankan tugas secara optimal.



Dokumentasi Kegiatan Evaluasi RB Tahun 2021

Tahun 2020, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kegiatan penataan organisasi sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi Birokrasi dengan Anggaran sebesar Rp 281.526.272 dan terealisasi sebesar Rp 203.645.292 atau 72,5% dan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 3 Orang yaitu Kepala Bagian Organisasi, Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi dan Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja.

SASARAN 3 Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik

Indikator 1 : Persentase Unit Pelayanan dengan Nilai SKM Minimal 80

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
3	Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80	100%	92,5	92,5%	Bagian Organisasi Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80 pada Tahun 2021 adalah 92,5%, persentasenya menurun daripada Tahun 2020 sebesar 100%. Pada Tahun 2021 nilai SKM Kabupaten Tanah Laut sebesar 84,53 dengan kategori **"BAIK"**. Rata-rata persentase nilai SKM masing-masing SKPD bisa dikatakan Baik, karena nilai interval yang didapat oleh masing-masing SKPD antara 76,61-88,30.

Dari 40 SKPD yang memperoleh nilai SKM Minimal 80, ada 3 SKPD yang memperoleh nilai dibawah 80 yaitu Bappeda (79,81), Dinas PUPRP (77,39), dan Diskopdag (79,06).

Pada Tahun 2021 ada 9 SKPD yang kategori nilai SKM nya kategori **"SANGAT BAIK"** yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (94,16), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (89,28), Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (95,72), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (89,54), Dinas

P2KBP3A (88,97), Satpol PP (89,97), Kecamatan Panyipatan (88,80), dan Kecamatan Bumi Makmur (91,44).

Ada beberapa SKPD/Unit Pelayanan yang unsur pelayanannya dianggap paling memuaskan oleh responden dan mencapai angka 4,00, yang terdapat pada yang terdapat pada Bappeda, BPKAD, BPBD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kintap, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Bumi Makmur. Sedangkan unsur pelayanan yang kurang memuaskan dengan angka dibawah 3,00 terdapat pada Badan Kesbangpol, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor.

Kepuasan terhadap layanan yang telah diberikan salah satunya dikarenakan adanya kegiatan **Manunggal Tuntung Pandang yaitu kegiatan bermalam di desa untuk Bupati dan seluruh jajaran** dan Perangkat Daerah. Pada saat manunggal tuntung pandang dilaksanakan, SKPD pemberi layanan misalnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, DPMPKS memberikan layanan kepada seluruh masyarakat. Hal ini juga mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat tanpa mereka harus datang langsung ke Kantor SKPD pemberi layanan

Rekomendasi :

- Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan kejelasan dan kepastian petugas pelayanan serta kenyamanan lingkungan.
- Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan yang masih kurang baik, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kesesuaian biaya pelayanan pada SKPD/Unit pelayanan dapat lebih baik lagi dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.
- Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas dan menetapkan standardisasi internal mengenai sikap layanan serta disiplin kerja.

- Diperlukan upaya untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan satuan kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh pelanggan seperti saluran telepon bebas pulsa, sms, email, dan atau kotak saran.
- Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap petugas dalam memberikan pelayanan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah: (1) memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas, (2) memberikan informasi secara komunikatif kepada pelanggan.
- Perlu pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan terus memotivasi untuk mendapatkan prestasi di masa yang akan datang serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan dalam bentuk insentif khusus.
- Kegiatan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dapat terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan membandingkan Survei Kepuasan Masyarakat terdahulu secara berkala, survei bisa dilakukan secara periodik (3 sampai dengan 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan perubahan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Masih ada beberapa SKPD yang kualitas pelayanannya kurang baik
- Keterlambatan SKPD dalam menyampaikan laporan penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada SKPDnya sehingga menghambat dalam penyusunan Laporan SKM Kabupaten.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan kejelasan dan kepastian petugas pelayanan serta kenyamanan lingkungan.
- Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan yang masih kurang baik, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kesesuaian biaya pelayanan pada SKPD/Unit pelayanan dapat lebih baik lagi dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.

- Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas dan menetapkan standarisasi internal mengenai sikap layanan serta disiplin kerja.
- Diperlukan upaya untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan satuan kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh pelanggan seperti saluran telepon bebas pulsa, sms, email, dan atau kotak saran.
- Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap petugas dalam memberikan pelayanan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah: (1) memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas, (2) memberikan informasi secara komunikatif kepada pelanggan.
- Perlu pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan terus memotivasi untuk mendapatkan prestasi di masa yang akan datang serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan dalam bentuk insentif khusus.
- Kegiatan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dapat terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan membandingkan Survei Kepuasan Masyarakat terdahulu secara berkala, survei bisa dilakukan secara periodik (3 sampai dengan 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan perubahan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Rencana aksi

- Dilakukan survei Kepuasan Masyarakat oleh pihak eksternal;
- Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat di SKPD berkelanjutan secara berkala, (3 sampai dengan 6 bulan sekali).
- Pemberian reward and punishment terhadap SKPD dengan predikat layanan terburuk dan terbaik.

Indikator 2 : Persentase Unit Pelayanan dengan Nilai SKM Minimal 80

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
4	Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	100%	Bagian Organisasi Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Untuk capaian SKPD yang memiliki SOP Tahun 2021 adalah sebesar 100%, persentasenya sama dengan Tahun 2020 yaitu 100%.

Dari beberapa SKPD yang sudah memiliki SOP, ada beberapa SKPD telah melakukan revisi terhadap SOPnya masing-masing menyesuaikan dengan PERDA SOTK Nomor 6 Tahun 2016. Akan tetapi berdasarkan hasil inventarisasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dikatakan bahwa data Peraturan Bupati/Walikota se Kalimantan Selatan dari tahun 2015 s.d 2021 ditemukan penetapan Standar Pelayanan Prosedur (SOP) dengan Peraturan Bupati/Walikota. Sehingga penetapan SOP dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (8), Pasal 7 ayat (2), Pasal 13, Pasal 20 ayat (3) Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut, untuk tahun 2022 bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut akan melakukan inventarisir ulang sekaligus melakukan evaluasi terhadap SOP yang ada pada SKPD se Kabupaten Tanah Laut.

Kedepannya diharapkan SOP yang ada pada setiap SKPD telah sesuai dengan Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 sehingga bisa dirangkum dalam 1 Keputusam Bupati Tanah Laut.

Adapun program/kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Kegiatan Penataan Organisasi/Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp.209.100.976,- dengan realisasi sebesar Rp.149.376.596,- (71%).

Untuk serapan anggaran sdh melebihi 50% dari pagu yang ada, hal ini disebabkan karena Kabupaten Tanah Laut sudah mulai berada pada zona kuning, sehingga beberapa kegiatan sudah dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan.

SASARAN 4 Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Analisa dan Evaluasi Jabatan

Indikator Persentase Perangkat Daerah dengan Kelembagaan yang Efektif

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
4	Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	100%	100%	100%	Bagian Organisasi Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif tahun 2021 adalah 100% sama dengan tahun 2020 yang juga sebesar 100%

Perangkat Daerah yang berjumlah 40 SKPD seluruhnya telah memiliki SOTK dan uraian tugas rinci dan jelas sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Pada tahun 2021 dilaksanakan penyederhanaan struktur organisasi, sehingga harus diadakan pula perubahan SOTK. Sebanyak 28 SKPD mengalami penyederhanaan struktur organisasi, terkecuali BPBD dan Kecamatan.

Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 276.217.276,- dan realisasinya sebesar Rp.160.616.996,- atau 58%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk menunjang kegiatan Tim kegiatan di bidang kelembagaan Tahun anggaran 2021 dan Belanja Barang Jasa, seperti ATK, narasumber, cetak dan penggandaan dokumen serta makanan dan minuman kegiatan. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2021 berupa :

1. Rapat Tim Kelembagaan :
 - a. Ekpose tentang pembentukan UPTD Puskesmas Durian Bungkok dan UPTD Puskesmas Bentok pada Dinas Kesehatan;

- b. Ekpose tentang pembentukan UPTD Kebersihan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - c. Ekpose tentang penggabungan UPTD Peralatan dengan UPTD Pengujian Material Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan menjadi UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi;
 - d. Rapat Tim membahas penyederhanaan struktur organisasi dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi;
 - e. Rapat Tim membahas penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional;
 - f. Rapat Tim membahas rancangan perubahan Peraturan Daerah tentang Susunan Perangkat Daerah; dan
 - g. Rapat Tim membahas tentang Pemberian Tambahan Penghasilan ASN.
2. Melaksanakan pembentukan Peraturan Bupati tentang SOTK Perangkat Daerah;
 3. Melaksanakan pembentukan Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD baru;
 4. Melaksanakan penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah;
 5. Melaksanakan penyusunan dokumen analis jabatan dan analisis beban kerja serta evaluasi jabatan;
 6. Melaksanakan penyusunan dokumen Standar Kompetensi Jabatan Administrator.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Anjab

INDIKATOR	TOLOK UKUR	KINERJA	
		TARGET	REALISASI
Masukan	Tersedianya Dana, SDM, dan Bahan	Rp 276.217.276,-	Rp 160.616.996,-
Keluaran	Jumlah revisi Raperda Kelembagaan Perangkat Daerah/ Revisi Perbup UPTD/Perbup Tupoksi/ Perbup Uraian Tugas	11 Dokumen	11 Dokumen

Tabel Realisasi Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Anjab

NO	PERBUP	TENTANG	TANGGAL
1	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2021	Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.	15 Maret 2021
2	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 101 Tahun 2021	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Durian Bungkok dan Pusat Kesehatan Masyarakat Bentok Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.	28 Oktober 2021
3	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 104 Tahun 2021	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.	10 November 2021
4	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2021	Standar Kompetensi Manajerial dan Standar Kompetensi Sosial Kultural Jabatan Administrator Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.	1 Desember 2021
5	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 109 Tahun 2021	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.	1 Desember 2021
6	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 111 Tahun 2021	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin.	13 Desember 2021
7	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.	13 Desember 2021
8	-	Laporan Evaluasi Kelembagaan Tahun 2021 berdasarkan PermenpanRB Nomor 20 Tahun 2018.	April 2021
9	Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 061/01428/ORG	Tanggal hal Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) Kab/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan	13 Oktober 2021
10	Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/4249/OTDA	Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan	29 Juni 2021
11	Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/8159/OTDA	Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan	10 Desember 2021

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas terdapat beberapa kendala antara lain :

- Dalam penyusunan usulan Penyetaraan Jabatan dari Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional, Jabatan Fungsional yang ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodir penyetaraan jabatan dari Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional sehingga banyak terdapat jabatan struktural disetarakan ke jabatan yang kurang tepat.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Menyetarakan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional yang paling mendekati, atau bila tidak ada, maka disetarakan ke jabatan yang sifatnya umum, yaitu fungsional Analis Kebijakan.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Melakukan Monev secara berkala dan berkelanjutan



Foto Kegiatan Rapat Tim Kelembagaan

❖ **Analisa Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia**

Dalam mencapai sasaran bagian organisasi memiliki Program Pembinaan, Pengembangan, Penataan Kelembagaan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan dengan pagu Rp 409.816.840,00 terealisasi Rp 166.373.300,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar 40,60%.

Realisasi keuangan Bagian Organisasi relatif rendah yaitu sebesar 40,60%. Jumlah SDM di Bagian Organisasi terdiri dari, Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi berjumlah 2 orang, Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan berjumlah 3 orang,

Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana berjumlah 2 orang. Hal ini dikarenakan terjadinya wabah Covid 19 sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Bagian Organisasi yaitu:

1. Pelaksanaan bimbingan teknis bagi role model dan agen perubahan yang telah dijadwalkan dengan narasumber dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) Bandung.
2. Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang hanya dilaksanakan secara Desk oleh Tim Panel dan untuk beberapa Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dilakukan secara daring via *zoom meeting*.
3. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang hanya dilaksanakan melalui Desk oleh Tim Panel dan untuk beberapa Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dilakukan secara daring via *zoom meeting*.
4. Evaluasi Pembangunan Zona Integritas yang hanya dilaksanakan melalui *zoom meeting*.
5. Bimbingan Teknis penyusunan Laporan Kinerja dengan narasumber dari Biro Organisasi Provinsi dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan yang ditunda pelaksanaannya dikarenakan wabah Covid.
6. Pelaksanaan Bimbingan Teknis penyusunan Peta Proses Bisnis juga tidak dapat dilaksanakan.

Harapannya, kegiatan-kegiatan tersebut di Tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan tetap mempertimbangan situasi terakhir pandemi Covid 19.

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	KET
1	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan Penataan Organisasi	281.526.272	207.506.564	73.70	3 orang	
2	Nilai Komponen Area Perubahan RB SKPD		Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	281.526.272	207.506.564	73.70	3 orang	
3	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80		Kegiatan Penataan Organisasi	209.100.976	151.872.232	72.63	2 orang	
4	Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)		Sub Kegiatan Fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana	209.100.976	151.872.232	72.63	2 orang	
5	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif		Kegiatan Penataan Organisasi	276.217.276	162.547.632	58.85	3 orang	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	276.217.276	160.616.996	58%	3 orang	

❖ **Analisa Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan**

Untuk capaian Indikator sasaran pada Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 276.217.276,- dan terealisasi sebesar Rp 160.616.996,- atau 58% dengan dukungan SDM sebanyak 3 (tiga) orang

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	KET
1	Jumlah SKPD yang telah memiliki uraian tugas rinci dan jelas	PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan Penataan Organisasi	766.844.524	513.638.884	67%		
2	Jumlah SKPD yang memiliki SOTK yang jelas		Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	276.217.276	160.616.996	58%	3 (tiga) orang	
3	Jumlah perangkat daerah yang memiliki informasi jabatan							
4	Jumlah perangkat daerah yang memiliki evaluasi jabatan							
5	Jumlah perangkat daerah yang dianalisis beban kerja							
6	Jumlah perangkat daerah yang memiliki standar kompetensi jabatan							

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan dapat dilihat pada analisa sebagai berikut :

Tabel Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Pelaksanaan penataan kelembagaan yang efektif	Jumlah SKPD yang telah memiliki uraian tugas rinci dan jelas	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan
		Jumlah SKPD yang memiliki SOTK yang jelas	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan
2	Pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan	Jumlah perangkat daerah yang memiliki informasi jabatan	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan
		Jumlah perangkat daerah yang memiliki evaluasi jabatan	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan
		Jumlah perangkat daerah yang dianalisis beban kerja	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan
		Jumlah perangkat daerah yang memiliki standar kompetensi jabatan	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan

SASARAN 1 Pelaksanaan Penataan Kelembagaan yang Efektif

Indikator 1 : Jumlah SKPD yang Telah Memiliki Uraian Tugas Rinci dan Jelas

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Pelaksanaan penataan kelembagaan yang efektif	Jumlah SKPD yang telah memiliki uraian tugas rinci dan jelas	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Perangkat Daerah yang berjumlah 40 SKPD seluruhnya telah memiliki uraian tugas rinci dan jelas sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Pada tahun 2021 terdapat 1 SKPD yang mengalami perubahan uraian tugas. SKPD yang mengalami perubahan uraian tugas yaitu Dinas Kesehatan.

Penyusunan Uraian Tugas terdapat dalam Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan anggaran sebesar Rp 276.217.276 dan terealisasi sebesar Rp 160.616.996,- atau 58%.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas terdapat beberapa kendala antara lain :

- Dalam penyusunan uraian tugas, SKPD belum dapat membedakan antara uraian tugas jabatan dengan rincian kegiatan jabatan
- Masih kurangnya pengetahuan dari pemangku jabatan di SKPD tentang uraian tugas tiap jabatan di SKPD-nya.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan sosialisasi/pendampingan dalam penyusunan uraian tugas.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan

Indikator 2 : Jumlah SKPD yang Memiliki SOTK yang Jelas

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Pelaksanaan penataan kelembagaan yang efektif	Jumlah SKPD yang memiliki SOTK yang jelas	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Perangkat Daerah yang berjumlah 40 SKPD seluruhnya telah memiliki SOTK yang jelas sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Pada tahun 2021 terdapat 28 SKPD mengalami penyederhanaan struktur organisasi, terkecuali BPBD dan Kecamatan sehingga harus diadakan pula pembentukan Peraturan Bupati tentang SOTK SKPD tersebut serta pembentukan 5 UPTD baru.

Penyusunan SOTK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Penyusunan SOTK terdapat dalam Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan anggaran dengan anggaran sebesar Rp 276.217.276 dan terealisasi sebesar Rp 160.616.996,- atau 58%.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas terdapat beberapa kendala antara lain :

- Dalam penyusunan SOTK, nomenklatur masih ada jabatan yang belum mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan sosialisasi tentang Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Melakukan moneyv secara berkala dan berkelanjutan

SASARAN 2 Pelaksanaan Analisa dan Evaluasi Jabatan

Indikator 1 : Jumlah Perangkat Daerah yang Memiliki Informasi Jabatan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan	Jumlah perangkat daerah yang memiliki informasi jabatan	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Perangkat Daerah yang berjumlah 40 SKPD seluruhnya telah memiliki informasi jabatan sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Pada tahun 2021 terdapat 28 SKPD yang mengalami perubahan informasi jabatan sehingga harus diadakan pula perubahan Peraturan Bupati tentang informasi jabatan SKPD tersebut.

Penyusunan informasi jabatan termasuk dalam Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan anggaran sebesar Rp 276.217.276 dan terealisasi sebesar Rp 160.616.996,- atau 58%.

Penyusunan informasi jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas terdapat beberapa kendala antara lain :

- Tidak tersedianya waktu yang cukup, dikarenakan Peraturan Bupati tentang SOTK baru terbentuk pada bulan Desember 2021.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Merencanakan pelaksanaan penyusunan informasi jabatan pada tahun berikutnya.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan

Indikator 2 : Jumlah Perangkat Daerah yang Memiliki Informasi Jabatan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan	Jumlah perangkat daerah yang memiliki evaluasi jabatan	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Perangkat Daerah yang berjumlah 40 SKPD seluruhnya telah memiliki evaluasi jabatan sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Pada tahun 2021 terdapat 28 SKPD yang mengalami perubahan evaluasi jabatan sehingga harus diadakan pula perubahan dokumen tentang evaluasi jabatan SKPD tersebut.

Penyusunan evaluasi jabatan termasuk kedalam Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan anggaran sebesar Rp 276.217.276 dan terealisasi sebesar Rp 160.616.996,- atau 58%.

Penyusunan evaluasi jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas terdapat beberapa kendala antara lain :

- Dengan adanya pandemi Covid-19 proses evaluasi dan penetapan dokumen evjab oleh KemenpanRB menjadi terhambat.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan KemenpanRB secara daring dan lebih intens.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan

Indikator 3 : Jumlah Perangkat Daerah yang Dianalisis Beban Kerja

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan	Jumlah perangkat daerah yang disusun analisis beban kerja	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Perangkat Daerah yang berjumlah 40 SKPD seluruhnya telah memiliki analisa beban kerja sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Pada tahun 2021 terdapat 28 SKPD yang mengalami perubahan analisa beban kerja sehingga harus diadakan pula perubahan Peraturan Bupati tentang analisa beban kerja SKPD tersebut.

Penyusunan analisa beban kerja terdapat dalam Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan anggaran sebesar Rp 276.217.276 dan terealisasi sebesar Rp 160.616.996,- atau 58%.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas terdapat beberapa kendala antara lain :

- Tidak tersedianya waktu yang cukup, dikarenakan Peraturan Bupati tentang SOTK baru terbentuk pada bulan Desember 2021.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Merencanakan pelaksanaan penyusunan analisa beban kerja pada tahun berikutnya.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan

Indikator 4 : Jumlah Perangkat Daerah yang Memiliki Standar Kompetensi Jabatan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan	Jumlah perangkat daerah yang disusun standar kompetensi jabatan	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Pada tahun 2021 dilakukan penyusunan standar kompetensi jabatan untuk seluruh Jabatan Administrator seluruh SKPD. Jabatan Administrator sejumlah 154 jabatan seluruhnya telah memiliki standar kompetensi jabatan sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.

Standar Kompetensi Jabatan ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.

Penyusunan standar kompetensi jabatan untuk seluruh Jabatan Administrator terdapat Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan anggaran sebesar Rp 276.217.276 dan terealisasi sebesar Rp 160.616.996,- atau 58%.

Penyusunan standar kompetensi jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas terdapat beberapa kendala antara lain :

- Masih kurangnya pengetahuan pemangku jabatan tentang penyusunan standar kompetensi jabatan ASN.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Instansi terkait.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan

❖ Analisa Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Untuk capaian indikator pada Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Kegiatan Penataan Organisasi/Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp.209.100.976,- dan realisasi sebesar Rp.149.376.596,- (71%).

Dukungan SDM sebanyak 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian dan 1 (satu) orang PTT.

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia
Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	KET
1	Jumlah unit pelayanan publik yang melaksanakan standar pelayanan publik	PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan Penataan Organisasi	766.844.524,-				
2	Jumlah SKPD yang berpartisipasi pada Inovasi pelayanan publik		Sub Kegiatan Fasilitas pelayanan publik dan tatalaksana	209.100.976,-	149.376.596,-	71	2 (dua) orang	
3	Jumlah SKPD yang sudah memiliki SOP							
4	Jumlah regulasi standarisasi pedoman kerja							

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana dapat dilihat pada analisa sebagai berikut :

Tabel Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Penguatan Pelayanan Publik	Jumlah unit pelayanan publik yang melaksanakan standar pelayanan publik	3 SKPD	3 SKPD	100%	Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		Jumlah SKPD yang berpartisipasi pada Inovasi pelayanan publik	5 SKPD	5 SKPD	100%	Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana
4	Penguatan Tata Laksana	Jumlah SKPD yang sudah memiliki SOP	20 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		Jumlah regulasi standarisasi pedoman kerja	5 Perbup	4 SK	80%	Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana

SASARAN 3 Penguatan Pelayanan Publik

Indikator 1 : Jumlah unit pelayanan publik yang melaksanakan standar pelayanan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Penguatan Pelayanan Publik	Jumlah unit pelayanan publik yang melaksanakan standar pelayanan publik	3 SKPD	3 SKPD	100%	Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Jumlah unit pelayanan publik yang melaksanakan standar pelayanan publik ada 3 SKPD yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan RSUD Hadji Boejasin. Pada bulan Agustus-November telah dilakukan evaluasi pelayanan publik oleh Kemenpan RB dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk saat ini Kabupaten/Kota masih menunggu hasil evaluasi tersebut.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Sarana dan prasarana kurang memadai
- Standar Pelayanan pada SKPD terkait masih ada yang belum diperbaharui

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Lebih meningkatkan sarana dan prasarana yang ada sehingga pada saat penilaian oleh Tim akan dapat lebih meningkatkan nilai Pelayanan Publik
- Standar Pelayanan yang sudah ditetapkan agar dilakukan reviu secara berkala

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

Diadakan bimtek untuk lebih mengetahui lebih dalam tentang tata cara penyusunan Standar Pelayanan

Indikator 2 : Jumlah SKPD yang berpartisipasi pada inovasi pelayanan publik

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Penguatan Pelayanan Publik	Jumlah SKPD yang berpartisipasi pada Inovasi pelayanan publik	5 SKPD	5 SKPD	100%	Kasubbag Tata Laksana dan Pelayanan Publik

Pada tahun 2021, ada 6 (enam) inovasi yang ada di SKPD yang diikutsertakan pada Innovative Government Award (IGA) 2021, dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021, Kabupaten Tanah Laut memperoleh kategori Inovatif dengan skor indeks 52,42.

Adapun SKPD yang turut berpartisipasi dalam ajang Innovative Government Award (IGA) tahun 2021 adalah :

1. Sekretariat Daerah, dengan inovasinya Sosialita (2020), dan Gapura Karomah (2020)
2. Dinas PUPRP, dengan inovasinya Bina Marga On Call (BOC) (2021)
3. Dinas Pariwisata, dengan inovasinya Fantastic Radio (2020)
4. Dinas Kesehatan, dengan inovasinya PSC 119 (2019)

5. Dinas PMD, dengan inovasinya Manunggal Tuntung Pandang (2018)

SASARAN 4 Penguatan Tata Laksana

Indikator 1 : Jumlah SKPD yang sudah memiliki SOP

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Penguatan Tata Laksana	Jumlah SKPD yang sudah memiliki SOP	20 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Tata Laksana dan Pelayanan Publik

Untuk capaian SKPD yang memiliki SOP Tahun 2021 adalah sebesar 100%, persentasenya sama dengan Tahun 2020 yaitu 100%.

Dari beberapa SKPD yang sudah memiliki SOP, ada beberapa SKPD telah melakukan revisi terhadap SOPnya masing-masing menyesuaikan dengan PERDA SOTK Nomor 6 Tahun 2016. Akan tetapi berdasarkan hasil inventarisasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dikatakan bahwa data Peraturan Bupati/Walikota se Kalimantan Selatan dari tahun 2015 s.d 2021 ditemukan penetapan Standar Pelayanan Prosedur (SOP) dengan Peraturan Bupati/Walikota. Sehingga penetapan SOP dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (8), Pasal 7 ayat (2), Pasal 13, Pasal 20 ayat (3) Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut, untuk tahun 2022 bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut akan melakukan inventarisir ulang sekaligus melakukan evaluasi terhadap SOP yang ada pada SKPD se Kabupaten Tanah Laut.

- Kedepannya diharapkan SOP yang ada pada setiap SKPD telah sesuai dengan Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 sehingga bisa dirangkum dalam 1 Keputusam Bupati Tanah Laut.

Indikator 2 : Jumlah SKPD yang Berpartisipasi pada Inovasi Pelayanan Publik

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Penguatan Tata Laksana	Jumlah regulasi standarisasi pedoman kerja	5 Perbup	4 SK	80%	Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Untuk regulasi standarisasi pedoman kerja pada tahun 2021 yang telah dibuat :

- SK Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/413-KUM/2021 tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan pada Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- SK Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/467KUM/2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- SK Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/467KUM/2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- SK Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/505-KUM/2021 tentang Besaran Honorarium Tim Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

Pada pertengahan tahun 2021 telah dibuatkan draft Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas, memperbaharui Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. Akan tetapi berdasarkan hasil rapat FGD Penyusunan Revisi Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 (via zoom meeting) dengan Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Dalam Negeri, pihak KEMENDAGRI bekerjasama dengan KEMENPAN RB dan ANRI akan membuat Permendagri baru tentang Pedoman Tata Naskah Dinas sehingga draft Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas tersebut dipending di proses pembuatannya.

❖ Analisa Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Untuk capaian Indikator sasaran pada Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kegiatan penataan organisasi sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi Birokrasi dengan Anggaran sebesar Rp 281.526.272 dan terealisasi sebesar Rp 203.645.292 atau 72% dan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 3 Orang yaitu Kepala Bagian Organisasi, Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi dan Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia
Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	KET
1	Jumlah laporan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang disusun sesuai Permenpan 53 Tahun 2014	PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan Penataan Organisasi	281.526.272	203.645.292	72%	3 orang	
2	Jumlah yang diasistensi terkait laporan kinerja		Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	281.526.272	203.645.292	72%	3 orang	
3	Jumlah SKPD yang dibina terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi							

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada analisa sebagai berikut :

Tabel Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian
Kinerja dan Reformasi Birokrasi

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai Permenpan 53 Tahun 2014	Jumlah laporan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang disusun sesuai Permenpan 53 Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi
2	Pelaksanaan Pembinaan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah SKPD yang diasistensi terkait laporan kinerja	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi
3	Penguatan Sistem Reformasi Birokrasi	Jumlah SKPD yang dibina terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Rata-Rata Capaian Kinerja					100%	

SASARAN 1 Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai Permenpan 53 Tahun 2014

Indikator : Jumlah Laporan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang disusun sesuai Permenpan 53 Tahun 2014

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai Permenpan 53 Tahun 2014	Jumlah laporan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang disusun sesuai Permenpan 53 Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Indikator jumlah laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun sesuai Pemenpan 53 Tahun 2014 pada Tahun 2021 dilaksanakan melalui Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kegiatan penataan organisasi sub kegiatan peningkatan kinerja dan

reformasi Birokrasi dengan Anggaran sebesar Rp 281.526.272 dan terealisasi sebesar Rp 203.645.292 atau 725% dan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 3 Orang yaitu Kepala Bagian Organisasi, Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi dan Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Realisasi Indikator jumlah laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun sesuai Permenpan 53 Tahun 2014 terealisasi 1 dokumen dari target 1 dokumen sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Laporan kinerja merupakan pertanggungjawaban Bupati atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut atas penggunaan anggaran pada Tahun berjalan. Penyusunan Laporan Kinerja telah disusun sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014, dengan melibatkan seluruh SKPD pengampu IKU Kabupaten. Laporan Kinerja memuat pencapaian atas 21 Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan 31 indikator Kinerja dengan rata rata capaian kinerja sebesar %. Kedepannya, kualitas laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tanah laut akan terus ditingkatkan agar bisa meningkatkan nilai SAKIP Kabupaten Tanah Laut.

Hambatan:

- Kurangnya SDM penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Kurangnya data dan analisa yang diberikan oleh SKPD pengampu IKU Kabupaten.

Solusi ;

- Mengusulkan penambahan SDM penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ke BKPSDM.
- Memperbaiki sistematika penyusunan LKj SKPD dengan memuat capaian IKU Kabupaten pada LKj SKPD.

Rencana Aksi:

- Memastikan data dan analisa yang diberikan oleh SKPD pengampu IKU Kabupaten dimuat di LKj SKPD dengan data yang akurat dan dapat diandalkan

SASARAN 2 Pelaksanaan Pembinaan Laporan Kinerja SKPD

Indikator : Jumlah yang diasistensi terkait laporan kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Pelaksanaan Pembinaan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah yang diasistensi terkait laporan kinerja	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Indikator Jumlah SKPD yang di diasistensi laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2021 dilaksanakan melalui Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kegiatan penataan organisasi sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi Birokrasi dengan Anggaran sebesar Rp 281.526.272 dan terealisasi sebesar Rp 203.645.292 atau 725% dan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 3 Orang yaitu Kepala Bagian Organisasi, Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi dan Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Terealisasi 40 SKPD dari target 40 SKPD sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Asistensi laporan kinerja bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan kinerja SKPD. Masih ada 14 SKPD dengan nilai laporan kinerja di bawah, angka ini menunjukkan penurunan kinerja dibandingkan dengan tahun 2020 dimana jumlah SKPD yang mendapatkan nilai pelaporan kinerja di bawah 10 hanya 3 SKPD. Kedepan, Bagian organisasi akan lebih intensif melaksanakan pembinaan dalam penyusunan laporan kinerjanya agar bisa meningkat. Kebanyakan dari SKPD masih kurang dalam penyajian analisa terhadap capaian indikator Kinerja dan data pembandingan tidak tersedia.

Hambatan dalam melaksanakan indikator ini yaitu terlambatnya SKPD dalam menyampaikan LKj SKPD atau tidak tepat waktu sesuai dengan batas akhir yang telah ditentukan. Solusinya yaitu adanya ketegasan dari pimpinan terkait punishment terhadap keterlambatan penyampaian LKj SKPD sesuai dengan Perbup TPP. Rencana Aksi kedepannya adalah memastikan SKPD yang terlambat menyampaikan LKj akan diberikan sanksi atau punishment sesuai aturan.

Sasaran 3 Penguatan Sistem Reformasi Birokrasi

Indikator : Jumlah SKPD yang dibina terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
3	Penguatan Sistem Reformasi Birokrasi	Jumlah SKPD yang dibina terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Tahun 2021, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kegiatan penataan organisasi sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi Birokrasi dengan Anggaran sebesar Rp 281.526.272 dan terealisasi sebesar Rp 203.645.292 atau 725% dan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 3 Orang yaitu Kepala Bagian Organisasi, Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi dan Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Terealisasi 40 SKPD dari target 40 SKPD sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Pembinaan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi pada Tahun 2021 dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi reformasi birokrasi secara daring melalui zoom meeting dengan narasumber KemenpanRB, bimbingan teknis kepada seluruh Agen Perubahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan narasumber dari LAN RI.

Analisa Capaian Sasaran Strategis

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya layanan administrasi bidang perencanaan dan keuangan	Persentase layanan administrasi bidang perencanaan dan keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan Mengampu Misi ke- 3 “Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)”
2	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan lingkup Sekretariat Daerah	Persentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja dan keuangan yang sesuai aturan	100%	100%	100%	
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	82	86,81	105,86%	
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3.6	Tahap <i>Baseline</i> SPIP	Tahap <i>Baseline</i> SPIP	
1	Menyusun bahan perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	Kasubbag Perencanaan
2	Melaksanakan evaluasi di Bidang Perencanaan	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Perencanaan
3	Melaksanakan penatausahaan keuangan	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Keuangan
4	Melaksanakan evaluasi di Bidang Keuangan	Jumlah laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	Kasubbag Keuangan
5	Menyusun LKPJ dan LPPD Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen LKPJ dan LPPD Sekretariat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Pelaporan
6	Menyusun Laporan SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah laporan dokumen SAKIP Sekretariat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Pelaporan
7	Menyusun Laporan SPIP Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen Laporan SPIP Sekretariat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Pelaporan

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Bagian Perencanaan dan Keuangan terhadap capaian tahun sebelumnya :

Tabel Capaian Indikator Sasaran Strategis Bagian Perencanaan dan Keuangan terhadap capaian tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2021		
			2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase layanan administrasi Bidang Perencanaan dan Keuangan tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja dan keuangan yang sesuai aturan	%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	79,07	84,35	82	86,81	105,86%
4	Nilai SPIP Sekretariat Daerah	Level	-	-	3,6	Tahap <i>Baseline</i> SPIP	Tahap <i>Baseline</i> SPIP

❖ Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Kinerja

Capaian kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan ada 4 (empat) indikator dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Persentase layanan administrasi Bidang Perencanaan dan Keuangan, Tahun 2021 realisasi indikator ini sebesar 100% dengan target 100% dengan demikian indikator ini terlaksana 100%.
- 2) Persentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja dan keuangan yang sesuai aturan, Tahun 2021 realisasi indikator ini sebesar 100% dengan target 100% dengan demikian indikator ini terlaksana 100%
- 3) Nilai SAKIP Sekretariat Daerah, target nilai SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2021 sebesar 82, untuk nilai SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2021 dengan nilai 86,81 dan capaian sebesar 105,86%.
- 4) Nilai SPIP Sekretariat Daerah untuk Tahun 2021 target nilai SPIP Sekretariat Daerah dengan nilai 3,6, sedangkan untuk Tahun 2021 masih dalam tahap penilaian *Baseline* Maturitas SPIP Terintegrasi.

❖ **Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Sebelumnya**

- 1) Persentase layanan administrasi Bidang Perencanaan dan Keuangan realisasi untuk Tahun 2021 100%, untuk Tahun 2020 tercapai 100%, sehingga capaian targetnya sama 100%.
- 2) Persentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja dan keuangan yang sesuai aturan realisasi untuk Tahun 2021 100%, untuk Tahun 2020 tercapai 100%, sehingga capaian targetnya sama 100%.
- 3) Nilai SAKIP Sekretariat Daerah realisasi untuk Tahun 2021 sebesar 86,81 , sedangkan untuk realiasi nilai SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2020 dengan nilai 84,35 dengan ini mengalami kenaikan nilai sebesar 2,46 .
- 4) Nilai SPIP Sekretariat Daerah, untuk Tahun 2021 masih dalam tahap penilaian *Baseline* Maturitas SPIP Terintegrasi dari BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Maturitas SPIP Sekretariat Daerah telah di Level “3” setelah dilakukan penilaian *Quality Assurance* dari Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2018.

❖ **Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja Kepala Bagian**

SASARAN 1 Meningkatnya Layanan Administrasi Bidang Perencanaan dan Keuangan

Indikator : Persentase Layanaan Administrasi Bidang Perencanaan dan Keuangan tepat waktu

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya layanan administrasi bidang perencanaan dan keuangan	Persentase layanan administrasi bidang perencanaan dan keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan Mengampu Misi ke- 3 “Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)”

Indikator layanan Administrsai Perencanaan di dilaksanakan melalui rapat koordinasi untuk merumuskan Renja Bagian-Bagian lingkup Sekretariat Daerah, baik Renja APBD murni maupun Renja APBD Perubahan Tahun 2021. Dan rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah selaku Kepala SKPD.

Rumusan Renja di Bagian-Bagian selanjutnya dihimpun menjadi dokumen RKPD dan setelah melalui proses pembahasan dengan Tim RKPD, Tim TAPD dan rapat kerja dengan Badan Anggaran DPRD selanjutnya terbitlah dokumen RKA Sekretariat Daerah TA 2021. Kemudian dilanjutkan pembahasan RKA Sekretariat Daerah Tahun 2021 dengan Tim TAPD dan rapat kerja dengan Badan Anggaran DPRD, setelah pembahasan diterbitkanlah dokumen DPA Sekretariat Daerah Tahun 2021.

Disamping itu dilaksanakan juga monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan Perjanjian Kinerja dari Bagian-Bagian lingkup Sekretariat Daerah, Rencana Aksi Program serta penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing Bagian dan Rencana Kerja Tahunan. Hasil evaluasi data tersebut sebagai bahan penyusunan SAKIP Sekretariat Daerah.

Sedangkan untuk pelayanan administrasi keuangan dilaksanakan melalui penatausahaan keuangan, monitoring dan evaluasi intern terhadap capaian keuangan per Triwulan, melakukan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan anggaran Bagian-Bagian lingkup Sekretariat Daerah serta monitoring dan evaluasi penerapan SPI dengan menjalankan prinsip-prinsip efektif dan efisien anggaran, pelaporan yang andal, pengamanan asset BMD dan ketaatan terhadap peraturan.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Kurangnya pemahaman penyusun perencanaan terkait prinsip-prinsip perencanaan
- Kurangnya kemampuan melakukan proyeksi kegiatan secara efektif
- Lemahnya informasi perencanaan kegiatan dari Bagian-Bagian lingkup Sekretariat Daerah

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip perencanaan yang efektif yang dapat memberikan dampak positif terhadap pola perencanaan
- Peningkatan kompetensi terhadap penyusun perencanaan untuk dapat menganalisa dampak suatu perencanaan
- Melakukan koordinasi secara intens terkait penyusunan perencanaan dari Bagian-Bagian lingkup Sekretariat Daerah

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Meningkatkan kompetensi para petugas penyusun perencanaan
- Bimtek tentang teknik pembuatan perencanaan



*Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi dengan Bagian-Bagian Lingkup Sekretariat Daerah terkait
Rencana Kerja Awal TA.2022*



*Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Renja Tahun Anggaran 2022
dengan Bagian-Bagian Lingkup Sekretariat Daerah terkait Persiapan Rapat Kerja
dengan Badan Anggaran DPRD*



*Dokumentasi Kegiatan Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPRD
terkait Rencana Kerja Awal Tahun Anggaran 2022*



*Dokumentasi Kegiatan Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPRD
terkait Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022*

SASARAN 2 Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Sekretariat Daerah

Indikator 1 : Persentase Kualitas Penyusunan Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang sesuai Aturan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan lingkup Sekretariat Daerah	Persentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja dan keuangan yang sesuai aturan	100%	100%	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Indikator ini dilaksanakan dengan mengevaluasi bahan penyusunan Laporan Kinerja yang memuat analisa capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Bagian-Bagian Lingkup Sekretariat Daerah sebagai bahan penyusunan SAKIP Sekretariat Daerah dan mengevaluasi bahan laporan kinerja lainnya seperti SPIP Sekretariat Daerah, LPPD Sekretariat Daerah, Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) Sekretariat Daerah dengan cara melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga kualitas pelaporan kinerja dan keuangan dapat menjadi dokumen yang kredibel dengan menganalisa capaian indikator sasaran strategis.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas terdapat beberapa kendala antara lain :

- Belum optimal melakukan reviu kinerja internal secara berkala untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan kinerja serta solusi yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik.
- Beberapa Bagian-Bagian Lingkup Sekretariat Daerah tidak menyampaikan data capaian kinerja secara tepat waktu

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan reviu kinerja internal secara berkala
- Intensitas informasi melalui *WhatsApp Grup* "Tim Kinerja".

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan
- Menyampaikan surat permintaan data kinerja dengan mencantumkan batas waktu



Dokumentasi Kegiatan Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah



Dokumentasi Kegiatan Evaluasi Capaian Realisasi Keuangan Sekretariat Daerah

SASARAN 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD

Indikator 1 : Nilai SAKIP Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	82	86.81	86.81	Bagian Perencanaan dan Keuangan Mengampu Misi ke- 3 “Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)”

Peningkatan Komponen SAKIP dalam rangka Peningkatan Nilai SAKIP Sekretariat Daerah dilaksanakan melalui rapat koordinasi bersama Tim Penyusunan SAKIP Sekretariat Daerah terkait pengumpulan data dari Bagian-Bagian untuk menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Daerah, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah setelah di evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

Hasil Evaluasi Komponen SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2020 dan Upaya tindak lanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	KOMPONEN SAKIP	REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT EVALUASI KOMPONEN SAKIP	
		REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	PERENCANAAN KINERJA	Dokumen perencanaan dan target kinerja agar selalu menjadi dasar penetapan perencanaan anggaran tahunan	Penetapan perencanaan anggaran tahunan sudah berdasarkan dokumen perencanaan dan target kinerja (dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja)
2	ENGUKURAN KINERJA	Pencapaian target IKU agar dimanfaatkan dalam penilaian kinerja untuk pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	Capaian target IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian prestasi kinerja individu dengan pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> serta promosi jabatan
3	PELAPORAN KINERJA	Laporan Kinerja agar dimanfaatkan untuk perbaikan peningkatan kinerja	Laporan capaian kinerja telah dipergunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Daerah
4	EVALUASI INTERNAL	Hasil evaluasi internal yang dilakukan secara berkala agar dimanfaatkan dalam menilai keberhasilan program	Hasil evaluasi internal telah dilakukan secara berkala dengan per Triwulan, per Semester, dan Bulanan, hal ini untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program kegiatan (Monitoring dan Evaluasi berkelanjutan)
5	PENCAPAIAN KINERJA	Peningkatan atas pencapaian target kinerja	Capaian target kinerja dapat dilihat dari tercapainya target kinerja, analisa capaian IKU dan capaian kinerja lebih baik tahun sebelumnya (Dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Daerah)

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komponen SAKIP Tahun 2020 dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut masih terdapat Komponen/Sub Komponen SAKIP dengan Nilai C, dan hasil evaluasi tersebut telah ditindak lanjuti sebagaimana tabel di bawah ini :

No	KOMPONEN SAKIP	SUB KOMPONEN SAKIP	NILAI	TINDAK LANJUT
I.	EVALUASI INTERNAL	1. Kualitas Evaluasi (5%)		
		-Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja -Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan	C C	Melakukan Evaluasi per Triwulan terhadap Rencana Aksi, Realisasi capaian kinerja dan program,kegiatan dan Sub Kegiatan (Tergambar dalam bentuk tabel dengan menyajikan kendala,solusi dan Rencana Aksi serta tindaklanjut evaluasi Rencana Aksi Triwulan sebelumnya)
		2. Pemanfaatan Evaluasi (3%)		
		-Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata	C	Rencana Aksi, Realisasi capaian kinerja dan program,kegiatan dan Sub Kegiatan akan ditampilkan pada penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Petugas penyusun laporan kinerja kurang memahami sepenuhnya Sistem AKIP;
- Anggota Tim Penyusunan SAKIP dari Bagian-Bagian dalam menyampaikan data tidak tepat waktu; dan
- Kurang cermatnya dalam hal penyajian data.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Meningkatkan kompetensi petugas penyusun Laporan Kinerja;
- Rapat secara berkala dalam rangka membahas penyajian data dalam dokumen Laporan Kinerja; dan
- Intensitas informasi melalui *WhatsApp Grup* "Tim Kinerja".

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Melaksanakan Bimtek terkait penyusunan Laporan Kinerja;
- Melaksanakan Monev terkait capaian kinerja secara berkala;
- Koordinasi lebih intens dengan Pembina SAKIP Kabupaten; dan
- FGD



Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah

SASARAN 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD

Indikator 2 : Nilai SPIP Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3.6	Tahap <i>Baseline</i> SPIP	Tahap <i>Baseline</i> SPIP	Bagian Perencanaan dan Keuangan Mengampu Misi ke- 3 “Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)”

Pengendalian Intern Lingkup Sekretariat Daerah telah melaksanakan 5 (lima) unsur SPIP, yaitu :

- 1) Lingkungan Pengendalian;
- 2) Penilaian Risiko;
- 3) Kegiatan Pengendalian;
- 4) Informasi dan Komunikasi;
- 5) Pemantauan Pengendalian Internal.

Berdasarkan surat dari Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor : 050/98 -Insp/2021, Tanggal 23 November 2021, Perihal *Baseline* Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), bahwa Sekretariat Daerah menjadi salah satu SKPD sampel dengan mengampu minimal 2 (dua) sasaran strategis RPJMD. Dan telah ditindaklanjuti dengan mengisi Kertas Kerja Penilaian *Baseline* Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Pendampingan penyusunan *Baseline* Maturitas SPIP dilakukan oleh Tim Irban IV Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

Baseline Maturitas SPIP Sekretariat Daerah dengan mengampu 2 (dua) Sasaran Strategis RPJMD yaitu :

NO	SASARAN SKPD	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KUALITAS SASARAN STRATEGIS			NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
				SASARAN STRATEGIS TEPAT	IK TEPAT DAN BAIK	TARGET KINERJA BAIK				
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	95	Y	Y	Y	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	80%
2	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	100%	Y	Y	Y	Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Pelaku UMKM yang terfasilitasi permodalan	Persentase UMKM yang terfasilitasi permodalan	75%

Dilanjutkan adanya surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 005/3588/Setda/XII/2021, Tanggal 7 Desember 2021, Perihal Undangan Sosialisasi SPIP Terintegrasi dan Pendampingan Penyusunan Risk Register SKPD, untuk Sekretariat Daerah pendampingan penyusunan Risk Register oleh BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2021. Dan telah ditindaklanjuti dengan penyusunan Risk Register Sekretariat Daerah berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Tahun 2022. Selanjutnya dokumen Risk Register Sekretariat Daerah tersebut disampaikan ke Irban IV Inspektorat Kabupaten.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Petugas penyusun laporan kinerja kurang memahami maksud unsur-unsur SPIP;
- Kurang cermatnya dalam hal penyajian data

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Meningkatkan kompetensi petugas penyusun laporan agar lebih memahami unsur-unsur SPIP
 - Rapat secara berkala dalam rangka membahas penyajian data dalam dokumen SPIP
- Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :
- Melaksanakan Bimtek terkait Manajemen Risiko
 - Melaksanakan Monev terkait Rencana Tindak Lanjut Risiko
 - Koordinasi lebih intens dengan Pembina SPIP Kabupaten
 - FGD



*Dokumentasi Kegiatan Konsultasi Penilaian Baseline Maturitas SPIP Terintegrasi dengan
Inspektorat Kabupaten Tanah Laut*



*Dokumentasi Kegiatan Desk Manajemen Risiko Sekretariat Daerah oleh
BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut*

❖ Analisa Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

Pada Tahun Anggaran 2021 Bagian Perencanaan dan Keuangan mendapatkan pagu sebesar Rp. 20.701.072.128 terealisasi Rp. 18.350.516.964 realisasi keuangan sebesar 88.64%, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya layanan administrasi bidang perencanaan dan keuangan dengan indikator Persentase layanan administrasi bidang perencanaan dan keuangan tepat waktu dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu Rp 88.208.263 terealisasi Rp 59.023.769 dengan realisasi keuangan sebesar 66.91% dan dilaksanakan oleh 5 (lima) orang Sumber Daya Manusia. Kegiatan Indikator ini dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi dengan bagian-bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, sehubungan dengan masih adanya pandemi Covid-19, maka kegiatan tersebut tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan. Disamping itu terkendala dengan PERPRES NO.33 TAHUN 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional.

- 2) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan lingkup Sekretariat Daerah dengan indikator Persentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja dan keuangan yang sesuai aturan ditunjang dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu Rp 19.650.211.990 terealisasi Rp 17.503.513.599 dengan realisasi keuangan sebesar 89.07% dan Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan pagu Rp 810.366.176 terealisasi Rp 760.667.456 dengan realisasi keuangan sebesar 93.87% dan dilaksanakan oleh 9 (sembilan) orang Sumber Daya Manusia. Kegiatan indikator ini tidak sepenuhnya terealisasi dikarenakan sifatnya *accress* belanja pegawai.

- 3) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD dengan Nilai SAKIP Sekretariat Daerah dan Nilai SPIP Sekretariat Daerah ditunjang dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu Rp 152.258.700 terealisasi Rp 27.312.140 dengan realisasi keuangan sebesar 17.93% dan dilaksanakan oleh 4 (empat) orang Sumber Daya Manusia. Kegiatan Indikator ini dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi dengan bagian-bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, sehubungan dengan masih adanya pandemi Covid-19, maka kegiatan tersebut tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan. Disamping itu terkendala dengan PERPRES NO.33 TAHUN 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional.

Tabel Indikator Kinerja Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	KET
1	Persentase layanan administrasi Bidang Perencanaan dan Keuangan tepat waktu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.208.263	59.023.769	34.66	<ul style="list-style-type: none"> - Kabag Perencanaan dan Keuangan - Kasubbag Perencanaan - Pengelola Perencanaan - PTT (2 Orang) 	
			- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.376.882	53.088.769	86.50		
			- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.019.360	400.000	6.65		
			- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.845.790	1.020.000	6.52		
			- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	9.132.950	2.185.000	23.92		
			- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.833.280	2.330.000	29.74		
2	Persentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja dan keuangan yang sesuai aturan		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.650.211.990	17.503.513.599	80.76	<ul style="list-style-type: none"> - Kabag Perencanaan dan Keuangan - Kasubbag Keuangan - Verifikator Keuangan - Bendahara Pengeluaran - Pengadministrasi Keuangan - Pengadministrasi Penerimaan - PTT (3 Orang) 	
			- Sub Kegiatan Penyedia Gaji Tunjangan ASN	19.520.716.256	17.410.424.338	84.45		
			- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.736.326	23.167.632	75.35		
			- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	98.759.408	69.921.629	70.80		
			Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	810.366.176	760.667.456	93.87		
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	810.366.176	760.667.456	93.87		



NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	KET
3	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	152.258.700	27.312.140	28.56	<ul style="list-style-type: none">- Kabag Perencanaan dan Keuangan- Kasubbag Pelaporan- PTT (2 Orang)	
4	Nilai SPIP Sekrtariat Daerah		- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.258.700	12.312.140	45.12		
			- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.000.000	15.000.000	12.00		

❖ Analisa Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan

Untuk capaian Indikator sasaran pada Kasubbag Perencanaan dilaksanakan melalui program :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu Rp. 88.208.263,- terealisasi Rp 55.162.497,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 62,54 % dan di dukung SDM sebanyak 2 (dua) orang, terdiri dari :
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu Rp. 61.376.882,- terealisasi Rp 49.227.497 dengan realisasi keuangan sebesar 80,21%;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan pagu Rp 6.019.360,- terealisasi Rp 400.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 6.65% , sub kegiatan ini masuk realisasi dengan serapan rendah di karenakan adanya kebijakan mengenai Standar Harga Satuan Regional yang di atur dalam PerPres 33 Th. 2020, yang diantaranya mengatur tentang kebijakan penyediaan makan dan minum rapat mengikutsertakan SKPD lain.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan pagu Rp 3.845.790 terealisasi 1.020.000 dengan realisasi keuangan sebesar 26,52%, sub kegiatan ini masuk realisasi dengan serapan rendah di karenakan adanya kebijakan mengenai Standar Harga Satuan Regional yang di atur dalam PerPres 33 Th. 2020, yang diantaranya mengatur tentang kebijakan penyediaan makan dan minum rapat mengikutsertakan SKPD lain.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan pagu Rp 9.132.950 terealisasi 2.185.000 dengan realisasi keuangan sebesar 23,92%, sub kegiatan ini masuk realisasi dengan serapan rendah di karenakan adanya kebijakan mengenai Standar Harga Satuan Regional yang di atur dalam PerPres 33 Th. 2020, yang diantaranya mengatur tentang kebijakan penyediaan makan dan minum rapat mengikutsertakan SKPD lain.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan pagu Rp 3.845.790 terealisasi 1.020.000 dengan realisasi keuangan sebesar 26,52%, sub kegiatan ini masuk realisasi dengan serapan rendah di karenakan adanya kebijakan mengenai Standar Harga Satuan Regional yang di atur dalam PerPres 33 Th. 2020, yang diantaranya mengatur tentang kebijakan penyediaan makan dan minum rapat mengikutsertakan SKPD lain.

Tabel Indikator Kinerja Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia
Kepala Sub Bagian Perencanaan

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	KET
1	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Perencanaan, Pengabggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.208.263	59.023.769	62,54	<ul style="list-style-type: none"> - Kabag Perencanaan dan Keuangan - Kasubbag Perencanaan - Pengelola Perencanaan - PTT (2 Orang) 	
2	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi		- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.376.882	53.088.769	86.50		
			- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.019.360	400.000	6.65		
			- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.845.790	1.020.000	26.52		
			- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	9.132.950	2.185.000	23.92		
			- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.833.280	2.330.000	29.74		

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Kegiatan Perencanaan dapat dilihat pada analisa sebagai berikut

Tabel Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Kegiatan Perencanaan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Menyusun bahan perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	Kasubbag Perencanaan
2	Melaksanakan evaluasi di bidang perencanaan	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Perencanaan

SASARAN 1 Menyusun Bahan Perencanaan

Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun sesuai Ketentuan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Menyusun bahan perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	Kasubbag Perencanaan

Penyusunan dokumen perencanaan pada Sekretariat Daerah telah melalui tahapan – tahapan yang telah ditetapkan serta mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah yang ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Adapun jenis Dokumen Perencanaan yang telah disusun adalah sebagai berikut :

1. Renstra

Renstra adalah kepanjangan dari Rencana Strategi, yang biasanya dibentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Intansi/Lembaga, disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategik

2. Renja Murni

Rencana Kerja (Murni) Organisasi Perangkat Daerah (biasa disingkat OPD) adalah Organisasi Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia.

OPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik

3. Renja Perubahan

Rencana Kerja (Perubahan) Organisasi Perangkat Daerah (biasa disingkat OPD) adalah Organisasi Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. OPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik

4. DPA Murni

Merupakan dokumen pelaksanaan anggaran (Murni) yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu

5. DPA Perubahan

Merupakan dokumen pelaksanaan anggaran (Perubahan) yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu

6. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia

7. RKT

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Rencana Kerja Tahunan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)



Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2021

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Pejabat yang menyusun data perencanaan masing-masing Bagian kurang memahami pedoman penyusunan data perencanaan dengan baik;
- Pejabat yang menyusun data perencanaan pada masing-masing Bagian kurang memahami pedoman penyusunan Renja dengan baik;

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Rapat dengan pejabat penyusun data perencanaan masing-masing Bagian secara berkala

Rencana Aksi Perbaikan yang dilakukan ke depannya adalah :

- Keterlibatan pimpinan dalam rangka perencanaan program dan anggaran;
- Membuat aplikasi Laporan Kinerja dan Keuangan Bagian dengan tujuan aplikasi tersebut untuk mempermudah dalam hal perencanaan, penganggaran dan pelaporan berbasis *online*, cepat serta meminimalisir usulan perencanaan yang tumpang tindih, peningkatan alokasi fasilitasi usulan pola pikir dari pemangku kepentingan serta ketersediaan data yang *update* untuk perencanaan dan pelaporan.

SASARAN 2 Melaksanakan Evaluasi di Bidang Perencanaan

Indikator : Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Melaksanakan evaluasi di bidang perencanaan	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Kasubbag Perencanaan

Pelaksanaan evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat capaian target kegiatan masing – masing bagian serta penilaian tingkat capaian target pada masing- masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja Tahun 2021. Sesuai ketentuan, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai berhasil tidaknya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati.



Dokumentasi Kegiatan Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2021

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

Belum maksimalnya pelaksanaan Monev capaian target kinerja

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indicator ini adalah :

- Melaksanakan Monev secara berkala

Rencana Aksi Perbaikan yang dilakukan ke depannya adalah :

- Melaksanakan Monev secara berkala terkait *update* data perencanaan dan laporan;

❖ **Analisa Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan**

Untuk capaian Indikator sasaran jumlah laporan administrasi pelaksanaan anggaran dan jumlah laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Kasubbag Keuangan dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu Rp 129.495.734,00 terealisasi Rp 93.089.261,00 dengan realisasi keuangan sebesar 71.89% dengan dukungan SDM sebanyak 9 (Sembilan) orang, terdiri dari :

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan pagu Rp 30.736.326,00 terealisasi Rp 23.167.632,00 dengan realisasi keuangan sebesar 75.35%;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran dengan pagu Rp 98.759.408,00 terealisasi Rp 69.921.629,00 dengan realisasi keuangan sebesar 70.80%;
- Program kegiatan penunjang indikator tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan masih adanya Covid-19 dan Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa dalam mengadakan rapat untuk realisasi makan dan minum dilaksanakan didalam kantor sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari luar SKDP atau masyarakat.



Tabel Indikator Kinerja Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia
Kepala Sub Bagian Keuangan

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	KET
1	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan anggaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	129.495.734	93.089.261	71.89	- Kabag Perencanaan dan Keuangan	
2	Jumlah laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.736.326	23.167.632	75.35	- Kasubbag Keuangan - Verifikator Keuangan - Bendahara Pengeluaran	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	98.759.408	69.921.629	70.80	- Pengadministrasi Keuangan - Pengadministrasi Penerimaan - PTT (3 Orang)	

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Keuangan dapat dilihat pada analisa sebagai berikut :

Tabel Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Keuangan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Melaksanakan penatausahaan keuangan	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Keuangan
2	Melaksanakan evaluasi di Bidang Keuangan	Jumlah laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	Kasubbag Keuangan

SASARAN 1. Melaksanakan Penatausahaan Keuangan

Indikator : Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Melaksanakan penatausahaan keuangan	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Keuangan

Laporan Keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan Keuangan yang disusun memenuhi prinsip- prinsip yang dinyatakan Surat edaran Bupati Tanah Laut Nomor :900/3173/BPKAD/XI/2021. Laporan Keuangan dihasilkan dari masing-masing SKPD.

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan.

Pembuatan Laporan Keuangan dilakukan oleh masing-masing SKPD. Selanjutnya laporan keuangan tersebut akan di konsolidasikan oleh BPKAD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten yaitu :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Operasional
3. Laporan Perubahan Ekuitas

4. Neraca SKPD
5. Catatan atas Laporan Keuangan (Calk)
6. Memuat laporan saldo Aset

Dengan realisasi indikator jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 terealisasi sebesar 1 Dokumen sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 1 Dokumen berupa Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) SKPD sehingga capaian kinerja keuangan adalah 100 % .

Laporan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten tersebut dikeluarkan 1 kali dalam satu tahun anggaran, periode Januari – Desember.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Bendahara kurang memahami terkait input aplikasi SIPD
- Bendahara kurang teliti/cermat dalam menentukan post kegiatan belanja yang harus ditransaksikan;
- Rendahnya Respon Bendahara secara positif terhadap pelaporan keuangan, penganggaran maupun pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Pembinaan kepada bendahara agar lebih cermat dalam melakukan pembayaran
- Melakukan pengendalian intern terhadap pelaksanaan anggaran secara berkala
- Melakukan pemantauan terhadap serapan anggaran maupun penyampaian laporan keuangan

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Melakukan koreksi awal atas laporan tahunan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul setelah tutup buku per 31 Desember.
- Melaksanakan Monev per bulan, monev per triwulan dan monev akhir tahun terkait capaian keuangan;
- Memberikan fasilitasi dalam pengelolaan anggaran melalui penetapan pedoman, bimbingan teknis, dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi;
- Melaksanakan Verifikasi secara intens;
- FGD;

SASARAN 2. Melaksanakan Evaluasi di Bidang Keuangan

Indikator : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Melaksanakan evaluasi di Bidang Keuangan	Jumlah laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Jumlah Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan Keuangan SKPD adalah laporan Bulanan, Triwulan dan Semesteran dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan Keuangan tersebut disusun untuk memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan Surat edaran Bupati Tanah Laut Nomor :900/05/BPKAD/2021. Tentang Penataan Usahaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 Laporan Keuangan dihasilkan dari masing-masing SKPD yang kemudian dijadikan bahan pertanggungjawaban.

Penyusunan Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun untuk memenuhi informasi mengenai posisi keuangan dari seluruh transaksi dalam periode, Bulanan, Triwulan dan Semesteran.

Pembuatan Laporan laporan pertanggungjawaban Keuangan tersebut dilakukan oleh masing-masing SKPD. Selanjutnya disampaikan secara Administrasi ke BPKAD Bidang Akuntansi.

Adapun capaian indikator Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan Keuangan anggaran tahun 2021 terealisasi sebanyak 3 dokumen yaitu :

- a. **1 Dokumen laporan Bulanan terdiri dari 12 buah pertanggungjawaban,**
- b. **1 Dokumen laporan Triwulan terdiri dari 4 buah pertanggungjawaban**
- c. **1 Dokumen laporan Sementeran terdiri dari 2 buah pertanggungjawaban.**

Dari target indikator yang telah ditetapkan sebanyak 3 Dokumen yaitu laporan Bulanan, Triwulan dan Semesteran sehingga capaian kinerja Keuangan adalah 100 % Masing-masing pertanggungjawabannya memiliki rincian sebagai berikut :

1. Register Penutupan Kas
2. Format realisasi keuangan
3. Buku Kas Umum
4. Buku Pembantu Pajak

5. Buku Pembantu Simpanan Bank
6. Buku Pembantu Kas Tunai
7. Regitster SPP
8. Register SPM
9. LRA
10. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
11. Register SP2D
12. Rekening Koran
13. Format BPK
14. Format Rekon
15. Penjelasan Pajak
16. Rekap Pajak GU/TU
17. Rekap Pemotongan dan Penyetoran Gaji
18. Rekap Pajak Tunj. Kinerja/Tambahan Penghasilan
19. Rekap Belanja Pihak Ketigs Belanja Modal
20. Berita Acara Penutupan Kas
21. Bukti Pengembalian Sisa UP, TU, LS Tahun berakhir.



Dokumentasi Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2021



Dokumentasi Kegiatan Rekon Keuangan Triwulan TA 2021

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu lingkup Sekretariat Daerah kurang memahami terkait input aplikasi SIPD

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Pembinaan dari BPKAD kepada bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu lingkup Sekretariat Daerah agar lebih cermat dalam melakukan input aplikasi SIPD
- Konsultasi secara intens ke BPKAD terkait input aplikasi SIPD

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Melaksanakan Monev per bulan, monev per triwulan dan monev akhir tahun terkait capaian keuangan;
- Memberikan fasilitasi dalam pengelolaan anggaran melalui penetapan pedoman, bimbingan teknis, dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi;
- FGD;

❖ **Analisa Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Pelaporan**

Untuk capaian Indikator sasaran pada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu Rp 27.258.700 terealisasi Rp 12.312.140 dengan realisasi keuangan sebesar 45,12%, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyedia Gaji Tunjangan ASN dengan pagu Rp 19.520.716.256 terealisasi Rp 17.410.424.338 dengan realisasi keuangan sebesar 89,19%, serta Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan pagu Rp 810.366.176 terealisasi Rp 760.667.456 dengan realisasi keuangan sebesar 93,87% dan dilaksanakan Sumber Daya Manusia sebanyak 4 (empat) orang, terdiri dari Sub Kegiatan :

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu Rp 27.258.700 terealisasi Rp 12.312.140 dengan realisasi keuangan sebesar 45,12%; (Realisasi keuangan rendah karena adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Dengan adanya PERPRES RI ini sehingga rapat-rapat lingkup sekretariat daerah kabupaten Tanah Laut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya)
- Sub Kegiatan Penyedia Gaji Tunjangan ASN dengan pagu Rp 19.520.716.256 terealisasi Rp 17.410.424.338 dengan realisasi keuangan sebesar 89,19%; (realisasi keuangan dibawah 90% karena ada akres gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara)
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Pagu Rp 810.366.176 teralisasi Rp 760.667.456 dengan realisasi keuangan sebesar 93,87%.

Tabel Indikator Kinerja Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia
Kepala Sub Bagian Pelaporan

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	KET
1	Jumlah dokumen LKPJ dan LPPD Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.285.700	12.312.140	45.12	- Kabag Perencanaan dan Keuangan - Kasubbag Pelaporan - PTT (1 Orang)	
2	Jumlah laporan dokumen SAKIP Sekretariat Daerah		- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.285.700	12.312.140	45.12		
3	Jumlah dokumen Laporan SPIP Sekretariat Daerah		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.520.716.256	17.410.424.338	89.19		
			- Sub Kegiatan Penyedia Gaji Tunjangan ASN	19.520.716.256	17.410.424.338	89.19		
			Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	810.366.176	760.667.456	93.87		
			- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	810.366.176	760.667.456	93.87		

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Pelaporan dapat dilihat pada analisa sebagai berikut :

Tabel Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Pelaporan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Menyusun LKPJ dan LPPD Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen LKPJ dan LPPD Sekretariat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Pelaporan
2	Menyusun Laporan SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah laporan dokumen SAKIP Sekretariat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Pelaporan
3	Menyusun Laporan SPIP Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen Laporan SPIP Sekretariat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Pelaporan

SASARAN 1. Menyusun LKPJ dan LPPD Sekretariat Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen LKPJ dan LPPD Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Menyusun LKPJ dan LPPD Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen LKPJ dan LPPD Sekretariat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Pelaporan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap kinerja Sekretariat Daerah sekaligus menjadi bahan informasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan selanjutnya dapat dievaluasi secara obyektif dan menyeluruh atas kinerja pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah khususnya dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. , laporan ini juga memuat prestasi dan keberhasilan yang telah diraih dan permasalahan yang harus diselesaikan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memuat tentang :

1. Visi dan Misi
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Program dan Kegiatan
4. Kerjasama dengan pihak ketiga
5. Permasalahan Tata Batas Antar Daerah yang Berhasil Ditindaklanjuti

6. Kerjasama Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Pihak Ketiga yang berhasil ditindaklanjuti
7. Indikator Kinerja Kunci Keluaran
8. Indikator Kinerja Kunci Hasil.

Untuk Tahun 2022 LPPD Sekretariat Daerah telah disampaikan ke Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai bahan atau data untuk LPPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.



Dokumentasi Kegiatan Penyusunan LPPD Sekretariat Daerah Tahun 2021

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Petugas penyusun LPPD kurang memahami pedoman penyusunan LPPD dengan baik;

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Rapat dengan petugas penyusun LPPD membahas tentang pedoman penyusunan LPPD
- Konsultasi secara intens terkait penyusunan LPPD SKPD

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Melaksanakan Rapat/Monev per triwulan yang di pimpin atasan langsung terkait data dari Bagian-Bagian dalam rangka penyusunan LPPD
- Desk penyusunan LPPD SKPD

SASARAN 2. Menyusun Laporan SAKIP Sekretariat Daerah

Indikator : Jumlah Laporan Dokumen SAKIP Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Menyusun Laporan SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah laporan dokumen SAKIP Sekretariat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Pelaporan

Berdasarkan surat dari Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor: 700/202//LHE-Insp/2021, Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) Tahun 2020, merekomendasikan SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut agar melakukan peningkatan komponen SAKIP.



Dokumentasi Kegiatan Penyusunan SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2021

Terkait hal tersebut diatas dengan ini telah dilakukan perbaikan hasil reuiu Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT
1	PERENCANAAN KINERJA	Dokumen perencanaan dan target kinerja agar selalu menjadi dasar penetapan perencanaan anggaran tahunan	Penetapan perencanaan anggaran tahunan sudah berdasarkan dokumen perencanaan dan target kinerja (dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja)
2	PENGUKURAN KINERJA	Pencapaian target IKU agar dimanfaatkan dalam penilaian kinerja untuk pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	Capaian target IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian prestasi kinerja individu dengan pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> serta promosi jabatan

3	PELAPORAN KINERJA	Laporan Kinerja agar dimanfaatkan untuk perbaikan peningkatan kinerja	Laporan capaian kinerja telah dipergunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Daerah
4	EVALUASI INTERNAL	Hasil evaluasi internal yang dilakukan secara berkala agar dimanfaatkan dalam menilai keberhasilan program	Hasil evaluasi internal telah dilakukan secara berkala dengan per Triwulan, per Semester, dan Bulanan, hal ini untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program kegiatan (Monitoring dan Evaluasi berkelanjutan)
5	PENCAPAIAN KINERJA	Peningkatan atas pencapaian target kinerja	Capaian target kinerja dapat dilihat dari tercapainya target kinerja, analisa capaian IKU dan capaian kinerja lebih baik tahun sebelumnya (Dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Daerah)

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Petugas penyusun laporan kinerja kurang memahami pedoman penyusunan laporan kinerja dengan sistem AKIP

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Rapat dengan petugas penyusun laporan kinerja membahas tentang pedoman penyusunan laporan kinerja

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Melaksanakan Rapat/Monev per triwulan yang di pimpin atasan langsung terkait capaian kinerja Bagian-Bagian;
- Membuat aplikasi Laporan Kinerja dan Keuangan Bagian dengan tujuan aplikasi tersebut untuk mempermudah dalam hal perencanaan, penganggaran dan pelaporan berbasis *online*, cepat serta meminimalisir usulan perencanaan yang tumpang tindih, peningkatan alokasi fasilitasi usulan pola pikir dari pemangku kepentingan serta ketersediaan data yang *update* untuk perencanaan dan pelaporan.
- Melaksanakan Bimtek terkait penyusunan Laporan Kinerja;
- Melaksanakan Monev per bulan, monev per triwulan dan monev akhir tahun terkait capaian kinerja

SASARAN 3. Menyusun Laporan SPIP Sekretariat Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen Laporan SPIP Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Menyusun Laporan SPIP Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen Laporan SPIP Sekretariat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Pelaporan

Berdasarkan surat dari Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor : 050/98 - Insp/2021, Tanggal 23 November 2021, Perihal *Baseline* Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), bahwa Sekretariat Daerah menjadi salah satu SKPD sampel dengan mengampu minimal 2 (dua) sasaran strategis RPJMD. Dan telah ditindaklanjuti dengan mengisi Kertas Kerja Penilaian *Baseline* Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Pada Tahun 2018 Sekretariat Daerah telah dilakukan penilaian Maturitas SPIP oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dengan membuat dokumen-dokumen sesuai dengan unsur-unsur SPIP tersebut, dalam hal ini pelaksanaan unsur-unsur SPIP tersebut dapat di lihat pada tabel berikut :

NO	UNSUR SPIP	SUB UNSUR	PELAKSANAAN SUB UNSUR
1	LINGKUNGAN PENGENDALIAN	- Penegakan Integritas dan etika	- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut - Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11/Kep-Sekda/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 - Pakta Integritas Eselon II, Eselon III dan Eselon IV dan Pelaksana Lingkup Sekretariat Daerah Tahun 2021
		- Komitmen terhadap kompetensi	- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 74 Tahun 2020 tentang Analisis Beban Kerja Sekretariat - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 168 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan Sekretariat Daerah - Penilaian Kompetensi (<i>Assesment</i> PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021) - Daftar pegawai yang telah mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi lainnya.
		- Kepemimpinan yang kondusif	- SOP Penyusunan LAKIP - SOP Penyusunan Renstra - Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7/KEP-SEKDA/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

NO	UNSUR SPIP	SUB UNSUR	PELAKSANAAN SUB UNSUR
			<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah oleh Tim Kabupaten - Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 20/Kep-Sekda/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut - Pedoman Penyusunan RKA Tahun 2021
		<ul style="list-style-type: none"> - Struktur organisasi sesuai kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut - Laporan Hasil Tim Penyusun SOTK - Kegiatan Verifikasi SOTK Baru
		<ul style="list-style-type: none"> - Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab 	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penunjukan sebagai Plh/Plt - Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Kepada Camat - Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pengguna Anggaran PPTK - Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pengguna Anggaran PA/KPA
		<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan pembinaan SDM yang sehat 	<ul style="list-style-type: none"> - Buku Penjagaan Pensiun, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala dan Fasilitas Izin Belajar - Daftar Urut Kepangkatan - Penyusunan Formasi PNS - Hasil identifikasi diklat yang telah diikuti masing-masing Bagian
		<ul style="list-style-type: none"> - Peran APIP yang efektif 	-
		<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan kerja yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti Rekonsiliasi Keuangan TW. I s/d TW. IV - Rekonsiliasi Pendapatan dan Piutang - Rekonsiliasi BMD Barang Daerah - Laporan Keuangan Akhir Tahun - Laporan Pemanfaatan BMD
2	PENGENDALIAN RISIKO	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi risiko 	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 20/Kep-Sekda/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut - Dokumen Identifikasi Risiko Bagian Lingkup Sekretariat Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> - Analisis risiko 	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian Risiko yang berisi <i>Risk Register</i> - Rencana Tindak Pengendalian (RTP) - <i>Baseline</i> Maturitas SPIP Terintegrasi
3	KEGIATAN PENGENDALIAN	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Review</i> kinerja Instansi Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. - Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2020 - Rakor Pejabat Pemerintah Daerah (<i>Coffee Morning</i>) dilaksanakan setiap awal bulan.
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan SDM 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 168 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan Sekretariat Daerah

NO	UNSUR SPIP	SUB UNSUR	PELAKSANAAN SUB UNSUR
			<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian Kompetensi (<i>Assesment</i> PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021) - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 74 Tahun 2019 tentang Analisis Beban Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut - Rencana Kebutuhan Diklat Sekretariat Daerah
		- Pengendalian pengelolaan sistem informasi	Screenshot <i>Website</i> dan Aplikasi Sekretariat Daerah : <ul style="list-style-type: none"> - sirup.ikpp.go.id (SIRUP) - lpse.tanahlautkab.go.id (LPSE) - ukpbj.tanahlautkab.go.id (UKPBJ) - reportinglpse.tanahlautkab.go.id - jdih.tanahlautkab.go.id (JDIH) - Facebook Humas Kab. Tala dan Instagram Humas Kab. Tala - Aplikasi Sosialita (Sistem Order Semua Instansi Lingkup Tala) - setda.tanahlautkab.go.id - SIMPEG - Simda Keuangan
		- Pengendalian fisik aset	<ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Pemakaian Kendaraan Dinas Sekretariat Daerah - Keputusan tentang Pengurus Barang - Berita Acara <i>Stock Opname</i> Barang Pakai Habis dan Cetakan
		- Penetapan dan <i>review</i> indikator dan ukuran kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 - Perjanjian Kinerja Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Pelaksana Sekretariat Daerah Tahun 2021 - Dokumen IKU Sekretariat Daerah Tahun 2021 - Renja Sekretariat Daerah TA 2021 - LAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2020 - SKP Tahunan <i>Online</i>
		- Pemisahan fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
		- Otorisasi transaksi dan kejadian penting	<ul style="list-style-type: none"> - SOP Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah - SOP Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah - Dokumen SPJ Sekretariat Daerah - Dokumen SPP Sekretariat Daerah - Dokumen SPM Sekretariat Daerah
		- Pencatatan akurat dan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> - BKU Sekretariat Daerah - Laporan BMD Sekretariat Daerah - KIB Sekretariat Daerah - LKPJ dan LPPD Sekretariat Daerah - Laporan Keuangan Akhir Tahun 2021
		- Pembatasan akses sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pengguna Barang, Pejabat Penata Usahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang - Surat Keputusan tentang Penunjukan Bendahara - Keputusan tentang Penunjukan PA dan KPA
		- Akuntabilitas sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan tentang Penunjukan PA dan KPA - Surat Keputusan tentang Penunjukan Bendahara - Laporan BMD - Laporan Keuangan - Laporan Bendahara Penerimaan - Laporan Pengelolaan Kepegawaian
		- Dokumentasi sistem pengendalian intern	<ul style="list-style-type: none"> - SOP Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah - SOP Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah - Data Kepegawaian - Data Keuangan

NO	UNSUR SPIP	SUB UNSUR	PELAKSANAAN SUB UNSUR
			- Data Aset BMD
4	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	- Sarana komunikasi	Screenshot <i>Website</i> dan Aplikasi Sekretariat Daerah : - sirup.ikpp.go.id (SIRUP) - lpse.tanahlautkab.go.id (LPSE) - ukpbj.tanahlautkab.go.id (UKPBJ) - reportinglpse.tanahlautkab.go.id - jdih.tanahlautkab.go.id (JDIH) - Facebook Humas Kab. Tala dan Instagram Humas Kab. Tala - Aplikasi Sosialita (Sistem Order Semua Instansi Lingkup Tala) - setda.tanahlautkab.go.id
		- Manajemen sistem informasi	- E monev pertriwulan - E Planning - Simda Keuangan - Simda BMD - SIPD
5	PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN	- Pemantauan berkelanjutan	- Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat melalui E-Lapor - Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait layanan SPSE beserta tindak lanjut
		- Evaluasi terpisah	- Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah - Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas
		- Tindak lanjut	-

Pelaksanaan penyelenggaraan SPIP lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut telah menerapkan unsur-unsur SPIP yaitu Unsur Lingkungan Pengendalian meliputi 7 (Tujuh) Sub Unsur, Unsur Penilaian Risiko meliputi 2 (Dua) Sub Unsur, Unsur Kegiatan Pengendalian meliputi 11 (Sebelas) Sub Unsur, Unsur Informasi dan Komunikasi meliputi 2 (Dua) Sub Unsur, Unsur Pemantauan Pengendalian Intern 2 (Dua) Sub Unsur, dan telah dituangkan dalam bentuk Laporan SPIP Sekretariat Daerah Tahun 2021.

Kegiatan ini meliputi pengumpulan data-data dari semua bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, kemudian disusun dan diolah menjadi Laporan Kinerja (LKj), Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), dan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dimulai dengan rapat persiapan pengumpulan bahan atau data yang akan disusun menjadi laporan untuk dimonitoring dan evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dan BPKB Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan adanya catatan hasil monitoring dan evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut maka perlu dilaksanakan rapat tim untuk menindaklanjuti hal tersebut.



Dokumentasi Kegiatan Penyusunan SPIP Sekretariat Daerah Tahun 2021

Analisa Capaian Sasaran Strategis

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam pengadaan/jasa sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	100%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Mengampu Misi ke-3 “Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”
2	Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintahan melalui sistem LPSE	75%	57.5%	76.6%	
3	Meningkatnya Kompetensi SDM dalam Proses PBJ yang Berkualitas	Persentase SDM yang Kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa	100%	100%	100%	
4	Meningkatnya efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	Persentase efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	100%	75%	75%	
ESELON IV						
1	Melakukan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya	Jumlah sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya yang dikelola	360 Hari	360 Hari	100%	Kasubbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
2	Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	Jumlah paket pengadaan yang masuk dalam LPSE sesuai prosedur	150 Paket	248 Paket	165.3%	Kasubbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
3	Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah pemilihan penyedia Barang/Jasa yang difasilitasi	150 Paket	248 Paket	165.3%	Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
4	Melakukan pendampingan SKPD dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	Jumlah SKPD yang didampingi dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Melakukan sosialisasi/ bimbingan teknis SKPD dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	Jumlah pelaku pengadaan barang/jasa yang mengikuti sosialisasi/bimtek PBJ Pemerintah	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/jasa
6	Memfasilitasi peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam pengelolaan barang/jasa	25 Orang	25 Orang	100%	Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/jasa

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Bagian Pengadaan Barang/Jasa terhadap capaian tahun sebelumnya.

Tabel Capaian Sasaran Indikator Kinerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Terhadap capaian tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2021		
			2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	%	100%	100%	100%	248 Paket	100 %
2	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintahan melalui sistem LPSE	%	-	100%	75%	23 SKPD	57.5 %
3	Persentase SDM yang Kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa	%	-	-	100%	25 Orang	100 %
4	Meningkatnya efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	%	-	-	100 %	3,75%	75 %

Pemaparan analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yaitu :

❖ Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

- 1) Capaian Kinerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa terhadap Indikator yaitu “Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu”.

Dari target kinerja yang sebanyak 150 paket, telah terealisasi sebanyak 248 paket, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerjanya adalah 100%;

- 2) Capaian kinerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa terhadap indikator yaitu “Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE”.

Dari target kinerja sebanyak 40 SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE, telah terealisasi sebanyak 23 SKPD, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerjanya adalah 57,5 %;

- 3) Capaian kinerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa terhadap indikator Persentase SDM yang Kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Dari target kinerja sebanyak 25 orang yang kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa, telah terealisasi sebanyak 25 orang yang telah kompeten sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja telah terealisasi 100%;

- 4) Capaian kinerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa terhadap indikator yaitu “Meningkatnya efisiensi pagu Pengadaan Barang /Jasa”

Dari target kinerja yang sebesar 5 %, telah terealisasi efisiensi sebesar 3,75 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerjanya adalah 75 %;

- 5) Di Tahun 2021 Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut telah mencapai Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai aspek indikator ANTARA dalam Indeks Reformasi Birokrasi .

❖ **Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

1. Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu di Tahun 2020 mencapai 100%, sama dengan tahun 2021 yaitu 100%;
2. Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE di tahun 2021 sebesar 57.5% dari target 100% (23 SKPD dari target 40 SKPD). Sedangkan di tahun 2020 Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE sebesar 52.5%;
3. Persentase SDM yang kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa mencapai di tahun 2021 mencapai 100%, sama dengan tahun 2020 yaitu 100%;
4. Persentase Efisiensi Pagu Pengadaan Barang Jasa di tahun 2021 ini adalah 75% atau 3.75% dari nilai 5% penghematan biaya.

❖ **Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

Sasaran 1 Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik

Indikator : Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	100%	Bagian PBJ Mengampu Misi ke-3 “ Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi yaitu melaksanakan pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Dalam pengelolaan dan pembinaan PBJ tersebut kunci kesuksesannya yaitu jika paket pengadaan yang dilayani dapat diproseskan sesuai standar dan tepat waktu.

Agar paket pengadaan yang dilayani dapat selesai tepat waktu diperlukan peran serta yang sangat besar oleh pelaku pengadaan yang memahami terkait proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam pencapaian persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu menghadapi kendala yaitu :

1. Kurangnya pemahaman para PA/KPA dan PPK dalam menyusun Perencanaan Pengadaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
2. Sulitnya kerjasama SKPD untuk dievaluasi dalam proses pengadaan barang/jasa;
3. Sulitnya membina hubungan dengan para pemangku kepentingan guna menciptakan proses pengadaan barang/jasa yang selaras.

Solusi yang dilaksanakan dalam menghadapi kendala yang disebutkan di atas adalah :

1. Meningkatkan pemahaman para pelaku pengadaan dalam setiap proses pengadaan barang/jasa pemerintah;
2. Memahamkan SKPD terkait pentingnya evaluasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di SKPD sehingga akan menghasilkan proses pengadaan yang lebih baik;
3. Memahamkan pelaku pengadaan terkait pentingnya pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa secara elektronik;
4. Membuka komunikasi secara intens dengan para pemangku kepentingan guna menciptakan proses pengadaan barang/jasa yang selaras.

Rencana aksi perbaikan yang akan dilakukan adalah :

1. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis untuk para pelaku pengadaan yang terencana dan terkoordinir;
2. Melaksanakan pelatihan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
3. Mengagendakan rapat dengan para pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi tentang pengadaan barang/jasa.



GAMBAR 1
Kegiatan Pelayanan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dalam Mendampingi SKPD

Sasaran 2 Meningkatnya SKPD melakukan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem LPSE

Indikator : Persentase SKPD yang melakukan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem LPSE

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya SKPD melakukan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan melalui system LPSE	Persentase SKPD yang melakukan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Melalui Sistem LPSE	75%	23 SKPD	57,5 %	Bagian PBJ Mengampu Misi ke-3 “ Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”

Selain peningkatan kualitas layanan pengadaan barang/jasa, Bagian Pengadaan Barang/Jasa harus mengarahkan SKPD agar dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan sistem LPSE.

Tujuan dari dilaksanakannya Pengadaan barang/jasa secara elektronik (melalui LPSE) adalah :

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
4. Mendukung proses monitoring dan audit; dan
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Untuk itu maka Bagian Pengadaan Barang/Jasa selalu mengusahakan agar SKPD di Pemerintah Kab. Tanah Laut melaksanakan proses pengadaan barang/jasa melalui sistem LPSE.

Proses pengadaan barang/jasa melalui sistem LPSE diantaranya :

- Pengadaan langsung secara elektronik (e-PL)
- E-Tendering;
- E-Seleksi;
- E-Purchasing;
- Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (Pencatatan Non Tender); dan
- E-Kontrak

Di tahun 2021, persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE sebesar 57.5% dari target 100% (23 SKPD dari target 40 SKPD). Sehingga capaian kinerja pada indikator ini 57.5%.

SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE yaitu:

1. Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah
2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
3. Dinas Komunikasi dan Informatika
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
5. Dinas Pemuda dan Olah Raga
6. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
7. Dinas Kesehatan
8. Dinas Perhubungan
9. Badan Perencanaan Pembangunan
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
11. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
13. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14. Dinas Pariwisata
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
17. Sekretariat Dewan
18. Sekretariat Daerah
19. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21. Inspektorat
22. Dinas Sosial
23. Kecamatan Pelaihari

Pada tahun 2021, proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan SKPD melalui sistem LPSE meliputi e-tendering, e-seleksi, e-purchasing, e-pengadaan langsung dan pencatatan non tender.

Terdapat beberapa kendala agar SKPD melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui sistem LPSE tersebut, yaitu :

1. Masih kurangnya pemahaman pelaku pengadaan di SKPD terkait pentingnya melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui sistem LPSE (terutama untuk e-PL, Pencatatan non Tender dan E-Kontrak);
2. Masih kurangnya kecakapan pelaku pengadaan dalam menggunakan aplikasi SPSE;
3. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya secara elektronik (Pengadaan Langsung secara elektronik (e-PL) masih ada yang dilaksanakan secara manual, hal tersebut terjadi karena pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standard an Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, masih membolehkan pelaksanaan secara manual).

Solusi yang dilaksanakan dalam menghadapi kendala yang disebutkan di atas adalah:

1. Peningkatan pemahaman dan kecakapan pelaku pengadaan di SKPD dalam menggunakan aplikasi SPSE;
2. Koordinasi dengan pimpinan daerah dan stake holder di Pemerintah Daerah Kab. Tanah Laut terkait adanya keharusan dalam pemanfaatan aplikasi SPSE dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah terutama untuk e-PL, Pencatatan non Tender dan E-Kontrak.
3. Untuk pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya di atas 200 Juta dan pengadaan jasa konsultansi di atas 100 juta telah dilaksanakan E-Tendering dan E-Seleksi oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Rencana aksi perbaikan untuk peningkatan SKPD melakukan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem LPSE yang akan dilakukan adalah :

1. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis untuk para pelaku pengadaan yang terencana dan terkoordinir dalam pemanfaatan sistem LPSE;
2. Melaksanakan koordinasi dengan stake holder lain (Bappeda, BPKAD dan Inspektorat) untuk menyamakan persepsi tentang pengadaan barang/jasa dalam pemanfaatan SPSE.



GAMBAR 2

Kegiatan Pendampingan SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE Oleh Bag. Pengadaan Barang/jasa

Sasaran 3 Meningkatnya Kompetensi SDM dalam proses PBJ yang berkualitas

Indikator : Persentase SDM yang Kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
3	Meningkatnya Kompetensi SDM dalam proses PBJ yang berkualitas	Persentase SDM yang kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa	100%	100%	100%	Bagian PBJ Mengampu Misi ke-3 “ Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”

Sesuai dengan pencapaian level 3 proaktif kematangan UKPBJ, sebuah UKPBJ harus memenuhi 9 variabel yang mana salah satu dari variabel tersebut adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa yang berkualitas dan kompeten di bidangnya. Sehingga target pencapaian kinerja organisasi akan mudah direalisasi.

SDM pada bagian pengadaan barang/jasa ini terdiri atas :

- Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- Pengelola SPSE; dan
- Pengelola pembinaan dan advokasi.

SDM dari ketiga subbagian ini saling berkolaborasi dalam melaksanakan pelayanan pada bagian pengadaan barang/jasa yang meliputi pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan Sistem pengadaan secara elektronik dan pengelolaan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.

Untuk itu maka menjadikan SDM yang ada pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa menjadi berkompeten dan berkualitas adalah suatu kewajiban. Sehingga di tahun 2021 ada penambahan indikator kinerja yaitu Persentase SDM yang kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa dengan target kinerja 100% untuk 25 orang internal Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan pelaku pengadaan di 40 SKPD.

Adapun realisasi capaian kinerja terkait Persentase SDM yang kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa mencapai 100%.

Di tahun 2021 ini terdapat beberapa kendala dalam mewujudkan SDM yang kompeten dalam pengadaan barang/jasa, yaitu :

1. Terbatas dalam melaksanakan kegiatan bimbingan teknis, pendampingan dan konsultasi PBJ untuk meningkatkan kompetensi SDM terkait pengadaan barang/jasa akibat pandemic covid-19;
2. Adanya tsunami perubahan regulasi terkait Pengadaan Barang/Jasa dan pengelolaan keuangan daerah dalam waktu yang bersamaan sehingga kesulitan memperdalam pengetahuan baru tersebut;
3. Terbatasnya komunikasi ke LKPP untuk berkonsultasi;
4. Sikap menganggap mudah ilmu pengadaan barang/jasa sehingga banyak pelaku pengadaan di SKPD yang tidak mengikuti acara bimbingan teknis dengan sungguh-sungguh.

Solusi yang dilaksanakan dalam menghadapi kendala yang disebutkan di atas adalah:

1. Pemetaan kebutuhan pelatihan pengadaan barang/jasa untuk semua pelaku pengadaan di SKPD;

2. Penjadwalan kegiatan untuk sharing perubahan regulasi tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Keuangan Daerah ke pelaku pengadaan di SKPD;
3. Perlu kunjungan ke SKPD untuk melaksanakan FGD terkait regulasi dan implementasi pengadaan barang/jasa pemerintah di SKPD.

Rencana aksi perbaikan untuk peningkatan Kompetensi SDM dalam proses PBJ yang berkualitas yang akan dilakukan adalah :

1. Penyusunan jadwal kegiatan pembinaan pelaku pengadaan yang lebih terarah, efektif dan efisien dan perlu kunjungan ke SKPD untuk melaksanakan FGD terkait regulasi dan implementasi pengadaan barang/jasa pemerintah di SKPD;
2. Mengikutsertakan kegiatan PBJ di agenda kegiatan Pimpinan Daerah (seperti coffe morning) untuk meningkatkan kompetensi para pelaku pengadaan di SKPD;
3. Mengajukan telaahan staf ke Pimpinan Daerah untu membuka formasi CPNS untuk Jabatan Fungsional Pengelola PBJ



GAMBAR 3

Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk PA/KPA SKPD Kab. Tanah Laut

Sasaran 4 Meningkatnya Efisiensi Pagu Pengadaan Barang Jasa

Indikator : Persentase Efisiensi Pagu Pengadaan Barang Jasa

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
4	Meningkatnya Efisiensi Pagu Pengadaan Barang Jasa	Persentase Efisiensi Pagu Pengadaan Barang Jasa	100%	3,75 %	75%	Bagian PBJ Mengampu Misi ke-3 “ <i>Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)</i> ”

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2019 tentang Contoh Bukti Dukung Model Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (MK-UKPBJ) Level proaktif indikator kinerja utama sekurang-kurangnya mencakup 4 indikator kinerja pengadaan pada masing-masing area pengukuran yaitu :

1. Ketepatan waktu
2. Penghematan Biaya
3. Kualitas, dan
4. Tingkat Layanan.

Menyesuaikan dengan Surat Edaran di atas maka Bagian Pengadaan Barang/Jasa menambahkan lagi 1 (satu) indikator kinerja terkait Penghematan biaya. Adapun penghematan biaya di sini diukur melalui penghematan biaya dengan mengukur total nilai dari pagu anggaran dibandingkan dengan total nilai kontrak.

Untuk Indikator kinerjanya adalah Persentase Efisiensi Pagu Pengadaan Barang Jasa dengan target 100% dari 5% penghematan Biaya.

Adapun capaian kinerja untuk Persentase Efisiensi Pagu Pengadaan Barang Jasa di tahun 2021 ini adalah 75% atau 3.75% dari nilai 5% penghematan biaya.

Untuk **rencana aksi** di tahun yang akan datang, terkait dengan pencapaian target penghematan biaya, Bagian pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab. Tanah Laut akan memperbanyak kegiatan sosialisasi dan pembinaan terhadap pelaku pengadaan di SKPD agar lebih cakap dalam penyusunan dokumen persiapan pengadaan (spesifikasi teknis/KAK, HPS dan Rancangan Kontrak).

❖ Analisa Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas layanan pengadaan Barang/Jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik dan Meningkatnya SKPD melakukan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem LPSE maka ditunjang dengan Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa dengan pagu Rp 1.247.423.136,- dengan besaran realisasi Rp 806.240.833,- Dengan realisasi keuangan sebesar 64,6% dan dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang SDM yaitu Kasubbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa dan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ).

❖ Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP) 2021	REALISASI ANGGARAN (RP) 2021	%	JUMLAH SDM	KET
1	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam pengadaan/jasa sesuai standard dan tepat waktu	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	566.999.472	286.223.861	50,4		
	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE		Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	566.999.472	286.223.861	50,4	3 Orang	10 Orang JF PPBJ
2	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE							
3	Persentase SDM yang Kompeten dalam pengadaan Barang/Jasa		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	294.327.192	270.242.840	91,8		
4	Persentase Efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa		Sub Kegiatan Pengelolaan layanan Pengadaan Secara Elektronik	294.327.192	270.242.840	91,8	3 Orang	
	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam pengadaan/jasa sesuai standard dan tepat waktu		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	386.096.472	249.774.132	64,6		
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	386.096.472	249.774.132	64,6	1 Orang	

❖ **Analisa Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)**

Untuk capaian indikator sasaran pada Kasubbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dilaksanakan melalui Program Perekonomian dan Pembangunan dengan pagu Rp 294.327.192,- terealisasi Rp 270.242.840,- dengan realisasi keuangan sebesar 91,8%.

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia
Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP) 2021	REALISASI ANGGARAN (RP) 2021	%	SDM	KET
	Jumlah sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastruktur yang dikelola	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Sub Kegiatan Pengelolaan layanan Pengadaan Secara Elektronik	294.327.192,-	270.242.840,-	91,8	3	

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dapat dilihat pada analisa sebagai berikut :

Tabel Capaian Sasaran dan Indikator
 Kasubbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Melakukan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya	Jumlah sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya yang dikelola	360 Hari	360 Hari	360 Hari	Kasubbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
2	Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	Jumlah paket pengadaan yang masuk dalam LPSE sesuai prosedur	150 Paket	248 Paket	248 Paket	Kasubbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

SASARAN 1 Melakukan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya

Indikator : Jumlah sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya yang dikelola

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Melakukan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya	Jumlah sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya yang dikelola	360 Hari	360 Hari	360 Hari	Kasubbag Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Jumlah terlaksanakannya pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastruktur dikerjakan selama 360 hari.

Dalam melaksanakan indikator tersebut menghadapi kendala yaitu :

- Kendalanya adanya gangguan sistem jaringan internet dan suplay listrik

Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala adalah :

- Meningkatkan infrastruktur sistem Jaringan dan kelistrikan agar sistem informasi yang berjalan menjadi lancar

Rencana aksi perbaikan yang dilakukan kedepannya adalah :

- Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan (*maintenance*) secara rutin sistem jaringan dan kelistrikan.
- Pergantian perangkat (*hardware/software*) secara berkala.

SASARAN 2 Memfasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik

Indikator : Jumlah Paket Pengadaan yang Masuk Dalam LPSE Sesuai Prosedur

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	Jumlah paket pengadaan yang masuk dalam LPSE sesuai prosedur	150 Paket	248 Paket	248 Paket	Kasubbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Jumlah paket pengadaan yang masuk dalam LPSE sesuai prosedur sebanyak 248 paket.

Dalam melaksanakan indikator tersebut menghadapi kendala yaitu :

- *Summary* tender pada aplikasi SPSE terkadang tidak dapat di unduh

Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala adalah :

- Melaksanakan Pembuatan Tiket ke helpdesk LKPP

Rencana aksi perbaikan yang dilakukan kedepannya adalah :

- Mengikuti update perkembangan SPSE

❖ Analisa Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

Pada Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 3 (tiga) orang yaitu :

- Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) -1 (satu) orang;
- Pengelola Penyelenggara Media Elektronik -1 (satu) orang;
- Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1 (satu) orang.

❖ Analisa Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

Untuk capaian indikator sasaran pada Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan melalui Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan pagu Rp. 566.999.472,- terealisasi Rp. 286.223.861,- dengan realisasi keuangan sebesar 50,4%.

Adapun penyebab rendahnya realisasi keuangan dikarenakan Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka klarifikasi/verifikasi penyedia (Vendor) TIDAK DILAKSANAKAN secara berkunjung langsung/tatap muka. Hal tersebut disebabkan adanya pandemi Covid 19 yang mengharuskan pelaksanaan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi pada pemilihan penyedia dilaksanakan secara DARING. (Sesuai Edaran LKPP Nomor 4 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negosiasi pada Pemilihan Penyedia dalam Masa Wabah Virus Corona (Covid 19)).

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia
Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP) 2021	REALISASI ANGGARAN (RP) 2021	%	SDM	KET
1	Jumlah Pemilih penyedia Barang/Jasa yang difasilitasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	566.999.472,-	286.223.861,-	50,4	3 Orang	10 Orang JF PPBJ
2	Jumlah Pemilih penyedia Barang/Jasa yang difasilitasi		Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dapat dilihat pada analisa sebagai berikut :

Tabel Capaian Sasaran dan Indikator Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah pemilihan penyedia Barang/Jasa yang difasilitasi	150 Paket	248 Paket	248 Paket	Kasubbag Pengadaan Barang dan Jasa
2	Melakukan pendampingan SKPD dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	Jumlah SKPD yang didampingi dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	Kasubbag Pengadaan Barang dan Jasa

SASARAN 1 Memfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Sesuai Standar dan Tepat Waktu

Indikator : Jumlah Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang difasilitasi

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah pemilihan penyedia Barang/Jasa yang difasilitasi	150 Paket	248 Paket	248 Paket	Kasubbag Pengadaan Barang Dan Jasa

Jumlah terlaksanakannya kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu sebanyak 248 paket.

Dalam melaksanakan indikator tersebut menghadapi kendala yaitu :

- Masih banyak PPK dari SKPD yang kurang menguasai dalam penyusunan dokumen persiapan pengadaan, hal tersebut mengakibatkan tender/seleksi tidak bisa segera dilaksanakan di awal tahun;
- SKPD tidak segera menyampaikan Dokumen Persiapan Pengadaan untuk pelaksanaan Tender/Seleksi yang menyebabkan proses tender/seleksi numpuh di triwulan II (bulan April, Mei dan Juni), hal tersebut mengakibatkan beban kerja Pokja Pemilihan semakin berat.

- SKPD terlambat dalam pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan melalui aplikasi SiRUP.

Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala adalah :

- UKPBJ melaksanakan pendampingan dengan menugaskan Pengelola PBJ untuk mendampingi PPK dalam pelaksanaan penyusunan Dokumen Persiapan Pengadaan;
- UKPB selalu menyampaikan himbauan kepada SKPD agar segera menyampaikan permohonan tender/seleksi ke UKPBJ melalui rapat koordinasi (*Coffee Morning*) yang biasanya dilakukan di awal pekan;
- UKPBJ melaksanakan monitoring pelaksanaan input RUP dan melaksanakan pelatihan (*coaching clinic*) tata cara input RUP kepada SKPD serta memberikan pendampingan dalam pelaksanaan input RUP kepada SKPD.

Rencana aksi perbaikan yang dilakukan kedepannya adalah :

- Melaksanakan sosialisasi dan peningkatan kompetensi kepada pelaku PBJ yang ada di SKPD dengan lebih intensif dengan cara berkunjung ke SKPD.
- Menyampaikan himbauan kepada SKPD melalui Sekretaris Daerah tentang pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan melalui aplikasi SiRUP dengan dikenakannya sanksi bagi SKPD yang terlambat dalam pelaksanaan.



GAMBAR 4

Kegiatan Reviu Pengadaan Oleh Pokja Pemilihan Bersama SKPD Dalam Proses Pemilihan

SASARAN 2 Memfasilitasi Pendampingan SKPD dalam Perencanaan Pengadaan dan Pengelolaan Kontrak

Indikator : Jumlah SKPD yang didampingi dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Melakukan pendampingan SKPD dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	Jumlah SKPD yang didampingi dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	Kasubbag Pengadaan Barang Dan Jasa

Jumlah fasilitasi SKPD yang didampingi dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak sebanyak 40 SKPD.

Dalam melaksanakan indikator tersebut menghadapi kendala yaitu :

- Susah mendapat informasi tentang inventarisasi paket PBJ yang ada di SKPD.
- Susahnya koordinasi dengan SKPD khususnya PPK dalam hal pendampingan pengelolaan kontrak.

Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala adalah :

- Menyampaikan himbauan kepada SKPD melalui Sekretaris Daerah pada kegiatan rapat koordinasi agar SKPD segera melaksanakan pengumuman Rencana Umum Pengadaan, agar UKPBJ bisa segera menginventarisasi, memetakan dan merencanakan strategi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Menyampaikan kepada SKPD agar melibatkan Pengelola PPBJ yang ada di UKPBJ untuk berperan serta untuk mendampingi dalam pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan kontrak PBJ.

Rencana aksi perbaikan yang dilakukan kedepannya adalah :

- Lebih intens melakukan himbauan kepada SKPD terkait pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan agar bisa dilaksanakan di awal tahun, sehingga UKPB dapat lebih mudah untuk memetakan dan merencanakan strategi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

- Lebih intens melaksanakan sosialisasi kepada SKPD tentang peran serta Pengelola PPBJ dalam pendampingan perencanaan dan pengelolaan kontrak PBJ dengan tujuan agar Pengelola PPBJ lebih dilibatkan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan kontrak PBJ.



GAMBAR 5
Kegiatan Pendampingan Dalam Perencanaan Pengadaan Bersama Dinas Pariwisata

❖ Analisa Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa

Untuk capaian indikator sasaran pada Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan melalui Program Pembinaan, Pengelolaan, Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu Rp 386.096.472,- terealisasi Rp 249.774.132,- dengan realisasi keuangan sebesar 64,6%.

Adapun kendala serapan keuangan terletak pada belanja bahan pakai habis, yang mana harga pada DPA Program/kegiatan lebih tinggi dibanding harga di toko ATK. Sedangkan untuk belanja cetak dan penggandaan tidak dapat dimaksimalkan sebab belanja cetak spanduk yang tidak dapat dilaksanakan seluruhnya karena kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis lebih banyak dilaksanakan secara daring melalui media zoom.

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia
Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP) 2021	REALISASI ANGGARAN (RP) 2021	%	SDM	KET
1	Jumlah pelaku Pengadaan barang/jasa yang mengikuti sosialisasi/bimtek PBJ Pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	386.096.472,-	249.774.132,-	64,6	5 Orang	
2	Jumlah pelaku Pengadaan barang/jasa yang mengikuti sosialisasi/bimtek PBJ Pemerintah		Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa dapat dilihat pada analisa sebagai berikut :

Tabel Capaian Sasaran dan Indikator
Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Melakukan sosialisasi/bimbingan teknis SKPD dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	Jumlah pelaku pengadaan barang/jasa yang mengikuti sosialisasi/bimtek PBJ Pemerintah	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
2	Memfasilitasi peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam pengelolaan barang/jasa	25 Orang	25 Orang	25 Orang	Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa

SASARAN 1 Melakukan Sosialisasi/Bimbingan Teknis SKPD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Indikator : Jumlah Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang Mengikuti Sosialisasi/Bimtek PBJ Pemerintah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Melakukan sosialisasi/bimbingan teknis SKPD dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	Jumlah pelaku pengadaan barang/jasa yang mengikuti sosialisasi/bimtek PBJ Pemerintah	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa

Jumlah fasilitasi pembinaan SKPD dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan sebanyak 40 fasilitasi SKPD.

Dalam melaksanakan indikator tersebut menghadapi kendala yaitu :

- Masih rendahnya tingkat kesadaran para pelaku pengadaan di SKPD untuk menambah wawasan terkait Pengadaan Barang/Jasa.
- Kurang mengetahuinya fungsi dan peranan pelaku pengadaan di SKPD dalam pelaksanaan proses PBJ.
- Pemahaman terkait PBJ tidak sampai kepada pimpinan tertinggi SKPD, hanya kepada staf, sehingga banyak terkendala dalam pelaksanaan.

- Masih terbatasnya kemampuan penyedia dalam pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik.

Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala adalah :

- Mensosialisasikan peranan dan fungsi para pelaku pengadaan di SKPD
- Meningkatkan wawasan para pelaku pengadaan
- Melaksanakan pelatihan dan peningkatan wawasan bagi penyedia

Rencana aksi perbaikan yang dilakukan kedepannya adalah :

- Melaksanakan kunjungan ke SKPD untuk mengadakan kegiatan sharing terkait pengadaan barang/jasa guna menambah wawasan para pelaku pengadaan di SKPD
- Lebih intens dalam mensosialisasikan kegiatan Pembinaan pelaku pengadaan yang mencakup Pa/KPA, PPK, Pokja/PP sampai dengan Penyedia.
- Membuat rencana kerja yang disusun sesuai dengan kebutuhan para pelaku pengadaan



GAMBAR 6

Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penginputan SiRUP bagi PA/KPA dan Admin/Petugas Input SiRUP SKPD Pemerintah Daerah Kab. Tanah Laut



GAMBAR 7

Workshop Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Dinas Kesehatan, BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas se-Kabupaten Tanah Laut

SASARAN 2 Memfasilitasi peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Indikator : Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mempunyai Kompetensi Dalam Pengelolaan Barang/Jasa

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Memfasilitasi peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam pengelolaan barang/jasa	25 Orang	25 Orang	25 Orang	Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa

Jumlah fasilitasi pengelolaan personil Bagian Pengadaan Barang/Jasa di tahun 2020 terlaksana untuk 25 orang.

Dalam melaksanakan indikator tersebut menghadapi kendala yaitu :

- Terbatasnya kegiatan pembinaan bagi personil PBJ di SKPD karena pandemik covid-19.
- Terbatasnya kegiatan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan JF PPBJ yang dapat mendukung kinerja dan angka kredit JF PPBJ tersebut.

Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala adalah :

- Mengkonsep acara pembinaan personil PBJ di SKPD sesuai kebutuhan.
- Mencari informasi lebih intens terkait kegiatan pembinaan JF PPBJ.

Rencana aksi perbaikan yang dilakukan kedepannya adalah :

- Melaksanakan kunjungan ke SKPD untuk pembinaan personil PBJ di SKPD.
- Mengkoordinasikan dengan LKPP terkait kebutuhan pembinaan JF PPBJ yang dapat mendukung kinerja dan angka kredit JF PPBJ tersebut.



GAMBAR 8

Bimbingan Teknis Kewajaran Harga dan Tertib Dokumen Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi



GAMBAR 9

Bimbingan Teknis Strategi Kerja PPK dan PPTK dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Analisa Capaian Sasaran Strategis

Kepala Bagian Hukum

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya informasi produk hukum	Persentase informasi produk hukum	100%	100%	100%	Bagian Hukum Mengampu Misi ke- 3 “Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)”
2	Meningkatnya harmonisasi produk hukum	Persentase produk hukum yang harmonis	100%	100%	100%	
3	Tingkat penanganan kasus/perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani	100%	100%	125%	
4	Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)	Nilai 75	-	-	
ESELON IV						
1	Mengoreksi, sinkronisasi dan Fasilitasi Penyusunan produk hukum pengaturan	Jumlah produk hukum pengaturan yang dikoreksi atau yang diharmonisasi	200	135	67,5	Kasubbag Pembentukan Produk Hukum Pengaturan
2	Melakukan fasilitasi dan harmonisasi Peraturan Daerah sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik	Jumlah produk hukum daerah yang telah difasilitasi dan diharmonisasi sesuai ketentuan perundang-undangan	19	9	47,37	Kasubbag Pembentukan Produk Hukum Pengaturan
3	Fasilitasi kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama, naskah perjanjian hibah daerah atau naskah keperdataan lainnya	Jumlah kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama, naskah perjanjian hibah daerah atau naskah keperdataan lainnya yang ditelaah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	400	421	105,25	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM
4	Fasilitasi penanganan masalah hukum dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Jumlah masalah hukum yang di fasilitasi	4	5	125	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM
5	Fasilitasi Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM)	Jumlah kegiatan Rencana Aksi Nasional Asasi Manusia (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM)	4	3	100	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM

6	Mengoreksi, sinkronisasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum penetapan	Jumlah produk hukum penetapan yang dikoreksi atau yang di harmonisasi	900	1405	176	Kasubbag Pembentukan Produk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum
7	Dokumentasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Registrasi dan dokumentasi produk hukum daerah	1000 Register/ Dokumentasi	100%	100	Kasubbag Pembentukan Produk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum
		Jumlah Cetak Produk Hukum Daerah	500 Eksemplar	500	100	Kasubbag Pembentukan Produk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum
8	Pengelolaan informasi Hukum dan Publikasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Peserta yang mendapatkan Sosialisasi /Penyuluhan Hukum	250 Orang	200	80	Kasubbag Pembentukan Produk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum
		Jumlah kegiatan pengelolaan website jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Kabupaten Tanah Laut	365 Hari	1	100	Kasubbag Pembentukan Produk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum

❖ Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Capaian kinerja Bagian Hukum dari 4 (empat) indikator sebagai berikut:

- 1) Persentase Produk Hukum Daerah/Lainnya yang harmonis pada Tahun 2021 dengan target 100% telah dapat terealisasi sebesar 100% juga
- 2) Persentase masalah hukum yang diselesaikan pada Tahun 2021 dengan target 100% telah terealisasi lebih tinggi dari target yaitu sebesar 125%
- 3) Hasil penilaian atas pemenuhan HAM yang didapat pada Tahun 2021 dengan target nilai 75 tidak dapat terealisasi dikarenakan peniadaan kegiatan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2021 oleh Kementerian Hukum dan HAM R.I
- 4) Persentase produk hukum daerah yang terdokumentasi dan dipublikasikan pada Tahun 2021 dengan target 100% telah dapat terealisasi sebesar 100% juga

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Bagian Hukum terhadap capaian tahun sebelumnya

Tabel Capaian Sasaran Indikator Kinerja Bagian Hukum terhadap capaian tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2021		
			2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase informasi produk hukum	%	-	-	100%	100%	100%
2	Persentase produk hukum yang harmonis	%	238%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani	%	100%	100%	100%	100%	125%
4	Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Nilai	Nilai 71,82	Nilai 79,64	Nilai 75	-	-

❖ Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

- 1) Persentase produk hukum daerah yang terdokumentasi dan dipublikasikan pada Tahun 2021 dan Tahun-tahun sebelumnya sama-sama terealisasi 100%
- 2) Persentase Produk Hukum Daerah/Lainnya yang harmonis pada Tahun 2021 terealisasi sesuai dengan target yaitu 100%
- 3) Persentase masalah hukum yang diselesaikan pada Tahun 2021 lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya
- 4) Hasil penilaian atas pemenuhan HAM pada Tahun 2021 tidak diperoleh dikarenakan peniadaan kegiatan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2021 oleh Kementerian Hukum dan HAM R.I

❖ **Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

SASARAN 1 Meningkatnya Informasi Produk Hukum

Indikator : Persentase Infomasi Produk Hukum

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya informasi produk hukum	Persentase informasi produk hukum	100%	100%	100%	Bagian Hukum Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Pendokumentasian terhadap Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati telah dilakukan dengan baik, register, penomoran dan pengarsipan setiap produk hukum daerah yang telah dilakukan. Selain melakukan pendokumentasian terhadap produk hukum daerah, Bagian Hukum melalui sub bagian dokumentasi dan informasi hukum juga memberikan pelayanan kepada SKPD atau masyarakat yang datang untuk meminta informasi mengenai prodok hukum daerah atau informasi hukum lainnya secara langsung.

Untuk kegiatan publikasi dilakukan pembukuan terhadap produk hukum daerah sebanyak **500 eksemplar pada tahun 2021** yang terdiri dari 500 Lembaran Daerah. Setelah dilakukan cetak Produk hukum daerah tersebut dipublikasikan dengan cara membagikan produk hukum daerah yang telah dibukukan tersebut kepada SKPD sampai dengan Kecamatan. Selain itu publikasi terhadap produk hukum daerah juga dilakukan melalui website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Tanah Laut dengan melakukan digitalisasi terhadap produk hukum daerah ditahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya guna melengkapi data produk hukum daerah yang telah ada.

Sehingga target 100% yang telah dibuat sebelumnya dapat dianggap terrealisasikan semua atau 100% Sehingga capaiannya adalah sebesar 100%.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Proses penginputan atau pengunggahan data produk hukum daerah belum terjadwal dengan baik dikarenakan padatnya kegiatan pada sub bagian dokumentasi dan informasi hukum karena pada Tahun 2021 juga melakukan pencetakan terhadap produk hukum penetapan.

- File atau dokumen Peraturan Daerah Tahun 2005 kebawah yang masih belum ditemukan arsipnya karena proses pengarsipan waktu itu masih belum sebegas saat ini. kebawah dan Peraturan Bupati Tahun 2013 kebawah tidak tersedia karena terkendala tidak adanya file atau dokumen karena ditahun-tahun tersebut Perbup langsung dicetak oleh SKPD masing-masing.
- Masih terbatasnya anggaran untuk melakukan pencetak produk hukum

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Perlu membuat jadwal rutin untuk melakukan proses digitalisasi dan penginputan data ke website JDIH Tanah Laut
- Perlu melakukan pengumpulan dan pencarian terhadap dokumen-dokumen yang belum lengkap baik diruang arsip atau ke SKPD-SKPD terkait secara bertahap
- perlu penambahan anggaran pada cetak produk hukum agar dapat mencetak lebih banyak produk hukum

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- membuat jadwal rutin untuk melakukan proses digitalisasi dan penginputan data ke website JDIH Tanah Laut
- melakukan pengumpulan dan pencarian terhadap dokumen-dokumen yang belum lengkap baik diruang arsip atau pada SKPD-SKPD terkait secara bertahap
- Penganggaran pembuatan cetak produk hukum



SASARAN 2 Meningkatnya harmonisasi produk hukum

Indikator : Persentase produk hukum yang harmonisasi

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya harmonisasi produk hukum	Persentase produk hukum yang harmonis	100%	100%	100%	Bagian Hukum Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Dalam hal ini bagian hukum menerima dan melakukan koreksi terhadap *draft* rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati yang diusulkan oleh SKPD terkait ke bagian hukum. Selanjutnya juga dilakukan autentifikasi terhadap draf rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati.

Melakukan rapat-rapat serta fasilitasi dan evaluasi terhadap draf rancangan peraturan daerah dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta jika diperlukan konsultasi dan koordinasi dengan kementerian terkait. Hal tersebut juga bisa dilakukan terhadap rancangan peraturan bupati jika diperlukan. Dan khusus untuk Harmonisasi terhadap Peraturan Daerah wajib dilakukan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan. Sehingga target yang 100% yang telah dibuat sebelumnya dapat direalisasikan 100% Sehingga capaiannya adalah sebesar 100%.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Prosedur penetapan pembuatan produk hukum yang panjang sehingga perjalanan dari mulai draf s/d penetapan terkesan lama terutama rancangan peraturan daerah yang terkadang terkendala dalam proses di DPRD
- Adakalanya juga SKPD pengusul lambat dalam melakukan pengembalian draf setelah dikoreksi untuk dicetak sehingga terkesan prosesnya menjadi lama.
- belum siapnya SKPD pengusul terhadap draft dan kajian rancangan peraturan daerah (naskah akademik)

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Petugas perlu menghubungi SKPD pengusul untuk mengingatkan agar draf yang telah diperbaiki agar segera diserahkan kembali ke bagian hukum
- Perlunya penganggaran pembuatan (naskah akademik) untuk kajian Rancangan Peraturan Daerah
- Perlunya penganggaran perjalanan dinas luar daerah untuk melakukan rapat-rapat koordinasi tingkat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Petugas perlu menambahkan kolom baru yaitu kolom “tanggal berkas kembali/diterima” setelah perbaikan oleh SKPD pada buku tanda terima, sehingga bisa dilihat SKPD mana yang telah mengembalikan dan yang belum mengembalikan berkas.
- Penambahan anggaran pembuatan (naskah akademik) untuk kajian Rancangan Peraturan Daerah
- Penganggaran perjalanan dinas luar daerah untuk melakukan rapat-rapat koordinasi tingkat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan



SASARAN 3 Tingkat penanganan kasus/perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah

Indikator : Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
3	Tingkat penanganan kasus/perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani	100%	100%	100%	Bagian Hukum Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Pelayanan bantuan hukum, bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan SKPD ditahun 2021 dengan jumlah permasalahan hukum sebanyak 5 (lima) kasus. yaitu 1 (satu) Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pelaihari dengan nomor: 19/PDT.G/2020/PN.Pli dan 1 (Satu) Perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan nomor: 22/G/TF/2020/PTUN.BJM.yang saat ini sedang proses Kasasi di Mahkamah Agung dan pendampingan terhadap 3 Kasus dugaan Tindak Pidana.

Adapun kendala dalam pemberian fasilitasi bantuan hukum tersebut diatas adalah kurang tanggapnya SKPD atau Pemberi Kuasa dalam memenuhi berkas atau dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan membuat jawaban dan bukti-bukti didalam persidangan, padahal berkas atau dokumen tersebut ada pada Pemberi Kuasa.

Dalam fasilitasi penanganan kasus tidak serta merta dapat diprediksi kapan kasus tersebut dapat dianggap selesai, karena bisa saja salah satu pihak melakukan upaya hukum sehingga waktu atau proses akan tetap berlanjut sampai dengan ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa telah dilakukan fasilitasi bantuan hukum terhadap semua kasus yang masuk, sehingga target yang 100% yang telah dibuat sebelumnya dapat dianggap terrealisasikan semua atau 100% Sehingga capaiannya adalah sebesar 100%.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- kurang tanggapnya SKPD atau Pemberi Kuasa dalam memenuhi berkas atau dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan membuat jawaban dan bukti-bukti didalam persidangan, atau

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- koordinasi dan komunikasi dengan pemberi kuasa

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Tetap terus melakukan koordinasi dan komunikasi dalam persiapan dalam penanganan perkara.

SASARAN 4 Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut

Indikator : Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
4	Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Nilai Kabupaten/ Kota Peduli HAM (KKP HAM)	Nilai 75	-	-	Bagian Hukum Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Untuk Tahun 2021 tidak dilakukan penilaian kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM oleh Kementerian Hukum dan HAM R.I berdasarkan surat Kementerian Hukum dan HAM R.I Nomor HAM-HA.02.02-17 tanggal 28 Juli 2021 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Penilaian KKP HAM Tahun 2021



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta 12940
Telepon : (021) 2521344, 2526808. Faksimile : (021) 2522915, 2526808
Laman: www.ham.go.id Surel: informasi@ham.go.id

Nomor : HAM-HA.02.02-17 28 Juli 2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pembertitahuan Pelaksanaan
Penilaian KKP HAM tahun 2021

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI
di
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2021, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Permenkumham No. 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM masih memerlukan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta pedoman pelaksanaan verifikasi data dukung dalam format yang baru, mengingat adanya perubahan signifikan dalam indikator penilaian;
2. Dampak dari epidemi Covid-19 sangat besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan kegiatan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM. Banyak daerah kabupaten/kota yang mengalami kesulitan untuk menyiapkan dan menyampaikan data dukung indikator penilaian KKP HAM, sesuai dengan ketentuan penilaian yang baru, secara optimal;
3. Hampir sepanjang tahun 2020/2021 sebagian besar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lebih fokus pada upaya penanganan kesehatan masyarakat dan dampak epidemi Covid-19 terhadap perlindungan sosial, sehingga pelayanan di bidang lainnya yang termasuk dalam indikator penilaian menjadi agak terbatas.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka kami memutuskan bahwa untuk sementara program/kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) tahun 2021 **ditiadakan**, dan baru akan dilaksanakan kembali pada tahun 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat meneruskan pemberitahuan tentang **peniadaan sementara pelaksanaan kegiatan Penilaian KKP HAM Tahun 2021** ini kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia,
Muallimin Abdi
NIP 196211211982031001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Para Gubernur;
4. Para Bupati/Walikota.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSEI), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan: <https://bssn.bssn.go.id/verifikasi>

❖ Analisa Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai sasaran strategis / kinerja utama dalam meningkatkan pelayanan terhadap stakeholder dalam hal produk hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tingkat penanganan masalah hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, peningkatan kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut dan produk hukum daerah yang terdokumentasi dan dipublikasi yang di tunjangan dalam program dan Koordinasi Hukum dengan jumlah Pagu sebesar 1.525.510.792,00 dengan reasiasi sebesar 1.079.542.489, 00 atau sebesar 71 yang dilaksanakan oleh 12 (dua belas) orang SDM yang terdiri dari 5 (lima) orang PNS yaitu Kepala Bagian Hukum, Kasubbag Pembentukan Produk Hukum Pengaturan, Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM, Kasubbag Pembentukan Produk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Staf Penyusun Bahan Bantuan Hukum serta 7 (tujuh) orang Pegawai Tidak Tetap.

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	KET
1	Persentase informasi produk hukum	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	300.678.460	-	-	-	
			Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	300.678.460	75	4	1 Kasubbag 3 Staf PTT	
2	Persentase produk hukum yang harmonis		Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	516.619.194	-	-	-	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	516.619.194	73	3	1 Kasubbag 2 Staf PTT	
3	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani	Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	262.244.835	-	-	-	
4	Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)	Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	262.244.835	64	4	1 Kasubbag 1 Staf PNS 2 Staf PTT	

❖ **Analisa Capaian Kinerja Kepala Sub Pembentukan Produk Hukum Pengaturan**

Untuk capaian Indikator sasaran pada Kasubbag Pembentukan Produk Hukum Pengaturan dilaksanakan melalui Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah dengan anggaran sebesar Rp 711.572.352,- dan terealisasi sebesar Rp 516.619.194,- atau 73% dengan dukungan SDM sebanyak 3 (tiga) orang.

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Kepala Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum Pengaturan

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	KET
1	Jumlah produk hukum pengaturan yang dikoreksi atau yang diharmonisasi	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	711.572.352	516.619.194	73	3	1 Kasubbag 2 Staf PTT
2	Jumlah produk hukum daerah yang telah difasilitasi dan diharmonisasi sesuai ketentuan perundang-undangan		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	711.572.352	516.619.194	73	3	1 Kasubbag 2 Staf PTT

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum Pengaturan dapat dilihat pada analisa sebagai berikut :

Tabel Capaian Sasaran dan Indikator
Kepala Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum Pengaturan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Mengoreksi, sinkronisasi dan Fasilitasi Penyusunan produk hukum pengaturan	Jumlah produk hukum pengaturan yang dikoreksi atau yang diharmonisasi	200	125	62,5	Kasubbag Pembentukan Produk Hukum Daerah
2	Melakukan fasilitasi dan harmonisasi Peraturan Daerah sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik	Jumlah produk hukum daerah yang telah difasilitasi dan diharmonisasi sesuai ketentuan perundang-undangan	19	9	47,37	Kasubbag Pembentukan Produk Hukum Daerah

SASARAN 1 Mengoreksi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan

Indikator : Jumlah produk hukum pengaturan yang dikoreksi atau yang diharmonisasi

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Mengoreksi, sinkronisasi dan Fasilitasi Penyusunan produk hukum pengaturan	Jumlah produk hukum pengaturan yang dikoreksi atau yang diharmonisasi	200	135	67,5	Kasubbag Pembentukan Produk Hukum Daerah

Dalam hal ini bagian hukum menerima dan melakukan koreksi terhadap draft rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, yang diusulkan oleh SKPD terkait ke bagian hukum. Selanjutnya juga dilakukan autentifikasi terhadap draf rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati

Melakukan rapat-rapat serta fasilitasi dan evaluasi terhadap draf rancangan peraturan daerah dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta jika diperlukan konsultasi dan koordinasi dengan kementerian terkait. Hal tersebut juga bisa dilakukan terhadap rancangan peraturan bupati jika diperlukan.

Target yang sebelumnya adalah 200 Dokumen dan realisasinya sebanyak 135 yang terdiri dari 9 Peraturan Daerah dan 126 Peraturan Bupati pada tahun 2021. Sehingga capaian yang diperoleh hanya sebesar 67,5% dari target dikarenakan jumlah peraturan bupati yang diusulkan oleh SKPD lebih sedikit dari tahun sebelumnya serta dari 19 Rancangan Peraturan Daerah yang dimasukan dalam propemperda tahun 2020 hanya ada 9 Peraturan Daerah yang bisa selesai.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Prosedur penetapan pembuatan produk hukum yang panjang sehingga perjalanan dari mulai draf s/d penetapan terkesan lama terutama rancangan peraturan daerah yang terkadang terkendala dalam proses di DPRD
- Adakalanya juga SKPD pengusul lambat dalam melakukan pengembalian draf setelah dikoreksi untuk dicetak sehingga terkesan prosesnya menjadi lama.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Petugas perlu menghubungi SKPD pengusul untuk mengingatkan agar draf yang telah diperbaiki agar segera diserahkan kembali ke Bagian Hukum

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Petugas perlu menambahkan kolom baru yaitu kolom “tanggal berkas kembali/diterima” setelah perbaikan oleh SKPD pada buku tanda terima, sehingga bisa dilihat SKPD mana yang telah mengembalikan dan yang belum mengembalikan berkas.

SASARAN 2 Melakukan Fasilitasi dan Harmonisasi Peraturan Daerah Sesuai dengan Kaidah Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik

Indikator : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Telah Difasilitasi dan Diharmonisasi Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Melakukan fasilitasi dan harmonisasi Peraturan Daerah sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik	Jumlah produk hukum daerah yang telah difasilitasi dan diharmonisasi sesuai ketentuan perundang-undangan	19	9	47,36	Kasubbag Pembentukan Produk Hukum Daerah

Kegiatan yang dilakukan agar Peraturan Daerah yang dibuat harus sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik artiny selain legal drafting muatan didalam Peraturan Daerah juga sangat perlu diperhatikan agar peraturan daerah yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Untuk itu dilakukanlah rapat-rapat dengan SKPD teknis terkait serta fasilitasi dan evaluasi terhadap draf rancangan peraturan daerah dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta jika diperlukan akan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan kementerian terkait apabila terdapat hal-hal yang dianggap dapat menimbulkan permasalahan atau perlu diperjelas langsung oleh kementerian terkait karena adanya perbedaan dalam penafsiran suatu peraturan perundang-undangan.

Dan untuk Tahun 2021 Harmonisasi terhadap Peraturan Daerah wajib dilakukan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan sehingga dengan semua itu Peraturan Daerah yang dibentuk telah harmonis karena disusun berdasarkan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik.

Target Jumlah produk hukum daerah yang telah difasilitasi dan diharmonisasi sesuai ketentuan perundang- undangan sebelumnya hanya sebanyak 19 Peraturan Daerah sesuai dengan Propemperda Tahun 2020 namun hanya dapat direalisasinya sebanyak 9 Peraturan Daerah. Sehingga capaiannya adalah 47,36%.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Padatnya kegiatan anggota DPRD.
- belum siapnya SKPD pengusul terhadap *draft* dan kajian rancangan peraturan daerah (naskah akademik)

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Perlunya penganggaran pembuatan (naskah akademik) untuk kajian Rancangan Peraturan Daerah
- Perlunya penganggaran perjalanan dinas luar daerah untuk melakukan rapat-rapat koordinasi tingkat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Penganggaran pembuatan (naskah akademik) untuk kajian Rancangan Peraturan Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah

❖ Analisa Capaian Kinerja Kepala Sub Bantuan Hukum dan HAM

Untuk capaian Indikator sasaran pada Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM dilaksanakan melalui Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dengan anggaran sebesar Rp 412.043.902,- dan terealisasi sebesar Rp 262.244.835,- atau 64% dengan dukungan SDM sebanyak 3 (tiga) orang.

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia
Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	LISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	Ket
1	Jumlah kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama, naskah perjanjian hibah daerah atau naskah keperdataan lainnya yang ditelaah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Jumlah masalah hukum yang difasilitasi	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	412.043.902	262.244.835	64	4	1 Kasubbag 1 Staf PNS 2 Staf PTT
			Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	412.043.902	262.244.835	64	4	



NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	LISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	Ket
2	Jumlah kegiatan Rencana Aksi Nasional Asasi Manusia (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KPP HAM) Jumlah kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama, naskah perjanjian hibah daerah atau naskah keperdataan lainnya yang ditelaah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku							

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM dapat dilihat pada analisa sebagai berikut :

Tabel Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
3	Fasilitasi kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama, naskah perjanjian hibah daerah atau naskah keputusan lainnya	Jumlah kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama, naskah perjanjian hibah daerah atau naskah keputusan lainnya yang ditelaah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	400	421	105,25	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM
4	Fasilitasi penanganan masalah hukum dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Jumlah masalah hukum yang di fasilitasi	4	5	125	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM
5	Fasilitasi Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM)	Jumlah kegiatan Rencana Aksi Nasional Asasi Manusia (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM)	4	3	75	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM

SASARAN 3 Fasilitasi Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama, Naskah Perjanjian Hibah Daerah Atau Naskah Keputusan Lainnya

Indikator : Jumlah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama, Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau Naskah Keputusan Lainnya yang Ditelaah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
3	Fasilitasi kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama, naskah perjanjian hibah daerah atau naskah keputusan lainnya	Jumlah kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama, naskah perjanjian hibah daerah atau naskah keputusan lainnya yang ditelaah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	400	421	105,25	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM

Dalam hal ini bagian hukum menerima koreksi terhadap draf naskah kesepakatan bersama, draf perjanjian kerjasama atau draf naskah keperdataan lainnya yang diusulkan oleh setiap SKPD melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Tanah Laut serta melakukan register atau penomoran terhadap naskas keperdataan tersebut. Setiap tahun berjalan jumlah hibah daerah kepada masyarakat atau pihak ketiga yang ditindak lanjuti dengan NPHD sebelumnya atas dasar Surat Keputusan Bupati. Sedangkan perjanjian kerjasama pada setiap tahunnya dibuat karena kebutuhan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu pada masing-masing SKPD atau ada perjanjian yang bersifat insidental untuk ditindak lanjuti dan diselesaikan.

Untuk registrasi realisasi naskah kesepakatan bersama, perjanjian kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama atau naskah keperdataan lainnya ditargetkan 400 dokumen namun dalam realisasinya tercapai melebihi target yaitu sebanyak 421 Dokumen dengan Capaian sebesar 105,25 %.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- banyaknya SKPD yang tidak memberikan *fotocopy* naskah yang telah ditandatangani oleh para pihak ke bagian hukum untuk di arsipkan.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Mengcopy *draf* yang belum bertanda-tangan sebagai arsip sementara

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Mengcopy *draf* yang belum bertanda-tangan sebagai arsip sementara, dan menghubungi SKPD agar menyerahkan *fotocopy* naskah yang telah ditandatangani oleh para pihak ke bagian hukum.

SASARAN 4 Fasilitasi Penanganan Masalah Hukum Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Indikator : Jumlah masalah hukum yang di fasilitasi

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
4	Fasilitasi penanganan masalah hukum di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Jumlah masalah hukum yang di fasilitasi	4	5	125	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran indikator tersebut adalah melakukan Pelayanan bantuan hukum, bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan SKPD di Tahun 2021 dengan jumlah permasalahan hukum sebanyak 5 (lima) kasus. yaitu 1 (satu) Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pelaihari dengan nomor: 19/PDT.G/2020/PN.Pli dan 1 (Satu) Perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan nomor: 22/G/TF/2020/PTUN.BJM.yang saat ini sedang proses Kasasi di Mahkamah Agung dan pendampingan terhadap 3 Kasus dugaan Tindak Pidana.

Adapun kendala dalam pemberian fasilitasi bantuan hukum tersebut diatas adalah kurang tanggapnya SKPD atau Pemberi Kuasa dalam memenuhi berkas atau dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan membuat jawaban dan bukti-bukti didalam persidangan, padahal berkas atau dokumen tersebut ada pada Pemberi Kuasa.

Dalam fasilitasi penanganan kasus tidak serta merta dapat diprediksi kapan kasus tersebut dapat dianggap selesai, karena bisa saja salah satu pihak melakukan upaya hukum sehingga waktu atau proses akan tetap berlanjut sampai dengan ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa telah dilakukan fasilitasi bantuan hukum terhadap semua kasus yang masuk, sehingga reasiasi tercapai 125% karena melebihi target yang hanya 4 kasus.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- kurang tanggapnya SKPD atau Pemberi Kuasa dalam memenuhi berkas atau dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan membuat jawaban dan bukti-bukti didalam persidangan, atau

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- koordinasi dan komunikasi dengan pemberi kuasa

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Tetap terus melakukan koordinasi dan komunikasi dalam persiapan dalam penanganan perkara.

SASARAN 5 Fasilitas Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (KPP HAM)

Indikator : Jumlah kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KPP HAM)

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
5	Fasilitas Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (KPP HAM)	Jumlah kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KPP HAM)	4	3	100%	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM

Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan data beserta data dukungnya untuk kegiatan RANHAM dan KPP HAM sejak awal tahun sampai dengan akhir tahun 2021 sebagai berikut. Untuk Kegiatan RANHAM dilakukan sebanyak 3 Kegiatan dengan mengumpulkan data untuk tahun berjalan yang dilaporkan pertriwulan menggunakan form B-04, B-08, dan B-12 dan 1 Kegiatan lainnya adalah untuk Penilaian Kab/Kota Peduli HAM namun kegiatan tersebut untuk Tahun 2021 ditiadakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga hanya 3 kegiatan yang terlaksana sehingga capaian tetap dianggap terpenuhi 100%.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- lambatnya data SKPD yang masuk
- data dukung yang tidak dilampirkan oleh SKPD terkait sehingga harus berulang kali diminta lagi untuk kelengkapan data dukung

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- perlu mempertegas dan memasukan nama SKPD kedalam TIM yang di SK kan
- memberikan sanksi administratif yaitu Pemotongan TPP sebesar 2% kepada SKPD yang bersangkutan apabila tidak menyampaikan data atau terlambat dalam menyampaikan data tersebut sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- memasukan nama SKPD kedalam TIM yang di SK kan
- memberikan sanksi administratif yaitu Pemotongan TPP sebesar 2% kepada SKPD yang bersangkutan

❖ Analisa Capaian Kinerja Kepala Sub Pembentukan Produk Hukum Penetapan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Untuk capaian Indikator sasaran pada Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM dilaksanakan melalui Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum pada Sub Kegiatan Pembentukan Produk Hukum Penetapan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan anggaran sebesar Rp 401.894.538,- dan terealisasi sebesar Rp 300.678.460,- atau 64% dengan dukungan SDM sebanyak 3 (tiga) orang.

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Kepala Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum Penetapan Dokumentasi dan Informasi Hukum

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	Ket
1	Jumlah produk hukum penetapan yang dikoreksi atau yang diharmonisasi	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	401.894.538				
			Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		300.678.460	75	4	1 Kasubbag 3 Staf PTT
2	Jumlah Registrasi dan dokumentasi produk hukum daerah			401.894.538				
3	Jumlah Cetak Produk Hukum Daerah							
4	Jumlah Peserta yang mendapatkan Sosialisasi / Penyuluhan Hukum							
5	Jumlah kegiatan pengelolaan website jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Kabupaten Tanah Laut							

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum dapat dilihat pada analisa sebagai berikut :

Tabel Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mengoreksi, sinkronisasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum penetapan	Jumlah produk hukum penetapan yang dikoreksi atau yang diharmonisasi	900	1405	176%	Kasubbag Pembentukan Produk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum
2	Dokumentasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Registrasi dan dokumentasi produk hukum daerah	1000 Register/ Dokumentasi	100%	100%	
		Jumlah Cetak Produk Hukum Daerah	500 Eksemplar	500	100%	
3	Pengelolaan informasi Hukum dan Publikasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Peserta yang mendapatkan Sosialisasi / Penyuluhan Hukum	250 Orang	200	80%	
		Jumlah kegiatan pengelolaan website jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Kabupaten Tanah Laut	365 Hari	1	100%	

SASARAN 6 Mengoreksi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan

Indikator : Jumlah produk hukum penetapan yang dikoreksi atau yang di harmonisasi

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Mengoreksi, sinkronisasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum penetapan	Jumlah produk hukum penetapan yang dikoreksi atau yang di harmonisasi	900	1405	176%	Kasubbag Pembentukan Produk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan koreksi terhadap draft rancangan Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati yang diusulkan oleh SKPD terkait ke bagian hukum. Selanjutnya juga dilakukan autentifikasi terhadap draf Keputusan Bupati.

Target yang sebelumnya adalah 800 Dokumen dan realisasinya sebanyak 1405 yang terdiri dari 1386 Keputusan Bupati dan 19 Instruksi Bupati pada tahun 2021. Sehingga capaiannya adalah sebesar 176%. Peningkatan terjadi dikarenakan banyaknya usulan keputusan bupati ditahun berjalan.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Banyaknya draf produk hukum daerah yang masuk terutama draf keputusan bupati dan belum adanya simplikasi baik produk hukum pengaturan maupun penetapan
- Prosedur penetapan pembuatan produk hukum yang panjang sehingga perjalanan dari mulai draf s/d penetapan terkesan lama
- Adakalanya juga SKPD pengusul lambat dalam melakukan pengembalian draf setelah dikoreksi untuk dicetak sehingga terkesan prosesnya menjadi lama.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Petugas perlu menghubungi SKPD pengusul untuk mengingatkan agar draf yang telah diperbaiki agar segera diserahkan kembali ke Bagian Hukum

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Petugas perlu menambahkan kolom baru yaitu kolom “tanggal berkas kembali/diterima” setelah perbaikan oleh SKPD pada buku tanda terima, sehingga bisa dilihat SKPD mana yang telah mengembalikan dan yang belum mengembalikan berkas.

SASARAN 7 Dokumentasi dan Produk Hukum Daerah

Indikator 1 : Jumlah Registrasi dan Dokumentasi Produk Hukum Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Dokumentasi dan Produk Hukum Daerah	Jumlah Registrasi dan dokumentasi produk hukum daerah	1000 Register/ Dokumentasi	100%	100%	Kasubbag Pembentukan Produk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kegiatan yang dilakukan berupa register terhadap produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati dengan memberikan penomoran dan pengarsipan setiap produk hukum daerah yang telah dikeluarkan. Selain melakukan pendokumentasian terhadap produk hukum daerah, sub

bagian dokumentasi dan informasi hukum juga memberikan pelayanan kepada SKPD atau masyarakat yang datang untuk memintah informasi mengenai produk hukum daerah atau informasi hukum lainnya secara langsung. Semua produk hukum daerah yang di registrasi dan terdokumentasi sebanyak 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan, sehingga capaian dapat terpenuhi 100%.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Prosedur penetapan pembuatan produk hukum yang panjang sehingga perjalanan dari mulai draf s/d penetapan terkesan lama
- Adakalanya juga SKPD pengusul lambat dalam melakukan pengembalian draf setelah dikoreksi untuk dicetak sehingga terkesan prosesnya menjadi lama.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Petugas perlu menghubungi SKPD pengusul untuk mengingatkan agar draf yang telah diperbaiki agar segera diserahkan kembali ke Bagian Hukum

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

Petugas perlu menambahkan kolom baru yaitu kolom “tanggal berkas kembali/diterima” setelah perbaikan oleh SKPD pada buku tanda terima, sehingga bisa dilihat SKPD mana yang telah mengembalikan dan yang

SASARAN 7 Dokumentasi dan Produk Hukum Daerah

Indikator 2 : Jumlah Cetak Produk Hukum Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Dokumentasi dan Produk Hukum Daerah	Jumlah Cetak Produk Hukum Daerah	500 Eksemplar	500	100%	Kasubbag Pembentukan Produk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kegiatan yang dilakukan adalah mencetak produk hukum daerah sebanyak 500 eksemplar Lembaran Daerah pada Tahun 2021. Setelah dilakukan cetak Produk hukum daerah tersebut dipublikasikan dengan cara membagikan produk hukum daerah yang telah dicetak tersebut kepada SKPD sampai dengan Kecamatan. Maka capaiannya adalah 100%.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Terbatasnya anggaran cetak produk hukum

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- perlu penambahan anggaran pada cetak produk hukum agar dapat mencetak lebih banyak produk hukum

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Penganggaran pembuatan cetak produk hukum

SASARAN 8 Pengelolaan Informasi Hukum dan Publikasi Produk Hukum Daerah

Indikator 1 : Jumlah Peserta yang Mendapatkan Sosialisasi/Penyuluhan Hukum

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Pengelolaan informasi Hukum dan Publikasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Peserta yang mendapatkan Sosialisasi / Penyuluhan Hukum	250 Orang	200 Orang	80%	Kasubbag Pembentukan Produk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kegiatan yang dilakukan berupa sosialisasi/penyuluhan hukum direncanakan akan dilakukan di 5 lima Kecamatan yang ada di Kab Tanah Laut dengan peserta masing-masing 50 orang. namun hanya dapat terealisasi di 4 (empat) kecamatan saja. Sosialisasi/Penyuluhan Hukum telah dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Dengan menghadirkan beberapa narasumber dari Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut, Satpol PP dan juga Bagian Hukum Kabupaten Tanah Laut.

Target 250 Orang untuk 5 kegiatan hanya terealisasi sebanyak 4 Kegiatan atau 200 orang peserta sehingga nilai capaian adalah sebesar 80%.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- adanya beberapa kali pembatasan kegiatan pengumpulan masa / kerumunan pada masa PPKM.
- Padatnya kegiatan diakhir tahun sehingga tidak dapat dikerjakan seluruhnya

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Penambahan anggaran kegiatan sosialisasi ditahun berikutnya
- Pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir dengan tetap mematuhi protokol kesehatan

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Penganggaran kegiatan sosialisasi dengan dana yang lebih banyak ditahun depan
- Pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

SASARAN 8 Kasubbag Pembentukan Produk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum

Indikator 2 : Jumlah Peserta yang Mendapatkan Sosialisasi/ Penyuluhan Hukum

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Pengelolaan informasi Hukum dan Publikasi Produk Hukum Daerah	Jumlah kegiatan pengelolaan website jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Kabupaten Tanah Laut	365 Hari	365 Hari	100%	Kasubbag Pembentukan Produk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum

Telah dilakukan pengelollan *website* jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Kabupaten Tanah Laut dengan melakukan digitalisasi terhadap produk hukum daerah ditahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya guna melengkapi data produk hukum daerah yang telah ada. Selain itu juga dimuat berbagai artikel-artikel hukum terbaru yang perlu diketahui oleh masyarakat. Dengan terlaksananya pengeloaalan *website* JDIH dalam 365 Hari atau satu tahun berjalan dengan realisasi yang sama yaitu 365 Hari maka capaiannya adalah 100%.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Proses penginputan atau pengunggahan data produk hukum daerah belum terjadwal dengan baik dikarenakan padatnya kegiatan pada sub bagian dokumentasi dan informasi hukum karena pada Tahun 2021 juga melakukan pencetakan terhadap produk hukum penetapan.
- File atau dokumen Peraturan Daerah Tahun 2005 kebawah yang masih belum ditemukan arsipnya karena proses pengarsipan waktu itu masih belum sebgus saat ini. kebawah dan Peraturan Bupati Tahun 2013 kebawah tidak tersedia karena terkendala tidak adanya file atau dokumen karena ditahun-tahun tersebut Perbup langsung dicetak oleh SKPD masing-masing.
- Masih terbatasnya anggaran untuk melakukan pencetak produk hukum

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Perlu membuat jadwal rutin untuk melakukan proses digitalisasi dan penginputan data ke website JDIH Tanah Laut
- Perlu melakukan pengumpulan dan pencarian terhadap dokumen-dokumen yang belum lengkap baik diruang arsip atau ke SKPD-SKPD terkait secara bertahap

- perlu penambahan anggaran pada cetak produk hukum agar dapat mencetak lebih banyak produk hukum

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- membuat jadwal rutin untuk melakukan proses digitalisasi dan penginputan data ke website JDIH Tanah Laut
- melakukan pengumpulan dan pencarian terhadap dokumen-dokumen yang belum lengkap baik di ruang arsip atau pada SKPD-SKPD terkait secara bertahap.

Analisa Capaian Sasaran Strategis

Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolannya dan dokumentasi.	Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Mengampu Misi ke- 3 “Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)”
		Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani	100%	100%	100%	
		Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu Daerah yang terlayani keprotokolannya	100%	100%	100%	
		Persentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditandaklanjuti	100%	0%	0%	
ESELON IV						
1	Memberikan pelayanan dokumentasi kepada KDH/WKDH	Jumlah pelayanan Pendokumentasian KDH/WKDH	200 Kali	200 Kali	100%	Kasubbag Dokumentasi Pimpinan
2	Kegiatan KDH/WKDH terdokumentasikan	Jumlah pendokumentasian kegiatan KDH/WKDH	300 Kali	300 Kali	100%	Kasubbag Dokumentasi Pimpinan
3	Pembangunan pemerintahan daerah yang terpublikasikan dan diberitakan	Jumlah Publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah melalui media elektronik dan media sosial	1000 Berita	1000 Berita	100%	Kasubbag Komunikasi Pimpinan
4	Kegiatan KDH/WKDH terlayani peliputan, pemberitaannya	Jumlah liputan pemberitaan kegiatan KDH/WKDH	280 Kali	280 Kali	100%	Kasubbag Komunikasi Pimpinan
5	Fasilitasi komunikasi pimpinan	Jumlah komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	280 Kali	280 Kali	100%	Kasubbag Komunikasi Pimpinan
6	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah dokumen pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	1 Kali	1 Kali	100%	Kasubbag Komunikasi Pimpinan
7	Kegiatan keprotokolannya KDH/WKDH yang terlayani	Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang terlayani keprotokolannya	430 Kali	430 Kali	100%	Kasubbag Protokol

8	Pelayanan tamu KDH/WKDH yang terlayani	Jumlah tamu KDH/WKDH yang terlayani dengan baik	28 Kali	28 Kali	100%	Kasubbag Protokol
---	----------------------------------------	-------------------------------------------------	---------	---------	------	-------------------

❖ Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Rata-rata capaian kinerja bagian protokol dan komunikasi pimpinan adalah 100%, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Persentase penyebaran informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media terealisasi sebesar 100% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.
- 2) Persentase kegiatan Dokumentasi KDH/WKDH/SKPD yang terlayani terealisasi sebesar 100% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.
- 3) Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu daerah yang terlayani keprokolannya terealisasi sebesar 100% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.
- 4) Persentase Komunikasi Pimpinan yang terfasilitasi, kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan terealisasi sebesar 100% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.
- 5) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti adalah 0% dari target 100%, Karena tidak terdapat aduan dari Masyarakat.

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terhadap capaian tahun sebelumnya :

Tabel Capaian Sasaran Indikator Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terhadap capaian Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2021		
			2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase penyebaran informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani	%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu	%	100%	100%	100%	100%	100%

	Daerah yang terlayani keprotokolannya						
4	Persentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100%	0%	100%	0	0

❖ **Perbandingan realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

- 1) Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah pada Tahun 2021 dan Tahun 2020 tidak mengalami perubahan yaitu 100%
- 2) Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH/SKPD yang terlayani pada Tahun 2021 dan Tahun 2020 tidak mengalami perubahan yaitu 100%
- 3) Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/tamu daerah yang terlayani keprotokolannya pada Tahun 2021 dan Tahun 2020 tidak mengalami perubahan yaitu 100%
- 4) Persentase Komunikasi Pimpinan yang terfasilitasi, kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan terealisasi sebesar 100% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.
- 5) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada Tahun 2021 dan Tahun 2020 tidak mengalami perubahan yaitu 0%

❖ **Analisa program penunjang**

SASARAN 1 Meningkatnya Layanan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dan Komunikasi Pimpinan, Keprotokolan dan Dokumentasi.

Indikator 1 : Persentase Penyebarluasan Informasi/Pemberitaan Pembangunan Pemerintahan Daerah yang Bisa Diakses Masyarakat Melalui Media

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolan dan dokumentasi.	Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

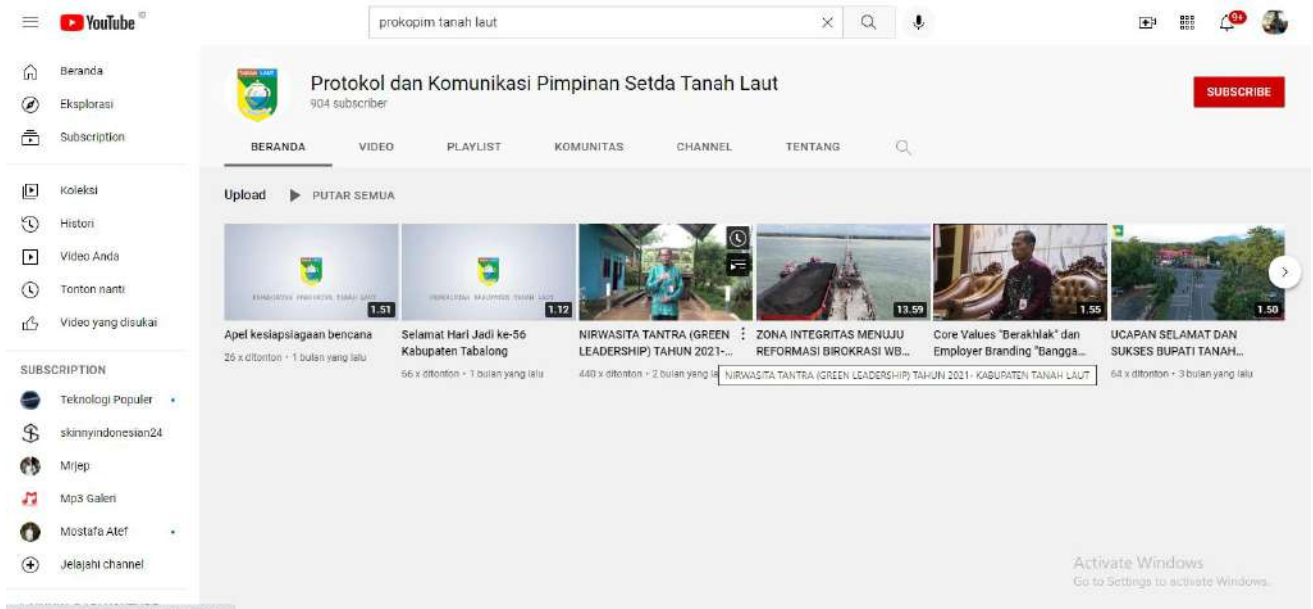


Foto : Media Publikasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Indikator 2 : Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolan dan dokumentasi.	Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Indikator ini dilaksanakan dengan menilai presentase dari jumlah kegiatan pemerintah secara keseluruhan dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang terdokumentasikan dengan target sebesar 100%. Indikator ini dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan dengan pagu Rp 611.496.936.00 terealisasi sebesar Rp 574.001.422.00 atau sebesar 93,87 %.

Kendala yang dihadapi adalah :

- Kualitas sarana penyimpanan Dokumentasi kegiatan KDH / WKDH yang masih kurang memadai.

Solusi yang dilakukan adalah :

- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pendokumentasian Pimpinan dan Kualitas sarana penyimpanan dokumentasi kegiatan KDH / WKDH pada Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan agar lebih memadai.

Rencana Aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Meningkatkan kualitas pendokumentasian dan sarana penyimpanan dokumentasi kegiatan pimpinan.
- Meningkatkan kerja sama dengan seluruh instansi dalam pelaksanaan kegiatan KDH/WKDH agar tidak terjadi tumpang tindih jadwal kegiatan sehingga seluruh kegiatan dapat terfasilitasi dan terdokumentasikan.



Foto : Beberapa dokumentasi kegiatan KDH/WKDH

Indikator 3 : Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu daerah yang terlayani keprokolannya

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolannya dan dokumentasi.	Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu Daerah yang terlayani keprotokolannya	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Indikator ini dilaksanakan dengan menilai presentase dari jumlah tamu daerah secara keseluruhan dibandingkan dengan jumlah tamu daerah yang terlayani keprotokolannya dengan target sebesar 100%. Indikator ini dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolannya dengan pagu Rp 450.951.254.00 terealisasi sebesar Rp 399.056.238.00 atau sebesar 88,49 %.

Kendala yang dihadapi adalah :

- Kurangnya koordinasi antara pelaksana kegiatan dengan Sub Bagian Fasilitasi Keprotokolan.

Solusi yang dilakukan adalah :

- Menginformasikan kepada pelaksana kegiatan agar terlebih dulu melakukan koordinasi dengan Sub Bagian fasilitasi Keprotokolan.

Rencana Aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Meningkatkan kualitas pelayanan keprotokolan kegiatan pimpinan.
- Meningkatkan kerja sama dengan seluruh instansi dalam pelaksanaan kegiatan KDH/WKDH agar tidak terjadi tumpang tindih jadwal kegiatan sehingga seluruh kegiatan dapat terlayani keprotokolannya dengan baik.



Foto :. Beberapa kegiatan KDH/WKDH yang terfasilitasi Keprotokolannya.

Indikator 4 : Presentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolan dan dokumentasi.	Persentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Indikator ini dilaksanakan dengan menilai presentase dari jumlah kegiatan pemerintah secara keseluruhan dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang terpublikasikan baik melalui media cetak, maupun media sosial dengan target sebesar 100%. Indikator ini dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dengan pagu Rp 963.305.306.00 terealisasi Rp 880.428.254.00 dengan realisasi keuangan sebesar 91,40 %.

Kendala yang dihadapi adalah :

- Penyebarluasan informasi / pemberitaan melalui Web dan Tabloid Tuntung Pandang yang dikelola oleh Sub Bagian Fasilitasi Komunikasi Pimpinan belum sesuai dengan standar pemberitaan yang baik dan benar.

Solusi yang dilakukan adalah :

- Meningkatkan Penulisan Informasi / Pemberitaan yang dikelola Sub Bagian Fasilitasi Komunikasi Pimpinan agar sesuai dengan standar yang baik dan benar.

Rencana Aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Meningkatkan kualitas pemberitaan dan publikasi kegiatan pemerintah daerah melalui media sosial yang di kelola pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

- Meningkatkan kerja sama dengan seluruh instansi dalam pelaksanaan kegiatan KDH/WKDH agar tidak terjadi tumpang tindih jadwal kegiatan sehingga seluruh kegiatan dapat terfasilitasi dan terpublikasikan.



Foto : 1. salah satu media publikasi kegiatan pemerintah daerah kabupaten Tanah Laut melalui website setda.tanahlautkab.go.id

2. Beberapa dokumentasi kegiatan KDH/WKDH

Indikator 5 : Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolan dan dokumentasi.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0	0%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Indikator ini dilaksanakan dengan menilai presentase dari jumlah pengaduan yang masuk secara keseluruhan dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk yang di tindaklanjuti dengan target sebesar 100%. Indikator ini dilaksanakan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan seluruh SKPD di lingkup pemerintah kabupaten Tanah Laut melalui aplikasi E-Lapor dengan program kegiatan Lapor KTA.

Kendala yang dihadapi adalah :

- Kurangnya pemahaman masyarakat terkait prosedur penyampaian aduan.

Solusi yang dilakukan adalah :

- Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat agar penyampaian aduan sesuai dengan prosedur.

Rencana Aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka tindak lanjut jika ditemukan laporan yang masuk.



Foto : Tampilan Website E-LAPOR kabupaten TANAH LAUT

❖ Analisa Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

- 1) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelaksanaan layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah, protokol dan komunikasi pimpinan dengan indikator Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media sosial dan website serta ditunjang Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan dengan pagu Rp. 963.305.306.00 terealisasi Rp. 880.428.254.00 dengan realisasi keuangan sebesar 91,40 % dan dilaksanakan oleh 8 (delapan) orang Sumber Daya Manusia yaitu Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Plt Kasubbag Komunikasi Pimpinan, Pranata Komputer Lanjutan Pelaksana Komputer, dan 5 (lima) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).
- 2) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelaksanaan layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah, protokol dan komunikasi pimpinan dengan indikator Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH/SKPD yang terlayani ditunjang dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan dengan pagu Rp 611.496.936.00 terealisasi sebesar Rp 574.001.422.00 atau sebesar 93,87 %
- 3) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelaksanaan layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah, protokol dan komunikasi pimpinan dengan indikator presentasi kegiatan KDH/WKDH/SKPD/Tamu Daerah yang terlayani keprotokolannya ditunjang dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan dengan pagu Rp 450.951.254.00 terealisasi sebesar Rp 399.056.238.00 atau sebesar 88,49 %, dan dilaksanakan oleh 11 (sebelas) orang Sumber Daya Manusia yaitu Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kasubbag Protokol, 5 (lima) orang Petugas Protokol, dan 4 (empat) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).
- 4) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelaksanaan layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah, protokol dan komunikasi pimpinan dengan indikator Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti melalui aplikasi yang terintegrasi dengan seluruh SKPD di lingkup pemerintah kabupaten Tanah Laut melalui

aplikasi E-Lapor dengan program kegiatan Lapor KTA dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang SDM yaitu Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kasubbag Komunikasi Pimpinan dan operator.

- 5) Pencapaian Realisasi Anggaran Tahun 2021 pada Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan dengan Jumlah pagu Rp 2.025.753.496,- terealisasi Rp 1.853.485.914,- atau sebesar 91.50% dikarenakan :
- Adanya pandemi covid-19 sehingga anggaran makan minum tamu perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten tidak terealisasi seluruhnya.
 - Adanya peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 yang mengatur tentang perjalanan dinas , dimana di dalamnya mengatur besaran uang transport lokal perjalanan dinas dalam kota kurang dari 8 (delapan) jam.

**Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang
dan Sumber Daya Manusia**

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	Ket
1	Persentase penyebarluasan informasi/ pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	Program Penunjang Urusan Pemda Kabupaten/Kota	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.025.753.496	1.853.485.914	91,50	29	
			- Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					
2	Persentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi			963.305.306	880.428.254	91,40	8	
3	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti							
4	Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani		- Sub Kegiatan Fasilitasi Pendokumentasian Tugas Pimpinan	611.496.936	574.001.422	93,87	10	
5	Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu Daerah yang terlayani keprotokolannya		- Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolannya	450.951.254	399.056.238	88,49	11	
JUMLAH								

❖ Analisa Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan

Untuk capaian indikator sasaran pada Kasubbag Dokumentasi Pimpinan dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan dengan pagu Rp 611.496.936.00 terealisasi sebesar Rp 574.001.422.00 atau sebesar 93,87 % dan dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) orang Sumber Daya Manusia yaitu Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kasubbag Dokumentasi Pimpinan, 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 6 (enam) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia
Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	Ket
1	Jumlah pelayanan Kehumasan KDH/WKDH	Program Penunjang Urusan Pemda Kabupaten/Kota	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	611.496.936	574.001.422	93,87	10	
2	Jumlah Pendokumentasian kegiatan KDH/WKDH		- Sub Kegiatan Fasilitas Pendokumentasian Tugas Pimpinan	611.496.936	574.001.422	93,87	10	

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan dapat dilihat pada analisa sebagai berikut :

Tabel Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan

NO	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Memberikan pelayanan dokumentasi kepada KDH/WKDH	Jumlah pelayanan pendokumentasian KDH/WKDH	200 Kali	200 Kali	100 %	Kasubbag Dokumentasi Pimpinan
2	Kegiatan KDH/WKDH terdokumentasikan	Jumlah pendokumentasian kegiatan KDH/WKDH	300 Kali	300 Kali	100 %	Kasubbag Dokumentasi Pimpinan

SASARAN 1 Memberikan Pelayanan Dokumentasi Kepada KDH/WKDH

Indikator : Jumlah Pelayanan Dokumentasi KDH/WKDH

NO	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Memberikan pelayanan dokumentasi kepada KDH/WKDH	Jumlah pelayanan pendokumentasian KDH/WKDH	200 Kali	200 Kali	100 %	Kasubbag Dokumentasi Pimpinan

Pada Tahun 2021 pelayanan Dokumentasi KDH/WKDH/SKPD terlaksana sesuai dengan target, semua kegiatan KDH/WKDH/SKPD yang telah terjadwal terdokumentasikan oleh Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan sesuai dengan prosedur.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah:

- Meningkatkan kualitas peralatan untuk keperluan dokumentasi pimpinan agar hasil pendokumentasian lebih berkualitas.
- Menyediakan armada/alat transportasi yang lebih memadai untuk pelaksanaan kegiatan pendokumentasian KDH/WKDH di lapangan.



Foto : Beberapa dokumentasi kegiatan KDH/WKDH

SASARAN 2 Kegiatan KDH/WKDH Terdokumentasikan

Indikator : Jumlah Pendokumentasian Kegiatan KDH/WKDH

NO	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Kegiatan KDH/WKDH terdokumentasikan	Jumlah pendokumentasian kegiatan KDH/WKDH	300 Kali	300 kali	100%	Kasubbag Dokumentasi Pimpinan

Seluruh kegiatan KDH/WKDH/SKPD yang telah terjadwalkan pada Tahun 2021 terdokumentasikan dengan baik dalam bentuk foto dan video dan tersimpan pada media penyimpanan pada Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah:

- Meningkatkan kualitas perangkat penyimpanan agar hasil dokumentasi kegiatan KDH/WKDH dapat tersimpan dengan baik.

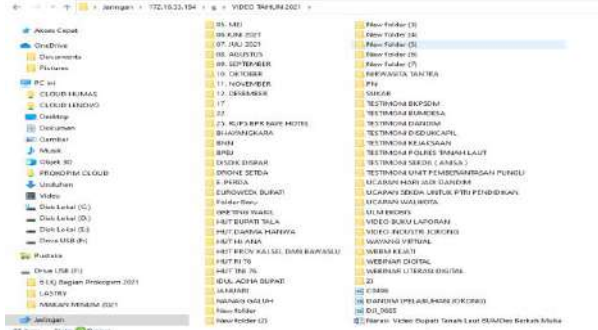
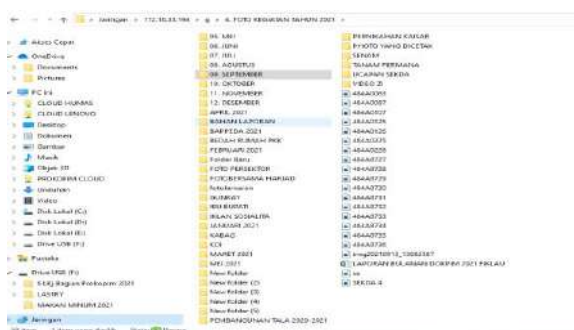


Foto : Tampilan Perangkat penyimpanan hasil Dokumentasi

❖ **Analisa Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan**

- ❖ Untuk capaian indikator sasaran pada Kasubbag Komunikasi Pimpinan dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sub Kegiatan Komunikasi Pimpinan dengan pagu Rp 963.305.306.00 terealisasi sebesar Rp 880.428.254.00 atau sebesar 91,40 % dan dilaksanakan oleh 8 (delapan) orang Sumber Daya Manusia yaitu Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Plt Kasubbag Komunikasi Pimpinan, Pranata Komputer Pelaksana Lanjut, dan 5 (Lima) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia
Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	Ket
1	Jumlah Publikasi dan Pemberitaan Pembangunan Pemerintah Daerah melalui media elektronik dan media sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	963.305.306	880.428.254	91.40%	8	
2	Jumlah liputan pemberitaan kegiatan KDH/WKDH		- Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	963.305.306	880.428.254	91.40%	8	
3	Jumlah komunikasi pimpinan yang terfasilitasi				880.428.254	91.40%	8	
4	Jumlah dokumen pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti				880.428.254	91.40%	8	
JUMLAH								

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan dapat dilihat pada analisa sebagai berikut :

Tabel Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan

NO	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Pembangunan pemerintahan daerah yang terpublikasikan dan diberitakan	Jumlah Publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah melalui media elektronik dan media sosial	1000 Berita	1000 Berita	100%	Kasubbag Komunikasi Pimpinan
2	Kegiatan KDH/WKDH terlayani peliputan, pemberitaanya	Jumlah liputan pemberitaan kegiatan KDH/WKDH	280 Kali	280 Kali	100%	Kasubbag Komunikasi Pimpinan
3	Fasilitasi komunikasi pimpinan	Jumlah komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	280 Kali	280 Kali	100%	Kasubbag Komunikasi Pimpinan
4	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah dokumen pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0	0%	Kasubbag Komunikasi Pimpinan

SASARAN 1 Pembangunan Pemerintahan Daerah yang Terpublikasikan dan Diberitakan

Indikator : Jumlah Publikasi Dan Pemberitaan Pembangunan Pemerintahan Daerah Melalui Media Elektronik dan Media Sosial

NO	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Pembangunan pemerintahan daerah yang terpublikasikan dan diberitakan	Jumlah Publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah melalui media elektronik dan media sosial	1000 Berita	1000 Berita	100%	Kasubbag Komunikasi Pimpinan

Jumlah publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah melalui media cetak, elektronik, *online* dan media sosial dari bulan Januari sampai dengan bulan desember Tahun 2021 terlaksana sesuai target yaitu 680 berita dengan jumlah

kerjasama media cetak sebanyak 5 buah dan media online sebanyak 5 buah. Sedangkan media sosial yang dikelola sub bagian pemberitaan sebanyak 3 buah yaitu *facebook* dengan nama halaman Prokopim Tanah Laut dan instagram dengan nama akun [@Prokopim Tanah Laut](https://www.instagram.com/ProkopimTanahLaut) serta 1 buah *website* dengan alamat setda.tanahlautkab.go.id

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah:

- Meningkatkan pengelolaan konten media publikasi agar lebih informatif dan beragam.
- Meningkatkan sarana publikasi berupa perangkat elektronik agar kegiatan pimpinan dapat terpublikasikan secara *update*.

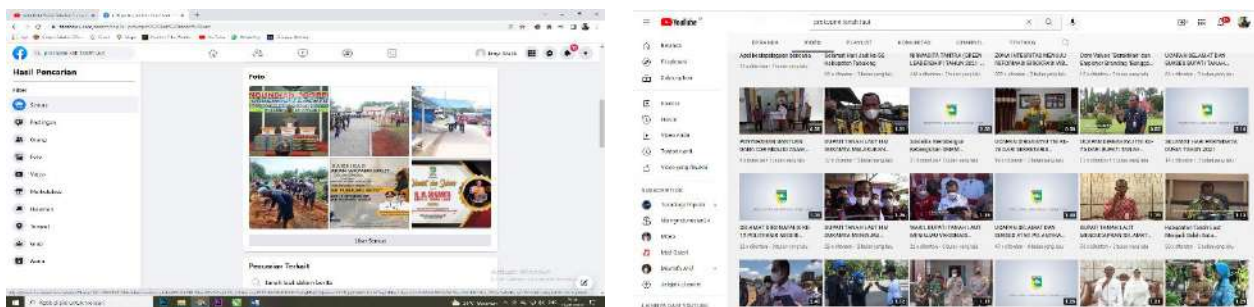


Foto : Tampilan Media Publikasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

SASARAN 2 Kegiatan KDH/WKDH Terlayani Peliputan, Pemberitaannya

Indikator : Jumlah Liputan Pemberitaan Kegiatan KDH/WKDH

NO	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Kegiatan KDH/WKDH terlayani peliputan, pemberitaannya	Jumlah liputan pemberitaan kegiatan KDH/WKDH	280 Kali	280 Kali	100%	Kasubbag Komunikasi Pimpinan

Jumlah liputan pemberitaan kegiatan KDH / WKDH / SKPD pada Tahun 2021 terlaksana sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah tersusun.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah:

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait mengenai jadwal kegiatan KDH/WKDH agar tidak terjadi tumpang tindih sehingga dapat terlaksana peliputan pemberitaannya dan kegiatan KDH/WKDH dapat terpublikasi secara maksimal.
- Meningkatkan kapasitas petugas Pemeritaan dan pengelolaan publikasi agar dapat meningkatkan kualitas informasi dan lebih maksimal dalam penyebarluasan informasi kegiatan KDH/WKDH.



Foto : Beberapa Liputan Pemberitaan kegiatan KDH/WKDH

SASARAN 3 Fasilitas Komunikasi Pimpinan

Indikator : Jumlah Komunikasi Pimpinan yang Terfasilitasi

NO	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
3	Fasilitasi komunikasi pimpinan	Jumlah komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	280 Kali	280 Kali	100%	Kasubbag Komunikasi Pimpinan

Jumlah Komunikasi kegiatan KDH / WKDH / SKPD pada Tahun 2021 terpublikasikan terlaksana sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah tersusun.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah:

- Mengadakan bimbingan teknis fasilitasi pimpinan kepada aparaturnya yang bertugas di Sub Bagian Komunikasi Pimpinan, agar Komunikasi yang disampaikan lebih Akurat dan dapat dimengerti oleh Masyarakat.



Foto : Beberapa Liputan Pemberitaan kegiatan KDH/WKDH

SASARAN 4 Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

Indikator : Jumlah Dokumen Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

NO	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
4	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah dokumen pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100% Kali	0 Kali	0%	Kasubbag Komunikasi Pimpinan

Jumlah aduan Masyarakat di Tahun 2021 terlaksana dengan baik sesuai dengan prosedur pelayanan.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah:

- Menindaklanjuti secara cepat bila terdapat aduan Masyarakat dengan mengkoordinasikan kepada bagian-bagian yang menjadi sasaran aduan dari Masyarakat

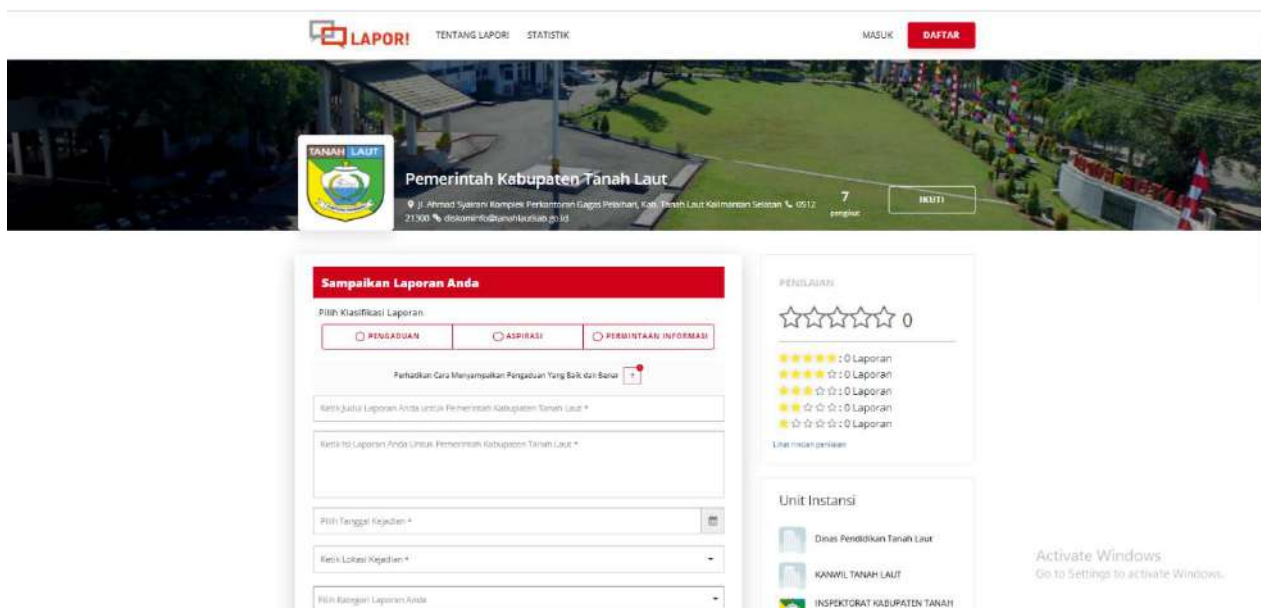


Foto : Tampilan website E-LAPOR Kab. Tanah Laut

❖ Analisa Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Protokol

Untuk capaian indikator sasaran pada Kasubbag Protokol dilaksanakan melalui program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, fasilitasi Protokol dengan pagu Rp 450.951.254,00 terealisasi Rp 399.056.238,00 dengan realisasi keuangan sebesar 88.49%. dan dilaksanakan oleh 11 (dua) orang SDM yaitu Kepala Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan, Kasubbag Protokol, 5 (Lima) Orang Petugas Protokol dan 4 (Empat) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia
Kepala Sub Bagian Protokol

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	Ket
1	Jumlah Kegiatan KDH/WKDH yang terlayani Keprotokolannya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	450.951.254	399.056.238	88.49%	11	
2	Jumlah tamu KDH/WKDH yang terlayani dengan baik		- Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	450.951.254	399.056.238	88.49%	11	

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Protokol dapat dilihat pada analisa sebagai berikut :

Tabel Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Protokol

	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Kegiatan keprotokolan KDH/WKDH yang terlayani	Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang terlayani keprotokolannya	430 Kali	430 Kali	100%	Kasubbag Protokol
2	Pelayanan tamu KDH/WKDH yang terlayani	Jumlah tamu KDH/WKDH yang terlayani dengan baik	28 Kali	28 Kali	100%	Kasubbag Protokol

SASARAN 1 Kegiatan Keprotokolan KDH/WKDH yang Terlayani

Indikator : Jumlah Kegiatan KDH/WKDH yang Terlayani Keprotokolannya

NO	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Pelayanan tamu KDH/WKDH yang terlayani	Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang terlayani keprotokolannya	430 Kali	430 Kali	100%	Kasubbag Protokol

Pada Tahun 2021 pelayanan keprotokolan kegiatan KDH/WKDH/SKPD terlaksana sesuai dengan target dan tercapai 100%.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah:

- Peningkatan Koordinasi dengan Penyelenggara Acara dan ADC/Ajudan Pimpinan dan mengingatkan kembali kepada pelaksana acara agar menyampaikan surat permohonan fasilitasi kegiatan ke Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
- Menyediakan armada/alat transportasi yang lebih memadai untuk pelaksanaan fasilitasi keprotokolan KDH/WKDH di lapangan.



Foto : Beberapa kegiatan KDH/WKDH yang terfasilitasi Keprotokolannya.

SASARAN 2 Pelayanan Tamu KDH/WKDH Yang Terlayani

Indikator : Jumlah tamu KDH/WKDH yang Terlayani dengan Baik

NO	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Pelayanan tamu KDH/WKDH yang terlayani	Jumlah tamu KDH/WKDH yang terlayani dengan baik	28 Kali	28 Kali	100%	Kasubbag Protokol

Pada Tahun 2021 seluruh tamu KDH/WKDH terlayani dengan baik sesuai dengan prosedur pelayanan.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah:

- Mengadakan bimbingan teknis fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan kepada SKPD dan organisasi.



Foto : Beberapa pelayanan Tamu KDH/WKDH yang terfasilitasi Keprotokolannya.

Analisa Capaian Sasaran Strategis

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	SASARAN STRATEGIS /KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Pembinaan Lembaga sosial dan keagamaan	Persentase peningkatan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina	100%	96,43%	96,36%	Bagian Kesejahteraan Rakyat Mengampu Misi ke-3 <i>"Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)"</i>
2	Meningkatnya layanan bantuan sosial keagamaan	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan	100%	98,81%	99,22%	
3	Meningkatnya Peran serta Organisasi/ Lembaga Keagamaan /SKPD dalam Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	100%	100%	100%	
ESELON IV						
1	Melakukan Verifikasi dokumen pemberian hibah	Jumlah dokumen hibah yang diverifikasi	89 dokumen	55 dokumen	61,80%	Kasubbag Bina Mental dan Spiritual
2	Melakukan fasilitasi pemberian bantuan/hibah	Jumlah kegiatan/lembaga sosial keagamaan yang diberikan bantuan	55 organisasi/lembaga	53 organisasi/ lembaga	96,36%	Kasubbag Bina Mental dan Spiritual
3	Melakukan pembinaan pendidikan keagamaan	Jumlah lembaga pendidikan yang dibina	4 lembaga	4 lembaga	100%	Kasubbag Kesejahteraan Masyarakat
4	Melakukan fasilitasi kegiatan organisasi/lembaga keagamaan	Jumlah organisasi/lembaga keagamaan yang difasilitasi	4 organisasi/lembaga	4 organisasi/ lembaga	100%	Kasubbag Kesejahteraan Masyarakat
		Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	Kasubbag Kesejahteraan Masyarakat
5	Memberikan fasilitasi pembayaran insentif Guru TK/TPA, Madin/MIS, Ponpes, dan Penyuluh agama	Jumlah Guru TK/TPA, Madin/MIS, Ponpes, dan Penyuluh agama yang diberi Intensif	3.090 orang	3.066 Orang	99,22%	Kasubbag Kesejahteraan Sosial dan Budaya
6	Melakukan monitoring dan evaluasi lembaga Pendidik Keagamaan	Jumlah guru TK/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan penyuluh Agama yang di monitoring	3.090 orang	3.066 Orang	99,22%	Kasubbag Kesejahteraan Sosial dan Budaya
7	Melakukan fasilitasi Bidang Budaya Keagamaan	Jumlah kegiatan bidang budaya yang di fasilitasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	Kasubbag Kesejahteraan Sosial dan Budaya

❖ **Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja**

Capaian kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sub Kegiatan Fasilitas Bina Mental Spiritual berupa fasilitas pemberian bantuan hibah kepada lembaga/organisasi sosial keagamaan pada prinsipnya berjalan cukup baik dan lancar dengan realisasi fisik 96,36% dan realisasi keuangan dari pagu anggaran sebesar Rp. 8.384.349.572,- terealisasi sebesar Rp. 8.084.854.074,- atau 96,43%, tetapi memang masih ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu antara lain masih kurangnya pemahaman pengurus lembaga/organisasi penerima hibah dalam hal administrasi dari perencanaan sampai dengan pelaporan penggunaan dana hibah dan adanya wabah Covid 19 di Kabupaten Tanah laut, dengan rincian sebagai berikut :
 - Fasilitas pengelolaan bina mental spiritual secara fisik dapat terealisasi 100% dengan realisasi keuangan dari pagu anggaran sebesar Rp. 299.999.572,- terealisasi Rp. 136.030.524,- atau 45,34%.
 - Proposal hibah lembaga / organisasi keagamaan yang disetujui oleh Pemerintah Daerah sebanyak 55 buah dengan dana sebesar Rp 8.084.350.000,-
 - Lembaga/Organisasi keagamaan yang mencairkan dana hibahnya sebanyak 53 dari 55 Lembaga/Organisasi keagamaan dengan presentasi proposal 96,36% dan jumlah dana yang dicairkan sebesar Rp 8.044.350.000,- dan jumlah dana yang dikembalikan oleh Lembaga/Organisasi sebesar Rp. 131.526.450,- jadi realisasi keuangan sebesar Rp. 7.912.823.550,- dengan presentasi realisasi keuangan 97,46%.
 - Lembaga/organisasi keagamaan yang tidak mencairkan dana hibahnya sebanyak 2 Lembaga dengan presentase 3,63% dengan dana sebesar Rp 40.000.000,- disebabkan pemohon hibah tidak mengajukan berkas pencairan dana hibah.
- 2) Capaian kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial, pada dasarnya dapat terlaksana sesuai yang direncanakan dengan realisasi fisik 99,22% dan realisasi keuangan dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 19.035.999.762,- terealisasi sebesar Rp. 18.809.456.504,- atau 98,81%, yang terdiri dari pemberian insentif kepada Tenaga pengajar pada TKA/TPA, Madin/MIS, Pondok Pesantren

dan Penyuluh Agama dan melaksanakan kegiatan Batamat dan Wisuda santri TKA/TPA se Kabupaten Tanah Laut, dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah Tenaga pengajar pada TKA/TPA, Madin/MIS, Pondok Pesantren dan Penyuluh Agama yang mendapatkan insentif dari Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat berjumlah 3.090 orang dengan besaran Rp.18.108.000.000,-, yang terdiri dari guru-guru pada lembaga pendidikan keagamaan TKA/TPA berjumlah 1.883 orang, Madin/MIS berjumlah 466 orang, Pondok Pesantren berjumlah 501 orang dan Tenaga Penyuluh Agama berjumlah 240 orang.

Dari total keseluruhan tenaga pengajar yang berjumlah 3.090 orang, ada insentif yang dikembalikan ke kas Daerah sebanyak 24 orang disebabkan berhenti dan meninggal dunia, dengan rincian tenaga pengajar TKA/TPA sebanyak 12 orang, Madin sebanyak 2 orang, Pondok Pesantren sebanyak 1 orang dan Penyuluh agama sebanyak 9 orang.

- Kegiatan Batamat dan Wisuda santri TKA/TPA se Kabupaten Tanah Laut dapat terlaksana, dengan dibagi menjadi 6 zona (lokasi) karena masih dalam kondisi Pandemi Covid-19.

3) Capaian kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat, pada dasarnya dapat terlaksana dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.070.819.832,- dapat terealisasi Rp. 2.218.132.114,- atau 72,23%, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembinaan terhadap Lembaga/Organisasi Pendidikan keagamaan di Kabupaten Tanah Laut yaitu TKA/TPA, Madin/MIS, Pondok Pesantren dan Penyuluh Agama.
- Fasilitas kegiatan Lembaga/Organisasi Keagamaan, terdiri dari :
 - a. Fasilitas kegiatan FKUB Kabupaten Tanah Laut berupa Sosialisasi kerukunan umat beragama di Kabupaten Tanah Laut.
 - b. Fasilitas kegiatan BKPRMI Kabupaten Tanah Laut berupa Penguatan Managerial Kepala TKA/TPA se Kabupaten Tanah Laut.
 - c. Fasilitas kegiatan FKPP Kabupaten Tanah Laut berupa Peringatan Hari Santri Nasional di Kabupaten Tanah Laut.
 - d. Fasilitas kegiatan FKDT Kabupaten Tanah Laut berupa kegiatan PORSADIN IV tingkat Kabupaten Tanah Laut.

- Melaksanakan kegiatan keagamaan, terdiri dari :
 - a. Musabaqah Tilawatil Qur'an tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.
 - b. Safari Ramadhan diseluruh Kecamatan se Kabupaten Tanah Laut.
 - c. Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1443 H.
 - d. Shalat Hajat Peringatan Hari Jadi ke 56 Kab. Tanah Laut
 - e. Kegiatan Gema Al Qur'an Tanah Laut dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke-56 Kabupaten Tanah Laut tahun Tahun 2021.

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Sasaran Indikator Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat terhadap capaian tahun sebelumnya :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2021		
			2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase peningkatan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina	%	86%	84,93%	100%	96,43%	96,36%
2	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan	%	99,51%	99,94	100%	98,81%	99,22%
3	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	%	88,33%	11,77%	100%	72,23%	100%

❖ **Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya :**

- 1) Persentase realisasi peningkatan pelayanan lembaga sosial dan keagamaan Tahun 2020 dan Tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 11,5% , yaitu dari 84,93% menjadi 96,43%.
- 2) Persentase realiasi layanan kesejahteraan sosial bagi lembaga pendidikan keagamaan yakni berupa pemberian insentif Tenaga pengajar pada TKA/TPA, Madin/MIS, Pondok Pesantren dan Penyuluh Agama di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dan Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1,13%, yakni dari 99,94% menjadi 98,81%, hal ini disebabkan adanya tenaga pengajar yang berhenti dan ada yang meninggal dunia.
- 3) Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga yang dilaksanakan pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 60,46% yakni dari 11,77% menjadi 72,23%.

❖ **Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

SASARAN 1 Meningkatnya Pembinaan Lembaga Sosial dan Keagamaan

Indikator : Persentase Peningkatan Lembaga Sosial dan Keagamaan yang Dibina

NO	SASARAN STRATEGIS /KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Pembinaan Lembaga sosial dan keagamaan	Persentase peningkatan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina	100%	96,43%	96,36%	Bagian Kesejahteraan Rakyat Mengampu Misi ke-3 "Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Layanan Bagian Kesejahteraan Rakyat semakin banyak tahun demi tahun, ini dilihat dari banyak organisasi/kelembagaan sosial dan keagamaan yang memohon bantuan baik itu berupa fisik maupun kegiatan keagamaan. Jumlah proposal pada Tahun 2021 sebanyak 55 proposal.

NO	MEMBERIKAN FASILITASI KEPADA MASYARAKAT BERUPA HIBAH	PROPOSAL HIBAH YANG MASUK TAHUN 2020	JUMLAH PROPOSAL YANG MASUK	JUMLAH PROPOSAL YANG DITINDAK LANJUTI	JUMLAH PROPOSAL YANG TIDAK DITINDAK LANJUTI	CAPAIAN 2020
1		Proposal Hibah Fisik	73 Buah Proposal	Proposal Hibah Fisik 47 Buah	Proposal Hibah Fisik 1 Buah	64,39 %
2		Proposal Hibah Non Fisik		Proposal Hibah Non Fisik 15 Buah	Proposal Hibah Non Fisik 10 Buah	20,54 %
	Jumlah		73 Buah	62 Buah	11 Buah	84, 93%

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Bagi pengurus organisasi/kelembagaan keagamaan yang memohon bantuan hibah fisik maupun kegiatan kebanyakan tidak memahami bagaimana membuat proposal.
- Lambatnya dalam hal pencairan dana hibah dikarenakan administrasi dari pemohon proposal hibah yang tidak lengkap.
- Permintaan RAB proposal pencairan dengan permintaan RAB proposal awal berbeda yang akan dikerjakan.
- Kurangnya ketaatan dalam meng SPJ kan dana hibah.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melaksanakan sosialisasi kepada pemohon hibah secara langsung dan meminta kepada aparat desa dan kecamatan untuk menyampaikan syarat-syarat proposal mengajukan permohonan fisik maupun kegiatan kepada bagian kesejahteraan rakyat.
- Sebelum membuat permohonan proposal terlebih dahulu melakukan musyawarah pengurus dengan warga berkaitan dengan permintaan apa yang diinginkan.
- Meningkatkan koordinasi yang intensif kepada pejabat atau instansi terkait.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Melaksanakan sosialisasi kepada penerima pencairan hibah secara langsung dan sosialisasi bagaimana membuat laporan keuangan bantuan hibah
- Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas realisasi kemajuan pelaksanaan hibah kepada pemohon proposal secara berkelanjutan serta pengawasan terus menerus.



Foto Kegiatan Sosialisasi Hibah

Daftar Penerima Hibah

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut
 Tahun Anggaran 2020 Hibah Uang yang Direkomendasikan Oleh
 Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

NO	NAMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	Langgar Darul Muttaqin	Jl. Dahlia RT. 13 Dusun IV Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung	42,000,000
2	Yayasan Nurul Adzula m	Desa Benua Tengah RT. 01/01 Dusun 01 Kecamatan Takisung	105,000,000
3	Masjid Nurul Iman	Jl. Sungai Kembang RT. 09 Desa Gunung Makmur	17,500,000
4	Langgar Al Akhdari	Jl. Basuki Rahmat RT. 26 RW. 07 Kel. Angsau Kec.	10,000,000

NO	NAMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
		Pelaihari	
5	Kelompok Rukun Kematian Cendana Putih	Jl. Jend Sudirman RT. 03 RW. 01 Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung	7,000,000
6	Yayasan Pondok Pesantren Darussalim Bati-Bati	Jl. Pahlawan RT. 08 RW. III No. 43 Kec. Bati-Bati	210,000,000
7	Langgar Arrahman	Desa Sumber Makmur RT. 09 RW. 05 Kec. Takisung	25,000,000
8	Perkumpulan Rukun Kematian Lingkungan Langgar Darul Muttaqien	Jl. Perintis Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari	35,000,000
9	Majelis Jemaat Sion Katunun	Jl. Katunun RT. 09 RW. 03 Desa Telaga Kec. Pelaihari	35,000,000
10	Yayasan An Nur Fattah	Jl. Niaga Gang Baru RT. 13 RW. 04 Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari	52,500,000
11	Yayasan Ponpes Darul Muslim	Jl. Raya Takisung RT. 02 Desa Ranggang Kec. Takisung	280,000,000
12	Majelis Maulid Habsyi Al Iklas	Jl. Ambawang RT. 04 Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari	7,000,000
13	Pengurus Group Al-Habsyi Al Ikhlas	Desa Gunung Makmur Kec. Takisung	5,250,000
14	Langgar Attaubah	Desa Bumi Jaya RT. 01 A/Dusun 01 Kec. Pelaihari	15,000,000
15	Langgar Hubbul Mustofa	Komp. Karunia Kembar 1 RT. 07 C RW. 03 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari	14,000,000
16	Majelis Ta'lim Al Kautsar	Jl. A Yani Km. 4 Kel. Pabahanan Kec. Pelaihari	35,000,000
17	Masjid Hidayatussalikim	Desa Telaga RT. 06 RW. 01 Kec. Pelaihari	70,000,000
18	Masjid Darul Istiqomah	Desa Bumi Jaya RT. 03 A / Dusun 01 Kec. Pelaihari	140,000,000
19	Baznaz Tanah Laut	Jl. Sapta Marga No. 06 RT. 07 Pelaihari	175,000,000
20	Pimpinan Daerah Aisyiyah Tanah Laut	Jl. Matah 1 RT. 06 No. 43 Kel. Karang Taruna	70,000,000
21	Masjid At Taqwa	Dusun 2 Jayau RT. 09 / 02 Desa Ambungan Kec. Pelaihari	105,000,000
22	Gerakan Pemuda Ansor Kab. Tanah Laut	Jl. Samudera RT. 10 / IV Pelaihari	105,000,000
23	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tanah Laut	Komplek Perguruan Muhammadiyah Jl. A Yani Km. 59 Panggung Pelaihari	280,000,000
24	Yayasan Pesantren Assyuhada	Jl. Abadi RT. 03 RW. 01 Kec. Pelaihari	280,000,000
25	PWRI Kabupaten Tanah Laut	Jl. A Syairani Komp Perkantoran Gagah (Gedung Juang) Pelaihari	70,000,000
26	Yayasan Raudhatul Mustarsyidin	Desa Kintap Kecil Kec. Kintap	250,000,000
27	Masjid Attaqwa	Jl. Dewata Desa Jilatan RT. 06 Dusun 02 Kec. Batu Ampar	52,500,000
28	Yayasan Darul Amanah Pandahan	Jl. A. Yani Km. 29 RT. 07 Desa Pandahan Kec. Bati-Bati	105,000,000
29	Masjid Jami Al Falah	Desa Banyu Irang Kec. Bati-Bati	140,000,000
30	Majelis Ta'lim Ar Raudoh	Jl. Pesantren Komplek Al Karomah RT. 08 RW. 03 Desa Bati-Bati Kec. Bati-Bati	35,000,000
31	Masjid Al Muchlis	Tanjung 4 A RT. 20 Dusun IV Desa Tanjung Kec. Bajuin	17,500,000
32	Masjid Al Hijriyah	Dusun Plasma Desa Pulau Sari RT. 01 RW. 03 Kec. Tambang Ulang	150,000,000
33	Lembaga Adat Mekar Sari	Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar	140,000,000
34	Masjid Jami Al Falah	Jl. A Yani RT. 01/01 Desa Gunung Raja Kec. Tambang Ulang	70,000,000
35	Masjid Al Faizin	Desa Handil Birayang Atas RT. 03 RW. 02 Kec. Bumi Makmur	70,000,000
36	Yayasan Maarif Nahdlatul Ulama Kal-Sel Cabang Batu Ampar	Jl. Imam Bonjol RT. 05 Desa Durian Bungkok Kec. Batu Ampar	140,000,000
37	Pengurus Masjid Jami At Taqwa Panyipatan	Desa Panyipatan Kec. Panyipatan	105,000,000
38	Pengurus Kelompok Habsyi Ahbaburrasul	Jl. Merdeka RT. 04 RW. 01 Desa Tirta Jaya Kec. Bajuin	7,000,000
39	Masjid Nurul Hidayah	Desa Handil Birayang Bawah RT. 05 RW. 02 Kec. Bumi Makmur	52,500,000

NO	NAMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
40	Masjid Darul Muslimin	Desa Handil Suruk RT. 03 RW. 01 Kec. Bumi Makmur	52,500,000
41	Masjid Nurul Huda	Jl. Hang Tuah RT. 01 RW. 01 Desa Swarangan Kec. Jorong	105,000,000
42	Masjid Raudhatul Ridhwan	Jl. Swadaya Desa Padang Luas RT. 02 RW. 01 Kec. Kurau	45,500,000
43	Langgar Taufiqurrahman	Jl. Subarang / Bawah Sawo RT. 10 / 3 Desa Jorong Kec. Jorong	70,000,000
44	Masjid Al Muhajirin	Dusun Sidomukti RT. 16 Desa Sebuhr Kec. Jorong	157,500,000
45	Majelis Ta'lim Ihyamul Ulum	Jl. H. M. Sarbini Desa Durian Bungkok Kec. Batu Ampar	80,000,000
46	Masjid At Taqwa	Desa Bawah Layung RT. 13 RW. 04 Kec. Kurau	35,000,000
47	Kelompok Maulid Habsyi Nurul Mu'Min	Desa Sumber Mulia Kecamatan Pelaihari	105,000,000
48	BKPRMI Kec. Kintap	Desa Kintapura Kec. Kintap	35,000,000
49	Yayasan Al Hasyimiyyah Kintap	Desa Pasir Putih Kec. Kintap	24,500,000
50	Pengurus Majlis Ta'lim As Sanusiyyah	Desa Bati-Bati Kec. Bati-Bati	35,000,000
51	Kelompok Maulid Habsyi Al Muna	Desa Handil Birayang Atas Kec. Bumi Makmur	21,000,000
52	Yayasan Pesantren Ubudiyah	Desa Padang Kec. Bati-Bati	52,500,000
53	Group Maulid Habsyi An Noor	Desa Handil Birayang Bawah Kec. Bumi Makmur	24,500,000
54	Majelis Ta'lim Al Dzikra	Desa Handil Babirik Kec. Bumi Makmur	42,000,000
55	Pengelola Masjid Darussaa'dah	Desa Handil Gayam Kec. Bumi Makmur	14,000,000
56	Karang Taruna "Bina Remaja"	Desa Kandangan Lama Kec. Panyipatan	35,000,000
57	Karang Taruna "Harapan Bersama"	Desa Kuringkit Kec. Panyipatan	28,000,000
58	Majelis Ta'lim Asy-Syekh H. M. Thaher	Desa Tanjung Dewa Kec. Panyipatan	24,500,000
59	Majelis Ta'lim At Taqwa	Jl. Datu Timang RT 006 / 02 Desa Jorong Kec. Jorong	30,000,000
60	Yayasan Al Muhajirin	Desa Martabah Kec. Tambang Ulang	35,000,000
61	DPC IKMADA Kalsel Cabang Tanah Laut	Desa Batakan Kec. Panyipatan	21,000,000
62	Badan Pengelola Masjid Al Ikhlas	Komplek Kijang Mas Permai Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari	126,000,000
JUMLAH			4,723,250,000

SASARAN 2 Meningkatnya Layanan Bantuan Sosial Keagamaan

Indikator : Persentase layanan bantuan sosial keagamaan

NO	SASARAN STRATEGIS /KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya layanan bantuan sosial keagamaan	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan	100%	98,81%	99,22%	Bagian Kesejahteraan Rakyat Mengampu Misi ke-3 "Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Layanan Bagian Kesejahteraan Rakyat semakin banyak tahun demi tahun, ini dilihat dari banyaknya bangunan sekolah-sekolah keagamaan dan juga tenaga pengajar pada TKA/TPA, Madin/MIS, dan Pondok Pesantren. Jumlah tenaga pengajar se Kabupaten

yang diberikan insentif dari Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat tahun 2021 berjumlah 3.090 orang. Dari total keseluruhan tenaga pengajar yang berjumlah 3.090 orang, ada insentif yang dikembalikan ke kas Daerah sebanyak 24 orang disebabkan berhenti dan meninggal dunia, dengan rincian tenaga pengajar TKA/TPA sebanyak 12 orang, Madin sebanyak 2 orang, Pondok Pesantren sebanyak 1 orang dan Penyuluh agama sebanyak 9 orang.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas pada dasarnya dapat terlaksana dengan baik, tetapi ada ditemukan beberapa kendala antara lain:

- Kurangnya komunikasi antara guru dengan Kepala sekolah atau Dewan Pengurus Kecamatan BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH.
- Dewan Pengurus Kabupaten BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH harus menginformasikan kepada kepala sekolah, Koordinator Kecamatan untuk mendata ulang TKA/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan PAH yang benar benar bersedia menjadi Tenaga Pengajar di lingkungan Pemerintah Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- Masih adanya tenaga pengajar pada TKA/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan PAH yang masih berstatus PNS/ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, sehingga harus dikeluarkan/diganti agar insentif dapat dibayarkan.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah

- Rapat rutin bulanan DPK BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH agar benar-benar dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan proses belajar.
- DPK BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH harus aktif melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada TKA/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan PAH.
- Meningkatkan koordinasi antara DPK dan DPD BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH agar setiap permasalahan yang dihadapi dilapangan dapat diselesaikan dengan cepat.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara intensif kepada TKA/TPA, Madin, Ponpes dan PAH se Kabupaten Tanah Laut.

- Seluruh Kepala Sekolah maupun tenaga pengajar pada TKA/TPA, Madin, Ponpes dan PAH agar mempunyai dan menyusun target yang ingin dicapai pada setiap tingkatan pembelajaran baik di TKA/TPA, Madin, Ponpes dan PAH agar kualitas hasil yang diharapkan dalam pembelajaran dapat tercapai.

FOTO KEGIATAN

Monitoring dan Evaluasi



Batamat dan Wisuda Santri TKA/TPA



Daftar Tenaga Pengajar TPA, Madin, Ponpes,
 Penyuluh Agama Islam, Penyuluh Agama Hindu dan Penyuluh Agama Kristen
 Lingkup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH GURU TPA	JUMLAH GURU MADIN	JUMLAH GURU PONPES	JUMLAH PENYULUH ISLAM	JUMLAH PENYULUH HINDU	JUMLAH PENYULUH KRISTEN
1	Pelaihari	437	31	125	49	4	7
2	Bajuin	122	-	-	16	-	3
3	Panyipatan	111	65	25	20	-	3
4	Takisung	160	48	17	18	-	-
5	Batu Ampar	206	7	28	18	4	5
6	Jorong	151	56	57	12	-	-
7	Kintap	209	60	60	20	4	-
8	Tambang Ulang	110	24	15	15	-	-
9	Kurau	99	19	12	10	-	-
10	Bumi Makmur	113	57	-	10	-	-
11	Bati Bati	163	99	162	22	-	-
JUMLAH		1883	466	501	210	12	18

**SASARAN 3 Meningkatnya Peran Serta Organisasi/ Lembaga Keagamaan/SKPD
 Dalam Bidang Pemuda dan Olahraga**

**Indikator : Persentase Hasil Tindak Lanjut Koordinasi Kegiatan Bidang
 Keagamaan, Pemuda dan Olahraga**

NO	SASARAN STRATEGIS /KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
3	Meningkatnya Peran serta Organisasi/ Lembaga Keagamaan /SKPD dalam Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	100%	100%	100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat Mengampu Misi ke-3 <i>"Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)"</i>

Layanan Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan organisasi/lembaga keagamaan dan SKPD terkait pada dasarnya dapat terlaksana dengan baik, tetapi memang terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain :

- Masih dalam kondisi wabah/pandemi covid-19 yang melanda seluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Tanah Laut yang menyebabkan beberapa kegiatan

dilaksanakan dengan membatasi jumlah undangan dan acara yang tidak dapat dilaksanakan sehingga anggaran kegiatan dihapus pada anggaran perubahan.

- Kegiatan yang bersifat even tahunan tidak dapat terjadwal sesuai rencana lagi karena pandemic covid-19.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah

- Meningkatkan koordinasi yang baik dengan organisasi/lembaga keagamaan maupun dengan instansi terkait.
- Berharap pandemi covid-19 dapat berakhir atau berkurang sehingga seluruh kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

Meningkatkan dan menjalin koordinasi dengan semua pihak terkait serta menyusun rencana kegiatan dengan baik.

FOTO KEGIATAN

Pembinaan Lembaga Pendidikan Keagamaan



Fasilitasi Kegiatan FKUB Kab. Tanah Laut (Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama)



Fasilitasi Kegiatan BKPRMI Kab. Tanah Laut (Penguatan Managerial Kepala TKA/TPA se Kab. Tanah Laut)



Fasilitasi Kegiatan FKPP Kab. Tanah Laut (Peringatan Hari Santri Nasional)



Fasilitasi Kegiatan FKDT Kab. Tanah Laut (PORSADIN IV Tk. Kab. Tanah Laut)



TC Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan



Safari Ramadhan



Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1443 H



Shalat Hajat Peringatan Hari Jadi ke 56 Kab. Tanah Laut



Gema Al Qur'an Tanah Laut Tahun 2021



❖ **Analisa Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia**

- 1) Untuk mencapai sasaran meningkatnya pembinaan lembaga sosial dan keagamaan yang ditindaklanjuti Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan indikator persentase peningkatan lembaga sosial dan keagamaan yang dibina, dengan pagu Rp 299.999.572,- terealisasi Rp 136.030.524,- atau 45,34% dan dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang SDM yaitu Kasubbag Bina Mental Spiritual, pengadministrasian umum dan tenaga PTT.
- 2) Untuk mencapai sasaran meningkatkan kualitas pelaksanaan layanan bantuan sosial keagamaan yang ditindaklanjuti Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan indikator presentase layanan bantuan sosial keagamaan pada program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dengan pagu Rp19.035.999.762,- terealisasi Rp 18.809.456.504,- atau 98,81% dan dilaksanakan oleh 7 (Tujuh) orang SDM yaitu Kepala Bagian, Kasubbag Sosial dan Budaya, Kasubbag Kesejahteraan Masyarakat, Penyusun data, Pengelola kegiatan survey dan perencanaan, Pengelola bantuan keagamaan, dan pengelola bimbingan kemasyarakatan.
- 3) Untuk mencapai sasaran meningkatnya peran serta Organisasi/Lembaga Keagamaan/SKPD dalam bidang pemuda dan olah raga yang ditindaklanjuti Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan indikator persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olah raga, dengan pagu Rp 3.070.819.832,- terealisasi Rp 2.218.132.114,- atau 72,23% dan dilaksanakan oleh 5 (Lima) orang SDM yaitu Kepala Bagian, Kasubbag Kesejahteraan Masyarakat, Pengelola data Kesejahteraan Masyarakat, Pengadministrasi umum, dan 2 (dua) orang tenaga PTT.

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	KET
1	Persentase peningkatan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHRTERAAN RAKYAT	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	30.491.169.166	29.076.442.692	95,36	14 Orang	
			- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluas, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	19.035.999.762	18.809.456.504	98,81	5 Orang	
2	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan		- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8.384.349.572	8.048.854.074	96	3 Orang	
3	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga		- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	3.070.819.832	2.218.132.114	72,23	5 Orang	

❖ **Analisa Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Bina Mental dan Spiritual**

Untuk capaian indikator sasaran pada kasubbag Bina Mental dan Spiritual dilaksanakan melalui program :

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dengan pagu Rp 299.999.572,- terealisasi Rp 136.030.524,- atau 45,34% dan dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang SDM yaitu Kasubbag Bina Mental Spiritual, pengadministrasian umum dan tenaga PTT.

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia
Kepala Sub Bagian Bina Mental dan Spiritual

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	KET
1	Jumlah dokumen hibah yang diverifikasi	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	8.384.349.572				
2	Jumlah kegiatan/lembaga sosial keagamaan yang diberikan bantuan		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8.384.349.572	8.048.854.074	96	3 Orang	

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Bina Mental dan Spiritual dapat dilihat pada analisa sebagai berikut :

Tabel Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Bina Mental dan Spiritual

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Melakukan Verifikasi dokumen pemberian hibah	Jumlah dokumen hibah yang diverifikasi	89 Dokumen	55 Dokumen	61,80%	Kasubag Bina Mental dan Spritual
2	Melakukan fasilitasi pemberian bantuan/hibah	Jumlah kegiatan/lembaga sosial keagamaan yang diberikan bantuan	55 Organisasi /Lembaga	53 Dokumen	96,36%	Kasubag Bina Mental dan Spritual

Capaian kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bina Mental Spiritual berupa fasilitasi pemberian bantuan hibah kepada lembaga/organisasi sosial keagamaan pada prinsipnya berjalan cukup baik dan lancar dengan realisasi fisik 96,36% dan realisasi keuangan dari pagu anggaran sebesar Rp. 8.384.349.572,- terealisasi sebesar Rp. 8.084.854.074,- atau 96,43%, tetapi memang masih ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu antara lain masih kurangnya pemahaman pengurus lembaga/organisasi penerima hibah dalam hal administrasi dari perencanaan sampai dengan pelaporan penggunaan dana hibah dan adanya wabah Covid 19 di Kabupaten Tanah laut, dengan rincian sebagai berikut :

- Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual secara fisik dapat terealisasi 100% dengan realisasi keuangan dari pagu anggaran sebesar Rp. 299.999.572,- terealisasi Rp. 136.030.524,- atau 45,34%.
- Proposal hibah lembaga / organisasi keagamaan yang disetujui oleh Pemerintah Daerah sebanyak 55 buah dengan dana sebesar Rp 8.084.350.000,-
- Lembaga/Organisasi keagamaan yang mencairkan dana hibahnya sebanyak 53 dari 55 Lembaga/Organisasi keagamaan dengan presentasi proposal 96,36% dan jumlah dana yang dicairkan sebesar Rp 8.044.350.000,- dan jumlah dana yang dikembalikan oleh Lembaga/Organisasi sebesar Rp. 131.526.450,- jadi realisasi keuangan sebesar Rp. 7.912.823.550,- dengan presentasi realisasi keuangan 97,46%.

- Lembaga/organisasi keagamaan yang tidak mencairkan dana hibahnya sebanyak 2 Lembaga dengan presentase 3,63% dengan dana sebesar Rp 40.000.000,- disebabkan pemohon hibah tidak mengajukan berkas pencairan dana hibah.

SASARAN 1 Melakukan Verifikasi Dokumen Pemberian Hibah

Indikator : Jumlah Dokumen Hibah yang Diverifikasi

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Melakukan Verifikasi dokumen pemberian hibah	Jumlah dokumen hibah yang diverifikasi	89 Dokumen	55 Dokumen	61,80%	Kasubag Bina Mental dan Spritual

Tahun 2021, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui 1 (satu) Program yaitu Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dengan pagu Rp 299.999.572,- terealisasi Rp 136.030.524,- atau 45,34% dengan dokumen hibah yang diterima berjumlah 89 dokumen dan yang direkomendasikan dapat menerima bantuan hibah sebanyak 55 Dokumen permohonan atau 61,80%, sedangkan sisanya sebanyak 34 Dokumen belum direkomendasikan karena keterbatasan anggaran dan direncanakan akan direkomendasikan pada tahun anggaran yang akan datang.

Daftar Penerima Hibah

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut
 Tahun Anggaran 2021 Hibah Uang yang Direkomendasikan Oleh
 Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN
1	Badan Pengelola Masjid Agung Syuhada Pelaihari	Jl. Taqwa RT.09 Pelaihari	Rp 1,000,000,000
2	Badan Pengelola Masjid An Nuur	Komplek Gagas Permai Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari	Rp 500,000,000
3	BAZNAS Tanah Laut	Jl. Sapta Marga RT.007 RW.003 Kel. Pelaihari Kecamatan Pelaihari	Rp 350,000,000
4	Majelis Ulama Indonesia Kab. Tanah Laut	Jl. Samudra RT.01 RW.01 Kelurahan Pelaihari	Rp 100,000,000
5	Masjid Darussolihin	Ketunun RT.03 RW.03 Desa Telaga Kec. Pelaihari	Rp 25,000,000

6	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kab. Tanah Laut	Jl. Samudra Pelaihari	Rp 700,000,000
7	Pengurus Langgar Ash Sholihin	Jl. Bakunci/Matah II Komplek Sinar Alam Takisung Permai	Rp 20,000,000
8	Pengurus Langgar Darul Falah	Jl. Bhakti RT.03 RW.01 Karang Jawa Kelurahan Karang Taruna Kec. Pelaihari	Rp 20,000,000
9	Pengurus Masjid Al-Muhajirin	Jl. A. Yani Km 5,5 RT.18 Desa Panggung Kec. Pelaihari	Rp 300,000,000
10	Pengurus Masjid Syiarul Muslimin	Jln. Raya Batakan RT.02/01 Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari	Rp 20,000,000
11	Pengurus Mushala Athoriqu Sa'adah	Jln. Raya Batakan RT.03/01 Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari	Rp 20,000,000
12	PHBI Kabupaten Tanah Laut	Jl. A Yani Gg. Keluarga Rt.01 Rw.01 Pelaihari	Rp 150,000,000
13	Yayasan Al Mubarak Sarang Halang	Jl. A Yani RT.01 RW.01 Kel. Sarang Halang Kecamatan Pelaihari	Rp 350,000,000
14	Yayasan Bunyan Syadid	Jl. Raya Takisung RT.13 Bukit Sabat Matah Kelurahan Karang Taruna	Rp 600,000,000
15	Yayasan Panti Asuhan Tuntung Pandang Kabupaten Tanah Laut	Jalan Air Terjun Bajuin RT.01/01 Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari	Rp 125,000,000
16	Kelompok Rukun Kematian Al-Anshor Desa Kait-Kait	Jl. A. Yani Km 63 Desa Kait-Kait Kec. Bati-Bati	Rp 15,000,000
17	Pengurus Majelis Ta'lim Al-Muhibbin	Jl. Kamajaya RT.005 RW.02 Desa Padang Kecamatan Bati-Bati	Rp 25,000,000
18	Pengurus Masjid Darul Mahabbah	Jl. A Yani KM 29 RT.02/RW.02 Desa Liang Anggang Kec. Bati-Bati	Rp 200,000,000
19	Pengurus Masjid Mujahidin	Jl. Tarini Desa Martadah Baru Kec. Tambang Ulang	Rp 150,000,000
20	Pengurus Langgar Raudhatul Rahim	Desa Handil Babirik RT.02 RW.01 Kecamatan Bumi Makmur	Rp 80,000,000
21	Pengurus Mesjid Al Karim	Desa Bumi Harapan RT.04 RW.02 Kec. Bumi Makmur	Rp 60,000,000

Dari target yang ditetapkan yakni sebanyak 89 Dokumen permohonan Hibah dari Lembaga/organisasi sosial dan keagamaan yang diterima dapat direkomendasikan sebanyak 55 Dokumen, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 34 dokumen tidak dapat direkomendasikan karena keterbatasan anggaran dan akan diusulkan kembali pada tahun anggaran yang akan datang.

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran diatas sebagai berikut :

- Terbatasnya anggaran sehingga tidak semua proposal yang masuk dapat direkomendasikan..

Solusi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan tersebut yakni :

- Mengusulkan ulang pada tahun anggaran yang akan datang untuk dapat direkomendasikan .

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Menjadikan prioritas untuk mendapatkan bantuan hibah pada tahun anggaran yang akan datang .

SASARAN 2 Melakukan Fasilitasi Pemberian Bantuan/Hibah

Indikator : Jumlah Kegiatan/Lembaga Sosial Keagamaan yang Diberikan Bantuan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Melakukan fasilitasi pemberian bantuan/hibah	Jumlah kegiatan/lembaga sosial keagamaan yang diberikan bantuan	55 Organisasi /Lembaga	53 Dokumen	96,36%	Kasubag Bina Mental dan Spritual

Tahun 2021, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui 1 (satu) Program yaitu Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dengan pagu Rp 8.084.350.000,- terealisasi Rp 7.912.823.550,- atau 97,46% dengan dokumen hibah yang direkomendasikan berjumlah 55 dokumen dan yang mengajukan pencairan dana hibah sebanyak 53 Dokumen permohonan atau 96,36%, dan 2 Dokumen Lembaga/Organisasi yang tidak mengajukan pencairan.

Daftar Penerima Hibah Yang Tidak Mencairkan

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut
Tahun Anggaran 2021 Hibah Uang

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN
1	Majelis Ta'lim dan Shalawat Dalailul Khairat	Desa Ranggung RT.08 Kec. Takisung	Rp 20,000,000
2	Pengurus Langgar Darul Ibadah	Desa Ranggung RT.09 Kecamatan Takisung	Rp 20,000,000
JUMLAH			Rp 40,000,000

Untuk mencapai indikator target sasaran, minimal 10 komponen yang harus dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Menerima proposal dari pengurus Mesjid, Pengurus Langgar/Musholla, Pengurus Pondok Pesantren, Pengurus Madrasah Diniyah, Pengurus TK Alquran dan meneliti kelengkapan administrasi proposal bantuan hibah sesuai peraturan pemberian hibah daerah sebanyak 55 dokumen yang terdiri dari fisik dan kegiatan
- 2) Memonitoring usulan proposal yang telah masuk ke Bagian Kesra Setda Tanah Laut dengan mengecek langsung datang ke tempat Pemohon proposal dimana tempat lokasi tanah yang akan dibangun tempat pendidikan agama, ruang induk mesjid/langgar/musholla sesuai dengan Proposal/RAB yang telah disampaikan.
- 3) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim Evaluasi Bantuan Hibah untuk menyeleksi dan memverifikasi proposal yang telah masuk sesuai aturan sebanyak 55 lembaga/organisasi sosial keagamaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan pemberian hibah daerah.
- 4) Memberitahukan kepada semua penerima bantuan hibah yang proposalnya belum lengkap untuk memperbaiki proposalnya dan segera memberitahukan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk ditindak lanjuti kepada Tim Evaluasi Bantuan Hibah agar dipertimbangkan diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- 5) Melaksanakan sosialisasi penggunaan dana hibah kepada seluruh pengurus lembaga/organisasi penerima bantuan hibah.
- 6) Memverifikasi berkas pencairan dana hibah dari lembaga/organisasi sosial dan keagamaan.
- 7) Menandatangani Naskah perjanjian hibah daerah oleh Pengurus Lembaga/Organisasi penerima dengan Kuasa Pengguna Anggaran.
- 8) Pencairan dana hibah melalui transfer ke rekening lembaga/organisasi penerima hibah dan kegiatan bisa dilaksanakan sesuai RAB permohonan pencairan dana hibah.
- 9) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan hibah pada masing-masing lembaga/organisasi penerima hibah.
- 10) Menerima laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah dari masing-masing penerima hibah.

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran diatas sebagai berikut :

- Kurangnya pemahaman dari pemohon dari Lembaga/Organisasi Sosial dan Keagamaan untuk kelengkapan dalam pengajuan proposal hibah.
- Lambatnya dalam pencairan dana hibah, karena administrasi dari pemohon proposal hibah yang tidak lengkap.
- Kurangnya pemahaman pengurus lembaga/organisasi penerima hibah dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.
- Adanya pergantian pengurus lembaga/organisasi penerima hibah, sehingga pengurus baru kesulitan dan tidak bersedia untuk melanjutkan proses pencairan dana hibah.

Solusi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan tersebut yakni :

- Melaksanakan Sosialisasi kepada calon penerima hibah, dan meminta bantuan kepada aparat Desa dan Kecamatan untuk dapat membantu dalam melengkapi proposal yang diajukan sesuai dengan ketentuan.
- Sebelum menyerahkan proposal hibah ke pemerintah daerah terlebih dahulu musyawarah pengurus dan warga setempat berkaitan dengan fisik hibah
- Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas realisasi kemajuan pelaksanaan hibah kepada pemohon proposal secara berkelanjutan serta pengawasan terus menerus.
- Meningkatkan koordinasi yang intensif kepada pejabat atau instansi terkait.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- 1) Meningkatkan koordinasi antara lembaga/organisasi sosial dan keagamaan dengan aparat Desa maupun Kecamatan.
- 2) Memberikan bimbingan kepada lembaga/organisasi sosial dan keagamaan dalam hal pengajuan proposal bantuan dana hibah.
- 3) Meningkatkan koordinasi Tim Evaluasi Hibah Daerah agar dana hibah bisa terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran.

❖ Analisa Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat dengan pagu Rp3.070.819.832,- terealisasi Rp 2.218.132.11400,- atau 72,23%, kegiatan ini di dilaksanakan oleh 5 (Lima) orang SDM yaitu Kasubbag Kesejahteraan Masyarakat, Penyusun data Kesejahteraan Masyarakat, Pengadministrasi Umum dan 2 orang PTT.

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia
Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	KET
1	Jumlah Lembaga pendidikan yang dibina Jumlah organisasi/lembaga keagamaan yang difasilitasi	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3.070.819.832				
2	Jumlah organisasi/lembaga keagamaan yang difasilitasi		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	3.070.819.832	2.218.132.114	72,23	5 Orang	
3	Jumlah Lembaga pendidikan yang dibina							

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat dapat dilihat pada analisa sebagai berikut :

Tabel Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Melakukan pembinaan pendidikan keagamaan	Jumlah lembaga pendidikan yang dibina	4 Lembaga	4 Lembaga	100%	Kasubag Kesejahteraan Masyarakat
2	Melakukan Fasilitasi Kegiatan Organisasi/Lembaga Keagamaan	Jumlah Organisasi/ Lembaga Keagamaan yang difasilitasi	4 Organisasi/ Lembaga	4 Organisasi/ Lembaga	100%	Kasubag Kesejahteraan Masyarakat
		Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	Kasubag Kesejahteraan Masyarakat

Capaian kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat, pada dasarnya dapat terlaksana dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.070.819.832,- dapat terealisasi Rp. 2.218.132.114,- atau 72,23%, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembinaan terhadap Lembaga/Organisasi Pendidikan keagamaan di Kabupaten Tanah Laut yaitu TKA/TPA, Madin/MIS, Pondok Pesantren dan Penyuluh Agama.
- Fasilitasi kegiatan Lembaga/Organisasi Keagamaan, terdiri dari :
 - e. Fasilitasi kegiatan FKUB Kabupaten Tanah Laut berupa Sosialisasi kerukunan umat beragama di Kabupaten Tanah Laut.
 - f. Fasilitasi kegiatan BKPRMI Kabupaten Tanah Laut berupa Penguatan Managerial Kepala TKA/TPA se Kabupaten Tanah Laut.
 - g. Fasilitasi kegiatan FKPP Kabupaten Tanah Laut berupa Peringatan Hari Santri Nasional di Kabupaten Tanah Laut.
 - h. Fasilitasi kegiatan FKDT Kabupaten Tanah Laut berupa kegiatan PORSADIN IV tingkat Kabupaten Tanah Laut.
- Melaksanakan kegiatan keagamaan, terdiri dari :
 - f. Musabaqah Tilawatil Qur'an tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.
 - g. Safari Ramadhan diseluruh Kecamatan se Kabupaten Tanah Laut.
 - h. Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1443 H.

- i. Shalat Hajat Peringatan Hari Jadi ke 56 Kab. Tanah Laut
- j. Kegiatan Gema Al Qur'an Tanah Laut dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke-56 Kabupaten Tanah Laut tahun Tahun 2021.

SASARAN 1 Melakukan Pembinaan Pendidikan Keagamaan

Indikator : Jumlah Lembaga Pendidikan yang Dibina

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Melakukan pembinaan pendidikan keagamaan	Jumlah lembaga pendidikan yang dibina	4 Lembaga	4 Lembaga	100%	Kasubag Pendidikan Dan Agama

Tahun 2021, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui 1 (satu) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat dengan pagu Rp3.070.819.832,- terealisasi Rp 2.218.132.11400,- atau 72,23%

Selanjutnya indikator sasaran yaitu jumlah pendidikan dan keagamaan yang dibina yaitu 4 (empat) Lembaga Pendidikan yakni TKA/TPA, Madin/MIS, Pondok Pesantren dan Penyuluh Agama Kab. Tanah Laut.

Bahwa untuk mendukung tercapainya indikator target sasaran perlu dilakukan oleh lembaga pendidikan keagamaan dengan komponen :

- 1) Melaksanakan kunjungan langsung ke beberapa sekolah TKA/TPA, Madrasah Diniyah Takmiliyah yang ada di kabupaten tanah laut dan Penyuluh Agama serta melaporkan langsung kepada Pengurus BKPRMI Kabupaten, FKDT kabupaten, Pengurus Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) serta Koordinator Penyuluh Agama Kabupaten Tanah Laut dengan unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- 2) Jumlah TKA/TPA swasta berjumlah 347 unit dengan jumlah ustadz dan ustadzah berjumlah 1883 orang yang dapat insentif dari Pemerintah Daerah.
- 3) Jumlah sekolahan Madrasah Diniyah/Madrasah Ibtidayah swasta berjumlah 71 unit dengan jumlah ustadz dan ustadzah berjumlah 466 orang yang dapat insentif dari Pemerintah Daerah.

- 4) Jumlah sekolah pondok Pesantren yang terdaftar di Bagian kesejahteraan rakyat berjumlah 26 unit dengan jumlah ustadz dan ustadzah nya yang dapat insentif dari pemerintah daerah sebanyak 501 orang.
- 5) Jumlah penyuluh agama sebanyak 240 orang yang dapat insentif dari Pemerintah Daerah.

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai mencapai sasaran diatas sebagai berikut :

- Pengurus TKA/TPA, Madrasah Diniyah/Madrasah Ibtidiah swasta kurang memahami bagaimana pengelolaan manajemen pendidikan sekolah.
- Pengurus Pondok Pesantren kurang memahami bagaimana pengelolaan manajemen Pondok pesantren.
- Kurangnya sarana prasarana pada pendidikan madrasah diniyah/ madrasah Ibtidiah swasta dan Pondok Pesantren, baik itu fisik maupun sarana pendukung.

Solusi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan tersebut, yaitu :

- Membentuk tim monitoring dan verifikasi terhadap guru-guru agama yang di dalam dimasukkan kasi potren dan madin sebagai selaku pembina terhadap Madrasah diniyah dan pondok pesantren didalam melakukan pengelolaan maupun kurikulum pendidikan madrasah maupun pondok pesantren.
- Bagi Pengurus Madrasah diniyah/madrasah Ibtidayah swasta dan pondok pesantren kami minta untuk mendaftarkan sekolahnya ke kementarian Hukum dan Hak azasi manusia (Menkumham) dan notaris, agar sekolah yang tersebut dapat memasukkan permohonan bantuan kepada pemerintah daerah melalui bagian kesejahteraan rakyat.

Rencana aksi perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Melaksanakan pelatihan bagi pengelolaan TKA/TPA, madrasah diniya dan juga pondok pesantren dalam bidang manajemen.
- Melakukan bimbingan langsung kepada madrasah atau pondok pesantren yang sudah terdaftar pada menkumham dalam membuat proposal hibah.

SASARAN 2 Melakukan Fasilitasi Kegiatan Organisasi/Lembaga Keagamaan

Indikator 1 : Jumlah Organisasi/Lembaga Keagamaan yang Difasilitasi

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Melakukan Fasilitasi Kegiatan Organisasi/Lembaga Keagamaan	Jumlah Organisasi/ Lembaga Keagamaan yang difasilitasi	4 Organisasi/ lembaga	4 Organisasi/ lembaga	100%	Kasubag Kesejahteraan Rakyat
		Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	Kasubag Kesejahteraan Rakyat

Organisasi / lembaga keagamaan yang dibantu fasilitasi untuk kegiatan keagamaan pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat berjumlah 4 organisasi / kelembagaan keagamaan yaitu :

- 1) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tanah Laut dengan memfasilitasi sosialisasi SK 4 Menteri yang berkaitan membina beberapa desa kerukunan antar umat beragama dikecamatan, perizinan pendirian rumah ibadah dilingkup Pemerintah Daerah Tanah Laut.
- 2) Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) dalam pelaksanaan peringatan hari santri Nasional di Kab. Tanah Laut.
- 3) BKPRMI Kab. Tanah Laut dalam pelaksanaan kegiatan penguatan managerial kepala TKA/TPA se Kab. Tanah Laut.
- 4) Forum Komunikasi Diniyah Taklimiyah (FKDT) Kab. Tanah Laut dalam kegiatan PORSADIN IV tingkat Kab. Tanah Laut.

Bahwa untuk mendukung tercapainya indikator target sasaran perlu dilakukan oleh lembaga pendidikan keagamaan, organisasi/lembaga keagamaan yang melakukan kegiatan keagamaan dengan komponen :

1. Melaksanakan rapat koordinasi persiapan kegiatan dengan pengurus lembaga/organisasi.
2. Menyusun panitia dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.
4. Melaksanakan kegiatan dan menyusun pertanggung jawaban kegiatan.

Hambatan yang terjadi dalam organisasi / lembaga keagamaan yang difasilitasi untuk kegiatan keagamaan untuk sasaran diatas sebagai berikut :

- Terbatasnya pelaksanaan kegiatan akibat pandemi Covid 19.
- Kurangnya koordinasi organisasi FKUB dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

Solusi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan / hambatan tersebut yaitu :

- Memohon kepada instansi terkait dalam penganggaran kegiatan, untuk membuat kegiatan FKUB kedalam kegiatan skpd yang berkaitan terhadap kerukunan umat beragama.
- Meningkatkan koordinasi dengan lembaga/organisasi keagamaan dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

Rencana aksi perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Meminta kepada kementerian agama kabupaten tanah laut, khususnya kasi Madin dan Prontren untuk membantu manajemen organisasi FKPP dalam pengelolaan keuangannya pada kegiatan Hari Santri Nasional tahun selanjutnya.
- Melakukan pengumpulan dana mandiri dari para anggota FKPP Kabupaten Tanah Laut untuk penyelenggaraan Hari Santri Nasional karena kegiatan yang dilaksanakan dari santri, oleh santri dan untuk santri.
- Melakukan pendekatan kepada para stakeholder seperti pengusaha atau dermawan yang dapat membantu kontribusi pendanaan kepada pengurus FKPP Tanah Laut untuk menunjang kegiatan Hari Santri Nasional.

SASARAN 2 Melakukan Fasilitasi

Kegiatan Organisasi/Lembaga Keagamaan

Indikator 2 : Jumlah Kegiatan Keagamaan yang Dilaksanakan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Melakukan Fasilitasi Kegiatan Organisasi/Lembaga Keagamaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	Kasubag Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat berjumlah 5 (lima) kegiatan, yaitu MTQ, Safari Ramadhan, Peringatan Tahun Baru Islam 1443 H, Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW dan Kegiatan Gema Al Qur'an Tanah Laut Tahun 2021.

Bahwa untuk mendukung tercapainya indikator target sasaran perlu dilakukan dengan komponen :

1. Melaksanakan rapat koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait untuk mempersiapkan rencana kegiatan.
2. Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan.
3. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan.
4. Koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan.
5. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal dan ketersediaan anggaran.
6. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban kegiatan.
7. Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan.

Hambatan yang terjadi dalam organisasi / lembaga keagamaan yang dibantu / fasilitasi untuk kegiatan keagamaan untuk sasaran diatas sebagai berikut :

- Terbatasnya pelaksanaan kegiatan karena masih dalam masa Pandemi Covid-19.
- Kegiatan MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tidak dapat terikuti secara keseluruhan karena Kab. Tanah Laut mengundurkan diri pada saat pelaksanaan karena pelaksanaan tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan.
- Terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Gema Al Qur'an Tanah Laut Tahun 2021, karena ada beberapa bagian kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan awal.
- Masih belum ada pendanaan yang memadai bagi unsur LPTQ Kecamatan bagi pencarian bakat qori/qoriah, hafiz/halifah ditempat pendidikan seperti TK Alqur'an, Madin, Ponpes.

Solusi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan tersebut yaitu :

- Berharap Pandemi Covid-19 tidak terjadi lagi sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan lancar.

- Memberikan saran dan masukan kepada LPTQ Provinsi agar pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi dapat dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis untuk menghindari kecurangan dalam pelaksanaan.
- Melakukan pembinaan terus menerus bagi pembibitan qori dan qoriah kelompok umur baik anak-anak, remaja agar cadangan qori dan qoriah, hafizh dan hafizhah khusus untuk hafizh dan hafizah 1 juz s.d 30 juz dengan kemampuan qiraat quran yang 7 macam untuk bekerjasama dengan pengurus LPTQ Kecamatan, Pimpinan Ponpes dan Madrasah Diniyah agar potensi santri dalam hal baca qiraat alquran.
- Melakukan perubahan dan inovasi dengan membentuk LPTQ Desa bekerja sama dengan TK Alquran/TP Alquran agar kontribusi masyarakat untuk mencintai baca qiraat alquran dan hafal alquran sehingga setiap kecamatan yang ada di Kabupten Tanah Laut serta mencari sumber pendanaan yang mampu mem *back up* setiap kegiatan/event baca tulis alquran.
- Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran lebih baik lagi dalam pelaksanaan kegiatan Gema Al Qur'an Tanah Laut.

Rencana aksi perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Meningkatkan koordinasi yang intensif dengan lembaga/organisasi keagamaan dan instansi terkait.

❖ **Analisa Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Budaya**

Untuk mencapai sasaran tersebut didukung oleh indikator sebagai berikut :

- Tahun 2020, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp 19.035.999.762,- dan terealisasi sebesar Rp 18.809.456.504,- dengan persentasi 98,81%. Jumlah guru-guru TKA/TPA, Madin/MIS, Pondok Pesantren dan Penyuluh Agama Honorer (PAH) sebanyak 3.090 Orang. Dari total keseluruhan tenaga pengajar yang berjumlah 3.090 orang, ada insentif yang dikembalikan ke kas Daerah sebanyak 24 orang disebabkan berhenti dan meninggal dunia, dengan rincian tenaga pengajar TKA/TPA sebanyak 12 orang, Madin sebanyak 2 orang, Pondok Pesantren sebanyak 1 orang dan Penyuluh agama sebanyak 9 orang.

Kegiatan fasilitasi ini di dilaksanakan oleh 5 (Lima) orang SDM yaitu Kasubbag Kesejahteraan Sosial dan Budaya, pengelola bimbingan kemasyarakatan dan 3 Orang tenaga PTT.

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia
Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Budaya

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	KET
1	Jumlah Guru TK/TPA, Madin/MIS, Ponpes, dan Penyuluh agama yang diberi intensif	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	19.035.999.762				
2	Jumlah Guru TK/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan Penyuluh Agama yang di monitoring		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	19.035.999.762	18.809.456.504	98,81	5 Orang	



NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	KET
3	Jumlah Kegiatan bidang budaya yang di fasilitasi							

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Budaya dapat dilihat pada analisa sebagai berikut :

Tabel Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Budaya

NO	SASARAN STRATEGIS /KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Memberikan fasilitas pembayaran insentif Guru TK/TPA, Madin/MIS, Ponpes, dan Penyuluh agama	Jumlah Guru TK/TPA, Madin/MIS, Ponpes, dan Penyuluh agama yang diberi Intensif	3.090 Orang	3.066 Orang	99,22%	Kasubag Kesejahteraan Sosial dan Budaya
2	Melakukan monitoring dan evaluasi lembaga Pendidik Keagamaan	Jumlah guru TK/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan penyuluh Agama yang di monitoring	3.090 Orang	3.066 Orang	99,22%	Kasubag Kesejahteraan Sosial dan Budaya
3	Melakukan fasilitasi Bidang Budaya Keagamaan	Jumlah kegiatan bidang budaya yang di fasilitasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	Kasubag Kesejahteraan Sosial dan Budaya

SASARAN 1 Memberikan Fasilitas Pembayaran Insentif Guru TK/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan Penyuluh Agama

Indikator : Jumlah Guru TK/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan Penyuluh Agama yang Diberi Insentif

Jumlah guru-guru agama yang terdaftar statusnya dilingkungan pada Bagian kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah kabupaten Tanah berjumlah 3.090 orang yang terdiri 2 katagori ada yang berbentuk sekolahan dan ada yang berbentuk haloqah / penyuluhan, keduanya tersebut sama-sama memberikan informasi atau mendidik seseorang di bidang keagamaan, seperti TKA/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan Penyuluh Agama.

NO	SASARAN STRATEGIS /KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Memberikan fasilitas pembayaran insentif Guru TK/TPA, Madin/MIS, Ponpes, dan Penyuluh agama	Jumlah Guru TK/TPA, Madin/MIS, Ponpes, dan Penyuluh agama yang diberi Insentif	3.090 Orang	3.066 Orang	99,22%	Kasubag Kesejahteraan Sosial dan Budaya

Pendidikan agama pada Taman Kanan-Kanak Al Qur'an memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya berupa mengenal huruf dan cara membaca huruf al Qur'an dengan menggunakan iqra, pada taman pendidikan Al Qur'an (TPA) memberikan ilmu kepada anak didiknya berupa ilmu tajwid, cara menulis al qur'an dan cara menghafal ayat-ayat al qur'an dan ditambah dengan bacaan-bacaan pada waktu shalat, serta do'a-do'a sehari hari, Madrasah Diniyah atau Madrasah Ibtidayah swasta memberikan anak didiknya berupa ilmu fiqih, ilmu al qur'an, ilmu hadist, bahasa arab, ilmu sejarah agama islam dan ilmu bahasa Indonesia serta cara membaca kitab berbahasa melayu, dan Pondok Pesantren memberikan ilmu pengetahuan agama kepada anak didiknya berupa ilmu membaca al qur'an, ilmu bahasa arab (ilmu nahwu, ilmu syoraf, ilmu mantiq, dan ilmu balagh) ilmu hadist, ilmu tafsir, ilmu asbabul tafsir, asbabul hadist, ilmu dan lain-lainnya.

Penyuluh Agama ini terbagi 3, yaitu penyuluh agama Islam, penyuluh agama Hindu dan penyuluh agama Kristen, masing masing penyuluh memberikan pengetahuan kepada umatnya masing-masing, contohnya penyuluh agama islam memberikan ilmu pengetahuan agamanya diberikan kepada muridnya bersifat umum disesuaikan dengan keperluan muridnya, seperti belajar ilmu al qur'an, ilmu fiqih, ilmu amaliyah, ilmu tasyauf dan lain-lainnya.

NO	KECAMATAN	JUMLAH GURU TPA	JUMLAH GURU MADIN	JUMLAH GURU PONPES	JUMLAH PENYULUH ISLAM	JUMLAH PENYULUH HINDU	JUMLAH PENYULUH KRISTEN
1	Pelaihari	437	31	125	49	4	7
2	Bajuin	122	-	-	16	-	3
3	Panyipatan	111	65	25	20	-	3
4	Takisung	160	48	17	18	-	-
5	Batu Ampar	206	7/6	28	18	4	5
6	Jorong	151	56	57	12	-	-
7	Kintap	209	60	60	20	4	-
8	Tambang Ulang	110	24	15	15	-	-
9	Kurau	99	19	12	10	-	-
10	Bumi Makmur	113	57	-	10	-	-
11	Bati Bati	163	99	162	22	-	-
JUMLAH		1883	465	501	210	12	18

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran diatas sebagai berikut :

- Kurangnya komunikasi antara guru dengan Kepala sekolah atau Dewan Pengurus Kecamatan BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH.
- Dewan Pengurus Kabupaten BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH harus menginformasikan kepada kepala sekolah, Koordinator Kecamatan untuk mendata ulang TKA/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan PAH yang benar benar bersedia menjadi Tenaga Pengajar di lingkungan Pemerintah Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- Masih adanya tenaga pengajar pada TKA/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan PAH yang masih berstatus PNS/ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, sehingga harus dikeluarkan/diganti agar insentif dapat dibayarkan.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah

- Rapat rutin bulanan DPK BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH agar benar-benar dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan proses belajar.
- DPK BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH harus aktif melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada TKA/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan PAH.
- Meningkatkan koordinasi antara DPK dan DPD BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH agar setiap permasalahan yang dihadapi dilapangan dapat diselesaikan dengan cepat.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara intensif kepada TKA/TPA, Madin, Ponpes dan PAH se Kabupaten Tanah Laut.
- Seluruh Kepala Sekolah maupun tenaga pengajar pada TKA/TPA, Madin, Ponpes dan PAH agar mempunyai dan menyusun target yang ingin dicapai pada setiap tingkatan pembelajaran baik di TKA/TPA, Madin, Ponpes dan PAH agar kualitas hasil yang diharapkan dalam pembelajaran dapat tercapai.

SASARAN 2 Melakukan Monitoring dan Evaluasi Lembaga Pendidikan Keagamaan

Indikator : Jumlah Guru TK/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan Penyuluh Agama yang Monitoring

NO	SASARAN STRATEGIS /KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Melakukan monitoring dan evaluasi lembaga Pendidik Keagamaan	Jumlah guru TK/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan penyuluh Agama yang di monitoring	3.090 Orang	3.066 Orang	99,22%	Kasubag Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sangat memperhatikan masalah pendidikan agama masyarakat, yang mana pemerintah daerah banyak membantu sekolah sekolah agama dalam memberikan hibah fisik untuk membangun sekolah agama secara tunai. Selain memberikan bantuan bangunan kepada sekolah, pemerintah daerah juga memberikan insentif bagi tenaga pengajar/guru agama agar kesejahteraan guru tersebut sejahteraa. Jumlah guru-guru agama yang diberi insentif oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2021 sebanyak 3.090 orang guru TKA/TPA, Madin/MIS, Ponpes menerima insentif sebesar Rp 500.000,- dan Penyuluh Agama per orang sebesar Rp 350.000,-, serta untuk penyuluh agama difasilitasi Asuransi BPJS dengan jaminan kematian dan kecelakaan.

Dalam melaksanakan monitoring ke sekolah sekolah TKA/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan Penyuluh Agama ada 24 orang yang berhenti dan meninggal dunia, dengan rincian tenaga pengajar TKA/TPA sebanyak 12 orang, Madin sebanyak 2 orang, Pondok Pesantren sebanyak 1 orang dan Penyuluh agama sebanyak 9 orang.

Guru-guru agama yang diberi insentif terbagi empat bagian, yaitu :

1. Guru Taman Kanak-Kanak Al Qur'an atau Taman Pendidikan Al Qur'an sebanyak 1.883 Orang
2. Guru Madrasah Diniyah atau Madrasah Ibtidayah swasta sebanyak 466 orang
3. Guru Pondok Pesantren sebanyak 501 orang
4. Penyuluh Agama Islam sebanyak 210 orang
5. Penyuluh Agama Hindu sebanyak 12 orang
6. Penyuluh Agama Kristen sebanyak 18 orang

Melaksanakan rapat koordinasi dengan Dewan Pengurus Kecamatan dan Dewan Pengurus Kabupaten beserta Bagian Kesejahteraan Rakyat.

- 1) Memonitoring lebih awal terhadap guru-guru TKA/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan PAH sebelum menyerahkan berkas lamaran ke Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- 2) Diberitahukan kepada semua guru TKA/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan PAH untuk berhenti atau mengundurkan diri harus memberitahukan kepada Dewan Pengurus Kecamatan agar dicarikan penggantinya

Hambatan dan solusi yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah :

- Kurangnya komunikasi antara guru dengan Kepala sekolah atau Dewan Pengurus Kecamatan BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH.
- Berkas tanda terima insentif yang di serahkan kordinator kepada kepala sekolah sering terlambat menyerahkan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat
- Dewan Pengurus Kabupaten BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH harus menginformasikan kepada kepala sekolah, Koordinator Kecamatan untuk mendata ulang TKA/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan PAH yang benar benar bersedia menjadi Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah

- Meminta kepada DPK BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH mengaktifkan kembali rapat rutin bulan pada setiap kecamatan.
- DPK BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH harus aktif menanyakan kepada Kepala sekolah tentang aktivitas guru-guru pengajar
- Membuat aturan secara lisan terhadap guru-guru agama berkaitan pencairan apabila satu sekolahan yang belum menyerahkan berkas tanda terima maka pencairan tidak bisa.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

1. Menambah kegiatan monitoring tempat TPA, Madin, Ponpes dan PAH

SASARAN 3 Melakukan Fasilitas Bidang Budaya Keagamaan

Indikator : Jumlah Kegiatan Bidang Budaya yang Difasilitasi

NO	SASARAN STRATEGIS /KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2						
3	Melakukan fasilitas Bidang Budaya Keagamaan	Jumlah kegiatan bidang budaya yang di fasilitasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	Kasubag Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat

Fasilitasi kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan Batamat dan Wisuda Santri TKA/TPA se Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan diseluruh Kecamatan se Kab. Tanah Laut.

Hambatan dan solusi yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah :

- Kegiatan dilaksanakan dalam masa Pandemi Covid-19, sehingga pelaksanaan kegiatan diundur sesuai dengan arahan Bupati Tanah Laut dan dibagi menjadi 6 zona pelaksanaan.
- Terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah

- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan arahan Bupati Tanah Laut.
- Melaksanakan perubahan anggaran pada perubahan anggaran Tahun 2021.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

Pelaksanaan kegiatan pada bulan Nopember Tahun 2021 dengan 6 Zona yang disepakati, yaitu :

- Kecamatan Kintap dan Kecamatan Jorong
- Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Bajuin
- Kecamatan Panyipatan dan Kecamatan Takisung
- Kecamatan Tambang Ulang dan Kecamatan Bati-Bati
- Kecamatan Kurau dan Kecamatan Bumi Makmur
- Kecamatan Pelaihari



Analisa Capaian Sasaran Strategis

Kepala Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	100 %	100%	100%	Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Mengampu Misi ke-5 "Membangun Sinergitas Yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat"
2	Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja positif	75%	75%	100%	
3	Meningkatnya Pelaku UMKM yang terfasilitasi permodalan	Persentase UMKM yang terfasilitasi permodalan	75%	75%	100%	
4	Meningkatnya kualitas manajemen data administrasi pembangunan yang proporsional	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan progres pembangunan fisik	80%	80%	100%	
ESELON IV						
1	Fasilitasi pengembangan potensi perekonomian	Laporan Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Perekonomian
2	Melakukan Fasilitasi Kegiatan Promosi Daerah	Jumlah Monev Fasilitasi Permodalan UMKM	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Perekonomian
3	Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Permodalan UMKM	Jumlah Fasilitasi Promosi Produk UMKM	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Perekonomian
4	Memfasilitasi kegiatan Pembinaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD/BLUD yang dibina	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
5	Melakukan verifikasi dan analisa BUMD yang akan menerima investasi Pemerintah	Jumlah dokumen BUMD/BLUD yang diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
		Dokumen analisis investasi Pemerintah Daerah kepada BUMD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Kasubbag Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
6	Melakukan monitoring dan evaluasi di Bidang Pembangunan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag ADM pembangunan dan Sumber Daya Alam
	Memfasilitasi kegiatan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan kegiatan Fasilitasi Bidang Sumber Daya Alam	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag ADM pembangunan dan Sumber Daya Alam

	Memfasilitasi kegiatan distribusi perekonomian	Laporan Kegiatan Pengendalian Inflasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Kasubbag ADM pembangunan dan Sumber Daya Alam
--	------------------------------------------------	---------------------------------------	-----------	-----------	------	-----------------------------------------------

❖ Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Rata-rata capaian kinerja Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA dari target indikator adalah sebagai berikut:

- 1) Persentase Fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan adalah 100%, dengan rincian sebagai berikut :
 - Persentase Fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka penyaluran Kredit **Program Gapura Karomah** capaian kinerjanya adalah 100%.
 - Kegiatan Fasilitasi Pembinaan BUMD dan penyusunan kajian pendukung revitalisasi manajemen BUMD capaian kinerjanya adalah 100%.
 - Fasilitasi tindak lanjut penyelesaian dan pembahasan Raperda Investasi Pemerintah Daerah capaian kinerjanya adalah 100%.
 - Fasilitasi kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan kegiatan pendukungnya capaian kinerjanya adalah 100%.
 - Persentase fasilitasi kegiatan dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program permodalan dari Pemerintah Pusat capaian kinerjanya adalah 100%.
- 2) Persentase BUMD yang berkinerja positif adalah 75% dari target 75% atau capainya adalah 100%.
- 3) Persentase Perangkat Daerah Yang Menyampaikan Laporan adalah 80% dari target 80% atau capainya adalah 100%.
- 4) Persentase peningkatan Permodalan kepada Pelaku UMKM melalui KUR, KUR Super Mikro dan UMi mencapai hasil 100% dari target yang ditetapkan.

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA terhadap capaian tahun sebelumnya

Tabel Capaian Sasaran Indikator Kinerja Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam terhadap Capaian Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2021		
			2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase BUMD yang berkinerja positif	%	60%	50%	75%	75%	100%
3	Persentase UMKM yang terfasilitasi permodalan	%	-	-	75%	100%	100%
4	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan progres pembangunan fisik	%	-	-	80%	100%	100%

❖ Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi capaian kinerja Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA pada Tahun 2021 berbanding dengan capaian kinerja Tahun 2020 pada masing Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

- Persentase Fasilitas penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan adalah 100% sama dengan capaian kinerja program Tahun 2020 yaitu 100%.
- Persentase BUMD yang berkinerja positif capaiannya adalah 75% lebih baik dibandingkan dengan Tahun 2020 yaitu 66,67%
- Persentase fasilitasi kegiatan dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program permodalan dari Pemerintah Pusat capaian kinerjanya adalah 100%
- Persentase Perangkat Daerah Yang Menyampaikan Laporan capaiannya adalah 100% lebih baik dibandingkan dengan Tahun 2020 yaitu 66,67%

❖ **Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

SASARAN 1 Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah

Indikator : Persentase Penyelesaian Permasalahan Terkait Perekonomian dan Pembangunan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	100 %	100%	100%	Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Mengampu misi ke-5 "Membangun Sinergitas Yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat"

Persentase kebijakan penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan merupakan akumulasi dari kegiatan koordinasi dan fasilitasi yang melahirkan beberapa kebijakan dibidang perekonomian guna menyelesaikan permasalahan dibidang perekonomian dan pembangunan. Selain fasilitasi penyelesaian permasalahan perekonomian dan pembangunan, juga kegiatan fasilitasi lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan untuk ditindaklanjuti sesuai tupoksi .

Capaian indikator kinerja Bagian Perekonomian Pembangunan pada Tahun 2021 sebesar 100% sama dengan capaian kinerja program Tahun 2020 yaitu 100%, namun ada beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain :

- Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan untuk ditindaklanjuti dalam rangka mendukung upaya penyelesaian permasalahan masih kurang maksimal dilaksanakan.
- Koordinasi dengan SKPD teknis yang terkait masih kurang optimal.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Penerapan rekomendasi kebijakan dilakukan evaluasi setiap periode sesuai kebutuhan
- Melakukan monitoring penerapan kebijakan bidang perekonomian
- Koordinasi dengan SKPD teknis lebih dimaksimalkan terutama dalam hal pemenuhan data dan pelaporan

Rencana aksi yang diperlukan

- Menyusun time *schedule* proses penerapan kebijakan penyelesaian permasalahan bidang perekonomian
- Monev secara berkala terhadap kebijakan yang diterapkan
- Rapat koordinasi setiap akhir triwulan



FGD Terkait Program Gapura Karomah



Rapat Koordinasi terkait Penyertaan Modal Pemerintah

SASARAN 2 Meningkatnya BUMD yang Sehat dan Berdaya saing

Indikator : Persentase BUMD yang Berkinerja Positif

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja positif	75%	75%	100%	Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Mengampu misi ke-5 "Membangun Sinergitas Yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat"

Capaian indikator kinerja Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam berikutnya yaitu Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing pada Tahun 2021 sebesar 75% lebih baik dari capaian Tahun 2020 yaitu 66,67%, namun ada beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain :

- Masih belum selesainya pembahasan Raperda penyertaan modal untuk BUMD pada tingkat Legislatif
- Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan kinerja manajemen BUMD belum dilaksanakan secara maksimal oleh BUMD.
- Proses penilaian aset yang akan menjadi objek penyertaan modal masih belum ditindaklanjuti oleh SKPD pelaksana.
- Masih tingginya NPL pada PT. BPR Tanah Laut yang disebabkan oleh Debitur Program Gapura Karomah yang macet.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Secara aktif melakukan koordinasi dengan pihak Legislatif
- Melakukan monitoring penerapan kebijakan terhadap BUMD
- Melakukan koordinasi dengan SKPD dan Pihak terkait dalam rangka percepatan penilaian aset yang akan menjadi objek penyertaan modal
- Memfasilitasi rapat antara PT. BPR Tala dengan SKPD pembina pelaku usaha mikro untuk tindak lanjut penanganan debitur program Gapura Karomah yang macet

Rencana aksi yang diperlukan

- Menyusun Jadwal Monev ke BUMD
- Monitoring dan Evaluasi Laporan Triwulan, semesteran dan tahunan BUMD
- Rapat koordinasi setiap akhir triwulan



Rapat Koordinasi Terkait Permasalahan PD. Baratala TP

SASARAN 3 Meningkatnya Pelaku UMKM yang Terfasilitasi Permodalan

Indikator : Persentase UMKM yang Terfasilitasi Permodalan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
3	Meningkatnya Pelaku UMKM yang terfasilitasi permodalan	Persentase UMKM yang terfasilitasi permodalan	75%	75%	100%	Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Mengampu Misi ke-5 "Membangun Sinergitas Yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat" "Masyarakat"

Capaian indikator kinerja Bagian Perekonomian Adm Pembangunan dan SDA yang berikutnya yaitu Meningkatnya Pelaku UMKM yang Terfasilitasi Permodalan pada

Tahun 2021 sebesar 100%, namun ada beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain :

- Data UMK Binaan SKPD masih kurang lengkap dan belum diklasifikasikan secara tepat;
- Data pelaporan tentang pelaku UMK yang sudah dan belum mendapatkan pembiayaan permodalan masih kurang lengkap.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan sosialisasi kepada SKPD tentang pentingnya melengkapi data binaan pelaku UMK dan pengklasifikasian sesuai bidang usaha
- Mengumpulkan data pelaku usaha yang menjadi binaan SKPD teknis
- Melakukan koordinasi secara intens dengan SKPD terkait

Rencana aksi yang diperlukan

- Menyusun jadwal sosialisasi kepada SKPD
- Monitoring dan evaluasi secara berkala



Rapat Koordinasi dengan SKPD Pembina UMKM

SASARAN 4 Meningkatnya Kualitas Manajemen Data Administrasi Pembangunan yang Proporsional

Indikator : Persentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Progres Pembangunan Fisik

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya kualitas manajemen data administrasi pembangunan yang proporsional	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan progres pembangunan fisik	80%	80%	100%	Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Mengampu Misi ke-5 "Membangun Sinergitas Yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat" "Masyarakat"

Capaian indikator kinerja Bagian Perekonomian Pembangunan yang terakhir yaitu Meningkatnya Kualitas Manajemen Data Administrasi Pembangunan yang Proporsional pada Tahun 2020 sebesar 100% lebih baik dari capaian Tahun 2019 yaitu 80%, namun ada beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain :

- Keterlambatan penyampaian laporan oleh SKPD;
- Data pelaporan yang diserahkan masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan sosialisasi kepada SKPD tentang waktu pelaporan terkait administrasi pembangunan yang dilaksanakan SKPD
- Melakukan penyusunan draft peraturan/regulasi sebagai acuan dalam pelaporan kegiatan SKPD yang melaksanakan pembangunan fisik
- Melakukan koordinasi secara intens dengan SKPD terkait

Rencana aksi yang diperlukan

- Menyusun jadwal sosialisasi kepada SKPD
- Monitoring dan evaluasi secara berkala



Rapat koordinasi Adm Pembangunan

❖ Analisa Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase kebijakan penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan di tunjangan dengan Program Perekonomian dan Pembangunan dengan pagu Rp 1.154.658.438,- terealisasi Rp 766.018.746,- dengan realisasi keuangan sebesar 66,34% dan dilaksanakan oleh 9 (sembilan) orang Sumber Daya Manusia.

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Perekonomian dan Pembangunan

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	Ket
1	Persentase penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1.154.658.438	766.018.746	66,34	9 orang	
			- Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	381.409.046	272.848.382	71,54	3 orang	
2	Persentase BUMD yang berkinerja positif		- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	466.142.336	252.715.832	54,21	2 orang	
3	Persentase UMKM yang terfasilitasi permodalan		- Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	52.642.270	17.540.900	33,32	3 orang	
4	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan progres pembangunan fisik		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	254.464.786	222.913.632	87,60	3 orang	



NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	Ket
			- Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	254.464.786	222.913.632	87,60	3 orang	

❖ Analisa Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Perekonomian

Untuk capaian Indikator sasaran pada Kasubbag Perekonomian dilaksanakan melalui program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dengan Pagu Rp 52.642.270,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 17.540.900,- atau 33,32% dan Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dengan Pagu Rp 381.409.046,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 272.848.382,- atau 71,54% yang didukung oleh 3 org SDM.

Analisa Capaian Kinerja Sub Bagian Perekonomian yang mengacu pada Indikator Sasaran Eselon III yaitu Persentase Permasalahan yang berhasil di tindak lanjuti di Bidang pengembangan Potensi Perekonomian dengan indikator sasaran Esselon IV sebagai berikut :

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia
Kepala Sub Bagian Perekonomian

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	%	SDM	Ket
1	Laporan Fasilitas Pengembangan Potensi Perekonomian Jumlah Monev Fasilitas Permodalan UMKM	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	434.051.316				
			- Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	381.409.046	272.848.382	71,54	3 orang	
2	Jumlah Fasilitas Promosi Produk UMKM		- Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	52.642.270	17.540.900	33,32	3 orang	
3	Laporan Fasilitas Pengembangan Potensi Perekonomian							

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Perekonomian dapat dilihat pada analisa sebagai berikut :

Tabel Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Perekonomian

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Fasilitasi pengembangan potensi perekonomian	Laporan Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Perekonomian
2	Melakukan Fasilitasi Kegiatan Promosi Daerah	Jumlah Monev Fasilitasi Permodalan UMKM	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Perekonomian
3	Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Permodalan UMKM	Jumlah Fasilitasi Promosi Produk UMKM	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Perekonomian

SASARAN 1 Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian

Indikator : Laporan Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Fasilitasi pengembangan potensi perekonomian	Laporan Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Perekonomian

Dalam rangka pengembangan dan penggalan potensi perekonomian telah dilakukan beberapa kegiatan konsultasi dan koordinasi yang melibatkan semua SKPD dan *stakeholder* terkait dalam rangka menggali potensi perekonomian di masing-masing desa dan kecamatan. Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan penggalan potensi perekonomian antara lain :

- Penggalan data dan potensi yang akan menjadi potensi unggulan daerah masih belum maksimal oleh SKPD Teknis

- Minimnya minat para pelaku usaha dalam melakukan eksplorasi terhadap potensi di daerahnya masing –masing.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan koordinasi yang lebih intens dengan SKPD Teknis
- Melakukan kerjasama dengan pihak akademisi atau bidang litbang di Kabupaten atau Provinsi tentang potensi unggulan daerah.

Rencana Aksi yang diperlukan

- Membentuk tim untuk menggali potensi perekonomian yang dapat dikembangkan
- Kerjasama dengan pihak ketiga untuk menganalisa setiap potensi perekonomian di beberapa desa yang menjadi sampel



Rapat Koordinasi dengan SKPD tentang penggalan Produk Potensi Unggulan

SASARAN 2 Melakukan Fasilitas Kegiatan Promosi Daerah

Indikator : Jumlah Monev Fasilitas Permodalan UMKM

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Melakukan Fasilitas Kegiatan Promosi Daerah	Jumlah Monev Fasilitas Permodalan UMKM	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Perekonomian

Program **GAPURA KAROMAH, KUR** dan **UMi** adalah sekian banyak dari beberapa program permodalan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Tanah Laut. Program **GAPURA KAROMAH** sendiri merupakan Program yang di usung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala yang mana hal tersebut di harapkan dapat menindaklanjuti Permasalahan dari Usaha Mikro Kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Tanah Laut yaitu karena Maraknya Pinjaman dengan Bunga Tinggi yang terasa mencekik dan memberatkan bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan ketentuan bantuan berupa Pinjaman Modal Usaha sesuai ketentuan.

Adapun Realisasi Pinjaman modal usaha sampai dengan Bulan Desember 2021 sebesar Rp 11.990.500.000,- (*sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima ratus ribu rupiah*), dengan jumlah debitur 1.454 orang yang bergerak di Bidang Pertanian, Peternakan, Perdagangan, Industri dan Perikanan yang masing-masing di dukung oleh SKPD Teknis yang membidangi. Selama masih dalam masa pandemi covid 19, dalam rangka menjaga NPL (*Non Performance Loan*) dan percepatan pemulihan ekonomi nasional ditingkat Kabupaten Tanah Laut, kepada semua debitur yang terdampak pandemi covid 19 masih bisa mengajukan program restrukturisasi dan akan dilakukan perubahan terhadap Perbup nomor 144 tahun 2021 tentang porsi skema dana yang disalurkan dengan yang diinvestasikan oleh penyalur.

Adapun kendala dalam pencapaian penyusunan laporan monev fasilitasi permodalan kepada UMKM antara lain :

- Tidak semua pelaku usaha di Kabupaten Tanah Laut terdaftar di SKPD pembina UMKM, sehingga data umkm tidak akurat.
- Para pelaku usaha mikro masih terbiasa dengan program bantuan pemerintah sehingga harus melakukan sosialisasi secara terus menerus
- Informasi tentang program permodalan dari perbankan belum diketahui oleh para pelaku usaha mikro di pedesaan

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Mengarahkan SKPD Teknis agar memaksimalkan penggalan data pelaku usaha di semua desa.
- Merencanakan kegiatan sosialisasi semua program permodalan dan mengarahkan pelaku usaha mikro untuk lebih mandiri dalam hal permodalan dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.

- Bekerjasama dengan pihak perbankan melakukan sosialisasi program KUR dan KUR Supermikro.

Rencana Aksi yang diperlukan

- Melakukan evaluasi pelaksanaan program Gapura Karomah, penyaluran KUR dan penyaluran UMi secara berkala
- Membuka layanan konsultasi terkait informasi permodalan Gapura Karomah, KUR dan UMi pada masing – masing SKPD pembina UMKM dan di Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA

Rekomendasi :

- Evaluas Program Permodalan bagi pelaku usaha mikro dilaksanakan lebih spesifik dengan melakukan analisa dampak program terhadap perkembangan usaha mikro.
- Perlu disusun SOP penanganan debitur macet pada program Gapura Karomah, sehingga tidak menjadi beban NPL pada Bank Penyalur (BPR Tala)



SASARAN 3 Fasilitas Penyusunan Kebijakan Permodalan UMKM

Indikator : Jumlah Fasilitas Promosi Produk UMKM

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
3	Fasilitas Penyusunan Kebijakan Permodalan UMKM	Jumlah Fasilitas Promosi Produk UMKM	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Perekonomian

Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan penggalian potensi unggulan daerah telah dilakukan beberapa kegiatan promosi yang melibatkan semua SKPD dan *stakeholder* terkait dalam rangka memperkenalkan produk-produk UKM Tanah Laut di tingkat Lokal dan Nasional. Namun sejak terjadinya pandemi covid 19 diawal Maret 2020 sampai dengan sekarang kegiatan promosi yang berskala nasional Cuma dilaksanakan satu kali yaitu event APKASI Otonomi Expo 2021 yang dilaksanakan di Jakarta. Tidak kendala yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan promosi produk. Kegiatan promosi pada even APKASI Otonomi Expo berjalan lancar dan sukses, terutama untuk produk kain sasirangan yang menarik banyak peminat dari pengunjung Rencana Aksi yang diperlukan

- Mengoptimalkan Tim Promosi Daerah untuk dapat lebih kreatif dalam memperkenalkan produk unggulan daerah
- Mendorong pelaku UMKM untuk belajar melakukan promosi secara digital menggunakan semua media sosial yang mendukung

Rekomendasi :

- Perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk menggali potensi unggulan daerah lainnya yang bernilai ekonomi lebih tinggi dan memiliki ciri khas yang berbeda dengan daerah lain.
- Variasi produk-produk yang disertakan pada pameran diharapkan lebih banyak lagi untuk menarik minat pengunjung.
- Perlu dilakukan pendampingan dalam proses transpormasi promosi produk unggulan melalui media digital dan mengarahkan pada penjualan secara online.



Rapat Koordinasi Persiapan Mengikuti Pameran APKASI Otonomi Expo 2021

❖ Analisa Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Untuk capaian Indikator sasaran pada Kasubbag Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dilaksanakan melalui program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD dengan Pagu Rp 466.142.336,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 252.715.832,- atau 54,21% yang didukung oleh 2 org SDM.

Analisa Capaian Kinerja Sub Bagian Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mengacu pada Indikator Sasaran Eselon III yaitu Presentase Permasalahan yang berhasil di tindak lanjuti dibidang Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan indikator sasaran Eselon IV sebagai berikut :

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia
Kepala Sub Bagian Badan Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP) 2021	REALISASI ANGGARAN (RP) 2021	%	SDM	Ket
1	Jumlah BUMD/BLUD yang dibina	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	466.142.336				
2	Dokumen analisis investasi Pemerintah Daerah kepada BUMD		- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	466.142.336	252.715.832	54,21	2 orang	
3	Jumlah dokumen BUMD/BLUD yang diverifikasi							

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat dilihat pada analisa sebagai berikut:

Tabel Capaian Sasaran dan Indikator
 Kasubbag Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Memfasilitasi kegiatan Pembinaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD/BLUD yang dibina	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
2	Melakukan verifikasi dan analisa BUMD yang akan menerima investasi Pemerintah	Jumlah Dokumen BUMD/BLUD yng diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
		Dokumen analisis investasi Pemerintah Daerah kepada BUMD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Kasubbag Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

SASARAN 1 Memfasilitasi Kegiatan Pembinaan BUMD dan BLUD

Indikator : Jumlah BUMD/BLUD yang dibina

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Memfasilitasi kegiatan Pembinaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD/BLUD yang dibina	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Dalam rangka peningkatan kinerja BUMD agar dapat menghasilkan laba dan memberikan PAD kepada pemerintah daerah, Bagian Perkonomian, Adm Pembangunan dan SDA melaksanakan kegiatan fasilitasi terkait penyelesaian permasalahan, pendampingan dan fasilitasi keperluan BUMD dan BLUD dengan Pemerintah Daerah

Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan BUMD antara lain:

- 1) Pelaksanaan FGD terkait penilaian aset milik Pemerintah Daerah yang akan disertakan sebagai Peyertaan Modal Pemerintah kepada PDAM. Tanah Laut
- 2) Melaksanakan FGD terkait pembahasan kondisi terakhir PD. Baratala Tuntung Pandang.
- 3) Melaksanakan penilaian RKAP 4 BUMD
- 4) Melaksanakan fit and proper test calon direksi BUMD PDAM. Tanah Laut periode 2022-2025

Adapun kendala dalam fasilitasi, pendampingan dan penyelesaian permasalahan Bina BUMD antara lain:

- BUMD masih kekurangan tenaga ahli dan terampil dalam menjalankan usahanya
- Sebagaimana BUMD belum berubah badan hukum sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan penyusunan kajian analisa kelayakan investasi pemerintah untuk menambah modal BUMD.
- Mendorong BUMD agar bekerja secara profesional dalam melakukan rekrutmen tenaga kerja

Rencana Aksi yang diperlukan

- Melakukan menginventarisir permasalahan dan kendala yang dihadapi pada Perusahaan Daerah.
- Melakukan fasilitasi pendampingan kepada BUMD yang akan melakukan penyusunan RKAP dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka oprasional perusahaan

Rekomendasi :

- Agar setiap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mempunyai target langkah-langkah kedepan.
- Perlunya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) supaya menginventarisir permasalahan dan kendala yang dihadapi pada Perusahaan Daerah.
- Perlunya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyampaikan progres kegiatan operasional.



Rapat Koordinasi Penilaian Aset PDAM Tanah Laut

SASARAN 2 Melakukan Verifikasi dan Analisa BUMD yang Akan Menerima Investasi Pemerintah

Indikator 1 : Jumlah Dokumen BUMD/BLUD yang Diverifikasi

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Melakukan verifikasi dan analisa BUMD yang akan menerima investasi Pemerintah	Jumlah dokumen BUMD/BLUD yang diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Dalam rangka terbinanya manajemen perusahaan daerah di Kabupaten Tanah Laut sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah laut, maka perlu dilakukan verifikasi data Rancangan Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang merupakan salah satu dokumen yang harus dilengkapi oleh BUMD sebagai dasar untuk menjalankan kegiatan operasional. Asistensi dan verifikasi RKAP ini sendiri dilakukan dengan tujuan apa yang menjadi target utama dari BUMD tergambarkan dalam RKAP tersebut dan diyakini dapat membantu BUMD dalam mencapai tujuannya

yaitu untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya sehingga dapat memberikan PAD bagi daerah

Adapun 4 (empat) RKAP Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dilakukan asistensi pada tahun 2021, yaitu;

1. RKAP PT. BPR Tanah Laut;
2. RKAP PD. Baratala Tuntung Pandang;
3. RKAP PDAM. Tanah Laut;
4. RKAP PT. Tanah Laut Manuntung;

Proses asistensi dan verifikasi RKAP ke empat BUMD tersebut melibatkan tim dari akademisi sekaligus penasehat investasi Kabupaten Tanah Laut yaitu LPPM STIE Indonesia Banjarmasin

Adapun kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan hasil asistensi RKAP antara lain:

- Belum lengkapnya data pelaporan dari BUMD.
- RKAP yang disusun oleh BUMD masih bersifat umum
- Sebagian BUMD belum mempunyai Rencana Bisnis yang seharusnya menjadi pedoman penyusunan RKAP.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Memberikan tenggat waktu dan pendampingan kepada BUMD yang melakukan perbaikan RKAP
- Mengusulkan kepada pimpinan agar dilakukan peningkatan kapasitas manajemen BUMD dengan fasilitasi Pemerintah Daerah.

Rencana Aksi yang diperlukan

- Membuat telahaan kepada pimpinan terkait rencana peningkatan kapasitas manajemen BUMD kepada pimpinan.
- Sehubungan dengan sering terjadinya penyampian perbaikan RKAP pada saat tenggat waktu pengesahan RKAP yang menjelang akhir tahun, maka diperlukan pembuatan time schedule penyusunan dan perbaikan RKAP setelah asistensi.

Rekomendasi :

- Sehubungan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), agar masing-masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mencantumkan langkah-langkah jangka pendek, dan langkah-langkah strategis.

- Terkait tentang penyusunan dokumen analisis investasi oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD, pihak BUMD seharusnya memberikan data potensi dan proyeksi usaha yang potensial
- Setiap BUMD harus mempunyai Rencana Bisnis lima tahun kedepan



Rapat Koordinasi Penilaian dan Asistensi RKAP BUMD

SASARAN 2 Melakukan Verifikasi dan Analisa BUMD yang Akan Menerima Investasi Pemerintah

Indikator 2 : Dokumen Analisis Investasi Pemerintah Daerah Kepada BUMD

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Melakukan verifikasi dan analisa BUMD yang akan menerima investasi Pemerintah	Dokumen analisis investasi Pemerintah Daerah kepada BUMD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Kasubbag Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Indikator sasaran yang kedua adalah kegiatan penyusunan dokumen analisis investasi Pemerintah Daerah kepada BUMD. Dalam menyusun dokumen analisis investasi, Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA bekerjasama dengan pihak dari akademisi yaitu FEB Universitas Lambung Mangkurat dan LPPM STIE Indonesia Banjarmasin. Dokumen analisis investasi yang disusun pada tahun 2021 yaitu:

- 1) Kajian Kelayakan Oprasional PD. Baratala Tuntung Pandang yang dilaksanakan bekerjasama dengan FEB Universitas Lambung Mangkurat
- 2) Kajian Analisa/kelayakan penyertaan modal pemerintah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang penyusunannya bekerja sama dengan LPPM STIE Indonesia

Adapun kendala dalam penyusunan laporan terkait penyusunan dokumen analisis investasi antara lain:

- Belum lengkapnya data pelaporan dari BUMD.
- BUMD PD. Baratala TP yang akan ditambah penyertaan modalnya masih belum memiliki rencana bisnis
- Masih banyak permintaan data dari pihak legislatif terkait tambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Disarankan kepada PD. Baratala TP agar segera menyusun rencana bisnis
- Memfasilitasi antara pihak legislatif dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan untuk membangun komunikasi yang lebih efektif.

Rencana Aksi yang diperlukan

- Melakukan komunikasi dengan tim akademisi untuk membantu pihak BUMD menyusun Rencana Bisnis.
- Memberikan data dukung yang akurat tentang kontribusi yang telah di berikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan kepada pihak legislatif.

Rekomendasi :

- Monitoring secara berkala dilakukan oleh Tim Pembina BUMD terkait keigatan penyusunan Rencana Bisnis.
- Tim Pembina BUMD terus melakukan monitoring dan komunikasi dengan pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan tentang progress penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Perlunya dilaksanakan expose oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dengan menghadirkan pihak Pemerintah Daerah dan pihak legislatif.



Rapat Koordinasi terkait Rencana Penyertaan Modal Pemerintah kepada Bank Kalsel

❖ **Analisa Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam**

Untuk capaian Indikator sasaran pada Kasubbag Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam dilaksanakan melalui program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dengan Pagu Rp 254.464.786,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 222.913.632,- atau 87,60% yang didukung oleh 3 org SDM.

Analisa Capaian Kinerja Sub Bagian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam yang mengacu pada Indikator Sasaran Eselon III yaitu persentase permasalahan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi penyelesaiannya dengan indikator sasaran Eselon IV sebagai berikut :

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia
Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP) 2021	REALISASI ANGGARAN (RP) 2021	%	SDM	Ket
1	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	254.464.786	222.913.632	87,60%	3 Orang	
2	Laporan Kegiatan Fasilitas Bidang Sumber Daya Alam		- Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	254.464.786	222.913.632	87,60%	3 Orang	
3	Laporan Kegiatan Pengendalian Inflasi							

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam dapat dilihat pada analisa sebagai berikut :

Tabel Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Melakukan monitoring dan evaluasi di Bidang Pembangunan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
2	Memfasilitasi kegiatan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan kegiatan Fasilitas Bidang Sumber Daya Alam	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
3	Memfasilitasi kegiatan distribusi perekonomian	Laporan Kegiatan Pengendalian Inflasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Kasubbag Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam

SASARAN 1 Melakukan Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Pembangunan

Indikator : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Melakukan monitoring dan evaluasi di Bidang Pembangunan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Sasaran yang pertama pada Subbag Adm Pembangunan dan SDA adalah monitoring dan Evaluasi bidang Pembangunan dengan indikator sasaran laporan monev bidang pembangunan, adapun kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan bahan untuk penyusunan laporan tersebut antara lain :

1. Mengumpulkan bahan dan peraturan pendukung yang diperlukan untuk penyusunan kebijakan.
2. Mengadakan rapat koordinasi dengan SKPD yang melaksanakan kegiatan pembangunan fisik
3. Melakukan koordinasi dengan Bappeda dalam hal permintaan data pelaporan kemajuan realisasi Dana DAK

4. Melakukan komunikasi melalui surat agar SKPD yang melaksanakan kegiatan pembangunan fisik agar menyampaikan laporan perkembangan realisasi anggaran pembangunan.

Adapun kendala dalam penyusunan laporan laporan monev bidang pembangunan antara lain :

- Banyak SKPD yang belum tertib dalam menyampaikan laporan
- Laporan yang disampaikan oleh SKPD belum lengkap
- Banyak SKPD yang masih lambat dalam penyerapan dana DAK

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan sosialisasi tentang jadwal pelaporan realisasi anggaran pembangunan fisik
- Membuat format yang baku form pelaporan dengan berpedoman pada format pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan

Rencana Aksi yang diperlukan

- Menyusun jadwal rapat/sosialisasi
- Membentuk WA Group untuk memudahkan komunikasi



Rapat Koordinasi

SASARAN 2 Memfasilitasi Kegiatan Bidang Sumber Daya Alam

Indikator : Laporan Kegiatan Fasilitas Bidang Sumber Daya Alam

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Memfasilitasi kegiatan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan kegiatan Fasilitas Bidang Sumber Daya Alam	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Sasaran yang kedua adalah Fasilitas kegiatan bidang sumber daya alam dengan indikator sasaran Laporan kegiatan Fasilitas Bidang Sumber Daya Alam. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mengumpulkan bahan pelaporan kegiatan Fasilitas Bidang Sumber Daya Alam antara lain adalah:

- 1) Mengumpulkan bahan dan peraturan pendukung yang diperlukan untuk penyusunan kebijakan
- 2) Mengadakan rapat koordinasi dengan SKPD yang terkait dengan bidang sumber daya alam secara berkala
- 3) Menghimpun laporan produksi pertanian, perkebunan dan tanaman hortikultura
- 4) Menghimpun laporan produksi hasil peternakan ayam pedaging, peternakan sapi dan peternakan lainnya yang menjadi binaan SKPD bidang peternakan
- 5) Menghimpun laporan produksi bidang perikanan tambak dan perikanan tambak
- 6) Memfasilitasi kegiatan yang terkait sumberdaya alam yang berasal dari Bagian Sumber Daya Alam Biro Perekonomian dan instansi vertikal lainnya

Adapun kendala dalam penyusunan kegiatan Fasilitas Bidang Sumber Daya Alam antara lain :

- Banyak SKPD yang belum tertib dalam menyampaikan laporan
- Laporan yang disampaikan oleh SKPD belum lengkap

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan sosialisasi tentang jadwal pelaporan hasil produksi bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
- Membuat format yang baku form pelaporan dengan berpedoman pada format pelaporan Bagian Sumber Daya Alam Biro Perekonomian

Rencana Aksi yang diperlukan

- Menyusun jadwal rapat/sosialisasi

- Membentuk WA Group untuk memudahkan komunikasi

SASARAN 3 Memfasilitasi Kegiatan Distribusi Perekonomian

Indikator : Laporan Kegiatan Pengendalian Inflasi

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
3	Memfasilitasi kegiatan distribusi perekonomian	Laporan Kegiatan Pengendalian Inflasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Kasubbag Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Sasaran yang ketiga pada subbag Administrasi Pembangunan dan SDA adalah Fasilitas kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Monitoring evaluasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Tanah Laut. Untuk mencapai sasaran tersebut telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain:

A. Fasilitas Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah

- Melakukan Monev kegiatan pasar murah di setiap desa pada saat kegiatan manunggal tuntung pandang dan kondisional sesuai permintaan pihak desa untuk menghadirkan pangan yang murah kepada masyarakat, dalam kegiatan tersebut Pemerintah Daerah memberikan subsidi dengan menjual paket sembako murah untuk kalangan masyarakat kurang mampu (total 42 kali pelaksanaan pasar murah) untuk dilaporkan kepada Tim pengendalian inflasi pusat (TPIP);
- Fasilitas Sidak pasar oleh Bupati Tanah Laut pada saat menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha serta pada saat Natal dan Tahun Baru;
- Melakukan MoU dengan Perusahaan Perikanan Tambak PT. SURI TANI Pemuka untuk budi daya ikan haruan / gabus, tindak lanjut akan dilaksanakan oleh SKPD teknis yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
- Melakukan monitoring distribusi Gas LPG 3 kg Bersubsidi yang sering menjadi penyebab inflasi bagi Kalimantan Selatan

B. Fasilitas Tim Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Program KUR

- Melaksanakan rapat koordinasi evaluasi penyaluran KUR di Tanah Laut setiap akhir semester

- Melakukan upload data calon penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) potensial untuk dapat dibiayai KUR kedalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dengan penanggungjawab Pemerintah Kabupaten
- Melakukan pendampingan/monitoring dan evaluasi atas kredit yang diterima atau calon yang belum berhasil mengakses kredit
- Membuat baliho dan spanduk untuk mensosialisasikan KUR di setiap Desa

Capaian serapan KUR ditahun 2021 menurut data SIKP adalah sebesar Rp 405,630,782,329,- (empat ratus lima milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah), jumlah ini meningkat sebesar Rp 95.956.312.229 (sembilan puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) atau meningkat sebesar 30,98%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan ini antara lain:

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan monev seperti alat transportasi mobil untuk ke desa – desa yang terpencil.
2. Masih kurangnya pemahaman para pelaku usaha tentang persyaratan KUR dan tata cara mengajukannya.
3. Banyak data UMKM di SKPD teknis yang mempunyai binaan pelaku UKM belum menginput datanya ke SIKP.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Memaksimalkan kerjasama antar SKPD yang tergabung dalam Tim Monitoring KUR agar dapat melakukan monitoring debitur KUR pada saat melakukan pembinaan UMKM.
- Melakukan sosialisasi tentang penginputan data pelaku UMKM sek sistem aplikasi
- Meminta para SKPD mengirimkan perwakilannya untuk menjadi admin SIKP

Rencana Aksi yang diperlukan

- Kerjasama monitoring debitur KUR dengan SKPD Teknis
- Menyusun jadwal rapat dan sosialisasi penggunaan aplikasi SIKP.



HLM TPID Kab. Tanah Laut Semester II Tahun 2021



Penandatanganan MoU antara Pemerintah Kab. Tanah Laut dengan PT. Suri Tani Pemuka tentang Pemanfaatan Lahan Tambak untuk Budidaya Haruan

4. Perbandingan Realisasi Capaian Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021

Tabel Realisasi Capaian Sasaran Strategis
 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2018-2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2020	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
1	2	3	4	5	6
Eselon II					
Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	82,33	87,12	107.5%
Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	1	5	6	600%
Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	ST 3,100	Nilai belum terbit	Masih dalam tahap evaluasi	Masih dalam tahap evaluasi
Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	85	55%	70%	82,35%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	95	92,5%	65%	68,42%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	82	84,65	86.81	105.8%
	Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3,6	Masih dalam tahap Baseline SPIP	Masih dalam tahap Baseline SPIP	Masih dalam tahap Baseline SPIP
Meningkatnya tata kelola Kepemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	90	91,24	91,71	101,9 %
	Nilai ZI Sekretariat Daerah	83	84,64	87,45	105,4 %
Meningkatnya kebijakan perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diterapkan	100%	100%	100%	100%

*Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021



SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2018-2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2020	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
1	2	3	4	5	6
Eselon III					
Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/SKPD/ Masyarakat dengan baik	100%	82,33%	80%	80%
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	100%	82%	76,5%	76,5%
	Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga	Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	100%	175%	416%	416%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	80%	92,5%	65%	81,25%
Meningkatnya Nilai Area Perubahan RB SKPD	Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60	30%	55%	70%	233,33%
Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80	100%	100%	92,5%	92,5%
	Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	95%	100%	100%
Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya layanan administrasibidang perencanaan dan keuangan	Persentase layanan administrasi bidang perencanaan dan keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan lingkup Sekretariat Daerah	Persentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja dan keuangan yang sesuai aturan	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	82	84,65	86,81	105,86%
	Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3,6	Masih dalam tahap <i>Baseline</i> SPIP	Masih dalam tahap <i>Baseline</i> SPIP	Masih dalam tahap <i>Baseline</i> SPIP
Meningkatnya pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada bagian-bagian lingkup Setda sarana prasarana/asset milik Setda terkelola dengan baik	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di	Persentase Pelayanan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di bidang Tata Usaha	100%	100%	100%	100%

SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2018-2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2020	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
1	2	3	4	5	6
bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian				
Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai komponen area perubahan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah	90	91,24	91,71	101,9 %
	Nilai komponen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah	83	84,64	87,45	105,4 %
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standar an tepat waktu	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintahan melalui system LPSE	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintahan melalui system LPSE	75%	65%	57.5%	76.6%
Meningkatnya Kompetensi SDM dalam Proses PBJ yang Berkualitas	Persentase SDM yang Kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Efisiensi pagu Pengadaan Barang jasa	Persentase Efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	100%	-	75%	75%
Meningkatnya informasi produk hukum	Persentase informasi produk hukum	100%	93,11%	100%	100%
Meningkatnya harmonisasi produk hukum	Persentase produk yang harmonis	100%	100%	100%	100%
Tingkat penanganan kasus/perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani	100%	100%	100%	100%
Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM	75	79,64	-	-
Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolan dan dokumentasi	Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	100%	100%	100%	100%
	Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani	100%	100%	100%	100%
	Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu daerah yang terlayani keprokolannya	100%	100%	100%	100%
	Persentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%	0%
Meningkatnya Pembinaan Lembaga sosial dan keagamaan	Persentase Peningkatan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina	100%	99,83%	96,43%	96,36%
Meningkatnya layanan bantuan social keagamaan	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan	100%	84,93%	98,81%	99,22%

SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2018-2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2020	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya peran serta Organisasi/lembaga keagamaan/SKPD dalam Bidang Pemuda dan Olahraga	Persetanse hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	100%	11,77%	72,23%	100%
Meningkatnya penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja positif	75%	50%	75%	100%
Meningkatnya pelaku UMKM yang terfasilitasi permodalan	Persentase UMKM yang terfasilitasi permodalan	75%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas manajemen data administrasi pembangunan yang proporsional	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan progres pembangunan fisik	80%	-	100%	100%

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021*

5. Laporan Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021

Laporan pengukuran kinerja Sekretariat Daerah dimaksudkan untuk memberikan gambaran dalam hal pencapaian kinerja untuk Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini :

CAPAIAN IKU ESELON II

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun Lalu	Target	Capaian					Target Akhir Renstra	2021 terhadap target akhir Renstra (%)	Penanggung Jawab (Bagian)	Keterangan
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Realisasi %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,6%	81	0	0	0	87.12	87.12	82	106.2%	Umum	
2	Inovasi Publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	500%	1	0	0	0	6	6	1	600%	Organisasi	
3	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	-	ST 3,100	0	0	0	0	0	ST 3,150	0	Pemerintahan	
4	Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minima B	78,57	85	0	0	70	0	70	100%	70%	Organisasi	
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB		95	0	0	65%	0	65%	100%	65%	Organisasi	
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	84,65	82	0	0	86.81	0	86.81	85	102.12%	Perencanaan dan Keuangan	
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	-	3,6	0	0	0	0	0	3,7	3,7	Perencanaan dan Keuangan	Masih dalam tahap Baseline SPIP
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	91.24	90	0	0	91.71	0	91.71	95	96,05%	Umum	
		Nilai ZI Sekretariat Daerah	84.65	83	0	0	87.45	0	87.45	85	102.8%	Umum	

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun Lalu	Target	Capaian					Target Akhir Renstra	2021 terhadap target akhir Renstra (%)	Penanggung Jawab (Bagian)	Keterangan
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Realisasi %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diterapkan	100%	100%	25%	20%	30%	25%	100%	100%	100%	Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	

*Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021

CAPAIAN IKU ESELON III

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun Lalu	Target	CAPAIAN					Target Akhir Renstra	2021 terhadap target akhir Renstra (%)	Penanggung Jawab	Hasil Evaluasi
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Realisasi %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/SKPD/Masyarakat dengan baik	86,83%	100%	0	0	20%	60%	80	100	80%	Umum	
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Aset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada bagian-bagian lingkup Setda dikelola dengan baik	92,57%	100%	25%	25%	20%	30%	100%	100%	100%	Umum	
3	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Kebijakan Pemantau dan Evaluasi di bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Persentase Pelayanan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	100%	100%	25%	30%	25%	30%	100%	100%	100%	Umum	
4	Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai komponen area perubahan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah	91.24	90	0	91,71	0	0	91.71	95	96.05%	Umum	



		Nilai komponen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah	84.65	83	0	0	87,45	0	105.4%	85	102.8%	Umum	
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	82%	100%	16%	14%	20%	26,5%	76,5%	100%	76.5%	Pemerintahan	
		Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/ Kabupaten yang diselenggarakan	70%	100%	0	0	50%	50%	100%	100%	100%	Pemerintahan	
6	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Kewilayahan	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	100%	100%	100%	0	0	0	100%	100%	100%	Pemerintahan	
7	Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	100%	100%	0	100%	0	0	100%	100%	100%	Pemerintahan	
8	Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga	Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	175%	100%	33,33%	150%	150%	82,67%	416%	100%	416%	Pemerintahan	
9	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	92,5%	80%	0	0	65%	0	65%	100%	65%	Organisasi	
10	Meningkatnya Nilai Area Perubahan RB SKPD	Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB Minimal 60	55%	30%	0	0	70%	0	70%	50%	140%	Organisasi	
11	Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80	100%	100%	0	0	92,5%	0	92,5%	100%	92,5%	Organisasi	
		Persentase SKPD yang memiliki	95%	100%	0	75	25	0	100%	100%	100%	Organisasi	



		Standar Operasional Prosedur (SOP)											
12	Meningkatnya efektivitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	100%	100%	100%	0	0	0	100%	100%	100%	Organisasi	
13	Meningkatnya layanan administrasi bidang perencanaan dan keuangan	Persentase layanan administrasi bidang perencanaan dan keuangan tepat waktu	100%	100%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	100%	Perencanaan dan Keuangan	
14	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan lingkup Sekretariat Daerah	Persentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja dan keuangan yang sesuai aturan	100%	100%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	100%	Perencanaan dan Keuangan	
15	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	84,65%	82%	0	0	86.81	0	86.81	85	102,12%	Perencanaan dan Keuangan	
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3,7	3,6	0	0	0	0	0	3.7	Masih dalam tahap Baseline SPIP	Perencanaan dan Keuangan	Masih dalam tahap Baseline SPIP
16	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	39%	31%	100%	100%	100%	100%	100%	Pengadaan Barang/Jasa	
17	Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	55%	75%	5%	37.5%	45%	57.5%	57.5%	100%	57.5%	Pengadaan Barang/Jasa	
18	Meningkatnya Kompetensi SDM	Persentase SDM yang Kompeten	0	100%	5%	37.5%	38.7%	100%	100%	100%	100%	Pengadaan Barang/Jasa	



	dalam Proses PBJ yang Berkualitas	dalam Pengadaan Barang/Jasa											
19	Meningkatnya Efisiensi pagu Pengadaan Barang jasa	Persentase Efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	-	100%	-	-	56.3%	75%	75%	100%	75%	Pengadaan Barang/Jasa	
20	Meningkatnya informasi produk hukum	Persentase informasi produk hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Hukum	
21	Meningkatnya harmonisasi produk hukum	Persentase produk yang harmonis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Hukum	
22	Tingkat penanganan kasus/perkara hokum di lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Hukum	
23	Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM	79,64%	Nilai 75	0	0	0	0	0	Nilai 76	0	Hukum	
24	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotolan dan dokumentasi	Persentase penyebarluasan informasi/ pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	100%	100%	22,6%	27,40%	24,30%	25,70%	100%	100%	100%	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
		Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani	100%	100%	15%	35%	36,20%	13,80%	100%	100%	100%	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
		Persentase kegiatan KDH/WKDH SKPD/ tamu daerah yang terlayani keprokolannya	100%	100%	18%	59%	13%	10%	100%	100%	100%	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
		Persentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	100%	100%	29,2%	42%	15%	13,80%	100%	100%	100%	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
		Persentase pengaduan	0%	100%	0	0	0	0	100%	100%	100%	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	



		masyarakat yang ditindaklanjuti											
25	Meningkatnya Pembinaan Lembaga sosial dan keagamaan	Persentase Peningkatan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina	84,93%	100%	0	25,50%	70,90%	0%	96,40%	100%	96,40%	Kesejahteraan Rakyat	
26	Meningkatnya layanan bantuan sosial keagamaan	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan	99,94%	100%	0	0	50%	49,22%	99,22%	100%	99,22%	Kesejahteraan Rakyat	
27	Meningkatnya peran serta Organisasi/lembaga keagamaan/SKPD dalam Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	11,77%	100%	7,69%	23,08%	15,38%	53,85%	100%	100%	100%	Kesejahteraan Rakyat	
28	Meningkatnya penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	100%	100%	10%	45%	75%	100%	100%	100%	100%	Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	
29	Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja positif	66,67%	75%	66,67%	66,67%	50%	75%	75%	100%	75%	Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	
30	Meningkatnya pelaku UMKM yang terfasilitasi permodalan	Persentase UMKM yang terfasilitasi permodalan	85,56%	75%	65,46%	65,46%	50%	75%	75%	100%	75%	Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	
31	Meningkatnya kualitas manajemen data administrasi pembangunan yang proporsional	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan progres pembangunan fisik	-	80%	20%	20%	20%	20%	80%	80%	100%	Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	



CAPAIAN IKU ESELON IV

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun Lalu	Target	Capaian					Target Akhir Renstra	2021 terhadap target akhir Renstra (%)	Bagian	Hasil Evaluasi
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Realisasi %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana/aset Sekretariat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana/aset milik Setda yang terpelihara dan terkelola dengan baik	100%	614 Jenis	154 Jenis	160 Jenis	200 Jenis	100 Jenis	100%			Umum	
2	Melaksanakan Pelayanan Urusan pimpinan/Bagian/SKP D/ dan Masyarakat	Jumlah layanan pimpinan/Bagian/ SKPD dan Masyarakat terlayani dengan baik	100%	70.822 Ok	24.4%	25%	24.4%	25%	98.8%			Umum	
3	Melaksanakan Pelayanan bidang transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah layanan transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah terlayani dengan baik	100%	100%	18%	22%	20%	30%	90%			Umum	
4	Melaksanakan pengadaan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset yang didistribusikan di Lingkup Sekretariat Daerah	100%	91 Jenis	0 Jenis	91 Jenis	0	0	100%			Umum	
5	Melaksanakan Pengelolaan, Pencatatan Aset dan Penghapusan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset Sekretariat Daerah yang terkelola dan tercatat dengan baik	100%	2.468 Jenis	0	2.468 Jenis	0	0	100%			Umum	
6	Melaksanakan Rumusan Analisa Kebutuhan Barang di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen analisa kebutuhan barang berupa rencana kebutuhan barang milik daerah	77.77%	9 Dokumen	0	9 Dokumen	0	0	100%			Umum	



		(RKBMD) sesuai standar dan kebutuhan di lingkup Sekretariat Daerah											
7	Memberikan pelayanan Surat Menyurat lingkup Setda sesuai SOP	Jumlah SKPD/Bagian lingkup Setda yang terlayani administrasi surat menyurat	100%	54	8	15	22	9	100%			Umum	
8	Memberikan pelayanan Administrasi Kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah yang terselesaikan	100%	250 Kali	75 Kali	80 Kali	50 Kali	55 Kali	104%			Umum	
9	Memberikan pelayanan Administrasi Pimpinan lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi pimpinan daerah (KDH/WKDH/ Sekda)	100%	250 Kali	63	75	71	52	104.4%			Umum	
10	Pengelolaan dan penyimpanan arsip lingkup Setda	Jumlah arsip yang terkelola sesuai SOP	100%	3.500 Surat	811	1031	891	785	100.51%			Umum	
11	Melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen area perubahan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	91.24	126 Dokumen	0	0	115 Dokumen	0	91.26%			Umum	
12	Melaksanakan Zona Integritas di lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah	84.65	96 Dokumen	0	0	90 Dokumen	0	93.75%			Umum	
13	Memfasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintah umum	Jumlah laporan hasil penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan umum yang berhasil difasilitasi	82%	50 Kali	8 Kali	7 Kali	9 Kali	15 kali	78%			Pemerintahan	
14	Memfasilitasi kegiatan perayaan Hari Besar Nasional dan Kabupaten	Jumlah kegiatan perayaan Hari Besar Nasional dan Kabupaten yang	70%	2 Kegiatan	0	0	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%			Pemerintahan	



		berhasil difasilitasi dengan baik											
15	Memfasilitasi kegiatan Forkopimda	Jumlah laporan hasil fasilitasi kegiatan Forkopimda	-	12 Kali	0	4 Kali	1 Kali	4 Kali	75%			Pemerintahan	
16	Penyusunan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Jumlah Dokumen penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	100%			Pemerintahan	
17	Memfasilitasi kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negri	Jumlah dokumen kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negri dan Lembaga di Luar Negri yang berhasil difasilitasi	175%	6 Dokumen	2 Dokumen	9 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	416%			Pemerintahan	
18	Melakukan pembinaan administrasi Bidang Kewilayahan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Kecamatan yang dibina	100%	11 Kali	2 Kali	4 Kali	3 Kali	2 Kali	100%			Pemerintahan	
19	Memfasilitasi penyelesaian penegasan batas antar Daerah dan Kecamatan	Jumlah laporan penyelesaian penegasan batas antar Daerah dan Kecamatan yang difasilitasi	100%	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	0	100%			Pemerintahan	
20	Pelaksanaan penataan kelembagaan yang efektif	Jumlah SKPD yang telah memiliki uraian tugas rinci dan jelas	100%	40 SKPD	40	-	-	-	100%			Organisasi	
		Jumlah SKPD yang memiliki SOTK yang jelas	100%	40 SKPD	40	-	-	-	100%			Organisasi	
21	Pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan	Jumlah perangkat daerah yang memiliki informasi jabatan	100%	40 SKPD	40	-	-	-	100%			Organisasi	



		Jumlah perangkat daerah yang memiliki evaluasi jabatan	100%	40 SKPD	40	-	-	-	100%			Organisasi	
		Jumlah perangkat daerah yang dianalisis beban kerja	100%	40 SKPD	40	-	-	-	100%			Organisasi	
		Jumlah perangkat daerah yang memiliki standar kompetensi jabatan	100%	40 SKPD	-	-	40	-	100%			Organisasi	
22	Penguatan Pelayanan Publik	Jumlah unit pelayanan publik yang melaksanakan standar pelayanan publik	100%	3 SKPD	0	3	0	0	100%			Organisasi	
		Jumlah SKPD yang berpartisipasi pada Inovasi pelayanan publik	100%	5 SKPD	0	0	5	0	100%			Organisasi	
23	Penguatan Tata Laksana	Jumlah SKPD yang sudah memiliki SOP	100%	20 SKPD	0	40 SKPD	0	0	200%			Organisasi	
		Jumlah regulasi standarisasi pedoman kerja	100%	5 Perbup	4 SK	0	0	0	80%			Organisasi	
24	Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja Bupati Tanah Laut sesuai Permenpan 53 Tahun 2014	Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun sesuai Pemenpan 53 Tahun 2014	100%	1 Dokumen	1	0	0	0	100%			Organisasi	
25	Pelaksanaan Pembinaan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah SKPD yang di diasistensi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	100%	40 SKPD	40	0	0	0	100%			Organisasi	
26	Penguatan Sistem Reformasi Birokrasi	Jumlah SKPD yang dibina terkait pelaksanaan reformasi birokrasi	100%	40 SKPD	0	10	0	4	100%			Organisasi	
27	Menyusun bahan perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	100%	7 Dokumen	25%	25%	25%	25%	100%			Perencanaan dan Keuangan	



28	Melaksanakan evaluasi di bidang perencanaan	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi	100%	1 Dokumen	25%	25%	25%	25%	100%			Perencanaan dan Keuangan	
29	Melaksanakan penatausahaan keuangan	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan anggaran	100%	1 Dokumen	25%	25%	25%	25%	100%			Perencanaan dan Keuangan	
30	Melaksanakan evaluasi di bidang keuangan	Jumlah laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan	100%	3 Dokumen	25%	25%	25%	25%	100%			Perencanaan dan Keuangan	
31	Menyusun Laporan LKPJ dan LPPD Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen laporan LKPJ dan LPPD Sekretariat Daerah	100%	1 Dokumen	10%	25%	25%	40%	100%			Perencanaan dan Keuangan	
32	Menyusun Laporan SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen laporan SAKIP Sekretariat Daerah	100%	1 Dokumen	10%	25%	25%	40%	100%			Perencanaan dan Keuangan	
33	Menyusun SPIP Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen Laporan SPIP Sekretariat Daerah	100%	1 Dokumen	0	0	0	0	0			Perencanaan dan Keuangan	
34	Melakukan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya	Jumlah sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya yang dikelola	100%	360 Kali	90 Hari	90 Hari	90 hari	90 hari	100%			Pengadaan Barang/Jasa	
35	Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	Jumlah paket pengadaan yang masuk dalam LPSE sesuai prosedur	100%	150 Paket	20 Paket	82 Paket	94 Paket	52 Paket	165.3%			Pengadaan Barang/Jasa	
36	Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah pemilihan penyedia Barang/Jasa yang difasilitasi	100%	150 Paket	20 Paket	82 Paket	94 Paket	52 Paket	165.3%			Pengadaan Barang/Jasa	
37	Melakukan pendampingan SKPD dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	Jumlah SKPD yang didampingi dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	100%	40 SKPD	30 SKPD	20 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	100%			Pengadaan Barang/Jasa	



38	Melakukan sosialisasi/bimbingan teknis SKPD dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	Jumlah pelaku pengadaan barang/jasa yang mengikuti sosialisasi/bimtek PBJ Pemerintah	100%	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	100%			Pengadaan Barang/Jasa	
39	Memfasilitasi peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam pengelolaan barang/jasa	100%	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	100%			Pengadaan Barang/Jasa	
40	Mengoreksi, sinkronisasi dan Fasilitasi Penyusunan produk hukum pengaturan	Jumlah produk hukum pengaturan yang dikoreksi atau yang diharmonisasi	120,51%	200	23	52	89	135	67,5%			Hukum	
41	Melakukan fasilitasi dan harmonisasi Peraturan Daerah sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik	Jumlah produk hukum daerah yang telah difasilitasi dan diharmonisasi sesuai ketentuan perundang-undangan	36,84%	19	1	6	1	1	47,37%			Hukum	
42	Fasilitasi kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama, naskah perjanjian hibah Daerah atau naskah keperdataan lainnya	Jumlah kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama, naskah perjanjian hibah daerah atau naskah keperdataan lainnya yang ditelaah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	124,25%	400	14	372	387	421	105,25%			Hukum	
43	Fasilitasi penanganan masalah hukum dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Jumlah masalah hukum yang di fasilitasi	150%	4	2	3	3	5	125%			Hukum	
44	Fasilitasi Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KPP HAM)	Jumlah kegiatan Rencana Aksi Nasional Asasi Manusia (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KPP HAM)	100%	4	0	3	3	3	75%			Hukum	



45	Mengoreksi, sinkronisasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum penetapan	Jumlah produk hukum penetapan yang dikoreksi atau yang di harmonisasi	120,51%	900	369	615	218	203	176%			Hukum	
46	Dokumentasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Registrasi dan dokumentasi produk hukum daerah	100%	1000 Registrasi/ Dok	100%	100%	100%	100%	100%			Hukum	
		Jumlah Cetak Produk Hukum Daerah	100%	500 Eksemplar	0	0	250	500	100%			Hukum	
47	Pengelolaan informasi Hukum dan Publikasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Peserta yang mendapatkan Sosialisasi/ Penyuluhan Hukum	600%	250 Orang	1	2	1	0	80%			Hukum	
		Jumlah kegiatan pengelolaan website jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Kabupaten Tanah Laut	100%	365 Hari	90	181	273	365	100%			Hukum	
48	Memberikan pelayanan dokumentasi kepada KDH/WKDH	Jumlah pelayanan kehumasan KDH/WKDH	100%	200 Kali	30 Kali	80 Kali	50 Kali	40 Kali	100%			Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
49	Kegiatan KDH/WKDH/ terdokumentasikan	Jumlah pendokumentasian KDH/WKDH	100%	300 Kali	45 Kali	105 Kali	80 Kali	70 Kali	100%			Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
50	Pembangunan pemerintahan daerah yang terpublikasikan dan diberikan	Jumlah Publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah melalui media elektronik dan media sosial	100%	1.000 Berita	226 Berita	274 Berita	275 Kali	225 Kali	100%			Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
51	Kegiatan KDH/WKDH terlayani peliputan, pemberitaanya	Jumlah liputan pemberitaan kegiatan KDH/WKDH	100%	280 Kali	82 Kali	118 Kali	50 Kali	30 Kali	100%			Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
52	Fasilitas komunikasi pimpinan	Jumlah komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	100%	280 Kali	82 Kali	118 Kali	50 Kali	30 Kali	100%			Protokol dan Komunikasi Pimpinan	



53	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah dokumen pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	0%	1 Kali	0	0	0	0	100%			Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
54	Kegiatan keprotokol KDH/WKDH yang terlayani	Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang terlayani keprotokolannya	100%	430 Kali	82 kali	118 kali	130 Kali	100 Kali	100%			Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
55	Pelayanan tamu KDH/WKDH yang terlayani	Jumlah tamu KDH/WKDH yang terlayani dengan baik	100%	28 Kali	5 kali	9 kali	8 Kali	6 Kali	100%			Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
56	Melakukan Verifikasi dokumen pemberian hibah	Jumlah dokumen hibah yang diverifikasi	84,93%	89 Dokumen	55 Dokumen	0	0	0	61,80%			Kesejahteraan Rakyat	
57	Melakukan fasilitas pemberian bantuan/hibah	Jumlah kegiatan/lembaga social keagamaan yang diberikan bantuan	84,93%	55 Organisasi/ Lembaga	0	14 Organisasi/ Lembaga	39 Organisasi/ Lembaga	0	96,36%			Kesejahteraan Rakyat	
58	Melakukan pembinaan pendidikan keagamaan	Jumlah lembaga pendidik yang dibina	100%	4 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100%			Kesejahteraan Rakyat	
59	Melakukan fasilitasi kegiatan organisasi/lembaga keagamaan	Jumlah organisasi/lembaga keagamaan yang difasilitasi	100%	4 Organisasi	0	0	1 Organisasi	3 Organisasi	100%			Kesejahteraan Rakyat	
		Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100%	5 Kegiatan	0	2 Kegiatan	0	3 Kegiatan	100%			Kesejahteraan Rakyat	
60	Memberikan fasilitasi pembayaran intensif Guru TK/TPA, Madin/MIS, Ponpes, dan Penyuluh Agama	Jumlah Guru TK/TPA, Madin/MIS, Ponpes, dan Penyuluh Agama yang diberi Intensif	99,83%	3.090 Orang	0 Guru	0 Guru	3.090 Guru	3.066 Guru	99,22%			Kesejahteraan Rakyat	
61	Melakukan monitoring dan evaluasi lembaga Pendidik Keagamaan	Jumlah guru TK/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan penyuluh Agama yang di monitoring	99,83%	3.090 Orang	3.090 Guru	3.090 Guru	3.090 Guru	3.066 Guru	99,22%			Kesejahteraan Rakyat	
62	Melakukan fasilitasi Bidang Budaya Kegamaan	Jumlah kegiatan bidang budaya yang di fasilitasi	100%	1 Kegiatan	0	0	0	1	100%			Kesejahteraan Rakyat	



63	Fasilitasi pengembangan potensi perekonomian	Laporan Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian	100%	1 Dokumen	5%	40%	80%	100%	100%			Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	
64	Melakukan Fasilitasi Kegiatan Promosi Daerah	Jumlah Monev Fasilitasi Permodalan UMKM	100%	1 Dokumen	10%	40%	75%	100%	100%			Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	
65	Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Permodalan UMKM	Jumlah Fasilitasi Promosi Produk UMKM	100%	1 Dokumen	5%	25%	60%	100%	100%			Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	
66	Memfasilitasi kegiatan Pembinaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD/BLUD yang dibina	100%	1 Dokumen	10%	40%	75%	100%	100%			Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	
67	Melakukan verifikasi dan analisa BUMD yang akan menerima investasi Pemerintah	Jumlah dokumen BUMD/BLUD yang diverifikasi	100%	1 Dokumen	0	50%	70%	100%	100%			Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	
		Dokumen analisis investasi Pemerintah Daerah kepada BUMD	100%	2 Dokumen	10%	35%	80%	100%	100%			Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	
68	Melakukan monitoring dan evaluasi di Bidang Pembangunan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan	100%	1 Dokumen	10%	40%	60%	100%	100%			Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	
69	Memfasilitasi kegiatan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan kegiatan Fasilitasi Bidang Sumber Daya Alam	100%	1 Dokumen	10%	30%	60%	100%	100%			Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA	



70	Memfasilitasi kegiatan distribusi perekonomian	Laporan Kegiatan Pengendalian Inflasi	100%	2 Dokumen	0%	25%	50%	100%	100%			Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	
----	------------------------------------------------	---------------------------------------	------	--------------	----	-----	-----	------	------	--	--	-------------------------------------------------------------	--

6. Rencana Aksi dan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Triwulan I s.d Triwulan IV Tahun 2021

Dalam rangka pemantauan Rencana Aksi yang dilaksanakan untuk mengendalikan kinerja, maka dilakukan perbaikan dan pemantauan atas Rencana Aksi dari Triwulan I s.d Triwulan IV. (Tabel Rencana Aksi dan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Triwulan I s.d Triwulan IV Tahun 2021 terlampir)

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2021

Tahun Anggaran 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar **Rp. 78.265.490.458**

Tabel Anggaran Langsung dan Realisasi APBD Sekretariat Daerah Tahun 2021

NO	BAGIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemerintahan	2.566.229.358,00	1.305.334.142,00	50.86
2	Hukum	1.525.510.792,00	1.079.542.489,00	70.77
3	Organisasi	766.844.524,00	521.926.428,00	66.35
4	Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	1.154.658.438,00	766.018.746,00	66.34
5	Pengadaan Barang dan Jasa	1.247.423.136,00	806.240.833,00	64.59
6	Kesejahteraan Rakyat	30.491.169.166,00	29.076.442.692,00	95.36
7	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.025.753.496,00	1.853.485.914,00	91.50
8	Umum	17.786.829.420,00	15.012.624.806,00	84.40
9	Perencanaan dan Keuangan	20.701.072.128,00	18.350.516.964,00	88.64
	JUMLAH	78.265.490.458,00	68.772.133.014,00	87.87

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021*

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2021 ini dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung Tupoksi Sekretariat Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) Program, 18 (Delapan Belas) Kegiatan dan 55 (Lima Puluh Lima) Sub Kegiatan

Tabel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PENDAPATAN	100.000.000,00	75.705.000,00	75.71
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100.000.000,00	75.705.000,00	75.71
	Pendapatan Restribusi Daerah	100.000.000,00	75.705.000,00	75.71
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	7.800.000,00	0,00
2	BELANJA	78.265.490.458,00	68.772.133.014,00	87.87
	BELANJA OPERASI	75.950.586.747,00	66.610.438.794,00	87.70
	Belanja Pegawai	20.331.082.432,00	18.171.091.794,00	89.38
	Belanja Barang	47.535.154.315,00	40.526.523.450,00	85.26
	Belanja Hibah	8.084.350.000,00	7.912.823.550,00	97.88
3	BELANJA MODAL	2.314.903.711,00	2.161.694.220,00	93.38
	Belanja Peralatan dan Mesin	1.545.641.511,00	1.420.671.620,00	91.91
	Belanja Bangunan dan Gedung	727.633.200,00	700.377.600,00	96.25
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	41.629.000,00	40.645.000,00	99,83
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(78.165.490.458,00)	(68.696.428.014,00)	87.89
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(78.165.490.458,00)	(68.696.428.014,00)	87.89

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021*

Untuk Anggaran Pendapatan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021 dari target **Rp 100.000.000,00** hanya terealisasi sebesar **Rp 75.705.000,00 (75,71%)**, hal ini dikarenakan kurang optimalnya pemakaian kekayaan daerah oleh masyarakat/SKPD sehubungan masih adanya Pandemi Covid-19.

2. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Untuk anggaran belanja program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp 48.427.767.828,00,-** dengan capaian realisasi sebesar **Rp 41.622.508.206,00,- (85,95%)**, sedangkan untuk anggaran belanja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp 78.265.490.458,00,-** dengan capaian realisasi sebesar **Rp 68.772.133.014,00,- (87.87%)**, terjadi kenaikan capaian kinerja pada Tahun 2021 sebesar **1.92%**. Perbandingan anggaran dan realisasi tersebut di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Perbandingan Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah
Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021

No	Program/Kegiatan Tahun 2020	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021	Anggaran (Rp)		% Realisasi	
			2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bagian Pemerintahan						
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama antar Pemerintahan	PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	1.613.792.200	2.436.321.322	55,76	49.72
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Pengamanan Batas Daerah	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	115.374.700	2.038.691.846	83,40	44.85
	Kegiatan Pembinaan dan Tata Kelola Pemerintahan Umum	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	154.787.600	260.090.606	51,19	80.95
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.343.629.900	137.538.870	51,02	62.73
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	212.152.000	129.908.036	74,07	72.42
	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai – Nilai Budaya Bangsa	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	212.152.000	129.908.036	74,07	72.42
Bagian Organisasi						
	Program Pembinaan, Pengembangan, Penataan Kelembagaan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kegiatan Penataan Organisasi	409.816.840	766.844.524	48,39	66.35
	Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	107.445.800	276.217.276	30,13	58.85
	Kegiatan Pembuatan ID Card Pegawai	Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	37.720.800	209.100.976	99,65	72.63



	Kegiatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	56.090.560	281.526.272	38,88	69.04
	Kegiatan Pengembangan dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	-	48.339.020	-	70,60	-
	Kegiatan Pengembangan dan Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan	-	121.086.000	-	51,42	-
	Kegiatan Pengembangan dan Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	-	39.134.660	-	25,97	-
Bagian Hukum						
	Program Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan HAM, Dokumenasi Hukum	PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum	869.806.500	1.525.510.792	90,30	70.77
	Kegiatan Fasilitasi Produk Hukum	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	366.442.000	711.572.352	93,11	72.60
	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	313.479.600	412.043.902	89,65	63.64
	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	189.884.900	401.894.538	85,97	74.82
Bagian Pengadaan Barang/Jasa						
	Program Pembinaan, Pengelolaan, Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	736.109.060	1.247.423.136	76,62	64.59
	Kegiatan Pembinaan, Pengelolaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	311.531.840	566.999.472	93,82	50.39
	Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	180.954.020	294.327.192	45,31	91.82
	Kegiatan Pembinaan Kompetensi dan Evaluasi Pelaporan	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	243.623.200	386.096.472	77,90	64.69
Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam						
	Program Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi Perekonomian Pembangunan Daerah	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	579.517.620	900.193.652	85,55	60.33



		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				
	Kegiatan Pembinaan, Fasilitasi dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	198.751.200	466.142.336	85,55	54.21
	Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi Usaha Bdan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	193.439.060	52.642.270	73,88	323.32
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perekonomian Pembangunan	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	187.327.360	381.409.046	97,39	71.54
	-	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	254.464.786	-	87.60
	-	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-	254.464.786	-	87.60
Bagian Kesejahteraan Rakyat						
	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	19.774.259.800	30.491.169.166	93,97	94.45
	Kegiatan Pembinaan, Pengembangan, Pemberdayaa Sosail dan Kebudayaan	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Metal Spritual	131.869.000	8.384.349.572	61,76	45.34
	Kegiatan Pembinaan, Pengembangan, Pemberdayaan Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	18.485.415.200	19.035.999.762	99,35	98.81
	Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Agama	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.156.975.600	3.070.819.832	11,77	72.23
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan						
	Program Kerjasama Informasi dan Mass Media	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.392.390.200	2.025.753.496	97,35	91.50
	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	2.392.390.200	450.951.254	97,35	88.49



	Program Pembinaan, Pengembangan, Fasilitas Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1.037.567.900	963.305.306	79,38	91.40
	Kegiatan Pengembangan Hubungan Masyarakat	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	586.311.700	611.496.936	79,60	93.87
	Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Permanen Pembangunan	-	71.183.800		0,00	
	Fasilitasi dan Pelayanan Protokol Pemerintah Daerah	-	380.072.400		93,89	
Bagian Umum						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.479.413.560	125.000.000	65,00	35.90
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Bahan, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.356.913.560	125.000.000	64,02	12.00
	Kegiatan Penyusunan Tabulasi Aset Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	119.500.000	855.227.638	92,57	45.25
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.830.296.625	202.829.000	80,44	88.95
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prana Perkantoran	Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	2.625.542.724	25.000.000	87,22	0,00
	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.796.123.591	627.398.638	73,24	32.93
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.240.064.000	5.439.022.670	98,33	85.47
	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	690.098.600	113.637.480	84,34	81.20
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Jabatan/Dinas	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	493.665.000	156.529.050	83,17	85.05
	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas	Sub Kegiatan Penyedia Bahan Logistik Kantor	329.321.710	263.744.700	56,63	91.52



	Program Fasilitas Kegiatan dan Kebijakan KDH dan WKDH	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	2.221.000.000	160.050.990	89,05	69.87
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan dan Jasa Bagi KDH/WKDH	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000	2.970.000	79,19	53.54
	Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi KDH/WKDH	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	890.000.000	4.742.090.450	98,27	85.79
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Rumah Jabatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.056.000.000	1.745.160.661	73,29	85.97
	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	1.745.160.661	96,63	85.97
	-	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	3.864.693.334	-	84.17
	-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	1.600.199.740	-	91.46
	-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	1.103.434.464	-	72.81
	-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	1.161.059.130	-	84.92
	-	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	4.488.180.117	-	73.79
	-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	155.960.000	-	98.08
	-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	2.312.013.961	-	90.25
	-	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mabel	-	21.250.000	-	0,00
	-	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	1.560.699.792	-	47.72
	-	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	438.256.364	-	74.73
	-	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	200.000.000	-	0,00



-	Sub Kegiatan Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	200.000.000	-	0,00
-	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	1.194.545.000	-	99.16
-	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	-	684.835.000	-	98.70
-	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	-	509.710.000	-	99.77
Bagian Perencanaan dan Keuangan					
Program Pelayanan Administasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.190.124.423	115.493.962	94,07	35.90
Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.802.745.223	61.376.882	99,16	86.50
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.387.379.200	6.019.360	91,37	6.65
Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Staf Ahli Bupati	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	3.845.790	0,00	26.52
Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.000.000	9.132.950	0,00	23.92
Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	20.000.000	7.833.280	0,00	29.74
Kegiatan Penagdaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	27.285.700	0,00	45.12
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	61.521.100	19.650.211.990	25,47	71.89
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Penyedia Gaji ASN	40.550.000	8.546.741.272	19,15	82.58
	Tunjangan ASN		10.973.974.984		94.33



	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.171.100	30.736.326	45,35	75.35
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.800.000	98.759.408	30,49	70.80
	-	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	810.366.176	-	93.87
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	810.366.176	-	93.87

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021*

3. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tahun Anggaran 2021 Sekretariat Daerah telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan DPA SKPD Tahun Anggaran 2021, dengan total anggaran sebesar Rp 78.265.490.458,00,- dengan jumlah Program 3 (Tiga) 18 (Delapan Belas) Kegiatan dan 55 (lima puluh lima) Sub Kegiatan. Terkait realisasi keuangan atas pelaksanaan sasaran dan program dapat dilihat pada tabel berikut ini :

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2021 (RP)	RP (%) REALISASI 2021	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5		4
Meningkatnya Layanan Administrasi Bidang Perencanaan dan Keuangan	Persentase Layanan Administrasi Bidang Perencanaan dan Keuangan tepat waktu	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.208.263	59.023.769 (66.91)	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.376.882	53.088.769 (86.50)	
			- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.019.360	400.000 (6.65)	
			- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.845.790	1.020.000 (6.52)	
			- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	9.132.950	2.185.000 (23.92)	
			- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.833.280	2.330.000 (29.74)	
Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Sekretariat Daerah	Persentase Kualitas Penyusunan Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang sesuai aturan		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.650.211.990	17.503.513.599 (89.07)	
			- Sub Kegiatan Penyedia Gaji ASN	8.546.741.272	7.058.275.877 (82.58)	
			- Penyedia Tunjangan ASN	10.973.974.984	10.352.148.461 (94.33)	
			- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.736.326	23.167.632 (75.35)	



SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2021 (RP)	RP (%) REALISASI 2021	PENANGGUNG JAWAB
			- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	98.759.408	69.921.629 (70.80)	
			Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	810.366.176	760.667.456 (93.87)	
			- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	810.366.176	760.667.456 (93.87)	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	152.258.700	27.312.140 (17.93)	
	Nilai SPIP Sekretariat Daerah		- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.258.700	12.312.140 (45.12)	
			- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.000.000	15.000.000 (12.00)	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai Komponen Pelaporan Kinerja Minimal 10	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Penataan Organisasi	281.526.272	207.506.564 (69.04)	Bagian Organisasi
Meningkatnya Nilai Area Perubahan RB SKPD	Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60		Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	281.526.272	207.506.564 (69.04)	
Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Persentase Unit Pelayanan dengan Nilai SKM Minimal 80		Kegiatan Penataan Organisasi	209.100.976	151.872.232 (72.63)	
	Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)		Sub Kegiatan Fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana	209.100.976	151.872.232 (72.63)	
			Kegiatan Penataan Organisasi	276.217.276	162.547.632 (58.85)	



SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2021 (RP)	RP (%) REALISASI 2021	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Efektivitas Kelembagaan Analisa dan Evaluasi Jabatan	Persentase Perangkat Daerah dengan Kelembagaan yang efektif		Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	276.217.276	162.547.632 (58.85)	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	137.538.870	86.280.000 (62.73)	Bagian Pemerintahan
	Persentase Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan		Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	137.538.870	86.280.000 (62.73)	
Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase Kegiatan Tata Batas antar Daerah yang berhasil ditindaklanjuti		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	260.090.606	210.533.982 (80.95)	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	260.090.606	210.533.982 (80.95)	
Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	2.038.691.846	914.437.528 (44.85)	
			Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	2.038.691.846	914.437.528 (44.85)	
Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga	Persentase dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti		Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	129.908.036	94.082.632 (72.42)	
			Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	129.908.036	94.082.632 (72.42)	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan barang dan jasa Lingkup Kabupaten Tanah Laut secara Elektronik	Persentase Paket Pengadaan yang terlayani dalam pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	566.999.472	286.223.861 (50.39)	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui system LPSE	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui system LPSE		Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	566.999.472	286.223.861 (50.39)	
			Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	294.327.192	270.242.840	



SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2021 (RP)	RP (%) REALISASI 2021	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kompetensi SDM dalam proses PBJ yang berkualitas	Persentase SDM yang kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa				(91.82)	
			Sub Kegiatan Pengelolaan layanan Pengadaan Secara Elektronik	294.327.192	270.242.840 (91.82)	
Meningkatnya Efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	Persentase Efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	386.096.472	249.774.132 (64.69)	
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	386.096.472	249.774.132 (64.69)	
Meningkatnya Informasi Produk Hukum	Persentase Informasi Produk Hukum	Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	401.894.538	300.678.460 (74.82)	Bagian Hukum
			Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	401.894.538	300.678.460 (74.82)	
Meningkatnya Harmonisasi Produk Hukum	Persentase Produk Hukum yang harmonis		Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	711.572.352	516.619.194 (72.60)	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	711.572.352	516.619.194 (72.60)	
Tingkat Penanganan kasus/perkara hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani		Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	412.043.902	262.244.835 (63.64)	
Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)		Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	412.043.902	262.244.835 (63.64)	
Meningkatnya Layanan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dan Komunikasi Pimpinan, Keprotokolan dan Dokumentasi	Persentase Penyebarluasan Informasi/Pemberitaan Pembangunan Pemerintah Daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	Program Penunjang Urusan Pemda Kabupaten/Kota	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.025.753.496	1.853.485.914 (91.50)	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Persentase Komunikasi Pimpinan yang terfasilitasi		Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	963.305.306	880.428.254 (91.40)	
	Persentase Pengaduan masyarakat yang di tindaklanjuti					



SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2021 (RP)	RP (%) REALISASI 2021	PENANGGUNG JAWAB
	Persentase Kaegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani		Sub Kegiatan Fasilitas Pendokumentasian Tugas Pimpinan	611.496.936	574.001.422 (93.87)	
	Persentase Kegiatan KDH/WKDH/SKPD/Tamu daerah yang terlayani Keprotokolannya		Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	450.951.254	399.056.238 (88.49)	
Meningkatnya Kaulitas Layanan Umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan Baik	Persentase Layanan Pimpinan/Bagian/SKPD/ Masyarakat dengan baik	Program Penunjang Urusan Pemda Kabupaten/Kota	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.742.090.450	4.068.463.151 (85.79)	Bagian Umum
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.742.090.450	4.068.463.151 (85.79)	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.998.956.156	1.772.685.424 (88.68)	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	1.560.699.792	1.445.165.724 (47.72)	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	438.256.364	327.519.700 (74.73)	
Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah secara tertib	Persentase Layanan pada Bagian-bagian lingkup Setda sarana prasarana/asset milik Sekretariat Daerah dikelola dengan Baik		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	377.382.180	333.649.780 (88.41)	
			Sub Kegiatan Peyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor	113.637.480	92.271.620 (81.20)	
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	263.744.700	241.378.160 (91.52)	
			Kegiatan Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.264.490.594	1.789.351.768 (79.01)	
			Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.103.434.464	803.389.830 (72.81)	
			Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.161.056.130	985.961.938 (84.92)	



SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2021 (RP)	RP (%) REALISASI 2021	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.488.180.117	4.012.227.352 (89.39)	
			Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	155.960.000	152.971.207 (98.08)	
			Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	2.312.013.961	2.086.570.721 (90.25)	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	21.250.000	0,00	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	1.560.699.792	1.445.165.724 (47.72)	
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	438.256.364	327.519.700 (74.73)	
			Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200.000.000	0,00	
			Sub Kegiatan <i>Medical Check-Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200.000.000	0,00	
			Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat daerah	855.227.638	386.993.064 (45.25)	
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	202.829.000	180.415.000 (88.95)	
			Sub Kegiat Pemulangan Pegawai yang Meninggal Dunia Dalam Melaksanakan Tugas	25.000.000	0,00	
			Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	627.398.638	206.578.064 (32.93)	
			Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat daerah	4.901.589.500	4.203.185.561 (85.75)	
			Sub Kegiatan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan	156.529.050	133.132.410	



SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2021 (RP)	RP (%) REALISASI 2021	PENANGGUNG JAWAB
					(95.05)	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.742.090.450	4.068.463.151 (85.79)	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.970.000	1.590.000 (53.54)	
Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai Komponen Area Perubahan Reformasi Birokrasi Lingkup Sekretariat Daerah		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.050.990	111.827.300 (69.87)	
	Nilai Komponen Area Perubahan Zona Integritas Lingkup Sekretariat		Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	160.050.990	111.827.300 (69.87)	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.745.160.661	1.527.384.221 (85.97)	
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	1.745.160.661	1.527.384.221 (85.97)	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.600.199.740	1.463.499.260 (91.46)	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.600.199.740	1.463.499.260 (91.46)	
			Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.194.545.000	1.184.506.500 (99.16)	
			Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	684.835.000	675.964.000 (98.70)	
			Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	509.710.000	508.542.500 (99.77)	
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	30.491.169.166	29.076.442.692 (95.36)	

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2021 (RP)	RP (%) REALISASI 2021	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Pembinaan Lembaga Sosial dan keagamaan	Persentase peningkatan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	19.035.999.762	18.809.456.504 (98.81)	Bagian Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya Layanan Bantuan sosial keagamaan	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan		Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8.384.349.572	8.048.854.074 (71.4)	
Meningkatnya peran serta Organisasi /Lembaga Keagamaan /SKPD dalam Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	3.070.819.832	2.218.132.114 (72.23)	
Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase Penyelesaian Permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	900.193.652	543.105.114 (60.33)	Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA
			Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	381.409.046	272.848.382 (71.54)	
Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja Positif		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	466.142.336	252.715.832 (54.21)	
Meningkatnya Pelaku UMKM yang terfasilitasi Permodalan	Persentase UMKM yang Terfasilitasi		Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	52.642.270	17.540.900 (33.32)	
Meningkatnya Kualitas Manajemen data administrasi pembangunan yang proporsional	Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Progres Pembangunan fisik		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	254.464.786	222.913.632 (87.60)	
			Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	254.464.786	222.913.632 (87.60)	

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021*

4. Pada Tahun Anggaran 2021 Sekretariat Daerah telah melaksanakan efisiensi sasaran strategis dan keuangan, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Realisasi Persentase Keuangan, Realisasi Kinerja dan Efisiensi Sasaran Strategis

Sekretariat Daerah Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Kinerja (%)	Efisiensi (%)	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	74.73	87.12	32.77	Sekretaris Daerah dan Bagian Umum
2	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	72.63	600	527.37	Sekretaris Daerah dan Bagian Organisasi
3	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	44.85	Nilai dari KEMENDAGRI belum terbit	-	Sekretaris Daerah dan Bagian Pemerintahan
4	Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	69.04	70	0.6	Sekretaris Daerah dan Bagian Organisasi
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	69.04	68,42	0	Sekretaris Daerah dan Bagian Organisasi
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	45.12	86.81	41.69	Sekretaris Daerah dan Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	12	0	-	
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	69.87	91.71	21.84	Sekretaris Daerah dan Bagian Umum
		Nilai ZI Sekretariat Daerah	92.19	105.4	13.21	

8	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	60.33	100	39.67	Sekda dan Kabag Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
9	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	62.73	76,5	13.77	Bagian Pemerintahan
		Persentase kegiatan Peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan		100	32.27	
10	Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	80.95	100	19.05	Bagian Pemerintahan
11	Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	44.85	100	55.15	Bagian Pemerintahan
12	Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke Tiga	Persentase dokumen kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	72.42	416	343.58	Bagian Pemerintahan
13	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	69.04	81,25	12.21	Bagian Organisasi
14	Meningkatnya nilai Area Perubahan RB SKPD	Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60	69.04	233,33	45.71	Bagian Organisasi
15	Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan	Persentase Unit Pelayanan dengan nilai SKM Minimal 80	72.63	92,5	19.87	Bagian Organisasi

	dan Pelayanan Publik	Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)		100	27.37	Bagian Organisasi
16	Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	58.85	100	41.15	Bagian Organisasi
17	Meningkatnya layanan administrasi bidang perencanaan dan keuangan	Persentase layanan administrasi bidang perencanaan dan keuangan tepat waktu	66.91	100	33.09	Bagian Perencanaan dan Keuangan
18	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan lingkup Sekretariat Daerah	Persentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja dan keuangan yang sesuai aturan	89.07	100	10.93	Bagian Perencanaan dan Keuangan
19	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	45.12	100	54.88	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	12	Masih dalam tahap <i>Baseline</i> SPIP	Masih dalam tahap <i>Baseline</i> SPIP	Bagian Perencanaan dan Keuangan
20	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/SKPD/ Masyarakat dengan baik	74.73	80	5.27	Bagian Umum
21	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada Bagian-Bagian lingkup Setda sarana prasarana/aset milik Sekretariat Daerah terkelola dengan baik	85.60	100	14.4	Bagian Umum
22	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Kebijakan,	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan,	65.5	100	34.5	Bagian Umum

	Pemantauan dan Evaluasi di bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Staf Ahli dan Kepegawaian				
23	Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai komponen area perubahan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah	69.87	101.9	32.03	Bagian Umum
		Nilai komponen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah	92.19	105.4	13.21	Bagian Umum
24	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase Paket pengadaan yang terlayani dalam pengadaan/jasa sesuai standar dan tepat waktu	50.39	100	49.61	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
25	Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	50.39	76.6	26.21	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
26	Meningkatnya kompetensi SDM dalam proses PBJ yang berkualitas	Persentase SDM yang kompeten dalam Pengadaan Barang/jasa	91.82	100	53.31	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
27	Meningkatnya efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	Persentase efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	64.69	75	10.31	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
28	Meningkatnya Informasi Produk Hukum	Persentase Informasi Produk Hukum	78.82	100	21.18	Bagian Hukum
29	Meningkatnya Harmonisasi Produk Hukum	Persentase Produk hukum yang harmonis	72.60	100	27.4	Bagian Hukum

30	Tingkat Penanganan kasus/perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani	63.64	100	36.36	Bagian Hukum
31	Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)	-	-	Tidak dilaksanakan Penilaian-	Bagian Hukum
32	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolannya dan dokumentasi	Persentase penyebaran informasi/pemberitaan pembangunan pemerintah daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	91.50	100	8.5	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani	93.87	100	6.13	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/Tamu daerah yang terlayani keprotokolannya	88.49	100	11.54	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Persentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	91.40	100	8.6	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Persentase pengaduan masyarakat yang di tindaklanjuti	91.40	100	8.6	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
33	Meningkatnya pembinaan Lembaga sosial dan keagamaan	Persentase peningkatan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina	98.81	98.81	-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
34	Meningkatnya layanan bantuan sosial keagamaan	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan	71.4	99,22	27.82	Bagian Kesejahteraan Rakyat

35	Meningkatnya peran serta Organisasi/Lembaga Keagamaan/SKPD dalam Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	72.23	100	27.77	Bagian Kesejahteraan Rakyat
36	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	71.54	100	28.46	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
37	Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja positif	54.21	100	45.79	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
38	Meningkatnya Pelaku UMKM yang terfasilitasi permodalan	Persentase UMKM yang terfasilitasi	33.32	100	66.68	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
39	Meningkatnya kualitas manajemen data administrasi pembangunan yang proporsional	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan progres pembangunan fisik	87.60	100	12.4	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

LKj bagi Sekretariat Daerah mempunyai makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam pengukuran kinerja yang telah dilakukan dan dikuatkan dengan data dukung yang menguraikan bukan hanya pencapaian Tahun 2021, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA secara umum.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang telah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2021, yang mencakup penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan serta alokasi anggarannya, juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Secara umum pencapaian kinerja sasaran telah memenuhi target sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, namun masih terdapat beberapa indikator sasaran yang tidak tercapai yaitu untuk indikator sasaran Eselon III yang belum tercapai 5 (Lima) indikator kemudian indikator sasaran Eselon IV yang belum tercapai 8 (Delapan) indikator, hal ini dikarenakan program dan kegiatan sebagai penunjang indikator sasaran tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sehubungan dengan masih adanya pandemi *COVID-19*.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dari hasil analisa pencapaian sasaran dan IKU terhadap unit kerja lingkup Sekretariat Daerah teridentifikasi beberapa kendala antara lain :

1. Kurang pahamnya masyarakat terhadap maksud dan tujuan dilakukannya Survei Kepuasan masyarakat
2. Belum optimalnya kesadaran dari ASN untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat.
3. Bobot nilai IKK LPPD masih banyak yang capaiannya rendah karena realisasi capaian kinerja di masing-masing IKK dari SKPD yang rendah, kegiatannya tidak ada pelaksanaannya atau belum terakomodir.
4. Kurangnya komitmen SKPD dalam menyajikan data yang *valid*.
5. Belum tertanamannya ke seluruh ASN budaya kerja organisasi yang berbudaya kinerja
6. Kurangnya peran Agen Perubahan sehingga belum bisa menjadi Role Model atau panutan dalam penerapan reformasi birokrasi di lingkungan pekerjaan sehari-hari.
7. Kurangnya peran Tim pelaksana Reformasi Birokrasi dalam rangka internalisasi 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi.
8. Sasaran kinerja SKPD belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar dalam pemilihan program dan kegiatan sehingga masih terdapat program dan kegiatan yang kurang efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
9. Kualitas pengukuran kinerja SKPD belum sepenuhnya berorientasi kepada pencapaian kinerja program, masih ada pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
10. Masih kurangnya kualitas laporan kinerja SKPD, dimana masih banyak laporan kinerja yang mengungkapkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum sepenuhnya menyajikan analisis pencapaian kinerja program serta belum mampu menyajikan analisis efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja.
11. Masih kurangnya capaian kinerja Kabupaten dan SKPD dikarenakan masih kurangnya kualitas pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja secara triwulan dan evaluasi internal seluruh SKPD.
12. Belum maksimalnya kegiatan evaluasi dan dokumentasi terhadap pelaksanaan unsur-unsur SPIP
13. Adanya kegiatan yang belum didukung oleh SOP

14. Kurangnya kesadaran dalam memelihara asset daerah.
15. Pencatatan asset yang belum tertib
16. Penerapan tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan
17. Lingkungan kerja belum sepenuhnya menunjang pelaksanaan Zona Integritas
18. Terbenturnya jadwal kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (*Coffee Morning*) dan Rapat Forkopimda dengan jadwal undangan lain yang sudah dijadwalkan.
19. Kurangnya koordinasi SKPD terkait agenda kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dalam rangka Hari Besar Nasional/Kabupaten
20. Adanya penyampaian opsi-opsi maupun usulan titik segmen batas yang berbeda-beda oleh pihak Kabupaten Banjar pada setiap pelaksanaan rapat koordinasi yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
21. Kurangnya komitmen SKPD dalam menyajikan data yang *valid*
22. Kurangnya koordinasi SKPD terkait mengenai rencana awal penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah
23. Kurang selarasnya dokumen AKIP Karena laporan kinerja disusun berdasarkan dokumen perencanaan.
24. Belum dimanfaatkannya informasi kinerja pada laporan kinerja dalam pelaksanaan manajemen kinerja pada periode berikutnya.
25. Keterlambatan SKPD dalam menyampaikan laporan penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada SKPDnya sehingga menghambat dalam penyusunan Laporan SKM Kabupaten.
26. Dalam penyusunan usulan Penyetaraan Jabatan dari Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional, Jabatan Fungsional yang ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodir penyetaraan jabatan dari Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional sehingga banyak terdapat jabatan struktural disetarakan ke jabatan yang kurang tepat.
27. Kurangnya pemahaman penyusun perencanaan terkait prinsip-prinsip perencanaan
28. Kurangnya kemampuan melakukan proyeksi kegiatan secara efektif
29. Belum optimal melakukan reviu kinerja internal secara berkala untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan kinerja serta solusi yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

30. Petugas penyusun laporan kinerja kurang memahami sepenuhnya Sistem AKIP
31. Kurang cermatnya dalam hal penyajian data
32. Kurangnya pemahaman para PA/KPA dan PPK dalam menyusun Perencanaan Pengadaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
33. Masih kurangnya kecakapan pelaku pengadaan dalam menggunakan aplikasi SPSE
34. Terbatas dalam melaksanakan kegiatan bimbingan teknis, pendampingan dan konsultasi PBJ untuk meningkatkan kompetensi SDM terkait pengadaan barang/jasa akibat pandemic covid-19
35. Adanya tsunami perubahan regulasi terkait Pengadaan Barang/Jasa dan pengelolaan keuangan daerah dalam waktu yang bersamaan sehingga kesulitan memperdalam pengetahuan baru tersebut
36. Sikap menganggap mudah ilmu pengadaan barang/jasa sehingga banyak pelaku pengadaan di SKPD yang tidak mengikuti acara bimbingan teknis dengan sungguh-sungguh.
37. File atau dokumen Peraturan Daerah Tahun 2005 kebawah yang masih belum ditemukan arsipnya karena proses pengarsipan waktu itu masih belum bagus saat ini. kebawah dan Peraturan Bupati Tahun 2013 kebawah tidak tersedia karena terkendala tidak adanya file atau dokumen karena ditahun-tahun tersebut Perbup langsung dicetak oleh SKPD masing-masing.
38. Adakalanya juga SKPD pengusul lambat dalam melakukan pengembalian draf setelah dikoreksi untuk dicetak sehingga terkesan prosesnya menjadi lama.
39. Kurang tanggapnya SKPD atau Pemberi Kuasa dalam memenuhi berkas atau dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan membuat jawaban dan bukti-bukti didalam persidangan
40. Penyebarluasan informasi / pemberitaan melalui Web dan Tabloid Tuntung Pandang yang dikelola oleh Sub Bagian Fasilitasi Komunikasi Pimpinan belum sesuai dengan standar pemberitaan yang baik dan benar.
41. Kualitas sarana penyimpanan Dokumentasi kegiatan KDH / WKDH yang masih kurang memadai.
42. Kurangnya koordinasi antara pelaksana kegiatan dengan Sub Bagian Fasilitasi Keprotokolan.

43. Penyebarluasan informasi / pemberitaan melalui Web dan Tabloid Tuntung Pandang yang dikelola oleh Sub Bagian Fasilitas Komunikasi Pimpinan belum sesuai dengan standar pemberitaan yang baik dan benar.
44. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait prosedur penyampaian aduan.
45. Bagi pengurus organisasi/kelembagaan keagamaan yang memohon bantuan hibah fisik maupun kegiatan kebanyakan tidak memahami bagaimana membuat proposal.
46. Lambatnya dalam hal pencairan dana hibah dikarenakan administrasi dari pemohon proposal hibah yang tidak lengkap.
47. Masih adanya tenaga pengajar pada TKA/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan PAH yang masih berstatus PNS/ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, sehingga harus dikeluarkan/diganti agar insentif dapat dibayarkan.
48. Kurangnya komunikasi antara guru dengan Kepala sekolah atau Dewan Pengurus Kecamatan BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH.
49. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan untuk ditindaklanjuti dalam rangka mendukung upaya penyelesaian permasalahan masih kurang maksimal dilaksanakan.
50. Masih belum selesainya pembahasan Raperda penyertaan modal untuk BUMD pada tingkat Legislatif
51. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan kinerja manajemen BUMD belum dilaksanakan secara maksimal oleh BUMD.
52. Masih tingginya NPL pada PT. BPR Tanah Laut yang disebabkan oleh Debitur Program Gapura Karomah yang macet.
53. Data pelaporan tentang pelaku UMK yang sudah dan belum mendapatkan pembiayaan permodalan masih kurang lengkap.
54. Keterlambatan penyampaian laporan oleh SKPD

Beberapa hambatan yang terjadi, akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan Lkj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Strategi yang dapat dilakukan untuk peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut di tahun mendatang antara lain :

1. Membuat kuisisioner *online* terkait Survey Kepuasan Masyarakat
2. Melakukan pembinaan inovasi dalam kompetisi sehingga akan mendorong SKPD untuk memunculkan inovasinya lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar pelayanan yang diberikan lebih baik dan berkualitas.
3. Memprioritaskan perencanaan usulan kegiatan-kegiatan SKPD yang termasuk pada IKK LPPD untuk dianggarkan di SKPD terkait
4. Optimalisasi internalisasi seluruh program Reformasi Birokrasi sampai dengan level organisasi terendah
5. Dilaksanakan kembali bimbingan teknis kepada seluruh Role Model dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
6. Implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk memberikan reward dan punishment kepada SKPD sesuai dengan nilai beberapa indikator salah satunya adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperoleh.
7. Mengintegrasikan seluruh sistem pengukuran kinerja individu dan organisasi.
8. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap dokumen Perjanjian Kinerja yang dapat dijadikan dasar untuk memberikan *reward* dan *punishment*
9. Menerbitkan surat edaran tentang sanksi terhadap pelanggaran kepatuhan
10. SOP Kegiatan selaras dengan Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah
11. Menerapkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
12. Monev dari Tim Pembangunan Zona Integritas dan Tim Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dan pimpinan harus berperan aktif dalam melaksanakan monev
13. Melakukan kajian tentang dampak program Gapura Karomah terhadap kemajuan pelaku usaha mikro

14. Membuat surat edaran tentang penggunaan asset daerah.
15. Membuat berita acara penelusuran asset yang tidak ditemukan dan diusulkan untuk dihapus atau hibah.
16. Dokumen-dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi segera di buat di dicatat agar terkoordinasi dengan baik dan cepat.
17. Pembuatan Sarana dan Prasarana untuk menunjang pelaksanaan Zona Integritas
18. Mensinkronkan jadwal kegiatan rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (*Coffee Morning*) dan Rapat Forkopimda agar tidak terbentur dengan jadwal agenda lainnya
19. Lebih cepat mengkoordinasikan dalam menyinkronkan jadwal agenda kegiatan Pejabat Provinsi Kalimantan Selatan yang akan di undang pada Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut.
20. Melaksanakan koordinasi dengan Tim PBD Provinsi Kalimantan Selatan untuk segera melakukan fasilitasi survey lapangan untuk persiapan pemancangan batas Penegasan Batas Daerah di titik-titik yang disepakati.
21. Mengajukan kepada pimpinan usulan *reward* dan *punishment* terhadap SKPD terkait penyusunan dan skor LPPD
22. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait rencana kegiatan-kegiatan penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah yang akan direalisasikan di tahun anggaran berjalan maupun anggaran tahun berikutnya.
23. Mengintegrasikan seluruh sistem pengukuran kinerja individu dan organisasi.
24. Optimalisasi internalisasi roadmap RB sampai dengan level organisasi terendah
25. Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat di SKPD berkelanjutan secara berkala, (3 sampai dengan 6 bulan sekali).
26. Melakukan Monev secara berkala dan berkelanjutan
27. Meningkatkan kompetensi para petugas penyusun perencanaan
28. Bimtek tentang teknik pembuatan perencanaan
29. Melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan
30. Melaksanakan Bimtek terkait penyusunan Laporan Kinerja
31. Melaksanakan Monev terkait Rencana Tindak Lanjut Risiko

32. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis untuk para pelaku pengadaan yang terencana dan terkoordinir
33. Melaksanakan koordinasi dengan stake holder lain (Bappeda, BPKAD dan Inspektorat) untuk menyamakan persepsi tentang pengadaan barang/jasa dalam pemanfaatan SPSE.
34. Penyusunan jadwal kegiatan pembinaan pelaku pengadaan yang lebih terarah, efektif dan efisien dan perlu kunjungan ke SKPD untuk melaksanakan FGD terkait regulasi dan implementasi pengadaan barang/jasa pemerintah di SKPD
35. Mengikutsertakan kegiatan PBJ di agenda kegiatan Pimpinan Daerah (seperti coffe morning) untuk meningkatkan kompetensi para pelaku pengadaan di SKPD
36. Mengajukan telaahan staf ke Pimpinan Daerah untuk membuka formasi CPNS untuk Jabatan Fungsional Pengelola PBJ
37. Melakukan pengumpulan dan pencarian terhadap dokumen-dokumen yang belum lengkap baik di ruang arsip atau pada SKPD-SKPD terkait secara bertahap
38. Penambahan anggaran pembuatan (naskah akademik) untuk kajian Rancangan Peraturan Daerah
39. Tetap terus melakukan koordinasi dan komunikasi dalam persiapan dalam penanganan perkara.
40. Meningkatkan kualitas pemberitaan dan publikasi kegiatan pemerintah daerah melalui media sosial yang di kelola pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
41. Meningkatkan kualitas pendokumentasian dan sarana penyimpanan dokumentasi kegiatan pimpinan.
42. Meningkatkan kerja sama dengan seluruh instansi dalam pelaksanaan kegiatan KDH/WKDH agar tidak terjadi tumpang tindih jadwal kegiatan sehingga seluruh kegiatan dapat terlayani keprotokolannya dengan baik.
43. Meningkatkan kualitas pemberitaan dan publikasi kegiatan pemerintah daerah melalui media sosial yang di kelola pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
44. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka tindak lanjut jika ditemukan laporan yang masuk.

45. Melaksanakan sosialisasi kepada penerima pencairan hibah secara langsung dan sosialisasi bagaimana membuat laporan keuangan bantuan hibah
46. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas realisasi kemajuan pelaksanaan hibah kepada pemohon proposal secara berkelanjutan serta pengawasan terus menerus
47. Seluruh Kepala Sekolah maupun tenaga pengajar pada TKA/TPA, Madin, Ponpes dan PAH agar mempunyai dan menyusun target yang ingin dicapai pada setiap tingkatan pembelajaran baik di TKA/TPA, Madin, Ponpes dan PAH agar kualitas hasil yang diharapkan dalam pembelajaran dapat tercapai.
48. Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara intensif kepada TKA/TPA, Madin, Ponpes dan PAH se Kabupaten Tanah Laut.
49. Menyusun *time schedule* proses penerapan kebijakan penyelesaian permasalahan bidang perekonomian
50. Menyusun Jadwal Monev ke BUMD
51. Monitoring dan Evaluasi Laporan Triwulan, semesteran dan tahunan BUMD
52. Rapat koordinasi setiap akhir triwulan
53. Monitoring dan evaluasi secara berkala
54. Menyusun jadwal sosialisasi kepada SKPD

C. Penghargaan dan Inovasi

Sekretariat Daerah pada Tahun 2021 menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut meraih SimPel Award Kategori Wilayah Terbaik Kabupaten/Kota dalam Implementasi SimPel Melalui Program Genta Sambung Rasa, Penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 2) Pada Tahun 2021, ada 6 (enam) inovasi yang ada di SKPD yang diikutsertakan pada Innovative Government Award (IGA) Tahun 2021, dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021, Kabupaten Tanah Laut memperoleh Kategori Inovatif dengan skor indeks 52,42.
- 3) Penghargaan sebagai UKPBJ Kabupaten/Kota Pertama yang mencapai Level 3 dari Provinsi Kalimantan Selatan.




- 4) Penghargaan Indeks tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kabupaten Tanah Laut 2021 dengan Predikat BAIK dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI).

Demikian laporan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut ini dibuat, semoga dapat menjadi salah satu bahan yang dapat memberikan data dan informasi untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Pelaihari, 31 Januari 2022

Sekretaris Daerah,
Kabupaten Tanah Laut


Drs. H. DAHNIAL KIFLI, MAP
NIP. 19640425 1987033 1 012